



PEMERINTAH
KABUPATEN
TANGGAMUS

RPJPD
2025-2045



TANGGAMUS
SMART 2045
Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan

RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2025 - 2045

"Tanggamus Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan"
MENUJU INDONESIA EMAS 2045



**BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 9 TAHUN 2024**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif, efisien dan terarah, perlu disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengamatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan valuasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
4. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah Periode 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan program Bupati.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari adanya kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir dimasa pemerintahannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 29 Agustus 2024

Pj. BUPATI TANGGAMUS,



MULYADI IRSAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 30 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



SUAIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024 NOMOR ..228

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan dengan didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelaku pembangunan.

RPJPD Tahun 2025-2045 disusun secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045, adalah:

1. Pendekatan teknokratif;
2. Pendekatan partisipatif;
3. Pendekatan politis;
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas;
5. Pendekatan holistik-tematik;
6. Pendekatan integratif; dan
7. Pendekatan spasial.

RPJPD Tahun 2025-2045 diharapkan dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka

panjang nasional, dan memberikan ruang optimal bagi pembangunan daerah oleh karena itu diselaraskan dengan RPJPD Provinsi Lampung dan RPJMN yang berpedoman pada Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 600.1/176/SJ dan Nomor: 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

cukup jelas.

Pasal 2

cukup jelas.

Pasal 3

cukup jelas.

Pasal 4

cukup jelas.

Pasal 5

cukup jelas.

Pasal 6

cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR 113



**BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG**

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANGGAMUS NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045**

DAFTAR ISI

Daftar isi.....	ii	
Daftar Tabel.....	iii	
Daftar Grafik.....	vii	
Daftar Gambar.....	x	
BAB I : PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang.....	I-1	
1.2. Dasar Hukum.....	I-4	
1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJPD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya.....	I-5	
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-8	
1.5. Sistematika Penulisan.....	I-9	
BAB II: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH		
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1	
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-55	
2.3. Aspek Daya Saing Daerah.....	II-77	
2.4. Aspek Pelayanan Umum.....	II-109	
2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025.....	II-111	
2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan.....	II-122	
2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.....	II-135	
BAB III: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS		
3.1. Permasalahan.....	III-1	
3.2. Isu Strategis.....	III-40	
BAB IV: VISI DAN MISI DAERAH		
4.1. Visi Daerah Tahun 2025-2045.....	IV-1	
4.2. Sasaran Visi Daerah 2025-2045	IV-11	
4.2. Misi Daerah Tahun 2025-2045.....	IV-14	
BAB V: ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK		
5.1. Arah Kebijakan.....	V-1	
5.2. Sasaran Pokok.....	V-46	
BAB VI: PENUTUP.....		VI-1

DAFTAR TABEL

2.1.	Ibu Kota dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tanggamus.....	II-5
2.2.	Kemiringan Lereng yang Membentuk Permukaan Kabupaten Tanggamus.....	II-6
2.3.	Penutupan Lahan Tahun 2021 Kabupaten Tanggamus.....	II-14
2.4.	Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2015-2023....	II-16
2.5.	Indeks Kerentanan Lingkungan Tanah Longsor Kabupaten Tanggamus.....	II-18
2.6.	Indeks Kerentanan Kebakaran Lahan Dan Hutan Kabupaten Tanggamus.....	II-19
2.7.	Indeks Kerentanan Gempa Bumi Kabupaten Tanggamus.....	II-20
2.8.	Daerah Aliran Sungai Kabupaten Tanggamus.....	II-21
2.9.	Luas Cekungan Air Tanah Kabupaten Tanggamus.....	II-24
2.10.	Ekoregion Darat Kabupaten Tanggamus.....	II-25
2.11.	Data Ekoregion Karakteristik Bentang Alam di Kabupaten Tanggamus.....	II-26
2.12.	Data Ekoregion Karakteristik Vegetasi Alam di Kabupaten Tanggamus.....	II-27
2.13.	Kondisi Daya Dukung Pangan Kabupaten Tanggamus 2022-2045.....	II-29
2.14.	Kondisi Daya Dukung Air Kabupaten Tanggamus 2022-2045.....	II-30
2.15.	Kondisi Daya Dukung Lahan Kabupaten Tanggamus 2022-2045.....	II-31
2.16.	Jasa Penyediaan Pangan Kabupaten Tanggamus.....	II-32
2.17.	Jasa Penyediaan Air Kabupaten Tanggamus.....	II-33
2.18.	Jasa Pengaturan Iklim Kabupaten Tanggamus.....	II-35
2.19.	Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Kabupaten Tanggamus.....	II-35
2.20.	Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kabupaten Tanggamus.....	II-36
2.21.	Jasa Pendukung Biodiversitas Kabupaten Tanggamus.....	II-38
2.22.	Rencana Pemanfaatan atau Pencadangan Sumber Daya Alam.....	II-39
2.23.	Indeks Kemampuan Adaptif (IKA), Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) dan Tingkat Kerentanan Perubahan Iklim Kabupaten Tanggamus Tahun 2018.....	II-42
2.24.	Pekon Yang Terdaftar Dalam SRN dan Apresiasi yang Dicapai.....	II-43
2.25.	Target dan Capaian IKLH beserta komponen pembentuknya di Kabupaten Tanggamus 2021-2023.....	II-48
2.26.	Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2023.....	II-53
2.27.	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2023.....	II-58

2.28.	Perkembangan Nilai Gini Rasio Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2023.....	II-61
2.29.	Tingkat Ketimpangan Regional Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2019.....	II-62
2.30.	Perbandingan Angka Melek Huruf Kabupaten Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023.....	II-67
2.31.	Indikator Kesehatan Ibu dan Anak Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023.....	II-69
2.32.	Indikator Tuberkolosis Kabupaten Tanggamus Tahun 2022-2023.....	II-70
2.33.	Capaian Indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS) kabupaten Tanggamus 2022-2023.....	II-75
2.34.	Jumlah Desa menurut sataus IDM di Kabupaten Tanggamus Tahun 2015-2024.....	II-76
2.35.	Nilai (dalam Miliar Rupiah) dan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023.....	II-77
2.36.	Nilai (dalam Miliar Rupiah) dan Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023.....	II-78
2.37.	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanggamus Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023.....	II-79
2.38.	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanggamus Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023.....	II-80
2.39.	PDRB Perkapita Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023	II-81
2.40.	Nilai Tukar Petani (NTP) Per Kecamatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023.....	II-84
2.41.	Nilai Tukar Petani (NTP) menurut subsektor di Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023.....	II-85
2.42.	Persentase Penduduk Kabupaten Tanggamus Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2022.....	II-93
2.43.	Rasio Ketergantungan Kabupaten Tanggamus Tahun 2010-2023.....	II-95
2.44.	Kondisi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Jenis Kelamin Sampai Dengan Tahun 2023.....	II-96
2.45.	Kondisi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sampai Dengan Tahun 2023.....	II-96
2.46.	Kondisi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Golongan Sampai Dengan Tahun 2023.....	II-97
2.47.	Kondisi Infrstruktur Jalan di Kabupaten Tanggamus 2018-2023.....	II-99
2.48.	Kondisi RTLH di Kabupaten Tanggamus 2018-2023.....	II-100
2.49.	Sebaran Rasio Luas Lahan Pertanian Terhadap Jumlah Penduduk Berdasarkan Skala Prioritas Tahun 2022.....	II-102
2.50.	Sebaran Rasio Sarana dan Prasarana Ekonomi Terhadap Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Skala Prioritas Tahun 2022.....	II-104
2.51.	Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2023.....	II-103

2.52.	Angka Kriminalitas Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2023.....	II-104
2.53.	Jenis Tindak Kriminal di Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2023.....	II-105
2.54.	Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2023.....	II-109
2.55.	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021-2023.....	II-111
2.56.	Indikator Capaian Pembangunan pada Misi 1 RPJPD Kabupaten Tanggamus 2005-2045.....	II-113
2.57.	Indikator Capaian Pembangunan pada Misi 2 RPJPD Kabupaten Tanggamus 2005-2045.....	II-114
2.58.	Indikator Capaian Pembangunan pada Misi 3 RPJPD Kabupaten Tanggamus 2005-2045.....	II-115
2.59.	Indikator Capaian Pembangunan pada Misi 4 RPJPD Kabupaten Tanggamus 2005-2045.....	II-118
2.60.	Proyeksi dan Distribusi Penduduk Kabupaten Tanggamus Menurut Kecamatan Tahun 2024-2045.....	II-126
2.61.	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Jenis Kelamin.....	II-127
2.62.	Proyeksi dan Distribusi Penduduk Kabupaten Tanggamus Menurut Kelompok Umur, 2024-2045.....	II-128
2.63.	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Tanggamus.....	II-130
2.64.	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Tanggamus.....	II-131
2.65.	Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Tanggamus.....	II-131
2.66.	Proyeksi Timbulan Sampah Kabupaten Tanggamus.....	II-132
2.67.	Proyeksi Kebutuhan Rumah Sakit Kabupaten Tanggamus....	II-132
2.68.	Proyeksi Kebutuhan Puskesmas Kabupaten Tanggamus.....	II-133
2.69.	Proyeksi Kebutuhan Tenaga Dokter dan Tenaga Paramedis Kabupaten Tanggamus.....	II-134
2.70.	Proyeksi Kebutuhan Sekolah Kabupaten Tanggamus	II-134
2.71.	Rencana Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031.....	II-135
2.72.	Luasan dan Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Tanggamus.....	II-136
2.73.	Luasan dan Sebaran Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) Kabupaten Tanggamus.....	II-137
2.74.	Potensi Tambang Kabupaten Tanggamus.....	II-142
2.75.	Daftar Obyek Wisata di Kabupaten Tanggamus.....	II-144
2.76.	Ruas Jalan Provinsi Lampung yang ada di Kabupaten Tanggamus.....	II-151
3.1.	Estimasi Timbulan Sampah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022	III-14
3.2.	Capaian Indikator TPB Kab. Tanggamus Berdasarkan Metadata I.....	III-45
3.3.	Indikator dan Capaian Indikator Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Tanggamus.....	III-61
4.1.	Sasaran Visi RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045....	IV-7

4.2.	Penyelarasan Visi RPJP Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2045 dan RPJP Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 serta RPJP Nasional Tahun 2025-2045....	IV-10
4.3.	Penyusunan Penjelasan Visi RPJPD Tahun 2025-2045.....	IV-10
4.4.	Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2045.....	IV-12
5.1.	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-1.....	V-5
5.2.	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-2.....	V-13
5.3.	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-3.....	V-16
5.4.	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-4.....	V-18
5.5.	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-5.....	V-21
5.6.	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-6.....	V-24
5.7.	Jumlah Pelanggan PDAM Way Agung.....	V-26
5.8.	Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2023.....	V-28
5.9.	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-7.....	V-32
5.10.	Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-8.....	V-45

DAFTAR GRAFIK

2.1.	Proporsi Tutupan Hutan dan Lahan Kabupaten Tanggamus.....	II-15
2.2.	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2022-2023.....	II-51
2.3.	Pertumbuhan Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tanggamus 2017-2023.....	II-54
2.4.	Angka Beban Ketergantungan Penduduk di Kabupaten Tanggamus Tahun 2015-2023.....	II-55
2.5.	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023.....	II-56
2.6.	Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanggamus 2018-2023.....	II-56
2.7.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanggamus.....	II-58
2.8.	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2024.....	II-59
2.9.	Perkembangan Garis Kemiskinan Kapita Perbulan Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung Tahun 2018-2024 (Rupiah)..	II-59
2.10.	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Kearifan Kemiskinan (P2) Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2024.....	II-60
2.11.	Perkembangan TPT Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2023.....	II-63
2.12.	Perkembangan IPM Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2020-2023.....	II-64
2.13.	Perkembangan IPM Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2022-2023.....	II-64
2.14.	Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2020-2023.....	II-65
2.15.	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2020-2023	II-66
2.16.	Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2020-2023.....	II-67
2.17.	Cakupan Kepersertaan Jaminan Kesehatan Kabupaten Tanggamus, Tahun 2022.....	II-68
2.18.	Status Gizi Balita Kabupaten Tanggamus 2018-2023.....	II-70
2.19.	Prevalensi Stunting Provinsi Lampung 2023.....	II-71
2.20.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung Tahun 2017-2022.....	II-72
2.21.	Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Lampung Tahun 2020-2022.....	II-73

2.22.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung Tahun 2017-2022.....	II-74
2.23.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) rovinsi Lampung dan Nasional Tahun 2015-2020.....	II-75
2.24.	Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Tanggamus dengan Kabupaten/Kota disekitarnya Tahun 2023.....	II-82
2.25.	Pengeluaran PerKapita Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023.....	II-83
2.26.	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tanggamus 2019-2023.....	II-86
2.27.	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2023.....	II-87
2.28.	Perkembangan Indeks Ekonomi Inklusif Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2021.....	II-90
2.29.	Indeks Ekonomi Hujau Indonesia Tahun 2011-2020	II-92
2.30.	Indeks Pendidikan Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung 2015-2023.....	II-93
2.31.	Persentase Penduduk menurut kemampuan Literasi dan Akses Internet.....	II-94
2.32.	Perkembangan TPAK Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022.....	II-98
2.33.	Persentase Desa ODF menurut cakupan Puskesmas diKabupaten Tanggamus Tahun 2023.....	II-101
2.34.	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tanggamus 2022-2023...	II-104
2.35.	Indeks Demokrasi Provinsi Lampung dan Indonesia.....	II-106
2.36.	Indeks Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanggamus Tahun 2022.....	II-107
2.37.	Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (<i>Clearance Rate</i>) Tahun 2022 dan Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2023 di Provinsi Lampung.....	II-108
2.38.	Indeks SPBE Kabupaten/Kota di Provinsi Lampug tahun 2023	II-110
2.39.	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanggamus tahun 2010-2023.....	II-112
2.40.	Pertumbuhan Ekonomi dan Angka Kemiskinan Kabupaten Tanggamus tahun 2010-2023.....	II-117
2.41.	Proyeksi Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tanggamus.....	II-124
2.42.	Laju Pertumbuhan dan Produktivitas Sektor Pertanian Kabupaten Tanggamus 2019-2023.....	II-138
2.43.	Produksi Perikanan Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2023	II-141
3.1.	APK dan APM Kabupaten Tanggamus 2021-2022.....	III-2

3.2.	Jumlah Kasus Putus Sekolah dan KOndisi Guru di Kabupaten Tanggamus Tahun 2022.....	III-2
3.3.	Kondisi Kualitas LIngkungan HIdup di Kabupaten Tanggamus Tahun 2021-2023.....	III-13
3.4.	Tingkat Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengolahan Sampah Tahun 2022.....	III-14
3.5.	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	III-53
3.6.	Perkembangan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022.....	III-54
3.7.	Indeks Kerukunan Umat Beragam (KUB) Provinsi Lampung Tahun 2021-2023.....	III-66
3.8.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kbaupaten Tanggamus Tahun 2021-2023.....	III-69

DAFTAR GAMBAR

1.1.	Tahapan Penyusunan RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2045.....	I-3
1.2.	Keterhubungan antara RPJPD dan RPJMD.....	I-6
1.3.	Keterkaitan antara RPJPD dengan Dokumen Lainnya.....	I-7
2.1.	Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-1
2.2.	Peta Administrasi Kabupaten Tanggamus.....	II-3
2.3.	Peta Topografi Kabupaten Tanggamus.....	II-7
2.4.	Peta Geologi Kabupaten Tanggamus.....	II-11
2.5.	Peta Hidrologi Kabupaten Tanggamus.....	II-12
2.6.	Peta Klimatologi Kabupaten Tanggamus.....	II-13
2.7.	Peta Tata Aliran Air dan Banjir Kabupaten Tanggamus.....	II-17
2.8.	Peta Kerentanan Tanah Longsor Kabupaten Tanggamus.....	II-18
2.9.	Peta Kerentanan Kebakaran Hutan Kabupaten Tanggamus.....	II-19
2.10.	Peta Kerentanan Gempa Bumi Kabupaten Tanggamus.....	II-20
2.11.	Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Tanggamus.....	II-23
2.12.	Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Tanggamus.....	II-24
2.13.	Peta Bentang Alam Kabupaten Tanggamus.....	II-25
2.14.	Peta Vegetasi Alam Kabupaten Tanggamus.....	II-28
2.15.	Peta Daya Dukung Air Kabupaten Tanggamus.....	II-30
2.16.	Peta Jasa Penyediaan Pangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2023.....	II-32
2.17.	Peta Jasa Penyediaan Air Kabupaten Tanggamus Tahun 2023... ..	II-33
2.18.	Peta Jasa Pengaturan Iklim Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 ..	II-34
2.19.	Peta Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Kabupaten Tanggamus Tahun 2023.....	II-36
2.20.	Peta Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kabupaten Tanggamus Tahun 2023.....	II-37
2.21.	Peta Jasa Pendukung Biodiversitas (Perlindungan Plasma Nutfah) Kabupaten Tanggamus Tahun 2023.....	II-38
2.22.	Peta Kawasan Konservasi Perairan Teluk Kiluan Dan Sekitarnya.....	II-47
2.23.	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2022.....	II-89
2.24.	Produksi Perkebunan Kabupaten Tanggamus Tahun 2022-2023 ..	II-138
2.25.	Sebaran Pembangunan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia.....	II-143
2.26.	Peta Pola Perjalanan Wisata Kabupaten Tanggamus.....	II-147

2.27.	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tanggamus.....	II-152
2.28.	Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Tanggamus.....	II-156
3.1.	Megatren Global 2045.....	III-40
4.1.	Visi Indonesia Emas 2045.....	IV-3
4.2.	Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045.....	IV-3
4.3.	Kerangka Berfikir Visi dan Misi Lampung 2045.....	IV-5
4.4.	Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045.....	IV-15
5.1.	Empat Tahapan Pembangunan Lima Tahunan dalam RPJP.....	V-2

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 membuka pintu bagi Indonesia untuk mewujudkan cita-cita sebagai **Negara yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur**. Selanjutnya, tujuan tersebut akan dicapai melalui empat misi abadi yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijabarkan sebagai berikut: Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, berkontribusi dalam menjaga ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pembangunan nasional yang berkelanjutan harus tetap terjaga kesinambungannya. Semangat pembangunan dalam dua dekade mendatang mengusung pendekatan baru, dengan pemahaman bahwa reformasi tidaklah cukup; Indonesia harus melalui proses transformasi menyeluruh yang bergantung pada kolaborasi antara seluruh elemen masyarakat untuk mendorong kemajuan. Langkah ini diambil untuk mempersiapkan diri menghadapi 100 tahun kemerdekaan Indonesia dengan tema "Indonesia Emas 2045." Pembangunan Indonesia selama periode 2025-2045 memiliki tujuan untuk mewujudkan visi "**Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**".

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimilikinya, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penting bagi pembangunan daerah untuk berkolaborasi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional agar tujuan negara dapat terwujud. Dalam semangat visi bersama menuju "Indonesia Emas 2045," Kabupaten Tanggamus memulai perjalanan transformasi untuk kemajuan dan pembangunan yang berkelanjutan. Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tanggamus untuk periode 2025-2045 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan Provinsi Lampung dan visi besar Indonesia secara keseluruhan. Perencanaan ini adalah dasar bagi masa depan yang lebih baik dan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Tanggamus untuk menciptakan wilayah yang mandiri, sejahtera, dan

maju, dengan memegang prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial. Perencanaan Ini bukan sekadar serangkaian harapan; akan tetapi memuat rencana konkrit dan langkah yang terukur untuk mewujudkan kemajuan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat di Kabupaten Tanggamus.

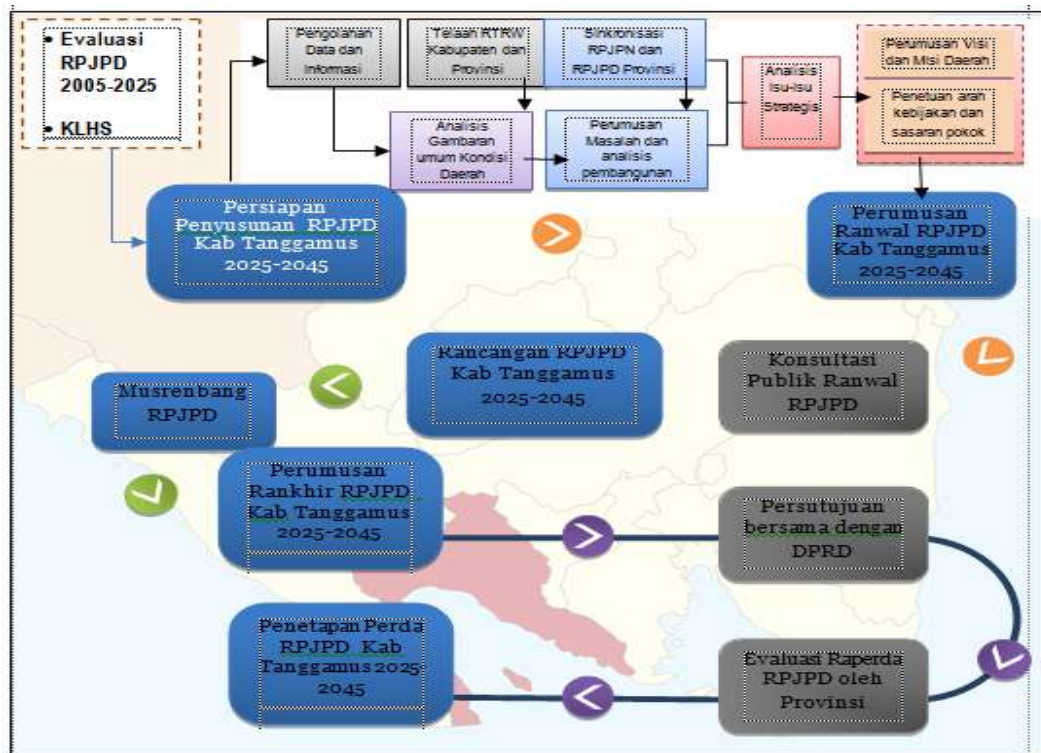
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanggamus 2025-2045 ini akan menguraikan strategi, tujuan, dan proyek yang akan dilakukan Kabupaten Tanggamus untuk berkontribusi dalam pencapaian visi “Indonesia Emas 2045”. Dalam penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Tanggamus 2025-2045 melibatkan kolaborasi dan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, komunitas lokal, dunia usaha, dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa program ini selaras dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tanggamus. Tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah mengedepankan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Sinergitas RPJPD dengan perencanaan nasional; 2) Sinkronisasi perencanaan kabupaten/kota dengan RPJPD Provinsi; 3) Penyesuaian perencanaan dengan peran dan kewenangan masing-masing wilayah; 4) Integrasi tata ruang dan pembangunan daerah; 5) Perencanaan berdasarkan karakteristik dan potensi setiap daerah; 6) Perencanaan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, adil, dan berkelanjutan; dan 7) Rencana yang spesifik, terukur, dapat diwujudkan, mempertimbangkan sumber daya, dan berjangka waktu yang jelas.

Arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tanggamus 2025-2045 diselaraskan dengan RPJPD Provinsi Lampung dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dalam beberapa aspek yang penting. Pertama adalah peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, yang diintegrasikan dengan tujuan nasional dan provinsi untuk menciptakan keadilan ekonomi dan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan. Fokus selanjutnya yaitu peningkatan kesempatan kerja dan peluang berusaha. RPJPD Kabupaten Tanggamus 2025-2045 akan memuat langkah-langkah konkret untuk mempromosikan lapangan kerja yang lebih banyak dan berusaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan sektor bisnis. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik juga menjadi prioritas yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Semua kebijakan ini, termasuk aspek keseimbangan dan keberlanjutan dalam pemanfaatan ruang dan lingkungan, akan menjadi bagian

integral dari RPJP Daerah Kabupaten Tanggamus 2025-2045, yang selaras dengan arah kebijakan tingkat provinsi dan nasional.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Tanggamus 2025-2045 menjadi tonggak penting dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Persiapan yang baik dalam penyusunan RPJPD ini adalah pondasi kuat yang disesuaikan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk menciptakan Tanggamus yang lebih mandiri, sejahtera, dan maju. Tahapan dan tatacara penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Tanggamus 2025-2045 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang meliputi: Persiapan penyusunan RPJPD, Penyusunan Rancangan Awal RPJPD, Penyusunan Rancangan RPJPD, Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, Perumusan Rancangan Akhir RPJPD, dan Penetapan RPJPD.

Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2045



Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus,2024

RPJPD Kabupaten Tanggamus 2025-2045 mengusung Visi TANGGAMUS 2045 “Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan”, visi tersebut dijabarkan melalui 8 (delapan)

Misi pembangunan, yaitu : (1) Transformasi Sosial untuk; (2) Transformasi Ekonomi; (3) Transformasi Tata Kelola; (4) Stabilitas Keamanan, Ketertiban Masyarakat yang Menjunjung Supermasi Hukum; (5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; (6) Pemerataan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas dan Berkeadilan untuk Mengurangi Disparitas Wilayah; (7) Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan yang Berbasis Mitigasi Bencana; dan (8) Kestinambungan Pembangunan untuk Mengawal Pencapaian Tujuan Pembangunan. Keseluruhan substansi yang ditetapkan dalam Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Tanggamus untuk dua dekade mendatang dirancang untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJPD Provinsi Lampung dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanggamus 2025-2045 adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6) Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

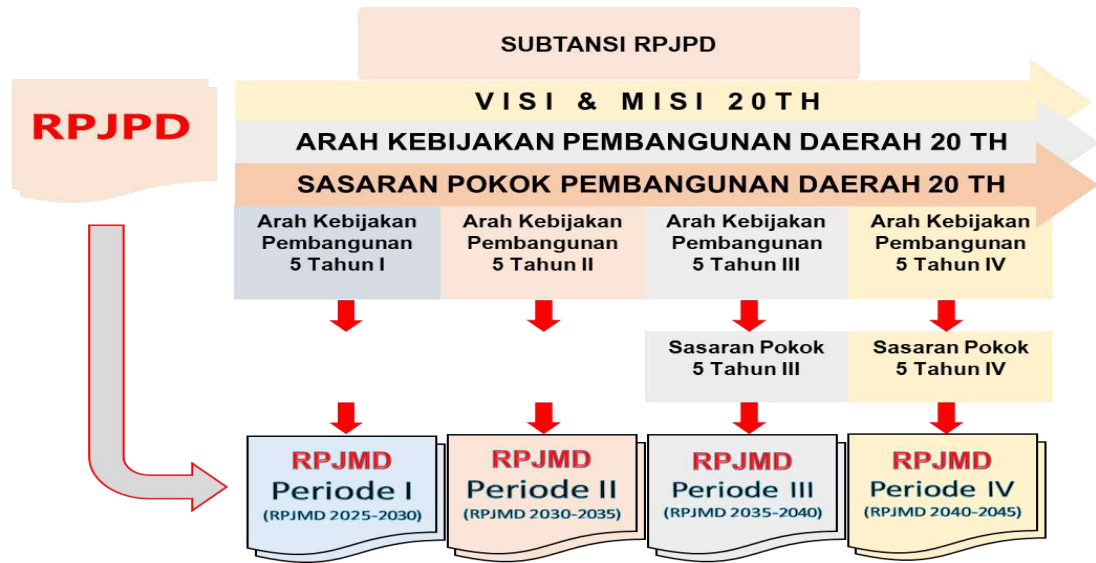
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 18);

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJPD Dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; secara paralel mengamanatkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

RPJPD Kabupaten merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 tahun, dan disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Pemerintah Provinsi dan RTRW Pemerintah Kabupaten. Selanjutnya, pelaksanaan RPJPD Kabupaten akan diuraikan melalui 4 tahap. RPJPD harus menjadi acuan dalam menyusun perencanaan lima tahunan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten.

Gambar 1.2. Keterhubungan antara RPJPD dan RPJMD

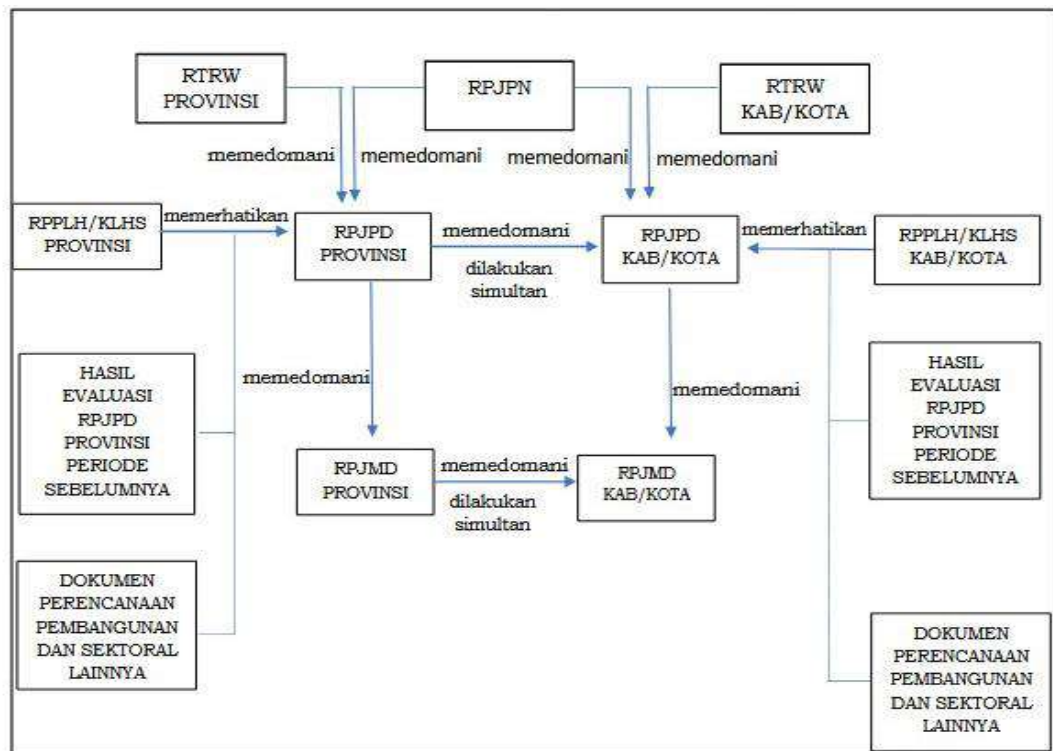


Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, 2024

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan merupakan satu kesatuan proses pembangunan dalam skema pembangunan dalam jangka panjang. Perencanaan pembangunan daerah melibatkan sejumlah tahapan dan proses yang komprehensif tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang mencakup penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, hingga tahap penganggaran daerah. Dalam proses ini, terjadi integrasi antara penyediaan layanan dasar kepada masyarakat dan perencanaan pemanfaatan wilayah dengan perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Tanggamus tahun 2025-2045 juga mempertimbangkan rumusan skenario pembangunan daerah yang berbasis berkelanjutan sebagaimana dirumuskan dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) Kabupaten Tanggamus 2025-2045. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 dan No. 7 Tahun 2018 menetapkan mekanisme dan hubungan antara Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Gambar 1.3. Keterkaitan antara RPJPD dengan Dokumen Lainnya



Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, 2024

Menurut Pasal 161 dan 162 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, KLHS bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dalam pembangunan daerah. KLHS melibatkan pengkajian teknis dan pembangunan berkelanjutan terhadap kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah, perumusan alternatif penyempurnaan program, serta penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi, dan/atau kompensasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 menekankan bahwa Laporan KLHS RPJMD digunakan dalam penyusunan dokumen RPJMD dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB). Laporan ini mencakup gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis daerah, tujuan, dan sasaran strategis. Gambaran umum kondisi daerah mencakup aspek geografis dan demografis, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah dengan mempertimbangkan prinsip keberlanjutan. Adapun Permasalahan dan isu strategis daerah diidentifikasi berdasarkan isu pembangunan berkelanjutan, sementara tujuan dan sasaran diarahkan untuk mengakomodir dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kedua regulasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan di tingkat daerah mempertimbangkan aspek lingkungan secara menyeluruh dan berkelanjutan, sehingga dapat mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Periode RPJPD Kabupaten Tanggamus tahun 2005-2025 akan berakhir pada Januari 2025. Dalam rangka kelanjutan perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Pemerintah Kabupaten Tanggamus mulai tahun 2023 telah melaksanakan rangkaian tahapan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Tanggamus tahun 2025-2045.

Dalam dokumen RPJPD tersebut, terdapat visi, misi, kebijakan, tahapan, dan target utama pembangunan daerah selama dua dekade ke depan. Panduan utama dalam penyusunan RPJPD ini adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanggamus. Semua isi dalam RPJPD bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan dari penyusunan RPJPD Kabupaten Tanggamus tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

- 1) **Pengarah dan Pedoman Pembangunan Jangka Panjang:** Menyediakan arah dan pedoman untuk Pemerintah Kabupaten Tanggamus, pemangku kepentingan pembangunan, dan masyarakat dalam menjalankan pembangunan selama 20 tahun ke depan. Ini termasuk rencana jangka menengah 5 tahunan dan tahunan serta
- 2) **Optimalisasi Partisipasi:** Meningkatkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa berbagai pandangan dan kepentingan masyarakat diwakili dalam rencana pembangunan.
- 3) **Pemanfaatan Sumber Daya Pembangunan yang Lebih Efisien:** Meningkatkan efisiensi, efektivitas, keadilan, dan keberlanjutan dalam penggunaan sumber daya pembangunan.
- 4) **Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Pembangunan:** Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara berbagai aspek pembangunan, termasuk wilayah, waktu, fungsi pemerintahan, dan tingkatan pemerintahan.

- 5) **Keterkaitan dan Konsistensi dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan:** Memastikan keterkaitan, konsistensi, dan kelangsungan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 6) **Pengendalian, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan:** Menyediakan pedoman tunggal untuk mengendalikan, mengawasi, dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat.

1.5. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung, dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika yang terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum, Hubungan Antar Dokumen, Maksud Dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing, Aspek Pelayanan Umum, Evaluasi Hasil RPJPD 2005-2025, Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik, dan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.

Bab III : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Memuat Permasalahan dan Isu Strategis Daerah.

Bab IV : Visi dan Misi Daerah

Memuat Visi daerah tahun 2025-2045 dan Misi daerah tahun 2025-2045.

Bab V : Arah Kebijakan Dan Sasaran Pokok

Memuat Arah kebijakan per-Lima Tahunan Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 (17 Arah Pembangunan, 8 Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan 45 Indikator Utama Pembangunan).

Bab VI : Penutup

Memuat Kaidah pelaksanaan RPJPD tahun 2025-2045.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Sebelum menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan maka terlebih dahulu dilakukan analisis kondisi umum daerah yang bertujuan untuk menghasilkan dan memutakhirkan gambaran umum kondisi daerah yang diperlukan untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah. Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dan demografi merupakan informasi dasar yang sangat penting dalam penyusunan rencana pembangunan. Aspek ini menjelaskan tentang kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Kerangka pemikiran hubungan antara kondisi geografi dengan potensi pengembangan kawasan budidaya seperti gambar berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah



Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan gambar di atas pengembangan wilayah di Kabupaten Tanggamus sangat didukung oleh berbagai aspek, utamanya aspek letak, luas dan batas wilayah, kondisi topografi, kondisi klimatologi, kondisi geologi, kondisi hidrologi, serta aspek penggunaan lahan. Disamping itu dijelaskan pula tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, serta distribusi penduduk per Kecamatan.

2.1.1. Geografi

2.1.1.1. Letak Geografis dan Wilayah Administrasi

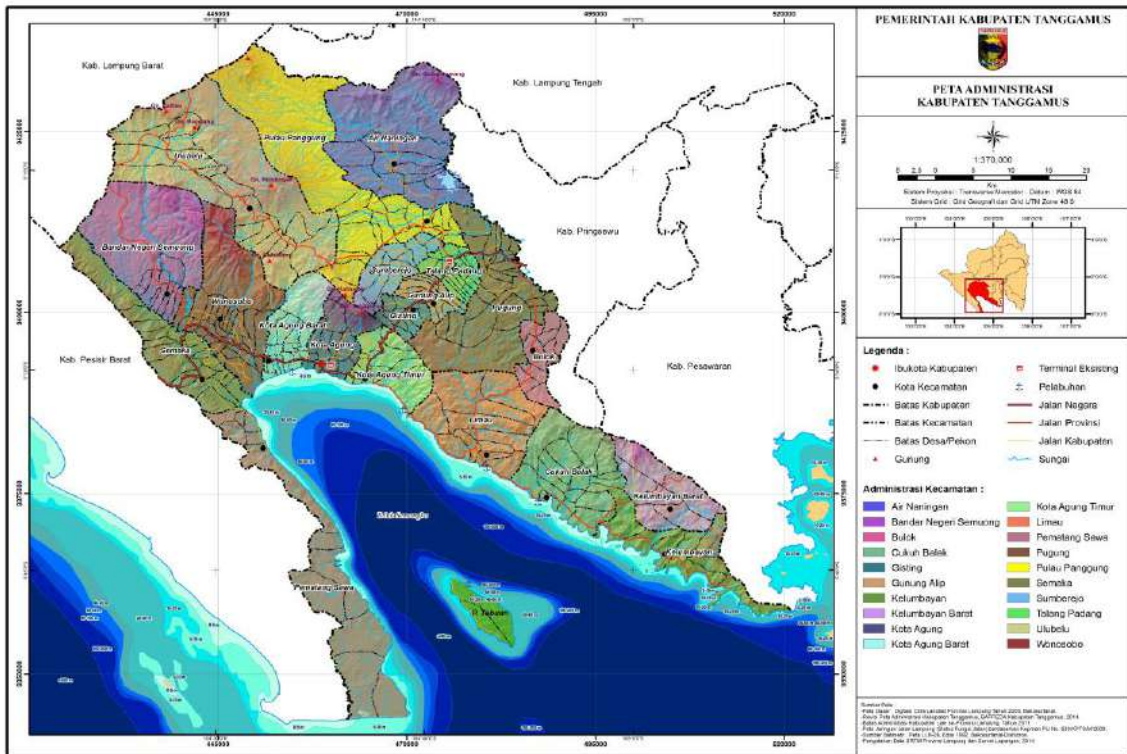
Kabupaten Tanggamus adalah salah satu dari 15 Kabupaten/Kota yang terletak di Provinsi Lampung. Kabupaten ini didirikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus. Undang-undang ini diresmikan pada 3 Januari 1997, dan Kabupaten Tanggamus menjadi resmi pada tanggal 21 Maret 1997.

Kabupaten Tanggamus berada di pesisir Barat Provinsi Lampung dengan letak geografis 104°18' BT – 105°12' BT dan 50°5' LS – 5°56' LS. Pada bagian Barat semakin ke Utara condong mengikuti lereng Bukit Barisan. Bagian Selatan meruncing dan mempunyai sebuah teluk yang besar yaitu Teluk Semangka. Di Teluk Semangka terdapat sebuah pelabuhan yang merupakan pelabuhan antar pulau dan terdapat tempat pendaratan ikan

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau maka saat ini Kabupaten Tanggamus memiliki luas wilayah 4.747,092 Km² yang terdiri dari daratan 2.947,592 Km² dan lautan 1.799,500 Km² yang memiliki garis pantai sepanjang 202 Km dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Pringsewu.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat.

Gambar 2.2. Peta Administrasi Kabupaten Tanggamus



Sumber: Bapperida Kabupaten Tanggamus, 2024

Wilayah Kabupaten Tanggamus dimasuki oleh penjajah Belanda Pada tanggal 24 Agustus 1682, wilayah Kabupaten Tanggamus disusupi oleh penjajah Belanda melalui ekspedisi perdagangan oleh VOC. Kejadian ini merupakan akibat dari perubahan pemerintahan dengan naiknya Sultan Haji sebagai pengganti Sultan Ageng Tirtayasa. Antara tahun 1682 dan 1799, perlawanan terhadap penjajah Belanda masih terus berlanjut. Namun, sejak tahun 1856, perlawanan terhadap pemerintahan Belanda mulai meredup, dan akhirnya di wilayah Tanggamus, dibentuk sebuah wilayah yang dikenal sebagai Onder Afdeling yang diperintah oleh seorang Controlir di Kota Agung.

Pada masa tersebut, pemerintahan dijalankan melalui sistem Pemerintahan Adat yang dikenal sebagai "Marga." Setiap Marga dipimpin oleh seorang Pasirah yang memiliki tanggung jawab atas beberapa kampung. Terdapat 5 (lima) Marga yang memegang peranan penting dalam pemerintahan wilayah tersebut, yaitu:

1. Marga Gunung Alip.
2. Marga Benawang.
3. Marga Belunguh.
4. Marga Pematang Sawa.
5. Marga Ngarip.

Pada tahun 1944, dibentuk Pemerintahan Kecamatan dan Kewedanaan, dan pada tahun 1953, Pemerintahan Negeri dibentuk, menggantikan Pemerintahan Adat/Marga. Selama Pemerintahan Kewedanaan, Kota Agung mengkoordinir 4 wilayah Kecamatan, termasuk Kota Agung sendiri, Wonosobo, Cukuh Balak, dan Talang Padang yang mencakup Pulau Panggung. Pada tahun 1964, Pemerintahan Kewedanaan dihapus, dan pada tahun 1971, Pemerintahan Negeri juga dihapus.

Untuk meningkatkan pelayanan birokrasi, maka pada tahun 1979 melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 114/1979 tanggal 30 Juni 1979 dalam rangka mengatasi rentang kendali dan sekaligus merupakan persiapan pembentukan Pembantu Bupati Lampung Selatan untuk Wilayah Kota Agung yang berkedudukan di Kota Agung yang terdiri dari 10 Kecamatan dan 7 Perwakilan Kecamatan dengan 300 Desa dan 3 Kelurahan serta 4 Desa Persiapan.

Sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat adat di Kabupaten Tanggamus, pada tanggal 12 Januari 2004 Kepala Adat Saibatin Marga Benawang merestui tegak berdirinya Marga Negara Batin, yang sebelumnya merupakan satu kesatuan adat dengan Marga Benawang. Pada tanggal 10 Maret 2004 di Pekon Negara Batin dinobatkan Kepala Adat Marga Negara Batin dengan gelar Suntan Batin Kamarullah Pemuka Raja Semaka V.

Dengan berdirinya Marga Negara Batin tersebut, masyarakat adat yang pada tahun 1889 terdiri dari 5 marga, saat ini menjadi 6 marga, yaitu:

1. Marga Gunung Alip (Talang Padang).
2. Marga Benawang.
3. Marga Belunguh.
4. Marga Pematang Sawa.
5. Marga Ngarip.
6. Marga Negara Batin

Secara administratif ketika terbentuk Kabupaten Tanggamus terdiri dari 11 (sebelas) Wilayah Kecamatan dan 6 (enam) Wilayah Perwakilan Kecamatan. Pada tanggal 19 Juni 2000 disyahkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000 tentang pembentukan kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanggamus. Dengan pengesahan Perda tersebut banyaknya kecamatan bertambah 6 (enam) Kecamatan sehingga menjadi 17 Kecamatan. Pada Tahun 2004 terdapat 7 Kelurahan serta 317 Pekon/Desa. Pada pertengahan tahun 2005 telah terbentuk kembali 7 Kecamatan baru hasil pemekaran berdasarkan Perda Nomor 05 Tahun 2005 tanggal 23 Juni 2005 yaitu Kecamatan Kota Agung Barat, Kota

Agung Timur, Gisting, Gunung Alip, Ambarawa, Banyumas dan Limau sehingga jumlahnya menjadi 24 Kecamatan dengan 7 Kelurahan dan 323 Pekon/Desa. Kemudian dengan disyahrkannya Perda Nomor 15 Tahun 2006, maka dibentuklah 4 kecamatan baru yaitu Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Air Nanningan, Bulok dan Kelumbayan Barat sehingga sampai tahun 2007 Kabupaten Tanggamus telah memiliki 28 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 371 Pekon/Desa.

Pada tanggal 26 November 2008, melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung, maka cakupan wilayah Kabupaten Tanggamus dikurangi dengan wilayah Kabupaten Pringsewu yang terdiri atas 8 Kecamatan yaitu Kecamatan Pringsewu, Gading Rejo, Ambarawa, Pardasuka, Pagelaran, Banyumas, Adiluwih dan Sukoharjo. Jadi sampai dengan pertengahan tahun 2011 Kabupaten Tanggamus memiliki 20 Kecamatan, 275 Pekon dan 3 Kelurahan. Selanjutnya melalui Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 yang disyahkan pada tanggal 31 Oktober 2011 dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 yang disyahkan pada tanggal 19 Desember 2011 telah dilakukan pemekaran 24 Pekon yang tersebar di 16 Kecamatan sehingga mulai tahun 2012 sampai sekarang, Kabupaten Tanggamus memiliki 20 Kecamatan, 299 Pekon dan 3 Kelurahan.

Tabel 2.1. Ibu Kota dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tanggamus

NO	NAMA KECAMATAN	IBU KOTA	LUAS (Km ²)	PERSENTASE TERHADAP LUAS KABUPATEN
1	Wonosobo	Tanjung Kurung	209,63	4.50
2	Semaka	Sukaraja	170,90	3.67
3	Bandar Negeri Semuong	Sanggi	98,12	2.11
4	Kota Agung	Kuripan	76,93	1.65
5	Pematang Sawa	Way Nipah	185,29	3.98
6	Kota Agung Timur	Kagungan	73,33	1.58
7	Kota Agung Barat	Negara Batin	101,30	2.18
8	Pulau Panggung	Tekad	437,21	9.39
9	Ulu Belu	Ngarip	323,08	6.94
10	Air Nanningan	Air Nanningan	186,35	4.00
11	Talang Padang	Talang Padang	45,13	0.97
12	Sumberejo	Margoyoso	56,77	1.22
13	Gisting	Kuta Dalam	32,53	0.70
14	Gunung Alip	Banjar Negeri	25,68	0.55
15	Pugung	Rantau Tijang	232,40	4.99
16	Bulok	Sukamara	51,68	1.11
17	Cukuh Balak	Putih Doh	173,70	2.87
18	Kelumbayan	Napal	157,25	2.60
19	Limau	Kuripan	240,61	5.17
20	Kelumbayan Barat	Sidoarjo	69,70	1.15
		LUAS DARATAN	2.947,59	
		LUAS LAUTAN	1.799.50	
		LUAS KABUPATEN TANGGAMUS*)	4.747.09	

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022

2.1.1.2. Topografi

Kondisi topografi perbukitan bergelombang menempati sebagian besar wilayah Kabupaten Tanggamus seperti di Kecamatan Wonosobo, Pulau Panggung, Kota Agung, Talang Padang dan Cukuh Balak dengan ketinggian antara 700 – 1.500 meter di atas permukaan laut (mdpl). Berdasarkan kategorinya, kemiringan lereng yang membentuk permukaan ruang wilayah Kabupaten Tanggamus dibedakan kedalam 4 (empat) kelompok, yaitu kemiringan lereng antara 0 – 2 %, 2 – 5 %, 15 - 40 % dan > 40 %.

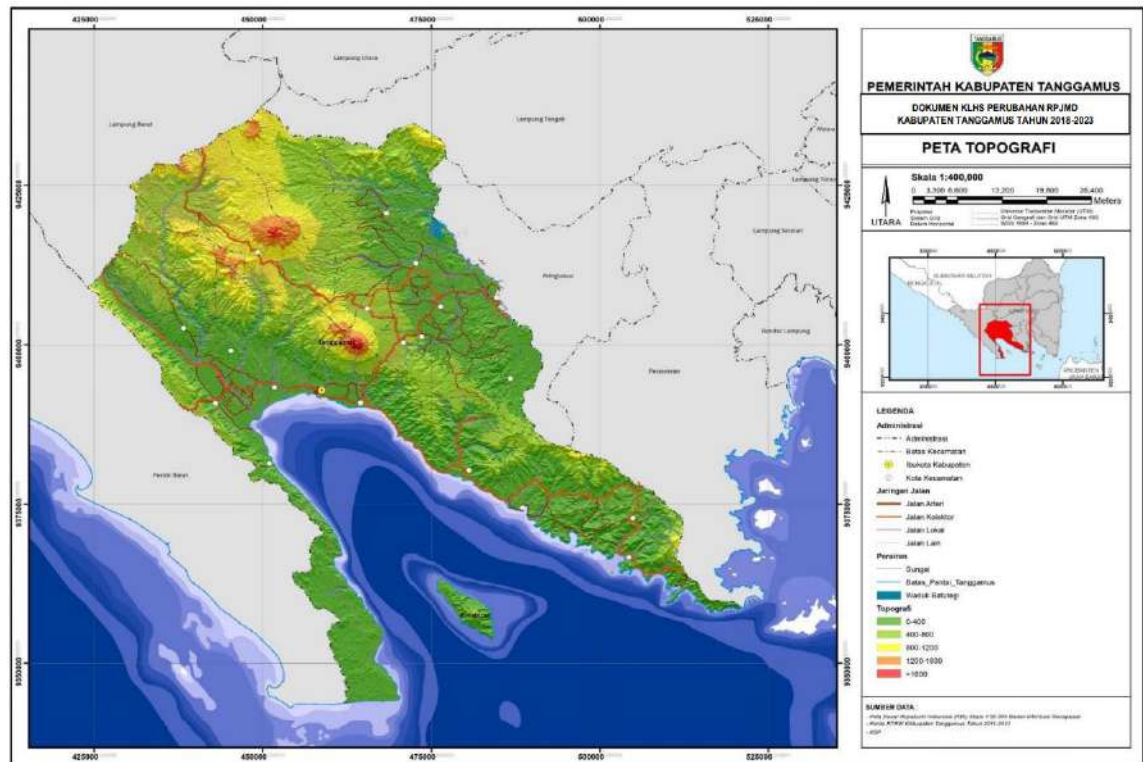
Tabel 2.2. Kemiringan Lereng yang Membentuk Permukaan Kabupaten Tanggamus

KEMIRINGAN LERENG ANTARA	KETERANGAN
0 – 2 %	Luas kemiringan lereng pada kelompok ini sebesar 19,28 % dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Tanggamus. Kecamatan yang memiliki lahan dengan kemiringan sangat datar (0 – 2 %).
2 – 5 %	sekitar 10,86 % dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Tanggamus merupakan lahan dengan kemiringan cukup datar. Kecamatan yang memiliki lahan dengan kemiringan cukup datar (2 – 15 %) paling dominan adalah Kecamatan Kota Agung yaitu 8.580 Ha atau 23,47 %.
15 - 40 %	Kemiringan dengan kategori ini adalah sebesar 58.179 Ha atau 17,33 % dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Tanggamus. Kecamatan Kota Agung merupakan kecamatan yang memiliki kemiringan 15 – 40 % paling besar yaitu 14.604 (25,10 %).
> 40 %	Kemiringan lereng yang mendominasi di wilayah Kabupaten Tanggamus adalah kemiringan > 40 % sebesar 165.215 Ha atau 49,22 % dari total wilayah Kabupaten Tanggamus. Sebagian besar terdapat di Kecamatan Cukuh Balak dan Kelumbayan yaitu sebesar 37.127 Ha atau 22,47 %.

Sumber : RTRW Kabupaten Tanggamus 2011-2031

Kabupaten Tanggamus terletak pada ketinggian antara 0 sampai dengan 2.115 meter di atas permukaan air laut (mdpl). Berdasarkan kondisi topografinya, Kabupaten Tanggamus terbentuk dengan kondisi topografi wilayah yang bervariasi mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi (berbukit dan bergunung), Secara fisiografi wilayah Kabupaten Tanggamus dibagi menjadi 5 (lima) satuan morfologi yang mencerminkan keadaan topografi wilayahnya, yaitu dataran rendah, perbukitan, bergelombang, dataran tinggi, pegunungan dan perbukitan, serta kerucut gunung api. Bentang alamnya terdiri dari daratan 65 % yang dimanfaatkan untuk perumahan dan pekarangan sebanyak 37,10%, perkantoran sebanyak 37,04% dan lebih kurang 35% dataran tinggi dimanfaatkan untuk perkebunan/pertanian sebanyak 40,71% dan fasilitas lainnya sebanyak 59,29%.

Gambar 2.3. Peta Topografi Kabupaten Tanggamus



Sumber : RTRW Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2031

2.1.1.3. Geologi

Berdasarkan jenisnya, batuan yang membentuk wilayah Kabupaten Tanggamus terdiri atas Batuan Pra Tertier, Batuan Tertier yang meliputi batuan gunung api andesit formasi tua, dan Batuan Kwartar berupa endapan gunung api muda. Batuan Tertier tersebar cukup luas di wilayah Kabupaten Tanggamus. Batuan Kwartar tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Tanggamus, namun yang cukup mendominasi terdapat di Kecamatan Pulau Pangung dan Wonosobo. Sementara Alluvium yang berupa endapan permukaan lebih banyak terdapat di Kecamatan Wonosobo.

Wilayah Kabupaten Tanggamus secara geologis termasuk dalam formasi kwarter. Berdasarkan formasinya, formasi yang terdapat di Kabupaten Tanggamus merupakan rangkaian pegunungan Bukit Barisan berupa satu rangkaian yang terletak di sebelah barat patahan (sesar) Semangka dan lainnya terletak di bagian timur patahan (sesar) Semangka. Tanah yang terdapat di Kabupaten Tanggamus terbagi dalam beberapa jenis tanah. Penentuan jenis tanah tersebut ditinjau dari berbagai klasifikasi, yaitu :

- 1) Klasifikasi menurut USDA (*United States Department of Agriculture*).
- 2) Versi unit lahan menurut Pusat Penelitian Tanah (PPT).
- 3) Versi unit lahan menurut Repport.

Berdasarkan klasifikasi USDA, jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tanggamus meliputi jenis-jenis tanah alluvial, latosol, andosol, regosol dan hidromorf kelabu. Lebih rincinya, jenis batuan dalam asosiainya dengan jenis tanah di Kabupaten Tanggamus dalam kaitannya dengan bentuk fisiografi wilayah adalah sebagai berikut :

- 1) Satuan tanah latosol yang berasal dari bahan induk kompleks tufa batuan gunung api intermedier dan basis dengan fisiografi pegunungan lipatan.
- 2) Satuan andosol coklat kekuningan yang berasal dari bahan induk kompleks tufa intermedier dan basis pada fisiografi pegunungan patahan.
- 3) Satuan tanah andosol coklat, kompleks tufa dan batuan tufa intermedier.
- 4) Satuan tanah podsolik merah kuning yang berasal dari bahan induk kompleks sedimen tufa dengan batuan metamorf pada fisiografi dataran.
- 5) Asosiasi podsoli merah kekuningan dan litosol yang berasal dari kompleks batuan kukuh plutonik masam dan metamorf pada fisiografi pegunungan.
- 6) Satuan tanah alluvial hydromorf yang berasal dari bahan induk endapan marin dengan fisiografi dataran.

Saat ini berdasarkan data Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanggamus terdapat beberapa potensi pertambangan yang terdapat di Kabupaten Tanggamus. Adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut:

1. Biji Besi

Biji besi yang ada di Kabupaten Tanggamus banyak di jumpai di Pekon Padang Ratu dan Pekon Tegineneng Kecamatan Limau, Pekon Suka Agung Kecamatan Bulok serta Pekon Paku Kecamatan Kelumbayan. Biji besi di Kabupaten Tanggamus umumnya berupa mineral magnetik yang memiliki kadar Fe antara 55-65%.

2. Mangan

Mangan di Kabupaten Tanggamus umumnya berupa mineral purolusit dengan kadar Mn anantara 25-45% dan banyak dijumpai di Pekon Tanjung Kemala, Pekon Tanjung Agung, Pekon Gunung Kasih yang terdapat di Kecamatan Pugung. Terdapat beberapa perusahaan industri yang mengelola mangan tersebut.

3. Emas

Bahan galian emas di Kabupaten Tanggamus memiliki sebaran cukup luas dengan jumlah cadangan yang cukup besar yang terdapat di Pekon Doh Kecamatan Cukuh Balak, Pekon Sidoharjo Kecamatan Kelumbayan Barat, Pekon Umbar Kecamatan Kelumbayan, Pekon Way Linggo dan Way Semong di Kecamatan Bandar Negeri Semuong.

4. Galena

Galena di Wilayah Kabupaten Tanggamus banyak di jumpai di Pekon Sidoharjo Kecamatan Kelumbayan Barat serta Pekon Umar dan Pekon Paku di Kecamatan Kelumbayan.

5. Pasir Besi

Pasir besi di Wilayah Kabupaten Tanggamus dapat dijumpai tersebar disepanjang pesisir pantai seperti Pekon Tegineneng dan Pekon Badak Kecamatan Limau, pesisir pantai Pekon Doh Kecamatan Cukuh Balak, pesisir pantai Pekon Napal dan Pekon Negeri Kelumbayan Kecamatan Kelumbayan. Pasir besi di Kabupaten Tanggamus memiliki ketebalan deposit berkisar antara 0,5 – 2,5 m.

6. Batu Bara

Batu bara di Kabupaten Tanggamus umumnya memiliki kalori berkisar antara 5.500-6300 dan dapat dijumpai di Pekon Tangkit Serdang dan Pekon Gading Pertiwi Kecamatan Pugung, Teluk Berak Pekon Way Nipah Kecamatan Pematang Sawa, Pekon Way Harong Kecamatan Air Nanningan, Pekon Sidoharjo Kecamatan Kelumbayan Barat dan Pekon Penyandingan Kecamatan Kelumbayan.

7. Zeolit

Bahan galian Zeolit di Kabupaten Tanggamus banyak dijumpai di Pekon Batu Balai Kecamatan Kota Agung Timur (sumber daya : 720.000 m³), Pekon Pertiwi Kecamatan Cukuh Balak (sumber daya : 2000.000 m³) pengelola PT Peragon Perdana Mining, Pekon Way Rilau Kecamatan Cukuh Balak (sumber daya : 600.000 m³).

8. Andesit

Batu Andesit di Kabupaten Tanggamus tersebar merata di beberapa Kecamatan diantaranya Pekon Toto Margo Kecamatan Air Nanningan (sumber daya tereka 2.000.000 m³), Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting (sumber daya tereka 600.000 m³), Pekon Gisting Atas Kecamatan Gisting (sumber daya tereka 2.700.000 m³), Pekon Kampung Baru Kecamatan Kota Agung Timur (sumber daya tereka 140.000 m³), Pekon Way Nipah Kecamatan Pematang Sawa (sumber daya tereka 3.000.000 m³), Pekon Suka Agung Kecamatan Bulok (sumber daya tereka 5.250.000 m³), Pekon Balak Kecamatan Wonosobo (sumber daya tereka 18.000.000 m³), Pekon Way Panas Kecamatan Wonosobo (sumber daya tereka 3.800.000 m³), Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak (sumber daya tereka 18.750.000 m³), Pekon Pampangan Kecamatan Cukuh Balak (sumber daya tereka 6.000.000 m³).

9. Batu Gamping

Batu Gamping atau Batu Kapur di Kabupaten Tanggamus banyak dijumpai pada beberapa wilayah di Kecamatan Pugung seperti di Pekon Gunung Kasih (sumber daya tereka 200.000 m³) dan Pekon Tanjung Kemala (sumber daya tereka 700.000 m³).

10. Bentonit

Jenis mineral bentonit di Kabupaten Tanggamus terdiri dari dua jenis yang banyak di jumpai di Dusun Umbul Solo Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung dengan jumlah sumber daya sebesar 600.000 m³.

11. Belerang

Belerang di Kabupaten Tanggamus dapat dijumpai di Pekon Suka Indah Kecamatan Ulu Belu. Kegunaannya adalah untuk industri farmasi (obat-obatan)

12. Batu Apung

Bahan galian jenis batu apung di Kabupaten Tanggamus banyak di jumpai di Pekon Tampang Kecamatan Pematang Sawa dan banyak digunakan sebagai bahan poles atau penggosok, bahan bangunan konstruksi ringan, bahan pengisi dan sebagai isolator temperatur tinggi.

13. Pasir

Pasir di Kabupaten Tanggamus banyak di ditemui di Pekon Sri Kuncoro dan Pekon Karang Rejo Kecamatan Samaka, disepanjang aliran sungai Way Semaka Pekon Tugu Rejo dan Pekon Karang Anyar Kecamatan Wonosobo, Pekon Baros Kecamatan Kota Agung.

14. Granit

Batu granit merupakan bahan galian yang sangat ekonomis dan di Kabupaten Tanggamus di jumpai di Pekon Talang Asahan dengan sumber daya sebanyak 6.000.000 m³ dan Pekon Kali Pasir Kecamatan Semaka dan Kecamatan Wonosobo.

15. Lempung

Lempung di wilayah Kabupaten Tanggamus banyak ditemui di Pekon Gunung Kasih dan Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Pugung dengan banyaknya sumber daya sebesar 22.500.000 m³

16. Silika

Mineral Silika atau Batu Kuarsa banyak dijumpai di Pekon Gunung Kasih Kecamatan Pugung (sumber daya tereka 600.000 m³) dan Pekon Air Kubang serta Pekon Air Naningan Kecamatan Air Naningan.

17. Sirtu

Sirtu di Kabupaten Tanggamus banyak ditemui di Pekon Balak Kecamatan Wonosobo, Pekon Karang Anyar Kecamatan Wonosobo, Pekon Banding Kecamatan Bandar Negeri Semoung dan Pekon Sri Kuncoro Kecamatan Semaka.

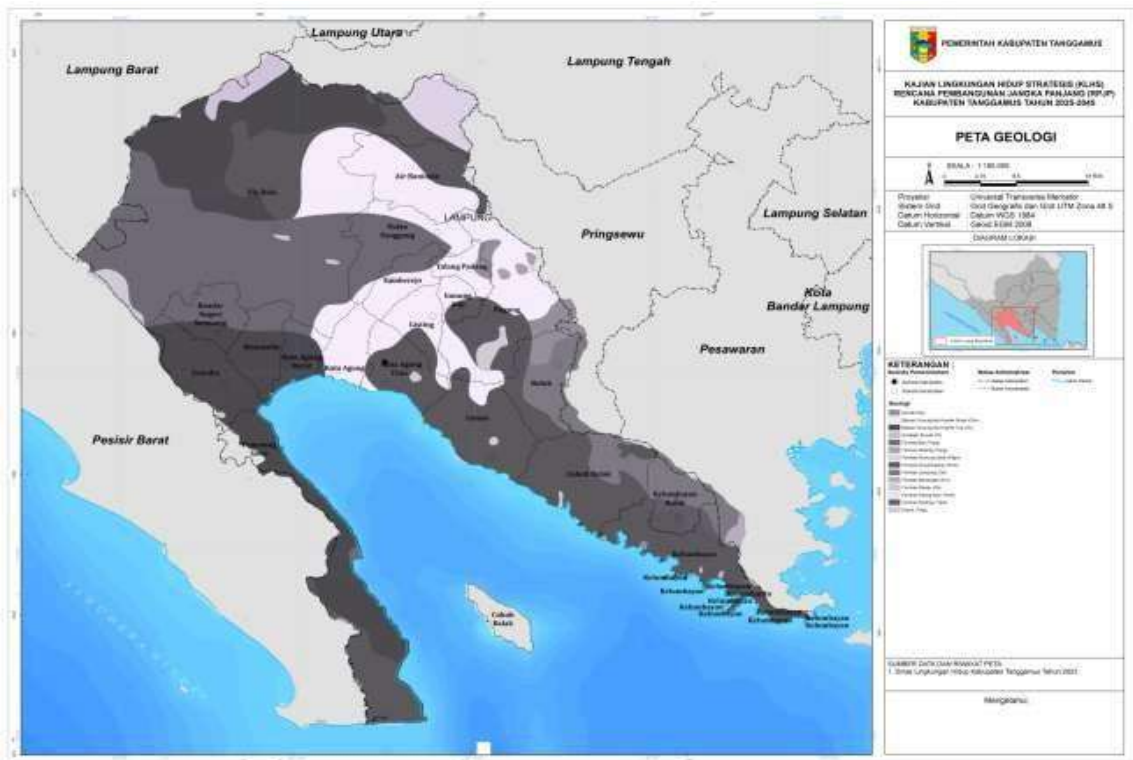
18. Marmer

Bahan Galian Marmer di Kabupaten Tanggamus di temui di Pekon Gunung Kasih Kecamatan Pugung (sumber daya tereka 780.000 m³) dan Pekon Tanjung Kemala Kecamatan Pugung (sumber daya tereka 3.240.000 m³).

19. Seng

Bahan Galian Seng di Kabupaten Tanggamus di temui di Pekon Tanjung Agung Kecamatan Pugung.

Gambar 2.4. Peta Geologi Kabupaten Tanggamus



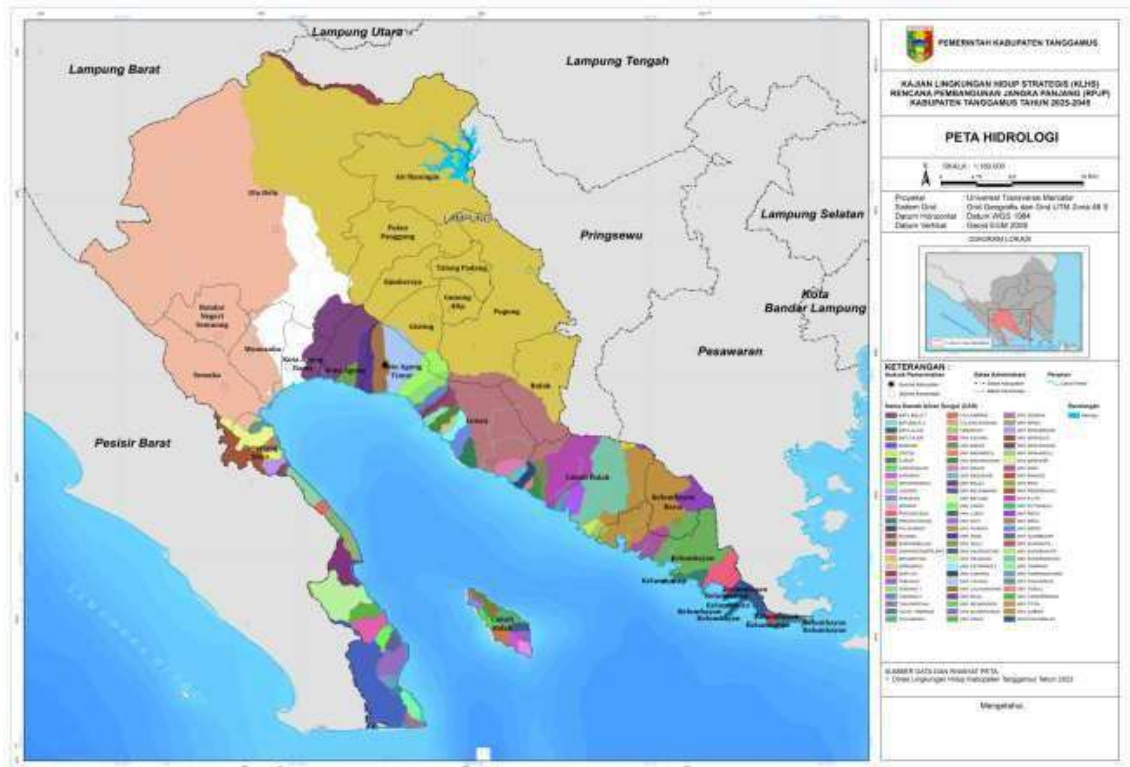
Sumber: Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, 1993, KLHS RPJPD Tahun 2025-2045

2.1.1.4. Hidrologi

Kondisi hidrologi di Kabupaten Tanggamus dipengaruhi oleh beberapa sungai baik sungai besar maupun sungai kecil. Keberadaan sungai dan anak sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Tanggamus sangat mempengaruhi kondisi perairan yang menjadi sumber air bagi penduduk di wilayah Kabupaten Tanggamus dan sekitarnya.

Sungai Way Sekampung merupakan sungai yang menjadi perhatian di Kabupaten Tanggamus karena manfaatnya yang sangat besar bagi aktivitas penduduk, termasuk juga daerah-daerah aliran sungai nya. Sungai dan anak sungai ini merupakan sumber air untuk Bendungan Batu Tegi yang terletak di Pekon Way Harong, Kecamatan Air Naningan yang dibangun pada tahun 2002, dengan luas genangan 25 km², yang diperuntukkan sebagai pembangkit tenaga listrik, air baku, pariwisata, pengendalian banjir dan pengembangan perikanan air tawar. Pola aliran Sungai Way Sekampung menganut pola aliran dendritik yang mengalir melintasi beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Pulau Pangung, Air Naningan, Talang Padang, Pugung, dan Bulok. Luas keseluruhan Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Sekampung untuk wilayah Tanggamus yaitu 279.528,41 Ha.

Gambar 2.5. Peta Hidrologi Kabupaten Tanggamus



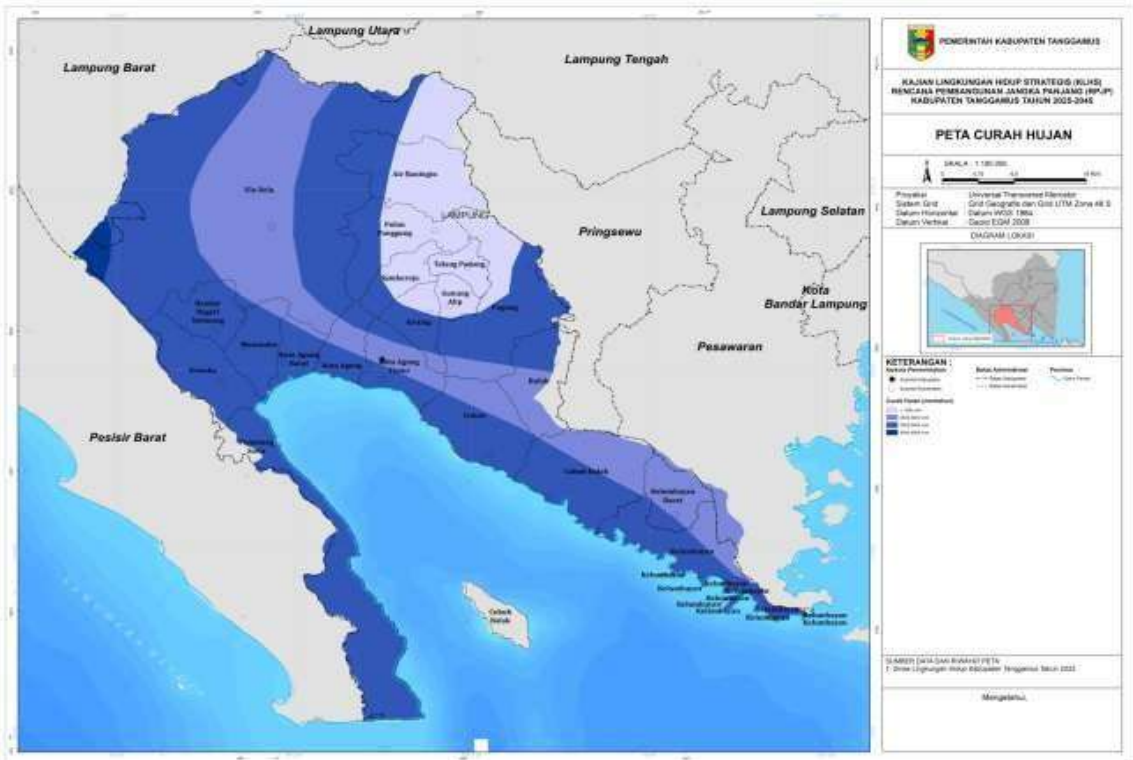
Sumber: KLHS RPJPD Tahun 2025-2045

2.1.1.5. Klimatologi

Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan laut yaitu Teluk Semangka yang merupakan bagian dari Samudera Indonesia menyebabkan sebagian besar wilayah Kabupaten Tanggamus dipengaruhi oleh udara tropikal pantai dan dataran dengan temperatur udara berkisar rata-rata antara 26 °C (Derajat Celcius) sampai 30 °C pada ketinggian 20-60 m diatas permukaan laut sedangkan pada daerah yang lebih rendah temperatur udara di wilayah ini dapat mencapai 33 °C.

Wilayah dengan udara sejuk (pegunungan) berada di sekitar daerah Kecamatan Gisting dan Kota Agung Timur yang berada pada ketinggian 500 mdpl sampai dengan 2.000 mdpl (Gunung Tanggamus). Kecepatan angin rata-rata adalah 5,83 km/jam, dengan kelembaban udara yang cukup tinggi yaitu 80%-88%. Curah hujan di wilayah Kabupaten Tanggamus juga cukup tinggi berkisar antara 1.750 mm per tahun sampai dengan 3.000 mm per tahun. Type-type iklim berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh L. R. Oldeman (1978) dibedakan berdasarkan panjang bulan basah dan bulan kering yang berlangsung di wilayah Kabupaten Tanggamus. Atas dasar klasifikasi tersebut, sebagian besar wilayah Kabupaten Tanggamus termasuk pada zona B - 1 dimana jumlah bulan basah adalah 7 sampai dengan 9 bulan dan Zona C dengan jumlah bulan basah 7 bulan.

Gambar 2.6. Peta Klimatologi Kabupaten Tanggamus



Sumber: KLHS RPJPD Tahun 2025-2045

2.1.1.6. Penutupan Lahan

Aspek fisik alam yang merupakan faktor pembatas bagi perkembangan ruang wilayah adalah ketersediaan lahan dan sumberdaya air. Hal ini disebabkan keadaan kedua sumberdaya tersebut bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan). Selain itu, secara alamiah kuantitas nya tetap namun keadaan dan sifat kualitasnya akan berbeda dari waktu ke waktu sehingga dapat membatasi pemakaian dan manfaat yang diberikan. Oleh karena itu, ketersediaan lahan

dan sumberdaya air ini akan menentukan sebaran dan besaran luas daya tampung ruang untuk pemanfaatan lahan pada wilayah tersebut.

Adapun kondisi Tutupan Lahan di Kabupaten Tanggamus terdiri dari hutan lahan kering primer dan sekunder, hutan mangrove, permukiman, perkebunan, pertanian lahan kering atau semak, semak belukar, tambak, pertambangan, lahan terbuka, sawah, dan tubuh air. Pertanian lahan kering campur semak merupakan jenis tutupan lahan yang mendominasi di Kabupaten Tanggamus, dengan prosentase 77,74%. Sedangkan jenis tutupan hutan lahan kering primer dan sekunder masing-masing memiliki persentase 0,11% dan 9,47% dari total luas daratan. Tutupan lahan yang luasnya terkecil adalah lahan semak belukar rawa sebesar 0,05%. Kondisi secara jelas peta tutupan lahan Kabupaten Tanggamus.

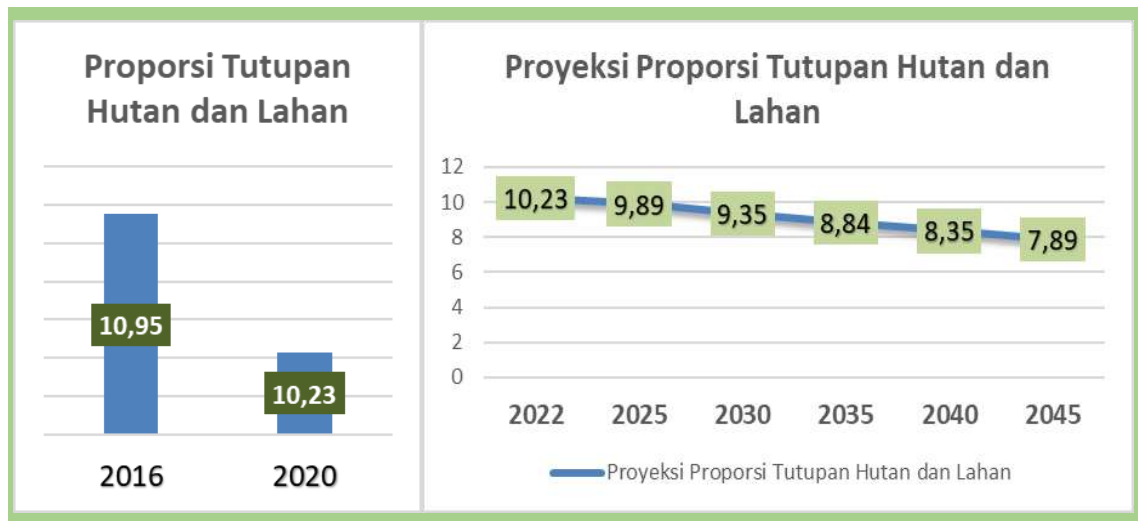
Tabel 2.3. Penutupan Lahan Tahun 2021 Kabupaten Tanggamus

No	Kelas Penutupan Lahan	Luas (Ha)	Persentase
1	Hutan Lahan Kering Primer	314,85	0,11%
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	27.847,96	9,47%
3	Hutan Mangrove Sekunder	69,33	0,02%
4	Lahan Terbuka	197,11	0,07%
5	Perkebunan	481,09	0,16%
6	Permukiman / Lahan Terbangun	8.477,51	2,88%
7	Pertambangan	96,33	0,03%
8	Pertanian Lahan Kering	2.953,76	1,00%
9	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	228.700,17	77,74%
10	Sawah	16.633,51	5,65%
11	Semak Belukar	6.839,85	2,32%
12	Semak Belukar Rawa	138,99	0,05%
13	Tambak	407,29	0,14%
14	Tubuh Air	1.045,13	0,36%
Total		294.202,86	100%

Sumber: BPKH-TL Wilayah XX Bandar Lampung, 2021

Proporsi Tutupan hutan dan lahan di Kabupaten Tanggamus dalam kurun waktu 4 tahun terakhir terjadi penurunan pada tahun 2016 sebesar 10.95 % menjadi 10.23% pada tahun 2020. Berdasarkan data diatas, luas tutupan hutan di Kabupaten Tanggamus menurun setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut maka luas hutan akan semakin terdegradasi yang selanjutnya akan berdampak pada menurun nya kualitas lahan dan tingkat keanekaragaman hayati di Kabupaten Tanggamus. Alih fungsi lahan hutan didominasi oleh aktivitas budidaya pertanian dan juga meningkatnya jumlah lahan untuk permukiman. Berdasarkan hasil proyeksi, Proporsi tutupan lahan dan hutan di Kabupaten Tanggamus menurun mulai tahun 2025, dan mencapai 9,35% pada tahun 2030 dan 7,89% pada tahun 2045. Penurunan ini juga turut dipengaruhi oleh kondisi daya dukung lingkungan, bencana alam, serta aktivitas manusia.

Grafik 2.1. Proporsi Tutupan Hutan dan Lahan Kabupaten Tanggamus



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Tanggamus tahun 2025-2045

2.1.1.7. Dampak dan Resiko Lingkungan serta Bencana Alam

Daerah berisiko bencana merujuk pada keadaan atau sifat suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang mengurangi kapasitasnya dalam pencegahan serta menanggapi dampak negatif dari ancaman atau bahaya tertentu. Sebagian daerah Kabupaten Tanggamus merupakan area yang memiliki risiko bencana. Kerentanan bencana alam perlu diketahui untuk pemilahan alternatif terhadap wilayah-wilayah yang akan dikembangkan, terutama untuk menetapkan wilayah-wilayah yang merupakan limitasi atau pembatas (kawasan dengan tingkat kualitas kerentanan bencana alam tinggi yang perlu di hindari). Berikut tingkat kerentanan kabupaten dan kota di Provinsi Lampung Tahun 2018.

Di tahun 2023 Data Bencana Indonesia mencatat 3 jenis bencana yang dominan terjadi di Kabupaten Tanggamus yaitu banjir, gempa bumi, dan gelombang ekstrim. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2023, pada tahun 2023 Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Tanggamus berada di angka 132,54. (sedang) menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 149,46. Namun berdasarkan hasil proyeksi dengan skenario BAU oleh tim penyusun KHLs, didapatkan hasil bahwa indeks risiko bencana di Kabupaten Tanggamus meningkat walaupun tidak signifikan sampai tahun 2045. Sehingga capaian indikator ini memerlukan upaya tambahan agar sesuai dengan target nasional atau dibawah nya.

Tabel 2.4. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2015-2023

NO	KABUPATEN/KOTA	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	KELAS RISIKO 2023
1	PESISIR BARAT							189.70	189.70	189.70	TINGGI
2	LAMPUNG TIMUR	183.20	183.20	183.20	183.20	183.20	183.20	183.20	183.20	183.20	TINGGI
3	LAMPUNG BARAT	214.00	214.00	214.00	204.22	179.29	179.29	163.85	178.48	176.61	TINGGI
4	LAMPUNG SELATAN	187.20	187.20	187.20	187.20	187.20	187.20	187.20	176.14	167.23	TINGGI
5	PESAWARAN	181.60	181.60	181.60	181.60	181.60	181.60	181.60	173.19	162.28	TINGGI
6	TANGGAMUS	201.20	149.37	141.00	135.86	135.86	135.86	135.86	149.46	132.54	SEDANG
7	LAMPUNG UTARA	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	SEDANG
8	TULANG BAWANG	144.40	144.40	144.40	144.40	144.40	144.40	144.40	132.70	122.66	SEDANG
9	TULANG BAWANG BARAT	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	120.34	120.28	SEDANG
10	KOTA BANDAR LAMPUNG	182.00	182.00	182.00	165.56	165.56	165.56	165.56	139.02	119.79	SEDANG
11	MESUJI	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	120.40	120.36	116.70	SEDANG
12	LAMPUNG TENGAH	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	120.80	113.24	SEDANG
13	WAY KANAN	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	131.20	120.07	108.00	SEDANG
14	KOTA METRO	113.60	113.60	113.60	113.60	113.60	113.60	100.26	108.37	96.29	SEDANG
15	PRINGSEWU	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	95.20	SEDANG

Indeks Risiko Bencana menurut Ancaman Bencana di Kabupaten Tanggamus 2023

NO	ANCAMAN	SKOR	KELAS RISIKO
1	Banjir	14,43	TINGGI
2	Gempa Bumi	14,98	TINGGI
3	Tsunami	7,4	SEDANG
4	Latusan Gunung Api	-	SEDANG
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	11,10	SEDANG
6	Tanah Longsor	11,10	SEDANG
7	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	16,65	TINGGI
8	Kekeringan	11,10	SEDANG
9	Cuaca Ekstrim	6,29	SEDANG

Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) BNPB, 2023

1. Banjir

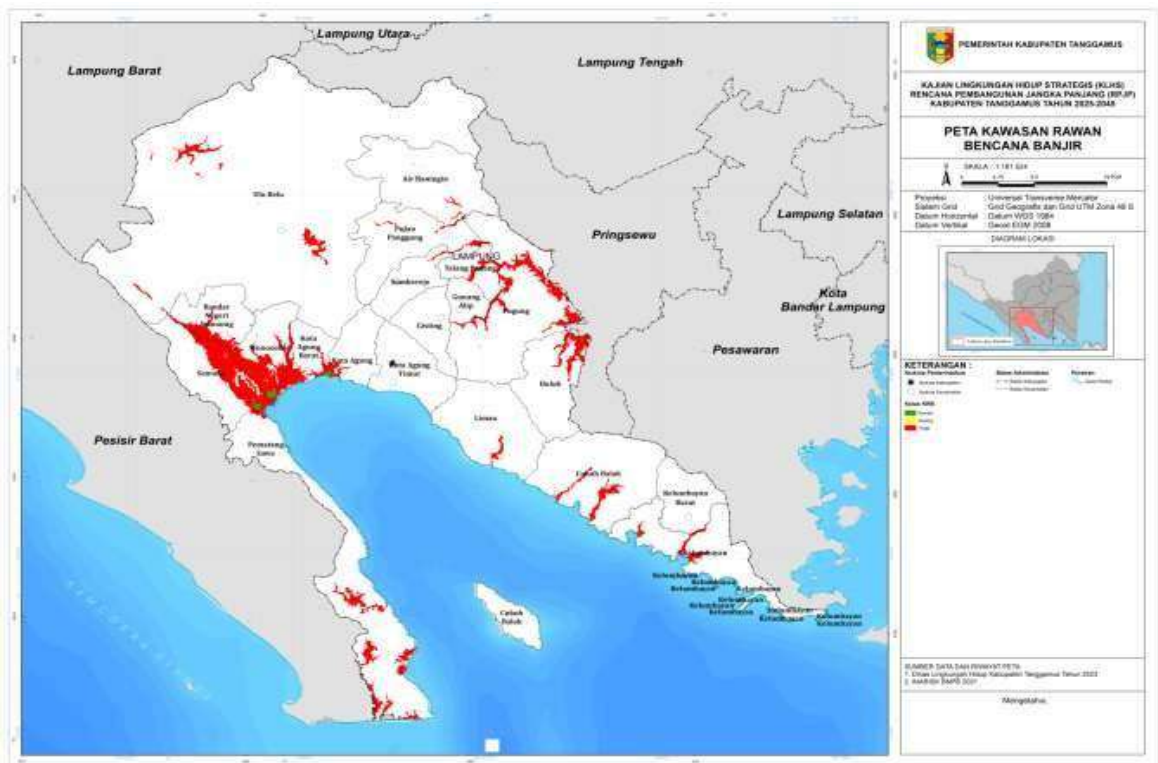
Secara alami, banjir sering kali dipicu oleh tingginya curah hujan yang melebihi kapasitas sistem aliran alami maupun saluran buatan. Kemampuan/daya tampung sistem pengaliran air berkurang akibat sedimentasi, maupun penyempitan sungai akibat fenomena alam dan manusia. Secara umum pada sebuah sistem aliran sungai yang memiliki tingkat kemiringan (gradien) sungai yang relatif tinggi (lebih dari 30%) apabila di bagian hulunya terjadi hujan yang cukup lebat, maka potensi terjadinya banjir bandang relatif tinggi. Tingkat kemiringan sungai yang relatif curam ini dapat dikatakan sebagai faktor “bakat” atau bawaan. Sedangkan curah hujan adalah salah satu faktor pemicu.

Faktor pemicu lainnya yaitu penggundulan hutan dan pembangunan perkotaan yang mengurangi kemampuan alami menyerap air hujan. Ketika hutan di daerah tangkapan air hujan ditebang, air hujan tidak terserap dengan baik, menyebabkan lonjakan debit air yang melebihi kemampuan aliran normal sungai. Di daerah perkotaan yang padat, permukaan bangunan menghambat

resapan air ke tanah, membuat air hujan langsung mengalir ke sistem saluran, membanjiri area tersebut saat hujan deras.

Kawasan rawan banjir di Kabupaten Tanggamus terjadi di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Wonosobo, Semaka, Bandar Negeri Semuong, Kotaagung, Kotaagung Barat, Pugung, Talang Padang, Pematang Sawa, Kotaagung Timur, Cukuh Balak, Kelumbayan dan Limau. Terdapat kecamatan yang masuk kategori Sangat Rentan sejumlah 3 Kecamatan dengan indikator (5) yaitu Kecamatan Pematang Sawa di Pekon Teluk Brak, Ulu Belu di Pekon Tanjungbaru, Sinar Banten dan Petay Kayu, dan Kalumbayan di Pekon Unggak. Sedangkan di beberapa kecamatan memiliki rata-rata tingkat kerentanan dengan indikator sebesar 3 (cukup rentan).

Gambar 2.7. Peta Tata Aliran Air dan Banjir Kabupaten Tanggamus



Sumber : KLHS RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2045

2. Longsor

Tanah longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan masa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Berikut ini merupakan tabel perhitungan kerentanan lingkungan tanah longsor tingkat kecamatan di Kabupaten Tanggamus yang sudah diskoring berdasarkan parameter yang telah ditentukan. Berdasarkan data yang diperoleh, kelas kerentanan lingkungan tanah longsor yang ada di Kabupaten Tanggamus adalah

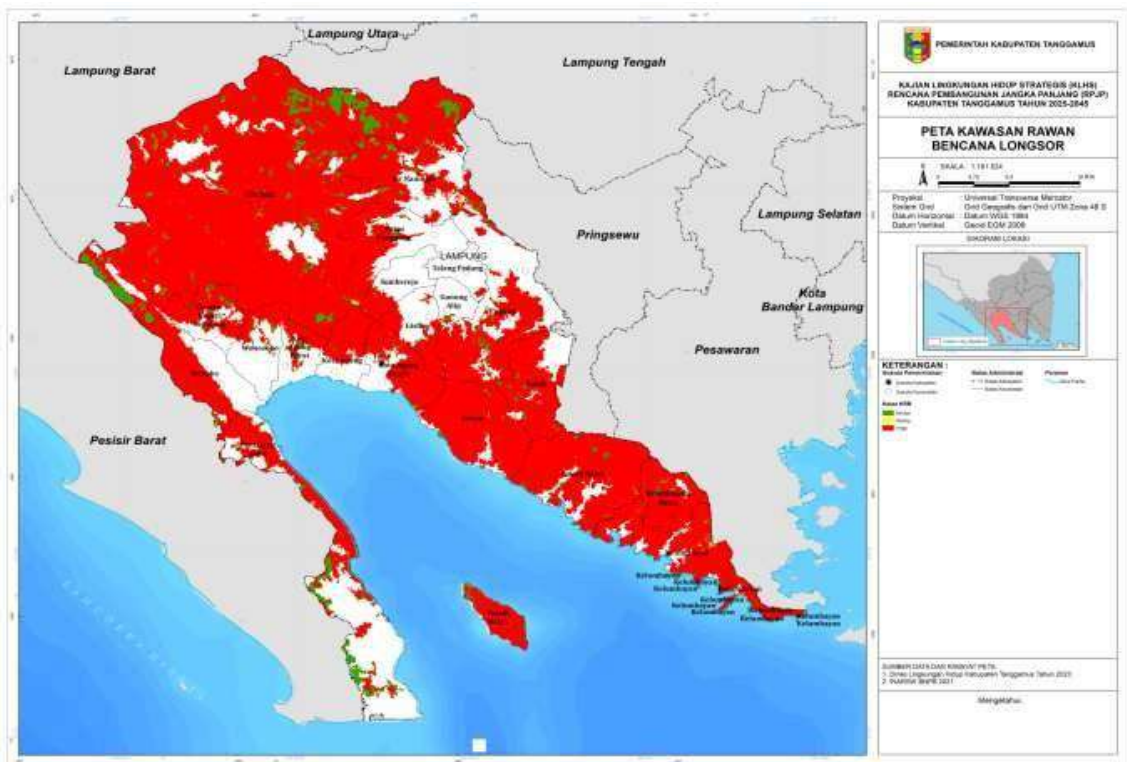
didominasi kelas kerentanan tinggi dengan luas 200.133,09 Ha atau 93,67% dan kelas kerentanan rendah seluas 12.831,68 atau 6,01%.

Tabel 2.5. Indeks Kerentanan Lingkungan Tanah Longsor Kabupaten Tanggamus

Klasifikasi	Luas (Ha)	Persentase
Rendah	12.831,68	6,01%
Sedang	684,79	0,32%
Tinggi	200.133,09	93,67%
Total	213.649,56	100,00%

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2045

Gambar 2.8. Peta Kerentanan Tanah Longsor Kabupaten Tanggamus



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2045

3. Kebakaran Hutan

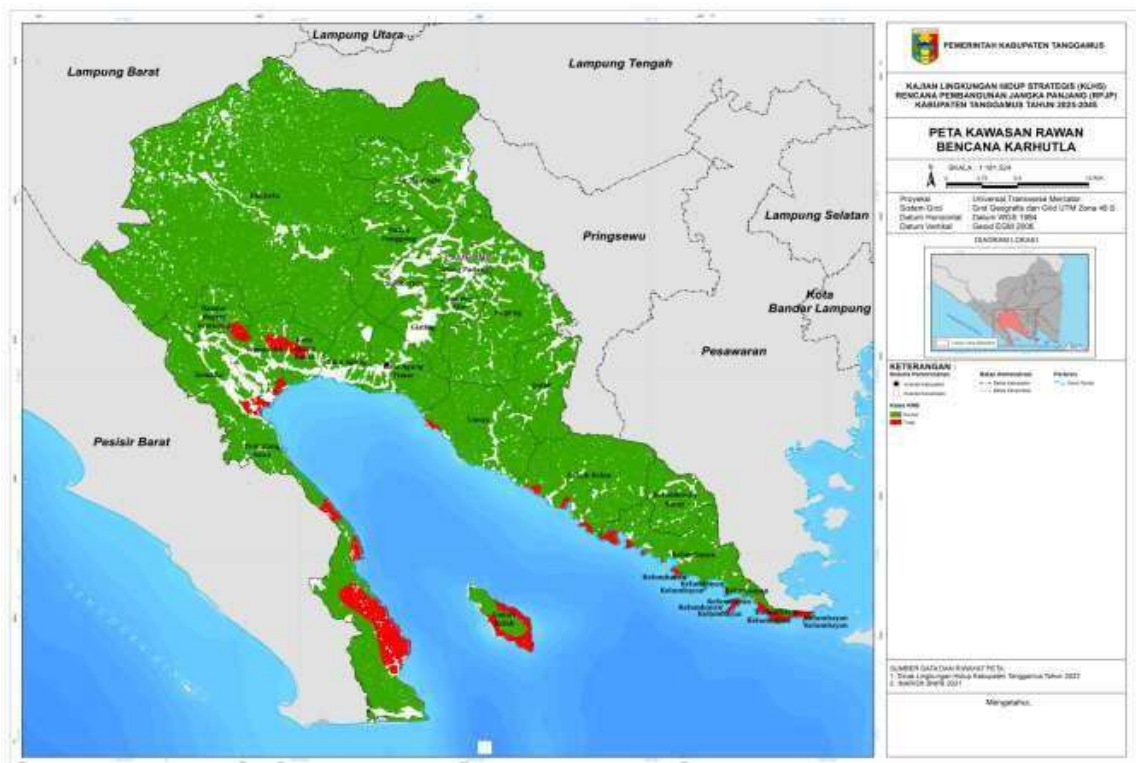
Kabupaten Tanggamus memiliki kelas kerentanan lingkungan kebakaran lahan dan hutan yang tergolong rendah dengan luas 246.675,83 Ha atau 95,97% dari seluruh wilayah Kabupaten Tanggamus. Kemudian tingkat kerentanan tinggi memiliki dominasi kecil yaitu seluas 10.356,57 Ha atau 4,03%.

Tabel 2.6. Indeks Kerentanan Kebakaran Lahan Dan Hutan Kabupaten Tanggamus

Klasifikasi	Luas (Ha)	Persentase
Rendah	246.675,83	95,97%
Sedang	-	0,00%
Tinggi	10.356,57	4,03%
Total	257.032,40	100,00%

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2045

Gambar 2.9. Peta Kerentanan Kebakaran Hutan Kabupaten Tanggamus



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2045

4. Gempa Bumi

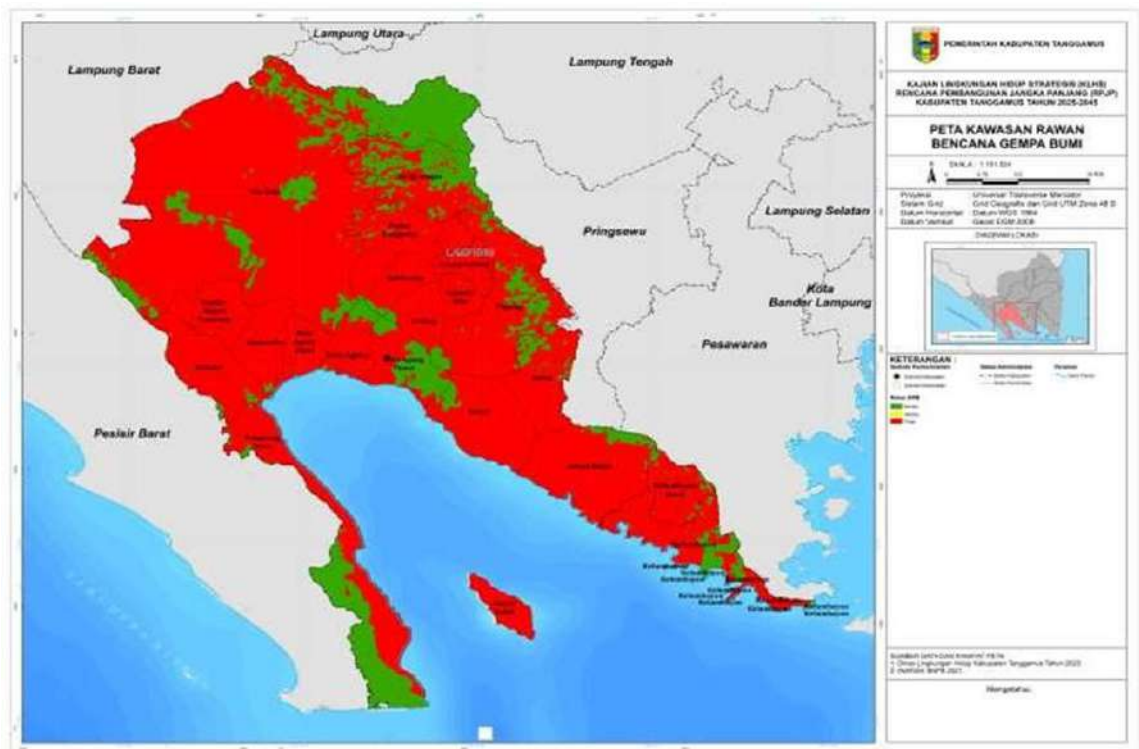
Berdasarkan hasil analisis Indeks kerentanan gempa bumi yang telah dilakukan diketahui bahwa Kabupaten Tanggamus memiliki kelas kerentanan gempa bumi yang tinggi seluas 235.488,45 Ha atay 80,85% dan kelas kerentanan gempa bumi rendah seluas 55.763,98 Ha atau 19,15%.

Tabel 2.7. Indeks Kerentanan Gempa Bumi Kabupaten Tanggamus

Klasifikasi	Luas (Ha)	Persentase
Rendah	55.763,98	19,15%
Sedang	7,35	0,00%
Tinggi	235.488,45	80,85%
Total	291.259,78	100,00%

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2045

Gambar 2.10. Peta Kerentanan Gempa Bumi Kabupaten Tanggamus



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2045

2.1.1.8. Kondisi Batas Ekologis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, batas ekologis adalah sebaran dampak lingkungan dari suatu rencana usaha atau kegiatan yang dikaji, mengikuti media lingkungan seperti air dan udara, dimana proses alami dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Batas ekologis ditentukan berdasarkan wilayah yang akan terkena dampak kebijakan, dengan delineasi menggunakan Informasi Geospasial Tematik (IGT) seperti Daerah Aliran Sungai (DAS), ekoregion, batas KRP, dan IGT lain yang relevan.

1. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Pola aliran Sungai Way Sekampung menganut pola aliran dendritik yang mengalir melintasi beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Pulau Panggung, Air Nanningan, Talang Padang, Pugung, dan Bulok. Luas keseluruhan Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Sekampung untuk wilayah Tanggamus yaitu 279.528,41 Ha.

Tabel 2.8. Daerah Aliran Sungai Kabupaten Tanggamus

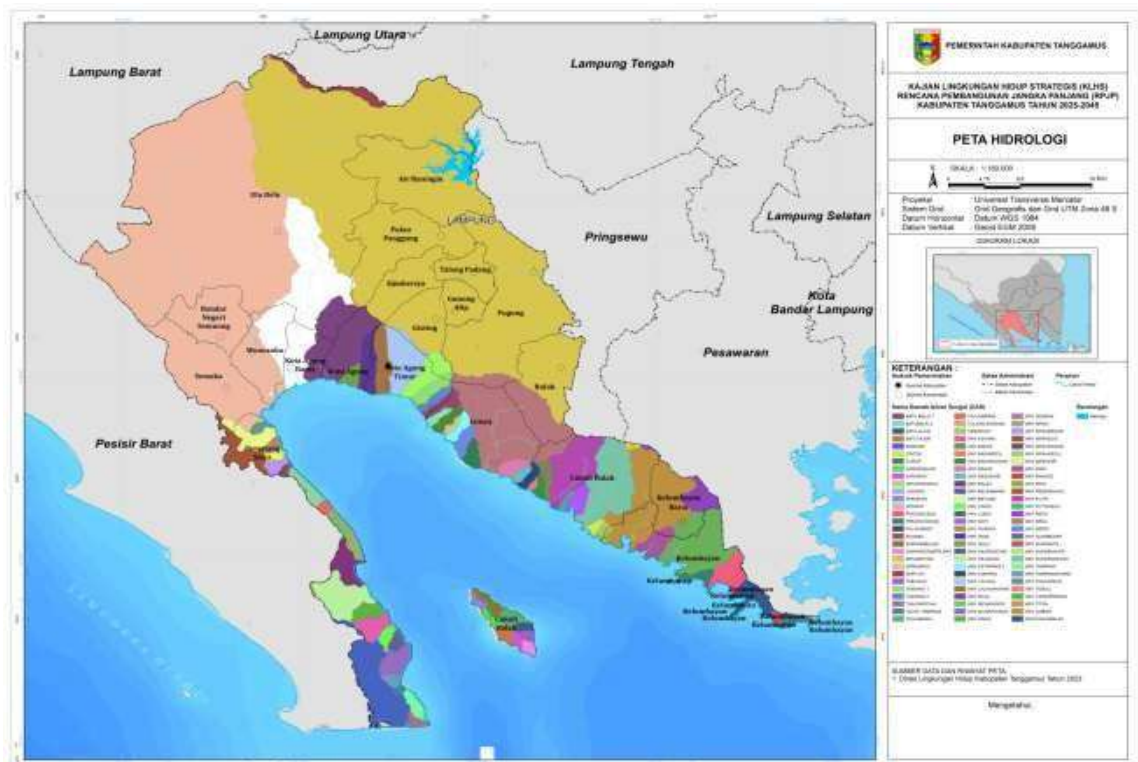
Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas (Ha)
Batu Balai 1	801,63
Batu balai 2	354,56
Batu jajar	269,92
Batu tajam	452,10
Bawang	52,40
Cintigi	285,00
Curup	593,02
Karang buah	346,84
Karupan	221,37
Ketapang dua	270,22
Legundi	60,52
Paguran	259,58
Pedada	6,79
Pekon susuk	1.537,21
Pekon unggak	560,31
Pulau baru	12,53
Rusaba	41,25
Sawang balak	564,02
Sawang cemerlang	313,45
Sekampung	106.445,04
Semangka	75.249,47
Seputih	1.256,12
Tabuhan	273,41
Tamiang 1	966,92
Tamiang 2	553,20
Tanjung cina	367,42
Teluk Tampang	169,04
Teluk baru	617,14
Teluk berak	258,65
Tulang Bawang	114,38
Umbarioh	370,35
Way Asahan	1.137,40
Way Badak	638,90

Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas (Ha)
Way Badak	638,90
Way Badakecil	146,66
Way Badak kanan	348,18
Way Bagiik	685,96
Way Bagiik kiri	361,25
Way Balak	1.522,75
Way Belambang	5.311,08
Way Betung	1.424,40
Way Cangi	480,50
Way Cumu	645,96
Way Doh	785,97
Way Guring	400,85
Way Isom	1.685,43
Way Jelai	555,04
Way Kaur gading	445,50
Way Kejadian	2.989,35
Way Ketapang 2	550,57
Way Kuripan	432,32
Way Lalaan	3.106,07
Way Lalaan kanan	1.675,25
Way Maja	6.978,10
Way Menang kiri	253,81
Way Muara tando	1.297,24
Way Napal	5.627,93
Way Ngaras	12,78
Way Nipah	1.013,49
Way Nipah besar	497,65
Way Nipah duo	99,38
Way Nipah kanan	116,58
Way Nipah kecil	840,91
Way Nipah kiri	333,35
Way Paku	1.224,16
Way Panago	17,61
Way Paya	56,51
Way Pemerihan 2	1.746,65
Way Putih	4.240,76
Way Putih kecil	206,50
Way Ratai	1.439,43
Way Seka	13.442,81
Way Serat	650,38
Way Suak besar	470,78

Daerah Aliran Sungai (DAS)	Luas (Ha)
Way Suak kecil	199,40
Way Suka banjar	1.794,45
Way Suka pandang	5.647,23
Way Tampang	714,24
Way Tampang kanan	365,86
Way Tanjungan	338,75
Way Temuli	22,27
Way Tirom pedada	816,29
Way Titan	2,06
Way Umbar	8.750,29
Way Cukuh balak	1.337,50
Luas Total	279.528,41

Sumber: Bapperida Kabupaten Tanggamus Tahun 2023

Gambar 2.11. Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Tanggamus



Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus Tahun 2023

2. Cekungan Air Tanah

Provinsi Lampung terdapat tujuh cekungan air tanah, yaitu cekungan air tanah Kalianda, cekungan air tanah Kabupaten Lampung Utara, cekungan air tanah Metro-Kotabumi, cekungan air tanah Talang Padang, cekungan air tanah Kota

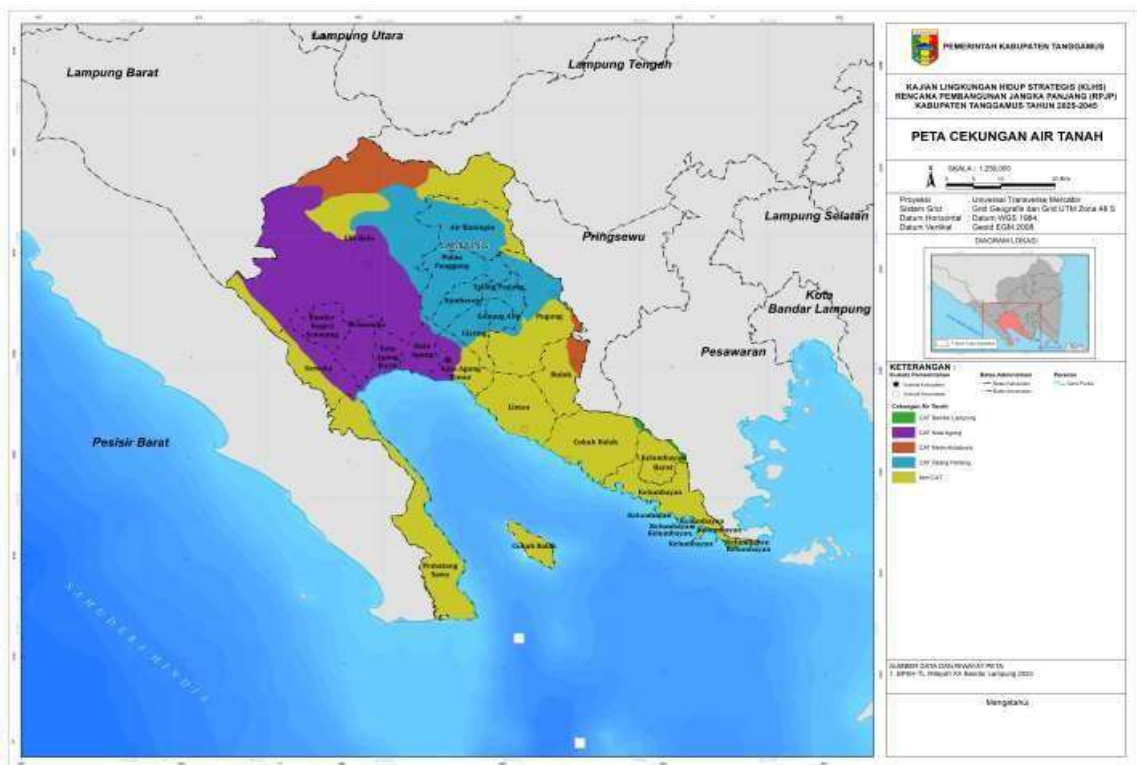
Agung, cekungan air tanah Batu Raja dan cekungan air tanah Danau Ranau. Wilayah Kabupaten Tanggamus itu sendiri masuk dalam cekungan air tanah Metro-Kotabumi, cekungan air tanah Kota Agung, cekungan air tanah Bandar Lampung, Ranau, dan cekungan air tanah Talang Padang.

Tabel 2.9. Luas Cekungan Air Tanah Kabupaten Tanggamus

No.	CEKUNGAN AIR TANAH	Total Luas (Ha)
1	CAT Bandar Lampung	626,38
2	CAT Kota Agung	85.472,8
3	CAT Metro-Kotabumi	17.039,86
4	CAT Talang Padang	60.338,33
5	Non-CAT	130.725,58
Luas Total		294.202,95

Sumber : Badan Geologi, Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2017

Gambar 2.12. Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Tanggamus



Sumber : Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2017

3. Bentang Alam (Ekoregion)

Jasa Ekosistem di Kabupaten Tanggamus dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu ekoregion dan tutupan lahan. Pegunungan Struktural Jalur Bukit Barisan adalah ekoregion yang paling dominan di wilayah ini, dengan luas sekitar 127.914,52 Ha atau sekitar 43,48% dari total luas Kabupaten Tanggamus. Sementara itu, ekoregion Dataran Struktural Jalur Bukit Barisan memiliki luas

yang paling kecil, hanya sekitar 4.410,15 Ha atau sekitar 1,50% dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Tanggamus, sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini

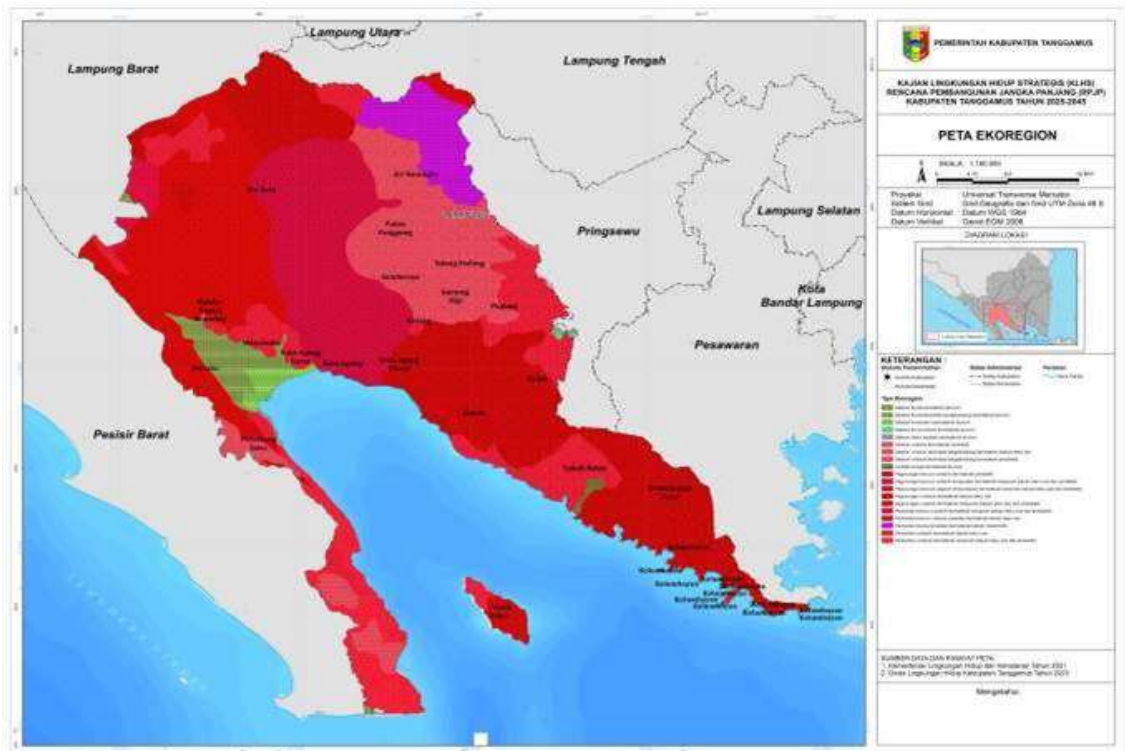
Tabel 2.10. Ekoregion Darat Kabupaten Tanggamus

No	Ekoregion Darat	Luas (Ha)	Persentase
1	Dataran Fluvial Sumatera	12.993,57	4,42%
2	Dataran Struktural Jalur Bukit Barisan	4.410,15	1,50%
3	Dataran Vulkanik Jalur Bukit Barisan	20.519,21	6,97%
4	Pegunungan Struktural Jalur Bukit Barisan	127.914,52	43,48%
5	Pegunungan Vulkanik Jalur Bukit Barisan	39.901,57	13,56%
6	Perbukitan Struktural Jalur Bukit Barisan	73.202,00	24,88%
7	Perbukitan Vulkanik Jalur Bukit Barisan	15.261,83	5,19%
Total		294.202,86	100,00%

Sumber: SK MenLHK No.1272 Tahun 2021 Tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami

Wilayah Kabupaten Tanggamus memiliki ekoregion yang beragam. Berdasarkan karakteristik bentang alam, total luas wilayahnya adalah 632.629,78 Ha. Pegunungan vulkanik dengan batuan beku luar mendominasi dengan luas 170.451,75 Ha (26,94%). Sebaliknya, ekoregion terkecil adalah dataran fluvial berombak-bergelombang dengan material aluvium seluas 203,66 Ha (0,03%), seperti yang disajikan dalam Peta dan Tabel dibawah ini.

Gambar 2.13. Peta Bentang Alam Kabupaten Tanggamus



Sumber: SK No.1272 Tahun 2021 Tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion, Skala 1:250.000

Tabel 2.11. Data Ekoregion Karakteristik Bentang Alam di Kabupaten Tanggamus

No	Ekoregion Karakteristik Bentang Alam (KBA)	Luasan (Ha)	Persentase
1	Dataran fluvial bermaterial aluvium	7.428,78	2,53%
2	Dataran fluvial berombak-bergelombang bermaterial aluvium	147,97	0,05%
3	Dataran fluviomarin bermaterial aluvium	2.418,50	0,82%
4	Dataran fluvi vulkanik bermaterial aluvium	295,57	0,10%
5	Dataran marin berpasir bermaterial aluvium	202,39	0,07%
6	Dataran vulkanik bermaterial piroklastik	4.221,64	1,43%
7	Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial batuan beku luar	38.089,06	12,95%
8	Dataran vulkanik berombak-bergelombang bermaterial piroklastik	966,70	0,33%
9	Lembah sungai bermaterial aluvium	595,12	0,20%
10	Pegunungan kerucut vulkanik bermaterial piroklastik	219,77	0,07%
11	Pegunungan kerucut vulkanik lereng atas bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	9.292,35	3,16%
12	Pegunungan kerucut vulkanik lereng bawah bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	34.731,47	11,81%
13	Pegunungan vulkanik bermaterial batuan beku luar	74.887,72	25,45%
14	Pegunungan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	55.701,54	18,93%
15	Perbukitan kerucut vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	3.241,66	1,10%
16	Perbukitan kerucut vulkanik parasiter bermaterial batuan beku luar	435,73	0,15%
17	Perbukitan struktural lipatan bermaterial batuan metamorfik	13.017,97	4,42%
18	Perbukitan vulkanik bermaterial batuan beku luar	35.085,59	11,93%
19	Perbukitan vulkanik bermaterial campuran batuan beku luar dan piroklastik	13.223,33	4,49%
Total		294.202,86	100,00%

Sumber: BPKH-TL Wilayah XX Bandar Lampung Tahun 2023

4. Karakteristik Vegetasi Alam

Sebagian wilayah Kabupaten Tanggamus berupa ekosistem hujan tropis yang yang menjadi bagian dari Pegunungan Bukit Barisan, memiliki ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut, dengan curah hujan yang sangat tinggi dibandingkan dengan potensi penguapan. Keadaan vegetasi yang rapat dan kanopi yang luas memungkinkan penyerapan air hujan yang lebih besar, sementara tumbuhan memainkan peran penting dalam menahan dan mengarahkan aliran air ke dalam tanah, menjadikannya daerah yang sangat

efektif sebagai daerah tangkapan air (*catchment area*). Ekosistem ini berperan sebagai elemen penting dalam mengatur infrastruktur alam untuk mencegah dan melindungi terhadap berbagai jenis bencana alam, terutama bencana erosi, tanah longsor, abrasi, dan tsunami. Daerah-daerah dengan vegetasi yang rapat dapat berfungsi sebagai benteng alami yang menghalangi bencana-bencana tersebut.

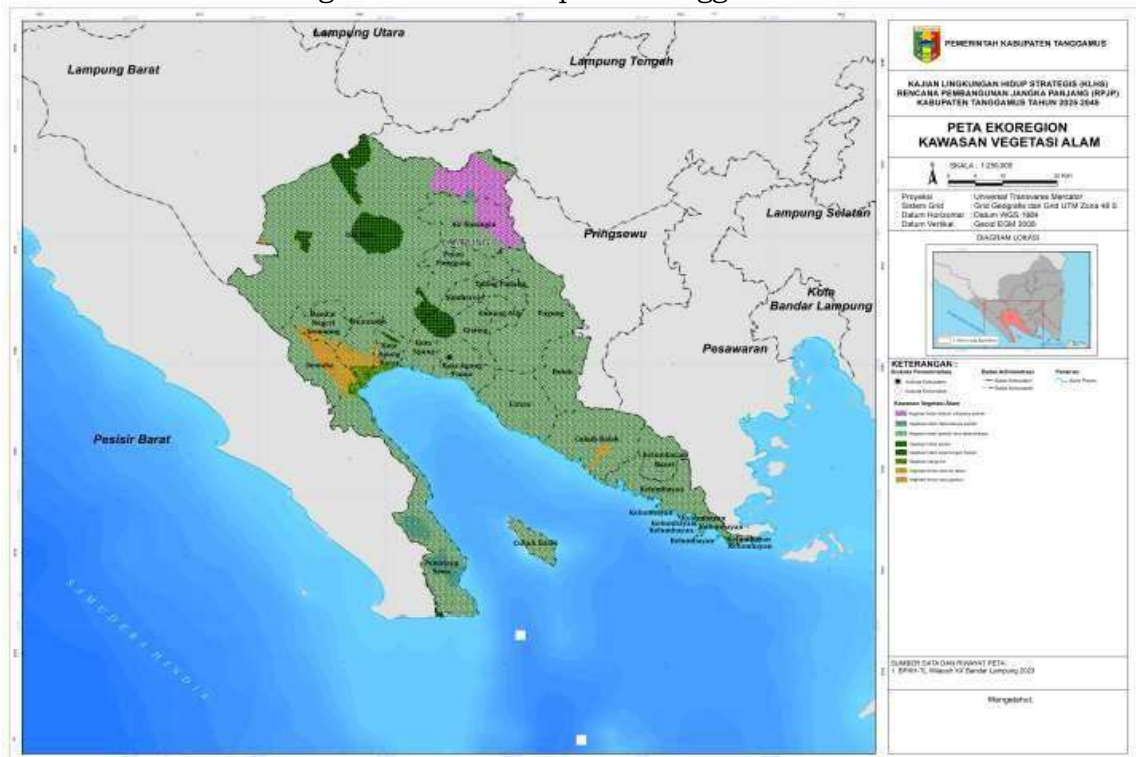
Kawasan ekoregion Vegetasi Alam Kabupaten Tanggamus memiliki ragam vegetasi alami yang mencakup berbagai tipe ekosistem. Di wilayah ini, terdapat jenis vegetasi hutan utama, yaitu Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa) yang mendominasi sebagian besar wilayah kecamatan. Di sebagian wilayah diwarnai Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah dan Vegetasi hutan dipterokarpa pamah. Di sepanjang pesisir, terdapat Vegetasi hutan pantai yang tumbuh, sementara di daerah pegunungan bawah, terdapat vegetasi hutan pegunungan yang beragam.

Tabel 2.12. Data Ekoregion Karakteristik Vegetasi Alam di Kabupaten Tanggamus

No.	Karakteristik Vegetasi Alam	Luas Total (Ha)
1	Vegetasi hutan batuan ultrabasa pamah	12.777,13
2	Vegetasi hutan dipterokarpa pamah	4.462,48
3	Vegetasi hutan kerangas pamah	197,83
4	Vegetasi hutan pamah (non dipterokarpa)	251.342,30
5	Vegetasi hutan pantai	350,36
6	Vegetasi hutan pegunungan bawah	14.630,41
7	Vegetasi mangrove	2.418,51
8	Vegetasi terna rawa air tawar	7.865,07
9	Vegetasi terna rawa gambut	158,83
LUAS TOTAL		294.202,95

Sumber: PKH-TL Wilayah XX Bandar Lampung Tahun 2023

Gambar 2.14. Peta Vegetasi Alam Kabupaten Tanggamus



Sumber: SK MenLHK No.1272 Tahun 2021 Tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami, Skala 1:250.000

2.1.1.9. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Daya dukung lingkungan hidup mengacu pada kapasitas lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia, organisme lain, dan menjaga keseimbangan antara keduanya. Sementara itu, Daya tampung lingkungan hidup merujuk pada kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat diukur melalui konsep jasa ekosistem dalam penyediaan makanan dan penyediaan air bersih. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, penting untuk memperhatikan aspek keberlanjutan dalam mengukur daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan tujuan, Menjaga keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; Memastikan keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; Menjaga keselamatan, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

1. Daya Dukung Pangan

Proyeksi daya dukung pangan dihitung berdasarkan ambang batas penyediaan pangan dimana analisis ini menggunakan jasa layanan lingkungan, produktifitas tanaman pangan dan jumlah penduduk. Daya dukung pangan merupakan

kemampuan suatu untuk memproduksi, menyediakan dan memastikan penduduk dapat mengakses dan memperoleh makanan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan gizi dan kesehatan. Konsep daya dukung pangan berfokus pada keseimbangan antara pertumbuhan populasi, produksi pangan, dan ketersediaan sumber daya alam yang digunakan dalam produksi pangan. Adapun rasio daya dukung pangan Kabupaten Tanggamus.

Tabel 2.13. Kondisi Daya Dukung Pangan Kabupaten Tanggamus 2022-2045

Tahun	Rasio Daya Dukung Pangan
2022	26,29
2025	24,94
2030	22,57
2035	20,55
2040	18,67
2045	17,03

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Tanggamus 2025-2045

Daya dukung pangan di Kabupaten Tanggamus masih termasuk surplus dengan rasio daya dukung cukup tinggi, namun hasil ini merupakan nilai dengan asumsi bahwa ketersediaan air tercukupi dan produktivitas yang tinggi. Kabupaten Tanggamus mampu menjaga ketersediaan daya dukung pangan melalui beberapa upaya sebagai berikut:

Mendorong praktik pertanian yang berkelanjutan, seperti pertanian organik, dan penggunaan teknologi hijau untuk meningkatkan produktivitas pertanian tanpa merusak lingkungan. Mendorong petani dan produsen untuk mengembangkan diversifikasi produksi pangan untuk membantu mengurangi risiko kekurangan pangan karena fluktuasi harga atau ketidakstabilan pasokan.

2. Daya Dukung Air

Daya dukung air secara umum dapat diartikan sebagai kemampuan lingkungan dalam menyediakan air untuk memenuhi kebutuhan kegiatannya. Daya dukung air dihitung dengan pendekatan supply dan demand. Daya dukung air dapat dikatakan surplus jika jumlah ketersediaan air lebih besar daripada kebutuhan air, atau rasio $DDA > 1$, dan dikatakan defisit jika rasio $DDA < 1$. Menurut (Muta'ali, 2012) untuk mendapatkan nilai daya dukung air permukaan yaitu dengan cara perhitungan ketersediaan air permukaan dibagi dengan kebutuhan air permukaan. Ketersediaan air permukaan Kabupaten Tanggamus tahun 2022 mencapai 2.089.317.248 m³ /tahun sedangkan kebutuhan air tahun 2022 mencapai 1.172.594.944 m³ /tahun dengan rasio daya dukung air yaitu 1,78% kondisi daya dukung air Tanggamus masih dalam kategori aman

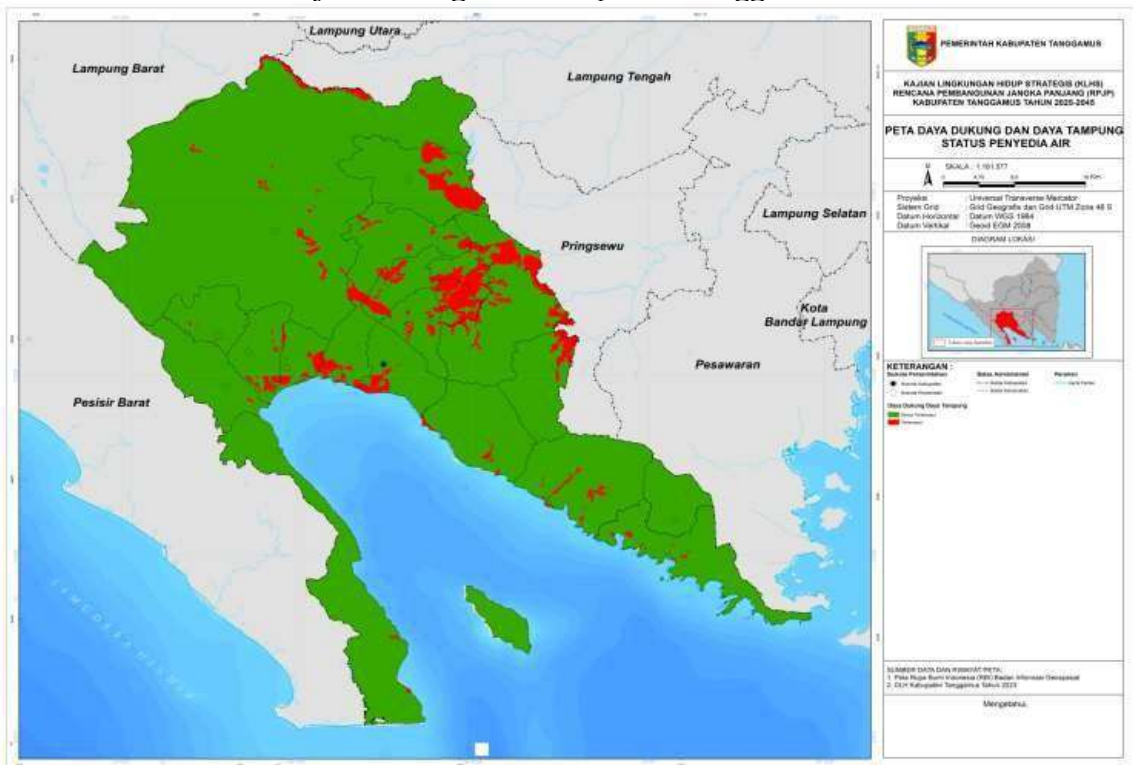
dikarenakan rasio daya dukung air lebih dari 1. Nilai daya dukung air Kabupaten pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2045 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14. Kondisi Daya Dukung Air Kabupaten Tanggamus 2022-2045

Tahun	Ketersediaan Air (M3/Tahun)	Rasio DDA	Kebutuhan Air (M3/Tahun)
2022	2.089.317.248	1,78	1.172.594.944
2025	2.089.317.248	1,74	1.203.251.328
2030	2.089.317.248	1,66	1.256.647.168
2035	2.089.317.248	1,59	1.313.060.992
2040	2.089.317.248	1,52	1.372.663.296
2045	2.089.317.248	1,46	1.435.634.432

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Kabupaten Tanggamus 2025-2045

Gambar 2.15. Peta Daya Dukung Air Kabupaten Tanggamus



Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Tanggamus 2025-2045

3. Daya Dukung Lahan

Status daya dukung lahan diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan lahan (SL) dan kebutuhan lahan (DL). Penentuan daya dukung lahan dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan lahan. Jika ketersediaan lahan lebih dari kebutuhan lahan maka daya dukung lahan dinyatakan surplus ($SL > DL$), Sebaliknya bila ketersediaan lahan kurang dari kebutuhan lahan

maka daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui ($SL < DL$). Ketersediaan lahan diukur dari ketersediaan kawasan budidaya yang ada, sedangkan kebutuhan lahan dipengaruhi banyak faktor seperti kebutuhan lahan untuk permukiman, sarana kesehatan, pelayanan umum, kegiatan ekonomi dan lain-lain.

Berdasarkan hasil proyeksi rasio daya dukung lahan Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 mencapai 95,73 dan pada tahun 2045 mencapai 74,34, kondisi tersebut cenderung menurun tetapi daya dukung lahan tersebut masih sangat baik dalam mendukung pembangunan, baik dari ketersediaan lahan dan rasio nya jauh di atas 1 (satu).

Tabel 2.15. Kondisi Daya Dukung Lahan Kabupaten Tanggamus 2022-2045

Tahun	Rasio Daya Dukung Lahan
2022	95,73
2025	92,63
2030	87,67
2035	82,98
2040	78,54
2045	74,34

Sumber: Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis jasa Ekosistem Tahun 2023

2.1.1.10. Jasa Lingkungan Hidup

Jasa ekosistem adalah proses lingkungan yang menghasilkan sumber daya alam untuk mendukung kehidupan manusia. Mereka terbagi menjadi empat klasifikasi:

- Layanan Penyedia (Provisioning Services) seperti sumber daya genetika, makanan, dan air;
- Layanan Pengaturan (Regulating Services) seperti pengendalian banjir dan dampak perubahan iklim;
- Layanan Kultural (Cultural Services) yang meliputi nilai-nilai estetika dan tradisi; dan
- Layanan Pendukung (Supporting Services) seperti produksi biomasa dan oksigen.

Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) dengan konsep Jasa Lingkungan Hidup mengasumsikan bahwa semakin tinggi jasa lingkungan suatu wilayah, semakin besar kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan menyerap zat atau energi dari lingkungannya.

1. Jasa Lingkungan Hidup Penyedia (*Provisioning Services*)

a. Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan

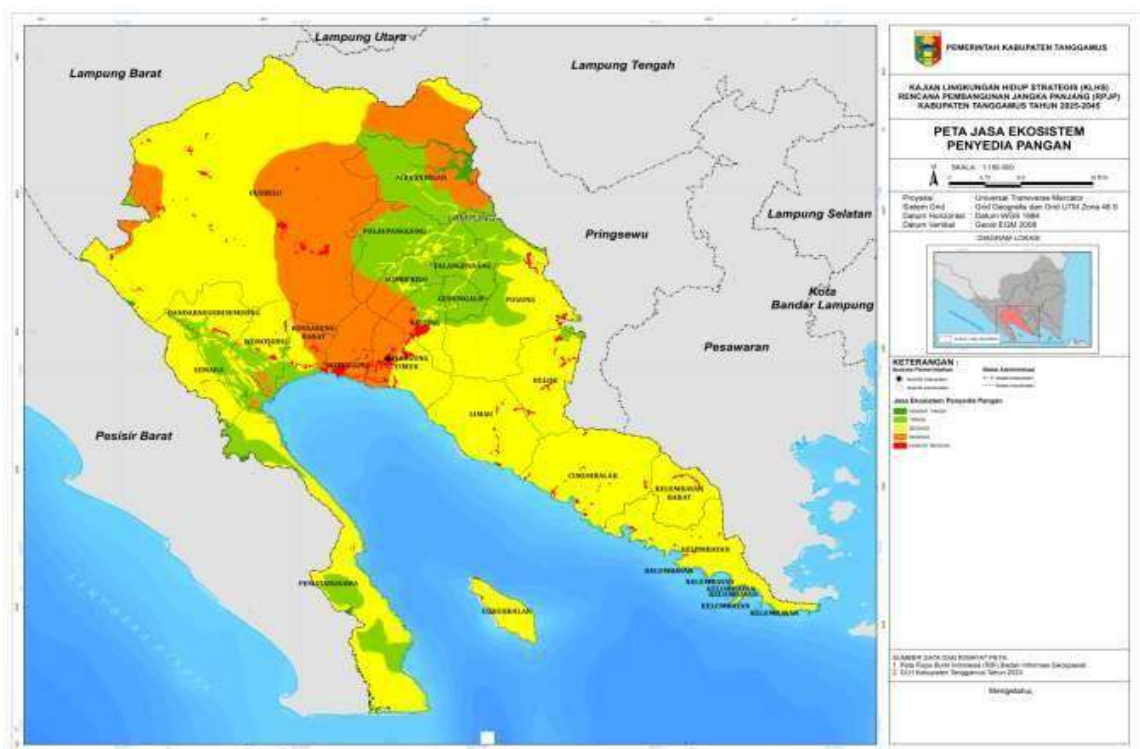
Lahan yang dapat mendukung penyediaan pangan di Kabupaten Tanggamus dapat diklasifikasikan berdasarkan potensi produktivitasnya menjadi lima kategori: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Dari data yang disediakan, lahan dengan potensi sangat tinggi hanya mencakup 1.557,82 Ha atau sekitar 0,54% dari total lahan. Sementara lahan dengan potensi tinggi mencakup area seluas 48.243,63 Ha atau sekitar 16,36%. Lalu, lahan dengan potensi sedang dalam penyediaan pangan mencakup 182.025,59 Ha atau sekitar 61,75% dari total luas lahan yang relevan. Selanjutnya, lahan dengan potensi rendah memiliki luas 58.886,54 Ha atau sekitar 19,98%, dan kategori sangat rendah hanya mencakup 4.064,06 Ha atau sekitar 1,38%.

Tabel 2.16. Jasa Penyediaan Pangan Kabupaten Tanggamus

No	Klasifikasi	Luas (ha)	Persentase
1	Sangat Rendah	12.658,32	4,30%
2	Rendah	23.332,89	7,93%
3	Sedang	16.177,53	5,50%
4	Tinggi	223.125,85	75,82%
5	Sangat Tinggi	18.998,54	6,46%
Total		294.293,13	100%

Sumber: Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis jasa Ekosistem Tahun 2023

Gambar 2.16. Peta Jasa Penyediaan Pangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2023



Sumber: Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosiste Tahun 2023

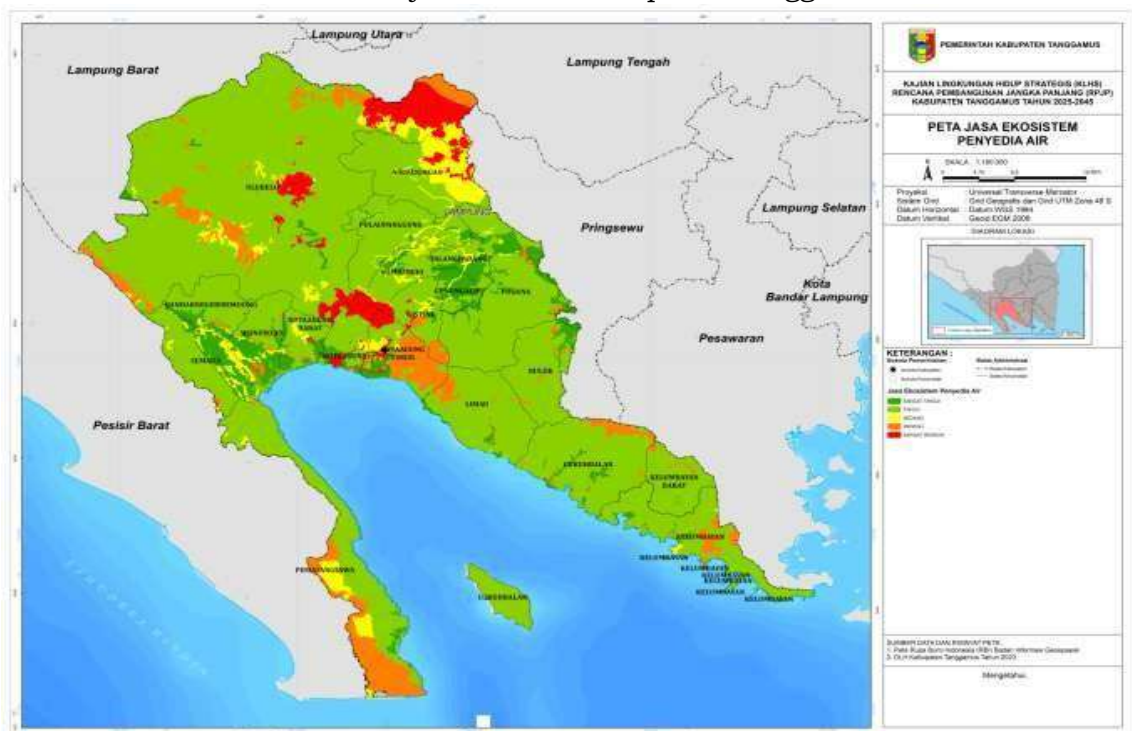
b. Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air

Secara umum, wilayah lahan di Kabupaten Tanggamus yang dapat mendukung penyediaan air bersih dapat dikelompokkan ke dalam kategori potensi yang berbeda: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Lahan dengan potensi sangat tinggi untuk menyediakan air bersih di Kabupaten Tanggamus memiliki luas seluas 1.570,14 hektar atau sekitar 0,53%. Di samping itu, lahan yang memiliki potensi tinggi mencakup area seluas 48.075,94 hektar atau sekitar 16,34% dari total lahan yang relevan. Kemudian, lahan dengan potensi sedang dalam penyediaan air memiliki luas 181.715,20 hektar atau sekitar 61,75%, sedangkan yang memiliki potensi rendah meliputi luas lahan 58.879,61 hektar atau sekitar 20,01%. Terakhir, kategori sangat rendah menunjukkan lahan dengan luas 4.052,24 hektar atau sekitar 1,38% dari total lahan yang relevan. Tabel 2.17. Jasa Penyediaan Air Kabupaten Tanggamus

No	Klasifikasi	Luas (ha)	Persentase
1	Sangat Rendah	4.052,24	1,38%
2	Rendah	58.879,61	20,01%
3	Sedang	181.715,20	61,75%
4	Tinggi	48.075,94	16,34%
5	Sangat Tinggi	1.570,14	0,53%
Total		294.293,13	100,00%

Sumber: Hasil Analisis Tim Pembuat KLHS RPJPD Kabupaten Tanggamus 2025-2045

Gambar 2.17. Peta Jasa Penyediaan Air Kabupaten Tanggamus Tahun 2023



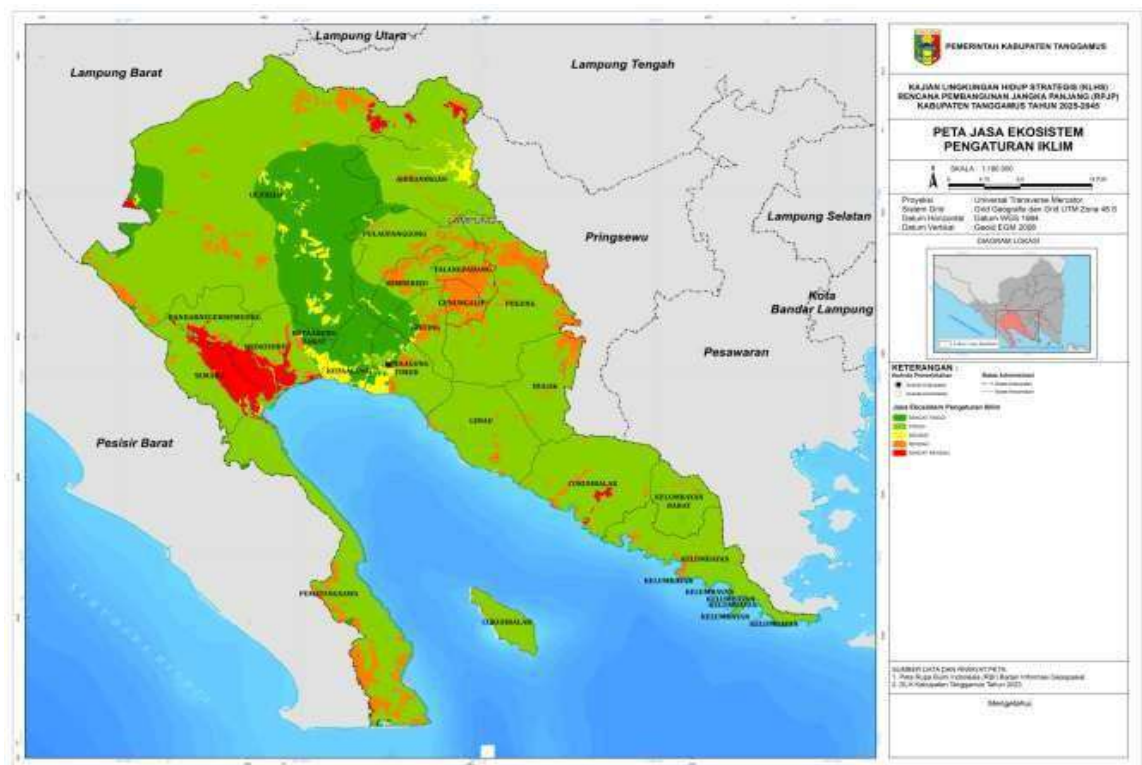
Sumber: Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Tahun 2023

2. Jasa Lingkungan Hidup Pengaturan (Regulating Services)

a. Jasa Pengaturan Iklim

Jasa pengaturan iklim merupakan peran lingkungan yang sangat vital dalam mengendalikan iklim mikro suatu area. Kerusakan lingkungan di suatu wilayah dapat menyebabkan peningkatan suhu serta kondisi udara yang kurang ideal. Di Kabupaten Tanggamus, terdapat lahan dengan potensi sangat tinggi untuk jasa pengaturan iklim seluas 42.745,14 hektar atau sekitar 14,52%. Selain itu, terdapat luas lahan yang memiliki potensi tinggi mencapai 213.519,26 hektar atau sekitar 72,55%. Sementara lahan dengan potensi sedang dalam jasa pengaturan iklim memiliki luas sekitar 6.289,36 hektar atau sekitar 2,14%. Di sisi lain, lahan yang memiliki potensi sangat rendah memiliki luas sekitar 22.746,04 hektar atau sekitar 7,73%, dan kategori sangat rendah mencakup area sebesar 8.993,32 hektar atau sekitar 3,06%, seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Gambar 2.18. Peta Jasa Pengaturan Iklim Kabupaten Tanggamus Tahun 2023



Sumber: Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Tahun 2023

Tabel 2.18. Jasa Pengaturan Iklim Kabupaten Tanggamus

No	Klasifikasi	Luas (ha)	Persentase
1	Sangat Rendah	8.993,32	3,06%
2	Rendah	22.746,04	7,73%
3	Sedang	6.289,36	2,14%
4	Tinggi	213.519,26	72,55%
5	Sangat Tinggi	42.745,14	14,52%
Total		294.293,13	100,00%

Sumber: Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis jasa Ekosistem Tahun 2023

b. Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

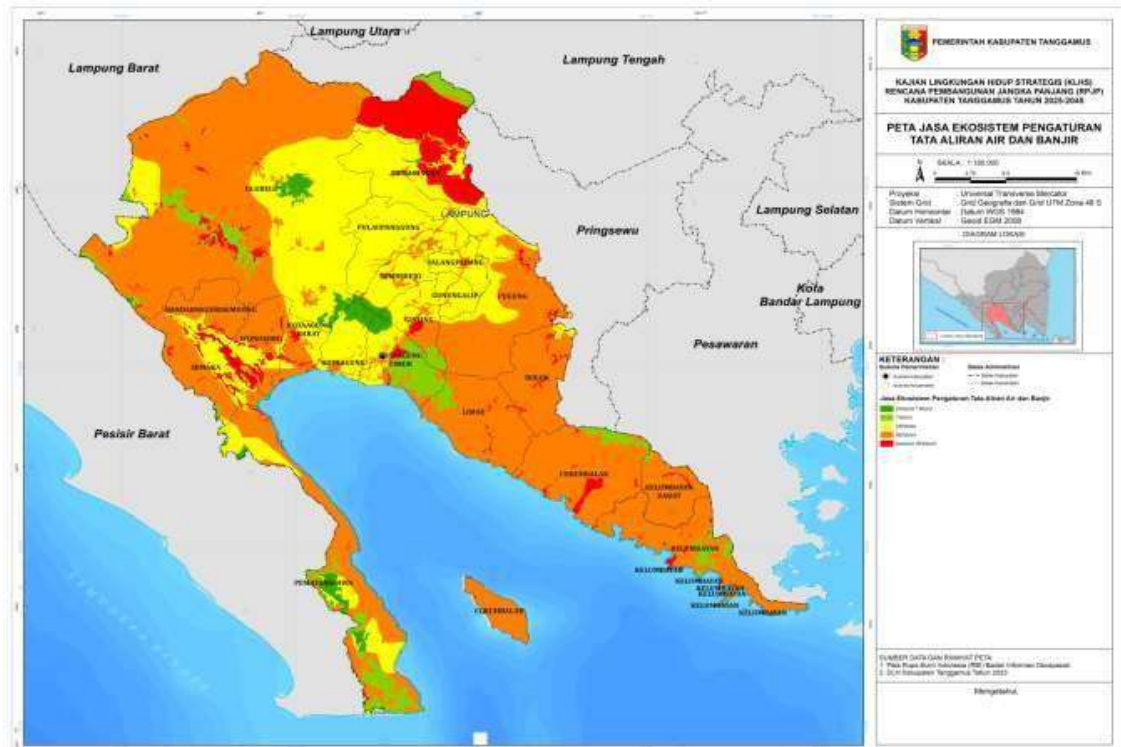
Jasa pengaturan tata aliran air dan banjir di Kabupaten Tanggamus secara keseluruhan, dibagi menjadi beberapa kategori yaitu sangat tinggi dengan luasan 5.767,46 Ha atau 1,96%, kategori tinggi memiliki luas 15.577,05 Ha atau 5,29%, lahan yang berpotensi kategori sedang seluas 87.023,34 Ha atau 29,57%, sedangkan yang memiliki kategori rendah sebesar 167.122,15 Ha atau 56,79%, dan sangat rendah sebesar 18.803,13 Ha atau 6,39%. Secara umum, lahan di Kabupaten Tanggamus memiliki kemampuan yang sedang dalam menghasilkan jasa pengaturan tata aliran air dan banjir yaitu sebesar 29,57% dari keseluruhan luas lahan di Kabupaten Tanggamus.

Tabel 2.19 Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Kabupaten Tanggamus

No	Klasifikasi	Luas (ha)	Persentase
1	Sangat Rendah	18.803,13	6,39%
2	Rendah	167.122,15	56,79%
3	Sedang	87.023,34	29,57%
4	Tinggi	15.577,05	5,29%
5	Sangat Tinggi	5.767,46	1,96%
Total		294.293,13	100,00%

Sumber: Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis jasa Ekosistem Tahun 2023

Gambar 2.19. Peta Jasa Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir Kabupaten Tanggamus Tahun 2023



Sumber: Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis jasa Ekosistem Tahun 2023

c. Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana

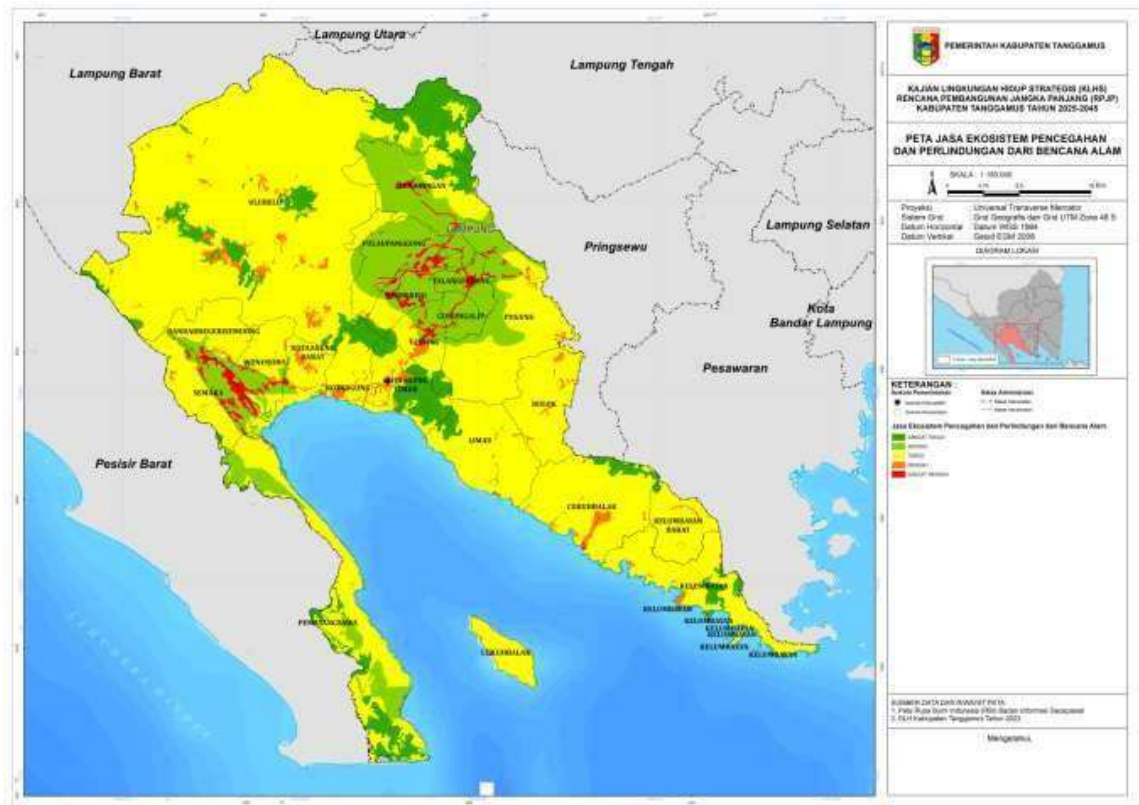
Kabupaten Tanggamus memiliki lahan yang mampu menyediakan jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana yaitu kategori sangat tinggi sebesar 26.461,15 Ha atau 8,99%, lahan yang berpotensi kategori tinggi dalam menyediakan jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan dari bencana memiliki luasan 210.615,21 Ha atau 71,57%, sedangkan lahan yang memiliki kategori sedang seluas 45.144,25 Ha atau 15,34%, sedangkan lahan yang memiliki potensi rendah seluas 7.163,21 Ha atau 2,43%, dan sangat rendah sebesar 4.909,31 Ha atau 1,67%.

Tabel 2.20. Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kabupaten Tanggamus

No	Klasifikasi	Luas (ha)	Persentase
1	Sangat Rendah	4.909,31	1,67%
2	Rendah	7.163,21	2,43%
3	Sedang	45.144,25	15,34%
4	Tinggi	210.615,21	71,57%
5	Sangat Tinggi	26.461,15	8,99%
Total		294.293,13	100,00%

Sumber: Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis jasa Ekosistem Tahun 2023

Gambar 2.20. Peta Jasa Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana Kabupaten Tanggamus Tahun 2023



Sumber: Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis jasa Ekosistem Tahun 2023

3. Jasa Lingkungan Hidup Pendukung (*Supporting Services*)

Dengan pertambahan penduduk, permintaan akan sumber daya alam hayati meningkat, mengakibatkan kemungkinan penurunan sumber daya alam hayati tanpa pengelolaan yang berkelanjutan. Nilai keanekaragaman hayati mencakup tingkat keragaman dan kelimpahan, sehingga dapat menjadi acuan dalam pengelolaan kawasan untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati yang ada dalam wilayah kelola suatu unit pengelolaan atau unit usaha. Ekosistem telah memberikan jasa keanekaragaman hayati (*biodiversity*) di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk di dalam spesies, antara spesies dan keanekaragamannya.

Nilai keanekaragaman hayati mencakup tingkat keragaman dan kelimpahannya, sehingga dapat menjadi acuan dalam pengelolaan kawasan untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati yang ada di dalam wilayah kelola suatu unit pengelolaan atau unit usaha. Secara keseluruhan, lahan di Kabupaten Tanggamus dalam jasa pendukung biodiversitas (*perlindungan plasma nutfah*) yang termasuk kategori sangat tinggi sebesar 19.526,75 Ha atau 6,64%, tinggi sebesar 196.240,18 Ha atau 66,68%, sedang sebesar 55.323,89 Ha atau 18,80%,

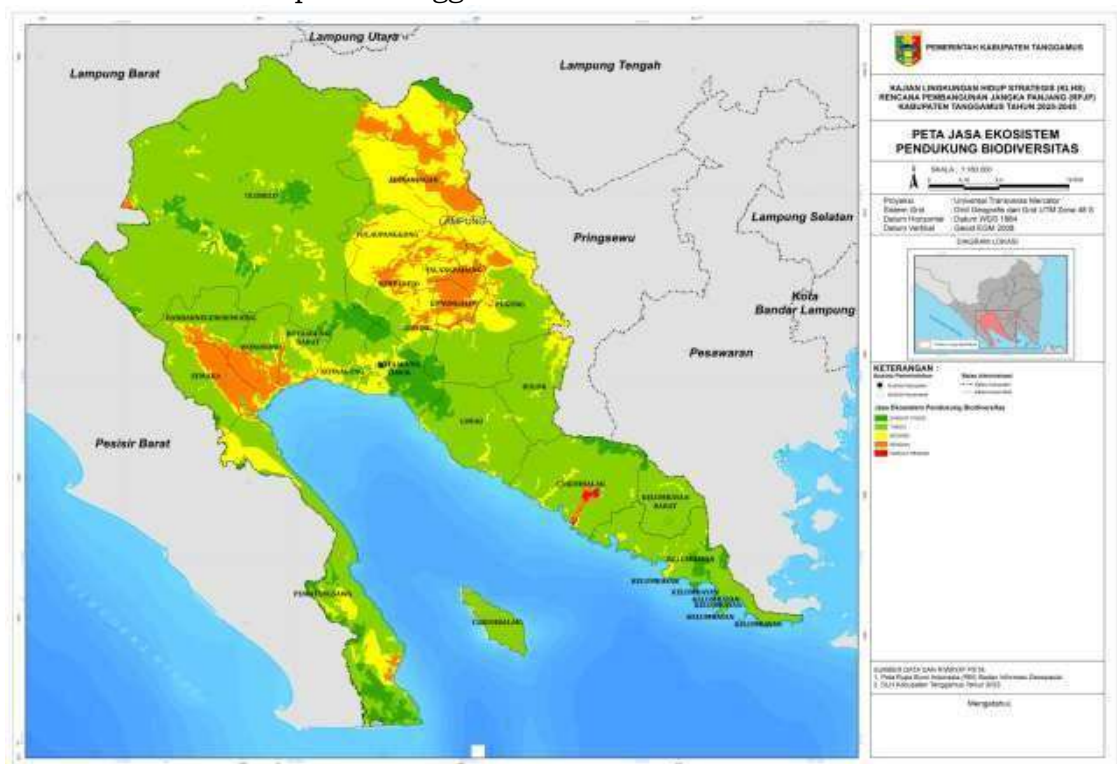
rendah sebesar 22.894,25 Ha atau 7,78%, dan sangat rendah sebesar 308,06 Ha atau 0,10%, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.21. Jasa Pendukung Biodiversitas Kabupaten Tanggamus

No	Klasifikasi	Luas (ha)	Persentase
1	Sangat Rendah	308,06	0,10%
2	Rendah	22.894,25	7,78%
3	Sedang	55.323,89	18,80%
4	Tinggi	196.240,18	66,68%
5	Sangat Tinggi	19.526,75	6,64%
Total		294.293,13	100,00%

Sumber: Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis jasa Ekosistem Tahun 2023

Gambar 2.21. Peta Jasa Pendukung Biodiversitas (Perlindungan Plasma Nutfah) Kabupaten Tanggamus Tahun 2023



Sumber: Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis jasa Ekosistem Tahun 2023

2.1.1.11. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber daya alam adalah kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan manusia, dibagi menjadi dua jenis: yang bisa diperbaharui (seperti hutan dan air) dan yang tidak (seperti tambang dan mineral). Mereka juga dibagi menjadi biotik (hidup) dan abiotik (tidak hidup), tergantung pada kehidupannya di darat

(terrestrial) atau di perairan (akuatik). Indonesia memiliki beragam sumber daya alam, seperti hutan, tanah, air, tambang, hutan bakau, hutan mangrove, dan terumbu karang. Namun, untuk memanfaatkannya secara baik, kita perlu menggunakan teknologi dan cara produksi yang efisien. Dalam mengelola pertumbuhan wilayah, penting untuk memperhatikan ketersediaan air yang erat kaitannya dengan kebutuhan manusia. Untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut, perlu strategi dan rencana pemanfaatan serta pencadangan sumber daya alam yang ada. Dengan demikian, kita dapat menjaga keseimbangan kebutuhan air di depan.

Tabel 2.22. Rencana Pemanfaatan atau Pencadangan Sumber Daya Alam

No	Indikator Sumber Daya Alam	Rencana Pemanfaatan Dan Pencadangan	Lokasi Kegiatan	Perangkat Daerah Yang Bertanggung Jawab
1	Pengelolaan Hutan Produksi	Pengembangan hutan produksi terbatas melalui kegiatan Hutan Tanaman Rakyat	Kecamatan Semaka Kecamatan Pematang Sawa	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Peternakan dan Perkebunan
		Pengembangan hutan non produksi terbatas melalui kegiatan Hutan Tanaman Rakyat	Kecamatan Bandar Negeri Semuong	
		Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (seperti komoditi rotan, tanaman obat, dan damar mata kucing)		
		Pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat- obatan pada lahan hutan rakyat		
2	Pengelolaan Mineral dan Energi	Pengetatan terhadap pemberian ijin pemanfaatan sumber daya alam penguatan pengawasan dan penegakan hukum secara adil dan konsisten	Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kecamatan Air Nangingan Kecamatan Pematang Sawa	Dinas Lingkungan Hidup
		Penerapan teknologi ramah lingkungan dan bahan bakar bersih pada pemanfaatan SDA dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung	Kecamatan Semaka	
		Penerapan Reward and punishment pada perusahaan yang melaksanakan pengelolaan SDA		
		Sinkronisasi pola ruang RTRW dengan Zonasi RPPLH		
3	Pengelolaan Lahan Pertanian	Perluasan lahan padi sawah beririgasi teknis pada areal- areal potensial	Kecamatan Pugung Kecamatan Talang Padang	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura
		Peningkatan produktivitas lahan padi sawah melalui intensifikasi dan pengembangan padi organik	Kecamatan Kotaagung Timur Kecamatan Kotaagung Barat	
		Pengembangan dan pembangunan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pertanian	Kecamatan Wonosobo Kecamatan Semaka	
		Penguatan kelembagaan petani		

No	Indikator Sumber Daya Alam	Rencana Pemanfaatan Dan Pencadangan	Lokasi Kegiatan	Perangkat Daerah Yang Bertanggung Jawab
		terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk irigasi, pengadaan sarana produksi, panen dan pasca panen Penetapan tata batas perkebunan yang potensial dan tidak berada pada kawasan lindung dan atau TNBBS		
		Pengembangan kawasan tanaman tahunan/perkebunan yaitu pengembangan komoditi perkebunan antara lain: kopi, kelapa dalam, kakao, dan lada. Peningkatan produktivitas produksi perkebunan melalui intensifikasi lahan dan peningkatan keterampilan petani kebun Peremajaan dan rehabilitasi untuk tanaman yang sudah tua pada masing-masing kecamatan/kawasan yang diprogramkan Pengembangan kawasan pertanian melalui pendekatan agropolitan pada kawasan-kawasan potensial		
4	Pengelolaan Kegiatan Peternakan	Pengembangan kawasan agribisnis peternakan Pengembangan kawasan integrasi peternakan - tanaman pangan dan hortikultura (organic farm) Pengembangan kawasan integrasi peternakan-perkebunan (kakao, lada, kopi) Pengembangan kawasan integrasi peternakan-perikanan	Kecamatan Pugung Kecamatan Talang Padang Kecamatan Kotaagung Timur Kecamatan Kotaagung Barat Kecamatan Wonosobo Kecamatan Semaka	Dinas Peternakan dan Perkebunan
5	Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Pesisir	Pengembangan perikanan tangkap laut dalam Pengembangan sentra budidaya perikanan laut (udang, kerapu, dan rumput laut) Pengembangan sentra budidaya perikanan laut (udang, kerapu, dan rumput laut) Pengembangan sentra budidaya perikanan air tawar Pengembangan kegiatan minapolitan, terutama di Kecamatan Wonosobo	Kecamatan Wonosobo Kecamatan Kotaagung	Dinas Perikanan
6	Pengelolaan Area Pertambangan	Inventarisasi daerah yang berpotensi untuk usaha pertambangan di seluruh wilayah Kabupaten Tanggamus	Kecamatan Cukuh Balak Kecamatan Pugung	Dinas Lingkungan Hidup dan Bapperida

No	Indikator Sumber Daya Alam	Rencana Pemanfaatan Dan Pencadangan	Lokasi Kegiatan	Perangkat Daerah Yang Bertanggung Jawab
		Pengembangan pertambangan tertutup (open pit) pada kawasan hutan lindung		
		Penetapan aturan zonasi penambangan rakyat yang diijinkan agar tidak menimbulkan dampak lingkungan		
		Menyusun profil investasi, prosedur dan mekanisme perizinan serta rencana bisnis untuk setiap wilayah pertambangan.		
		Rehabilitasi lahan pasca tambang pelarangan dan penghentian kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan.		
7	Pengelolaan Kawasan Industri Manufaktur dan KIM	Pengembangan industri pengolahan hasil laut	Kecamatan Wonosobo	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
		Pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan, terutama kopi, kelapa dalam, damar mata kucing	Kecamatan Kotaagung Timur, Kecamatan Talang Padang, Kecamatan Kotaagung Barat, Kecamatan Semaka	
8	Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung	Pengembangan Kawasan Ekowisata di TNBBS	Kecamatan Pematang Sawa, Kecamatan Semaka	Dinas Lingkungan Hidup
		Penguatan dan pengembangan objek daerah tujuan wisata budaya, alam dan buatan lainnya		
		Pengelolaan TNBBS diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan, membangun dan memberdayakan masyarakat sekitar Taman Nasional.		

Sumber: RPPLH Kabupaten Tanggamus, 2019

2.1.1.12. Kerentanan dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim suatu wilayah bisa dilihat dari berbagai faktor. Kerentanan dapat tercermin dari tingkat paparan terhadap ancaman perubahan iklim serta sensitivitas terhadap dampak-dampaknya. Hal ini melibatkan infrastruktur, ekonomi, lingkungan alam, kesehatan masyarakat, dan sosial-budaya. Sementara kapasitas adaptasi mengacu pada kemampuan suatu wilayah dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk kebijakan yang diterapkan, sumber daya yang tersedia, teknologi yang digunakan, serta kapasitas institusi dan masyarakat dalam merespons perubahan tersebut.

Indeks Kemampuan Adaptif (IKA) dan Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) merupakan metrik yang digunakan untuk mengevaluasi dampak dan kemampuan suatu wilayah atau masyarakat dalam menghadapi perubahan

iklim. Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) mengukur sejauh mana suatu wilayah atau komunitas terpapar terhadap ancaman perubahan iklim dan seberapa rentan mereka terhadap dampak-dampak tersebut. Ini melibatkan analisis terhadap faktor-faktor seperti geografis, sosial-ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi tingkat eksposur dan kerentanan terhadap perubahan iklim. Sementara itu, Indeks Kemampuan Adaptif (IKA) menilai kapasitas suatu wilayah atau komunitas dalam menghadapi perubahan iklim. IKA melibatkan evaluasi terhadap faktor-faktor seperti sumber daya manusia, kelembagaan, teknologi, dan infrastruktur yang memungkinkan mereka untuk mengatasi dan beradaptasi dengan dampak-dampak perubahan iklim.

Tabel 2.23. Indeks Kemampuan Adaptif (IKA), Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) dan Tingkat Kerentanan Perubahan Iklim Kabupaten Tanggamus Tahun 2018

Kecamatan	IKA	IKS	Kerentanan*)	Risiko Banjir	Risiko Kering
Wonosobo	0,50576	0,55	3	3	3
Semaka	0,53862	0,533	3	3	3
Bandar Negeri semong	0,4633	0,5585	3	3	3
Kotaagung	0,38276	0,567	3	3	3
Pematang Sawa	0,29044	0,608	5	5	5
Kotaagung Barat	0,48156	0,636	3	3	3
Kotaagung Timur	0,5011	0,645	3	3	3
Pulau Panggung	0,56612	0,574	3	3	3
Ulu Belu	0,43382	0,736	5	5	5
Air Naningan	0,53606	0,494	3	3	3
Talang Padang	0,5194	0,621	3	3	3
Sumberejo	0,57576	0,567	3	3	3
Gisting	0,51044	0,5845	3	3	3
Gunung alip	0,4485	0,6235	3	3	3
Pugung	0,47682	0,5845	3	3	3
Bulok	0,4566	0,547	3	3	3
Cukuh Balak	0,51896	0,5595	3	3	3
Kelumbayan	0,45424	0,708	5	5	5
Limau	0,4935	0,631	3	3	3
Kelumbayan Barat	0,49748	0,4835	3	3	3

Sumber: Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK), 2018

*) Keterangan:

1 = Tidak rentan 2 = Agak rentan 3 = Cukup 4 = Rentan 5 = Sangat Rentan

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa wilayah Kecamatan dengan nilai Indeks Kemampuan Adaptif (IKA) tertinggi adalah Sumberejo (0,57576) sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Pematang Sawa (0,29044). Sementara untuk Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) yang tertinggi adalah Kecamatan Ulu belu (0,736) diikuti Kelumbayan (0,708). Ketika nilai Indeks Keterpaparan dan

Sensitivitas (IKS) tinggi dan nilai Indeks Kemampuan Adaptif (IKA) rendah di suatu wilayah, hal ini menjadi indikator bahwa wilayah tersebut rentan atau lebih rentan terhadap risiko perubahan iklim. Terdapat kecamatan yang masuk dalam kelas resiko sangat rentan sebanyak 3 kecamatan yaitu Kecamatan Pematang Sawa di Pekon Teluk Brak, Kecamatan Ulu Belu di Pekon Tanjung Baru, Sinar Banten dan Petay Kayu, dan Kecamatan Kalumbayan di Pekon Unggak. Sedangkan di beberapa kecamatan lainnya memiliki rata-rata tingkat kerentanan dengan kelas resiko cukup rentan.

Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi jumlah polusi yang dilepaskan ke udara, seperti yang tertulis dalam dokumen NDC (Nationally Determined Contribution). Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari perjanjian Paris Agreement yang diresmikan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Targetnya adalah mengurangi emisi sebesar 29% dari tingkat perkiraan tahun 2030 dengan usaha dari dalam negeri, dan bahkan sampai 41% dengan bantuan dari luar negeri. Salah satu cara Indonesia mengurangi emisi sendiri adalah melalui Program Kampung Iklim (Proklam). Proklam ini adalah program nasional yang diurus oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuannya adalah untuk melibatkan masyarakat dan pihak lain agar lebih siap menghadapi dampak perubahan iklim dan mengurangi gas buangnya.

Tabel 2.24. Pekon Yang Terdaftar Dalam SRN dan Apresiasi yang Dicapai

Tahun	Pekon/Desa	Nilai SRN	Apresiasi
2018	Gisting Bawah	63,02%	Proklam Madya
2019	Gisting Bawah	89,27%	Proklam Utama
	Gubernur Lampung		Pembina Proklam
	Bupati Tanggamus		Pembina Proklam
2020	Ngarip	84,96%	Sertifikat Proklam Utama
	Sidokaton	65,55%	Proklam Madya
	Simpang Kanan	60,83%	Proklam Madya
	Wonoharjo	77,23%	Proklam Madya
	Tegal Binangun	77,88%	Proklam Madya
	Gubernur Lampung		Pembina Proklam
	Bupati Tanggamus		Pembina Proklam
2021	Campang	83,24%	Sertifikat Proklam Utama
2022	Tegal Binangun		Sertifikat Proklam Utama
2023	Gisting Atas		Sertifikat Proklam Utama

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus, 2021

Proklam diberi kategori berdasarkan penilaian akhirnya melalui Sistem Registrasi Nasional (SRN) dengan pembagian sebagai berikut:

- ✓ Proklam Pratama (50%)
- ✓ Proklam Madya (51%- 80%)
- ✓ Proklam Utama (81%)

Proklamasi Lestari (sudah memiliki Proklamasi Utama dan memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.84/MenLHK-Set/Kum.I/II/2016 tentang Program Kampung Iklim, Pasal 12 (2)).

Dalam mendukung upaya pemerintah tersebut, Kabupaten Tanggamus telah berperan aktif untuk menumbuhkan terbentuknya Kampung Iklim di Kabupaten Tanggamus dengan menerbitkan Surat Edaran Bupati Tanggamus Nomor: 061.A/6347/31/19 tentang Pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kabupaten Tanggamus dan mendaftarkan pekon-pekon yang telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ke dalam SRN (Sistem Registrasi Nasional).

2.1.1.13. Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati memegang peran krusial dalam kelangsungan hidup alam. Dengan memberikan beragam manfaat langsung maupun tak langsung bagi manusia, keberadaannya melampaui sekadar lanskap alam. Ini menjadi fondasi bagi berbagai layanan ekosistem seperti pemeliharaan air bersih, perlindungan dan pembentukan tanah, detoksifikasi polutan, serta menjaga stabilitas iklim, baik dalam skala besar maupun kecil.

Tak hanya itu, sumber daya hayati juga menjadi pondasi utama ketersediaan makanan dan obat-obatan. Di sisi sosial dan budaya, mereka berkontribusi pada pendidikan dan sektor pariwisata. Indonesia, terkategori sebagai negara dengan biodiversitas tinggi oleh komunitas internasional, memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Dengan iklim tropis dan luas hutan mencapai 124 juta hektar pada tahun 2017 menegaskan keberadaan keanekaragaman hayati yang luar biasa di Indonesia.

Namun, masalah seperti pengalihan fungsi hutan dan penurunan luas hutan setiap tahunnya menjadi isu krusial yang harus diatasi untuk menjaga keanekaragaman hayati yang ada di hutan-hutan tersebut. Selain masalah pengalihan fungsi hutan dan penurunan luas hutan yang menjadi perhatian utama di Kabupaten Tanggamus, keberlanjutan lingkungan juga harus memperhitungkan keanekaragaman hayati di perairan. Keanekaragaman hayati laut, seperti di wilayah pesisir Tanggamus, memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan menyediakan sumber daya yang penting bagi kehidupan manusia.

Kerusakan flora dan fauna di perairan juga menjadi isu krusial yang harus ditangani dengan serius. Perubahan iklim, polusi, overfishing, dan praktik-praktik eksploitasi yang tidak berkelanjutan telah menyebabkan penurunan

populasi spesies laut dan kerusakan ekosistem laut yang signifikan. Penurunan populasi ikan yang signifikan, misalnya, dapat mengganggu rantai makanan laut dan berdampak pada mata pencaharian masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil laut.

Luasnya hutan di Kabupaten Tanggamus memberikan lingkungan yang cocok bagi berbagai flora dan fauna. Di sana, hidup banyak jenis flora dan fauna seperti:

1. Flora

Secara keseluruhan, ada minimal 514 jenis pohon yang teridentifikasi di Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Di samping itu, terdapat sekitar 98 jenis tumbuhan rendah yang berasal dari beragam famili seperti Dipterocarpaceae, Lauraceae, Myrtaceae, Fagaceae, Annonaceae, Rosaceae, Zingiberaceae, dan lainnya. Selain itu, ada 126 jenis anggrek, 26 jenis rotan, 24 jenis liana, dan 15 jenis bambu yang hidup di kawasan ini.

Data dari Forum Ilmiah Mahasiswa Pertanian (FIMP) menunjukkan bahwa terdapat 124 jenis tanaman obat yang tersebar di TNBBS. TNBBS juga menjadi rumah bagi jenis tumbuhan berbunga yang unik, langka, dan masih dalam proses evolusi, seperti bunga Rafflesia (*Rafflesia* sp) serta dua jenis bunga bangkai, yaitu *Amorphophallus titanum* dan *Amorphophallus deculsivae*. *Amorphophallus titanum*, atau bunga bangkai jangkung, bisa mencapai ketinggian 2 meter. Salah satu ciri khas lainnya dari taman nasional ini adalah keberadaan anggrek raksasa atau tebu (*Grammatophyllum speciosum*). Dari hasil inventarisasi, ditemukan sebanyak 157 jenis tumbuhan di TNBBS yang memiliki potensi sebagai tanaman obat, seperti pasak bumi (*Eurycoma longifolia*) dan pulai (*Alstonia scholaris*). Taman Nasional ini juga menjadi habitat bagi jenis tumbuhan endemik yang dilindungi dan langka, seperti bunga Rafflesia (*Rafflesia* sp) dan kedua jenis bunga bangkai *Amorphophallus titanum* dan *A. deculsivae*.

Berbagai jenis ekosistem di TNBBS memiliki vegetasi yang khas. Di lahan basah dan pesisir, biasanya tumbuh *Terminalia cattapa*, *Hibiscus* sp, *Barringtonia asiatica*, *Callophyllum inophyllum*, *Casuarina* sp, *Pandanus* sp, dan *Ficus septica*. Hutan hujan dataran rendah didominasi oleh *Shorea* sp, *Dipterocarpus* sp, dan *Hopea* sp, dengan tumbuhan bawah seperti *Urophyllum* sp, *Phrynium* sp, *Korthalsia* sp, dan *Calamus* sp. Sedangkan, hutan hujan bukit sering ditempati oleh famili Dipterocarpaceae, Lauraceae, Myrtaceae, dan Annonaceae, dengan tumbuhan bawah seperti *Neolitsea cassianeforia*, *Psychotria rhinocerotis*, *Areca* sp, dan *Globba pendella*.

2. Fauna

Beragam fauna khas Pulau Sumatera dapat ditemukan di kawasan TNBBS, kecuali Orangutan Sumatera. Dalam penelitian, telah tercatat sebanyak 122 jenis mamalia termasuk 7 jenis primata, 450 jenis burung termasuk 9 jenis burung rangkong, 123 jenis herpetofauna (reptil dan amfibi), 221 jenis serangga, 7 jenis moluska, 2 jenis krustasea, dan 53 jenis ikan yang hidup di sana.

Bukit Barisan Selatan menjadi rumah bagi berbagai satwa seperti Badak Sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*), Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Tapir (*Tapirus indicus*), Rusa (*Cervus sp*), Kancil (*Tragulus javanicus*), Kerbau liar (*Bubalus bubalis*), Kijang (*Muntiacus muntjak*), Kambing hutan (*Capricorn sumatrensis*), Ajak (*Cuon alpinus*), Ungko (*Hylobates agilis*), Ular sanca (*Phyton reticulatus*), dan lainnya. Kawasan TNBBS juga menjadi habitat yang baik bagi kera dan monyet seperti Siamang (*Symphalangus syndactylus*), Owa (*Hylobates agilis*), Kera (*Macaca fascicularis*), Beruk (*Macaca nemestrina*), Lutung (*Presbytis cristata*), dan *Presbytis melalophos*. Lebih jauh ke dalam, terdapat Beruang Madu (*Helarctos malayanus*). Rangkong (*Buceros sp*) dan berbagai jenis burung lainnya juga menjadi bagian tak terpisahkan dari kekayaan fauna di sana. Di sepanjang pantai selatan dan barat, beberapa jenis Penyu seperti *Dermochelys imbricate* dan Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*) dapat dijumpai.

Ada 6 jenis mamalia yang terancam menurut Red Data Book IUCN di TNBBS, termasuk Gajah Sumatra (*Elephas maximus sumatranus*) dengan populasi diperkirakan sekitar 498 ekor (Hedges, et al., 2005), Badak Sumatra (*Dicerorhinus sumatrensis*) diperkirakan antara 60-80 ekor (RPU), Harimau Sumatra (*Panthera tigris sumatrensis*) diperkirakan sekitar 40-43 ekor (O'Brien dkk, 2003), Tapir (*Tapirus indicus*), Beruang Madu (*Helarctos malayanus*), dan Ajag (*Cuon alpinus*).

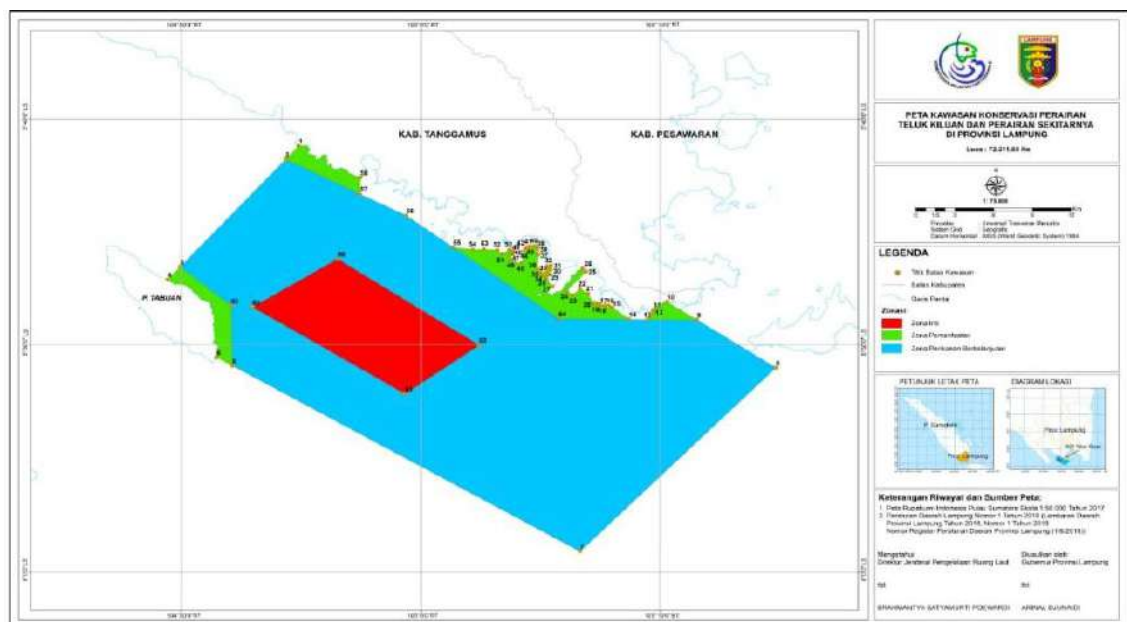
Meskipun ada kemajuan dalam pengelolaan hutan dan konservasi tanah serta air, persoalan lahan kritis di Indonesia masih belum terselesaikan. Lahan kritis merujuk pada lahan di dalam maupun di luar kawasan hutan yang mengalami kerusakan sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sesuai dengan yang diharapkan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air mendefinisikan lahan kritis sebagai lahan yang fungsinya tidak optimal baik sebagai media produksi tanaman yang dibudidayakan maupun yang tidak.

3. Kawasan Konservasi Teluk Kiluan

Dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan potensi perikanan serta menjaga habitat penting seperti terumbu karang, serta spesies yang vital seperti lumba-lumba, paus, dan penyu, diperlukan upaya konservasi kawasan perairan Teluk Kiluan dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Lampung. Teluk Kiluan dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Lampung memiliki keunikan fenomena alam dan budaya lokal yang alami, menciptakan daya tarik tinggi dan berpeluang besar untuk mendukung pengembangan pariwisata perairan yang berkelanjutan.

Melalui konservasi kawasan perairan ini, kita dapat menjaga keberagaman hayati laut yang menjadi habitat bagi spesies-spesies penting. Terumbu karang yang sehat dan lestari di Teluk Kiluan mendukung ekosistem laut yang kaya dan beragam. Selain itu, kehadiran lumba-lumba, paus, dan penyu di perairan tersebut menambah nilai ekologis dan wisata yang signifikan.

Gambar 2.23. Peta Kawasan Konservasi Perairan Teluk Kiluan Dan Sekitarnya



Sumber : Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/KEPMEN-KP/2019 tentang Kawasan Konservasi Perairan Teluk Kiluan Dan Perairan Sekitarnya Di Provinsi Lampung

Dengan mempertahankan keaslian alam dan budaya lokal, kawasan Teluk Kiluan dan Perairan Sekitarnya dapat menjadi destinasi wisata yang menarik bagi pengunjung yang tertarik pada keindahan alam dan keanekaragaman hayati laut. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan di kawasan ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan budaya yang berharga. Oleh karena itu, upaya konservasi dan pengembangan wisata perairan yang

berkelanjutan sangat penting untuk memastikan keberlangsungan Teluk Kiluan dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Lampung bagi generasi mendatang.

Oleh karena itu telah dikeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/KEPMEN-KP/2019 Tentang Kawasan Konservasi Perairan Teluk Kiluan dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Lampung. Kawasan ini memiliki luas keseluruhan sebesar 72.211,68 hektare. Kawasan ini terbagi menjadi tiga zona, yaitu: Zona Inti merupakan area yang memiliki perlindungan paling ketat dan memiliki luas sebesar 8.824,22 hektare. Sementara itu, Zona Pemanfaatan digunakan untuk kegiatan wisata dengan luas sebesar 4.771,76 hektare. Zona Perikanan Berkelanjutan adalah area yang diperuntukkan bagi kegiatan perikanan yang berkelanjutan dan memiliki luas terluas, yaitu 58.615,70 hektare.

2.1.1.14. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH atau Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah indikator yang digunakan untuk menggambarkan kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH adalah nilai komposit yang berasal dari beberapa indeks kualitas, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan khusus untuk provinsi juga termasuk Indeks Kualitas Air Laut. Pada tahun 2023, nilai IKLH untuk Kabupaten Tanggamus adalah 64,75. Nilai ini masih berada di bawah target yang ditetapkan sebesar 65,56, namun kondisinya meningkat dibanding dengan dua tahun sebelumnya.

Tabel 2.25. Target dan Capaian IKLH beserta komponen pembentuknya di Kabupaten Tanggamus 2021-2023

		2021	Kategori	2022	Kategori	2023	Kategori	2024	Kategori
IKA	TARGET	59.27	sedang	59.37	sedang	59.47	sedang	59.57	sedang
	CAPAIAN	57.92	sedang	51.44	sedang	53.75	sedang	-	-
IKU	TARGET	84.11	baik	84.21	baik	84.31	baik	84.41	baik
	CAPAIAN	84.22	baik	86.78	baik	86.97	-	-	-
IKL	TARGET	36.17	kurang	38.77	kurang	41.37	kurang	43.96	kurang
	CAPAIAN	34.42	kurang	34.42	kurang	42.57	-	-	-
IKLH	TARGET	64.27	sedang	64.92	sedang	65.56	sedang	66.21	sedang
	CAPAIAN	63.42	sedang	62.06	sedang	64.75	-	-	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus, 2024

1. Indeks Kualitas Air (IKA)

Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain: (a) penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air; (b) ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; (c) penggunaan air; dan (d) serta tingkat erosi dan sedimentasi. Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2021 yaitu 57,92, menurun menjadi 51,44 pada tahun 2022 dan memingkat lagi menjadi 53,75 pada tahun 2023. IKA Tanggamus dalam kategori sedang, namun berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Air di Kabupaten Tanggamus belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 59,47.

2. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks kualitas udara di Kabupaten Tanggamus dihitung menggunakan dua parameter, NO dan SO, yang mencerminkan emisi dari kendaraan bermotor dan industri. Berdasarkan pemantauan di empat lokasi representatif (transportasi, industri, pemukiman, dan perkantoran) menggunakan metode Passive Sampler, kualitas udara di Tanggamus dinilai baik dengan nilai indeks 86,97 pada tahun 2023, naik dari 84,22 pada tahun 2021. Nilai ini melebihi target 2023 sebesar 84,31. Peningkatan kualitas udara ini dikaitkan dengan konservasi keanekaragaman hayati dan penanaman pohon yang intensif di daerah tersebut.

3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, setiap provinsi harus memiliki kawasan hutan minimal 30% dari luas wilayahnya. Penghitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) dilakukan dengan membandingkan luas hutan dengan luas wilayah administratif. Provinsi Papua tahun 1982, dengan tutupan hutan 84,23%, digunakan sebagai acuan ideal dan diberi nilai 100, sedangkan daerah dengan tutupan 30% diberi nilai 50.

Pada tahun 2023, IKL Kabupaten Tanggamus mencapai 42,57, naik signifikan dari 34,42 pada tahun sebelumnya dan melampaui target yang ditetapkan sebesar 41,37. Meskipun terjadi peningkatan yang signifikan, kondisi ini belum berhasil mengubah kategori IKL Kabupaten Tanggamus dari status "kurang." Upaya lanjutan diperlukan untuk mencapai kategori yang lebih baik dalam kualitas lahan.

2.1.1.15. Emisi Gas Rumah Kaca

Efek rumah kaca merupakan sebuah proses dari suatu pemanasan. Pemanasan yang dimaksud disini adalah kondisi bumi yang mengalami pemanasan dan suhunya akan terus mengalami peningkatan dimana keadaan suhu bumi bisa nyaris tidak ada bedanya dengan suhu pada malam ataupun pada siang hari. Kondisi tersebut tentunya bisa menimbulkan ketidakseimbangan pada alam dan ekosistem yang ada disekitarnya. Secara alamiah, efek gas rumah kaca dihasilkan dari kegiatan sehari-hari manusia, namun sejak tahun 1950-an efek gas CO₂ dan juga metana meningkat secara drastis yang disebabkan oleh semakin majunya industri yang berbanding lurus dengan konsumsi energi. Emisi GRK adalah hasil dari lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer pada suatu area dan dalam jangka waktu tertentu. Secara alamiah, gas rumah kaca dihasilkan dari kegiatan manusia sehari-hari, namun sejak tahun 1950-an emisi gas CO₂ meningkat secara drastis yang disebabkan oleh semakin majunya industri yang berbanding lurus dengan konsumsi energi.

Kabupaten Tanggamus melaksanakan inventarisasi GRK melalui Dinas Lingkungan Hidup. Pelaksanaan inventarisasi GRK Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 dilakukan dengan menghimpun data dari 4 (empat) sektor utama penyumbang emisi GRK (kecuali IPPU). Penghimpunan data dilakukan dari Sektor Energi; Limbah; Pertanian; dan Kehutanan/FOLU (*forestry and other land use*).

Inventarisasi GRK mencakup status dan kecenderungan GRK di Kabupaten Tanggamus ini dilakukan guna memantau secara berkala untuk dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di masa mendatang. Hasil inventarisasi GRK Kabupaten Tanggamus tahun 2022 menunjukkan besar emisi GRK sebesar 756,17 Gg CO₂e, dengan kontribusi emisi GRK di masing-masing sektor secara berurutan adalah:

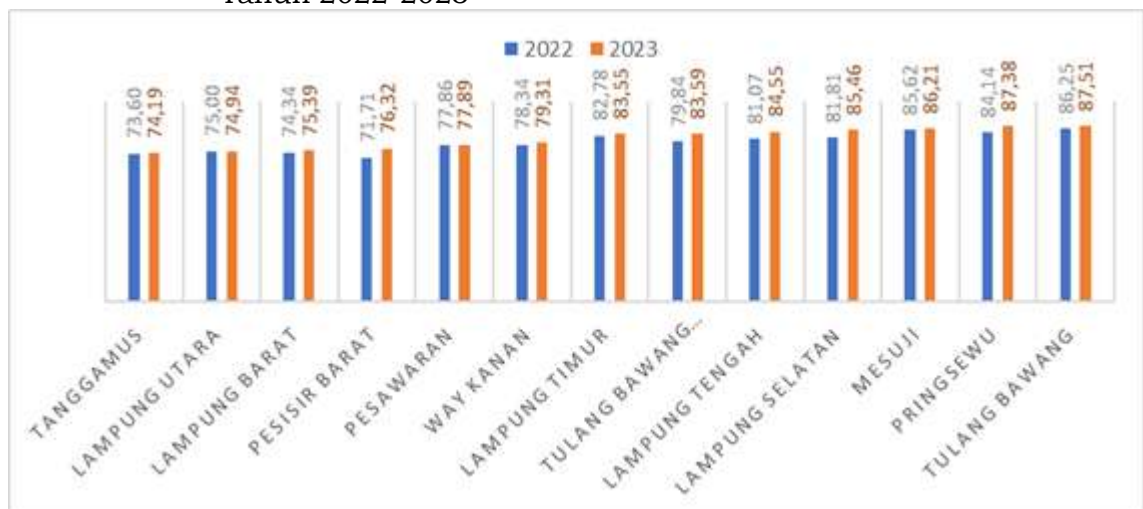
- 1) Sektor Pertanian sebesar 574,52 Gg CO₂e (76%);
- 2) Sektor Energi sebesar 136,61 Gg CO₂e (18%);
- 3) Sektor Limbah sebesar 37,09 Gg CO₂e (5%);
- 4) Sektor Kehutanan/FOLU sebesar 7,95 Gg CO₂e (1%)

2.1.1.16. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan nasional masih menjadi isu yang penting bagi Indonesia mengingat kecukupan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan memiliki dimensi yang terkait dengan dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai

subsistem. Subsistem utamanya meliputi ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, serta kualitas dan keamanan pangan. Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dari interaksi ketiga sub sistem tersebut. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tanggamus tahun 2023 sebesar 74,19 meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 73,6. Dibandingkan Kabupaten Lain Indeks Ketahanan Kabupaten Tanggamus tahun 2023 adalah yang terendah di Provinsi Lampung.

Grafik 2.2. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2022-2023



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2023

2.1.1.17. Indeks Ketahanan Energi

Ekonomi Indonesia yang terus berkembang telah meningkatkan permintaan energi. Namun, ketahanan energi Indonesia memburuk, berdasarkan indikator 4-A (availability, accessibility, affordability, acceptability). Strategi yang diusulkan untuk mengatasi masalah ini meliputi peningkatan produksi minyak bumi, pengurangan impor minyak dan LPG, pembangunan infrastruktur gas bumi, perluasan akses energi ke pulau kecil, terluar, dan perbatasan, percepatan pengembangan energi terbarukan, pendirian pusat konservasi energi, penyesuaian harga BBM dan listrik, serta pengurangan subsidi, dan peningkatan kapasitas institusi serta sumber daya manusia terkait pembangunan energi.

World Economic Forum menempatkan ketahanan energi Indonesia pada peringkat ke-63 dunia. Peringkat pertama hingga ketiga ditempati oleh Norwegia, Selandia Baru, dan Perancis. Negara-negara Asia dengan sedikit sumber daya energi, seperti Singapura (peringkat 62), Thailand (55), Korea Selatan (54), dan Jepang (38), masih memiliki ketahanan energi yang lebih baik dibandingkan

Indonesia. Dewan Energi Nasional (DEN) mencatat bahwa indeks ketahanan energi Indonesia saat ini berada dalam kategori "tahan" dengan skor antara 6 hingga 7,99, dengan skor Indonesia mencapai 6,64. Upaya terus dilakukan untuk mencapai indeks ketahanan energi yang ideal dengan skor 7 hingga 10.

2.1.1.18. Persentase Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perpindahan fungsi lahan. Menurut Hidayat (2008), alih fungsi lahan adalah proses perubahan penggunaan lahan dari bentuk penggunaan tertentu menjadi penggunaan lain. Setiawan (2016) menambahkan bahwa alih fungsi lahan, atau konversi lahan, adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi awalnya (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan potensi lahan tersebut. Alih fungsi lahan dapat diartikan sebagai perubahan atau penyesuaian peruntukan penggunaan lahan yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kebutuhan untuk memenuhi permintaan penduduk yang terus meningkat. Secara ringkas, alih fungsi lahan adalah perubahan lahan yang belum terbangun menjadi lahan terbangun guna memenuhi kebutuhan penduduk di suatu daerah.

Laju alih fungsi lahan dapat dihitung dengan mengurangi luas lahan pada tahun ke-t dengan luas lahan pada tahun sebelumnya (t-1). Selisih tersebut kemudian dibagi dengan luas lahan pada tahun sebelumnya, lalu dikalikan dengan 100 persen. Metode ini diterapkan secara berkelanjutan setiap tahun sehingga dapat diperoleh laju alih fungsi lahan tahunan.

2.1.1.19. Persentase Pemanfaatan Ruang Sesuai RTRW

Tata ruang wilayah adalah susunan suatu tempat yang memiliki dimensi luas dan isi, dengan memperhatikan struktur dan pola berdasarkan sumber daya alam maupun buatan yang tersedia, serta aspek administratif dan fungsional. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan demi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Berdasarkan amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang harus memperhatikan potensi, kondisi, permasalahan sosial dan budaya, serta memperhatikan daerah kawasan rawan bencana sebagai dasar dalam pengembangan dan pengelolaan wilayah. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, diperlukan upaya penataan ruang yang baik. Di Kabupaten Tanggamus, persentase pemanfaatan tata ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dinyatakan 100% sesuai.

2.1.2. Demografi

Komposisi dan Distribusi Penduduk. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus penduduk Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 sebanyak 662.542 jiwa, yang terdiri dari 342.203 jiwa penduduk laki-laki dan 320.339 jiwa penduduk perempuan, dengan luas wilayah daratan 2.855,46 Km² maka kepadatan rata-rata penduduk di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 adalah 142,33 jiwa per km². Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Pugung (10,52%) di ikuti Talang Padang (8,40%), Gisting (6,72%) dan Ulu Belu (6,72%)

Tabel 2.26. Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2023

NO	KECAMATAN	LUAS (Km ²)	JUMLAH PENDUDUK		TOTAL	PERSEN-TASE	KEPADATAN (per Km ²)
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN			
1	Wonosobo	209,63	22,320	20,511	42,831	6,46	204,32
2	Semaka	170,9	20,813	19,577	40,390	6,10	236,34
3	Bandar Negeri Semuong	98,12	9,103	8,327	17,430	2,63	177,64
4	Kota Agung	76,93	25,161	23,590	48,751	7,36	633,71
5	Pematang Sawa	185,29	9,639	8,552	18,191	2,75	98,18
6	Kota Agung Timur	73,33	11,419	11,041	22,460	3,39	306,29
7	Kota Agung Barat	101,3	12,049	10,991	23,040	3,48	227,44
8	Pulau Panggung	437,21	21,748	20,593	42,341	6,39	96,84
9	Ulu Belu	323,08	23,030	21,520	44,550	6,72	137,89
10	Air Nangingan	186,35	16,530	15,431	31,961	4,82	171,51
11	Talang Padang	45,13	28,501	27,149	55,650	8,40	1233,10
12	Sumberejo	56,77	18,921	18,001	36,922	5,57	650,38
13	Gisting	32,53	22,858	21,632	44,490	6,72	1367,66
14	Gunung Alip	25,68	12,020	11,351	23,371	3,53	910,09
15	Pugung	232,4	36,110	33,610	69,720	10,52	300,00
16	Bulok	51,68	12,930	12,261	25,191	3,80	487,44
17	Cukuh Balak	173,70	13,226	12,344	25,570	3,86	147,20
18	Kelumbayan	157,25	6,549	5,922	12,471	1,88	79,31
19	Limau	240,61	11,813	10,987	22,800	2,44	94,76
20	Kelumbayan Barat	69,70	7,463	6,949	14,412	1,18	206,78
JUMLAH		2.947,592	342,203	320,339	662,542	100,00	224,77

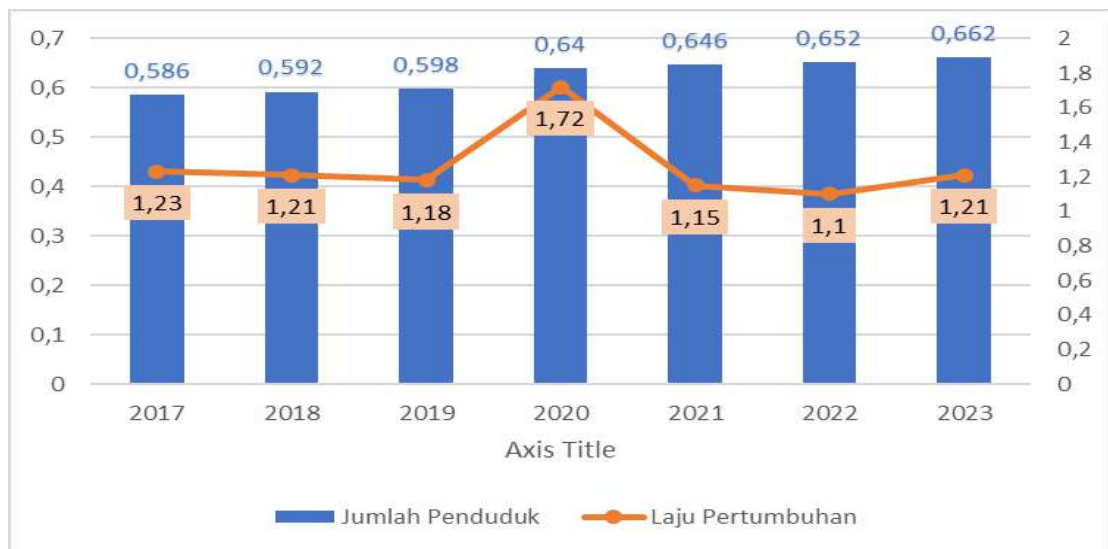
Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

Sex ratio. Data menunjukkan pada tahun 2023, Jumlah Penduduk laki-laki (51,65%) masih lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan (48,35%), maka rasio jenis kelamin (*sex ratio*) penduduk Kabupaten Tanggamus sebesar 106,83 yang dapat dimaknai bahwa dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106-107 penduduk laki-laki.

Pertumbuhan Penduduk. Jumlah penduduk Kabupaten Tanggamus mengalami pertumbuhan yang konsisten. Data BPS menunjukkan pada tahun 2017 penduduk Tanggamus sejumlah 0,586 juta jiwa, angka tersebut terus meningkat setiap tahunnya, mencapai 0,662 juta jiwa pada tahun 2023. Laju pertumbuhan penduduk juga menunjukkan tren yang cukup fluktuatif, namun secara

keseluruhan terjadi perlambatan laju pertumbuhan penduduk dari 1.23% pada tahun 2017 menjadi 1.10% pada tahun 2022. Hal ini mencerminkan dinamika pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kabupaten Tanggamus selama periode tersebut, jelasnya terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2.3. Pertumbuhan Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tanggamus 2017-2023



Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2017-2024 (diolah)

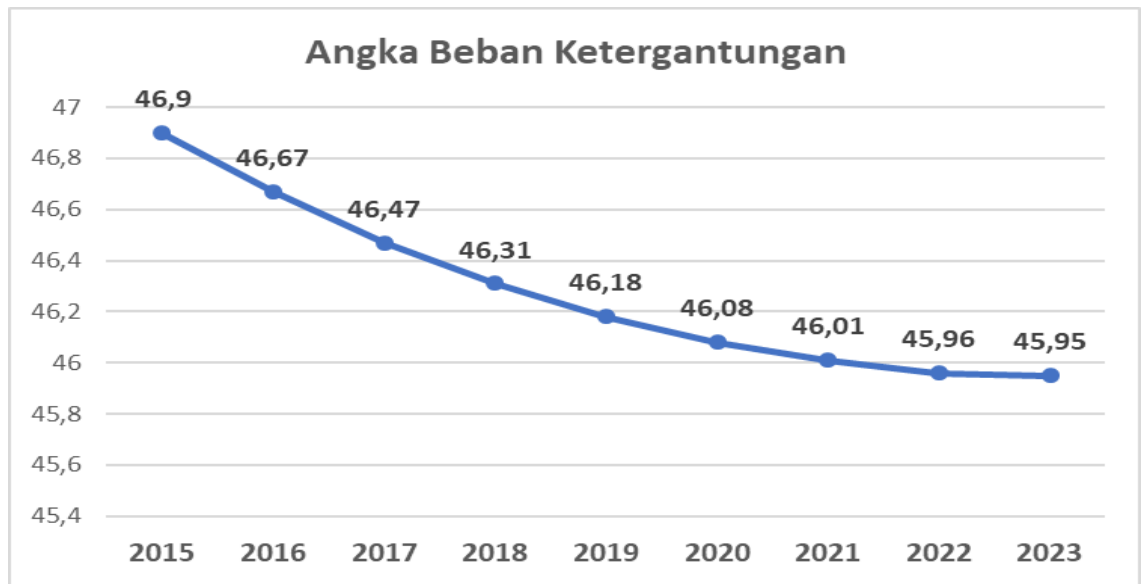
Perubahan Struktur Penduduk dan Bonus Demografi. Perubahan struktur penduduk Tanggamus ditunjukkan dari penurunan angka beban ketergantungan dari 46,9% pada tahun 2015 menjadi 45,95% pada tahun 2023, sebagai indikasi dari pertumbuhan penduduk usia produktif. Angka beban ketergantungan yang semakin rendah menandakan bahwa proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) relatif lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia non produkyif atau anak-anak dan lansia (0-14 tahun dan > 65 tahun).

Fenomena ini menunjukkan bonus demografi, yang merupakan periode di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada jumlah orang yang tergolong sebagai beban ketergantungan (anak-anak dan lansia). Bonus demografi dapat memberikan potensi pertumbuhan ekonomi karena jumlah orang yang dapat berkontribusi dalam produksi dan pembangunan lebih besar dibandingkan dengan jumlah orang yang bergantung pada mereka.

Dengan angka beban ketergantungan di bawah 50%, Tanggamus memiliki peluang untuk memanfaatkan bonus demografi ini dengan menciptakan kebijakan dan program yang mendukung pendidikan, pelatihan kerja, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun demikian, penting juga

untuk memperhatikan aspek distribusi pendapatan, ketersediaan pekerjaan yang layak, dan infrastruktur sosial lainnya untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut merata dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Grafik 2.4. Angka Beban Ketergantungan Penduduk di Kabupaten Tanggamus Tahun 2015-2023



Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2017-2024 (diolah)

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

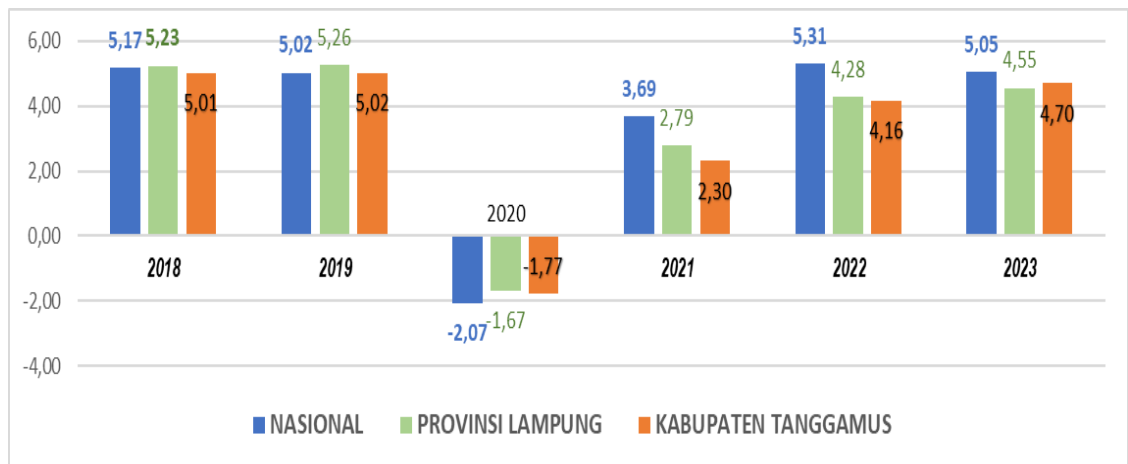
2.2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus tercatat fluktuatif, sejalan dengan yang terjadi pada kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam lima tahun terakhir, tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 5,02%. Namun akibat adanya pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,77%, hal ini selaras dengan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang juga mengalami kontraksi pada angka -1,67% dan Nasional pada angka -2,07%.

Pada tahun 2021, Kabupaten Tanggamus mencatat perbaikan dalam pertumbuhannya, sebesar 2,34%. Pada tahun 2022, kinerja ekonomi ini terus meningkat, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,16%. Meskipun demikian, masih berada di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dan tingkat nasional, yang masing-masing mencapai 4,28% dan 5,31%. Pada tahun 2023, perekonomian Kabupaten Tanggamus terus menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 4,70%, bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yang hanya mencapai

4,55%. Tren positif ini menandakan adanya pemulihan ekonomi di Tanggamus setelah masa dampak pandemi COVID-19. Perbaikan yang berkelanjutan dalam pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa upaya-upaya pemulihan dan stimulus ekonomi yang diterapkan telah memberikan hasil yang diharapkan.

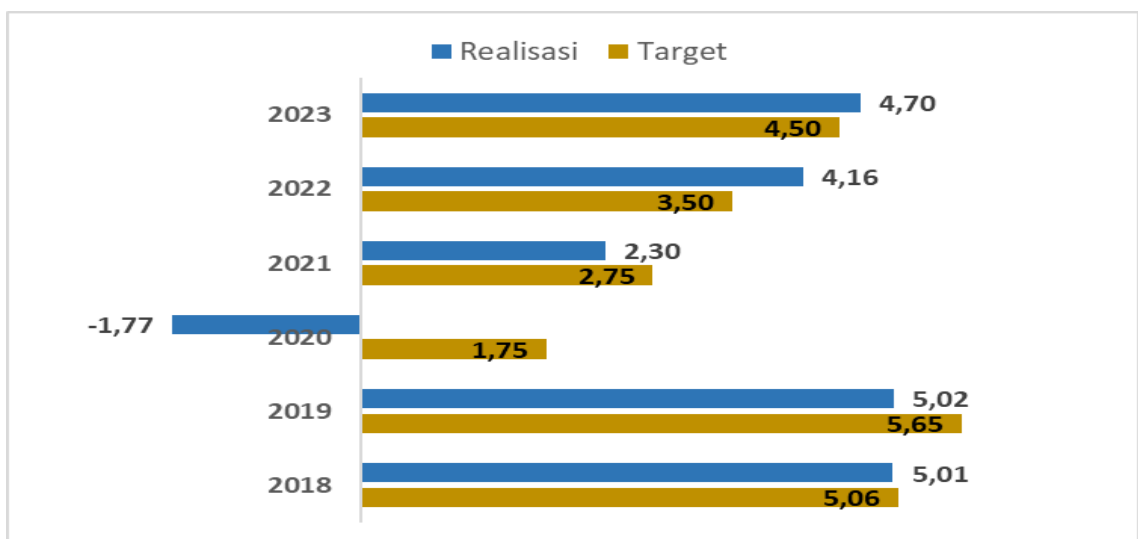
Grafik 2.5. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2019-2024 (diolah)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus selama beberapa tahun terakhir mencerminkan berbagai dinamika dan tantangan. Pada tahun 2018 dan 2019, meskipun target pertumbuhan ekonomi telah ditetapkan pada tingkat yang ambisius, realisasinya tetap berada di bawah ekspektasi dengan pencapaian masing-masing sebesar 5,01% dan 5,02%.

Grafik 2.6. Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanggamus 2018-2023



Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024 (diolah)

Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat menantang dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 1,75%, namun realisasinya justru mencatat kontraksi ekonomi

yang signifikan, dengan pertumbuhan mencapai -1,77%, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19. Namun, upaya pemulihan ekonomi terlihat pada tahun 2021, meskipun realisasi pertumbuhan ekonomi masih sedikit di bawah target yang ditetapkan. Tren positif terus berlanjut pada tahun 2022 dan 2023, di mana pertumbuhan ekonomi berhasil melampaui target yang ditetapkan, mencapai 4,16% dan 4,70% berturut-turut. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang konsisten dan progresif di Kabupaten Tanggamus pasca dampak pandemi Covid-19, meskipun tantangan dan dinamika ekonomi masih menjadi perhatian penting.

2.2.1.2. Persentase Penduduk Miskin

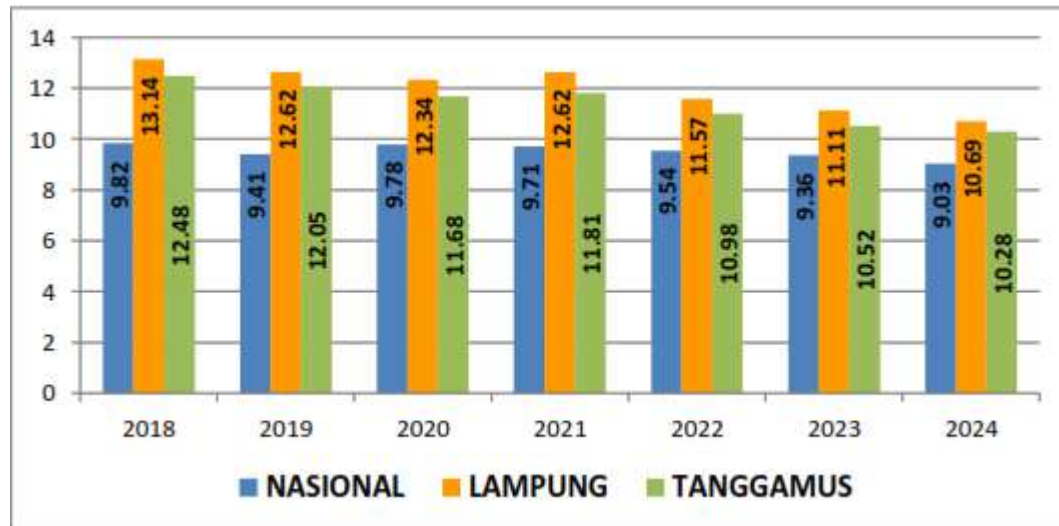
Permasalahan kemiskinan memang telah menjadi fokus strategis sepanjang sejarah peradaban manusia. Karena sifatnya yang dinamis dan melibatkan beragam dimensi, penanganannya memerlukan pendekatan inklusif untuk mencapai kesamaan persepsi di antara para pemangku kepentingan (stakeholder). Hal yang serupa terjadi dalam Kabupaten Tanggamus, di mana jumlah penduduk miskin tersebar di 20 kecamatan dengan tingkat kemiskinan yang bervariasi. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi khusus untuk menangani permasalahan tersebut. Pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan local strategy yang melibatkan pemangku kepentingan lokal. Dengan melibatkan pihak-pihak lokal, seperti pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, penanganan kemiskinan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Penting untuk diingat bahwa kemiskinan bukan hanya masalah materi, tetapi juga melibatkan berbagai dimensi sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Dampaknya merambah ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi. Kemiskinan juga dapat menyebabkan ketidaksetaraan yang semakin besar dalam masyarakat serta memperburuk kondisi lingkungan hidup. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi untuk mengatasi akar permasalahan yang menyertainya.

Data menunjukkan adanya perbaikan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tanggamus, dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 mencapai 64.220 jiwa, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 65.180 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya penanggulangan kemiskinan telah memberikan hasil positif, namun masih diperlukan kerja keras dan kerjasama dari semua pihak untuk mencapai tujuan yang lebih baik lagi. Persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten Tanggamus

pada tahun 2018 sebesar 12,48% angka tersebut terus menunjukkan perbaikan pada tahun 2023 menjadi 10,52% dan pada tahun 2024 menurun menjadi 10,28%.

Grafik 2.7. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanggamus



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

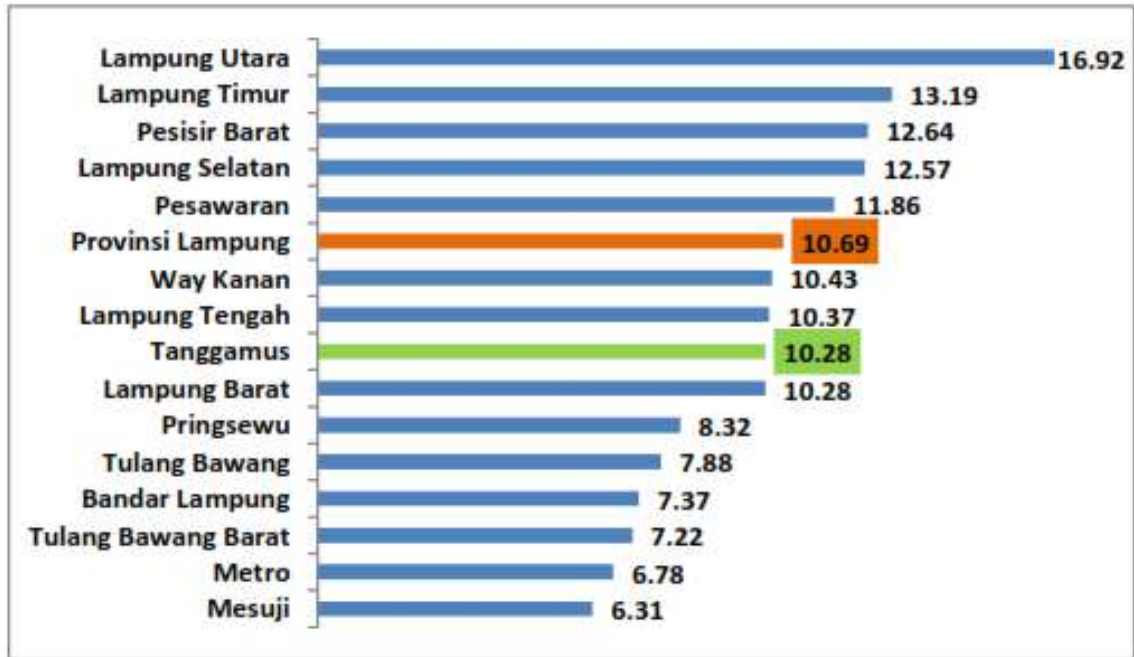
Tabel 2.27. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2023

NO	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (RIBU JIWA)						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Metro	15,06	14,49	14,31	15,32	13,68	12,8	12,07
2	Mesuji	15,01	14,94	14,72	15,24	13,88	13,71	12,91
3	Tulang Bawang Barat	21,93	21,14	20,29	23,03	20,72	20,32	20,35
4	Pesisir Barat	22,98	22,38	22,24	23,23	21,85	21,45	20,22
5	Lampung Barat	40,62	39,05	38,12	39,36	36,20	34,73	33,43
6	Pringsewu	41,64	40,55	40,12	41,04	38,18	37,6	34,42
7	Tulang Bawang	43,10	42,06	42,43	44,53	39,19	37,83	37,46
8	Way Kanan	60,16	58,72	58,41	59,89	54,28	51,26	48,88
9	Pesawaran	70,14	67,36	66,04	68,31	63,17	59,29	55,01
10	Tanggamus	73,77	71,90	70,37	71,89	67,43	65,18	64,22
11	Bandar Lampung	93,04	91,24	93,74	98,76	90,51	87,08	83,88
12	Lampung Utara	128,02	122,65	119,35	121,91	114,67	107,21	105,91
13	Lampung Selatan	148,54	144,44	143,33	145,85	136,21	133,67	132,38
14	Lampung Tengah	160,12	153,84	152,28	155,77	143,34	140,29	137,41
15	Lampung Timur	162,94	158,90	153,57	159,79	149,12	148,26	142,70
Provinsi Lampung		1,097,05	1,063,66	1,049,32	1,083,92	1,002,43	970,67	941,23
Indonesia		25,670,00	24,780,00	27,550,00	26,500,00	26,161,00	25,900,00	25,220,00

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Dengan tingkat kemiskinan 10,52% pada tahun 2023 maka saat ini Kabupaten Tanggamus berada pada peringkat kesembilan dari lima belas Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

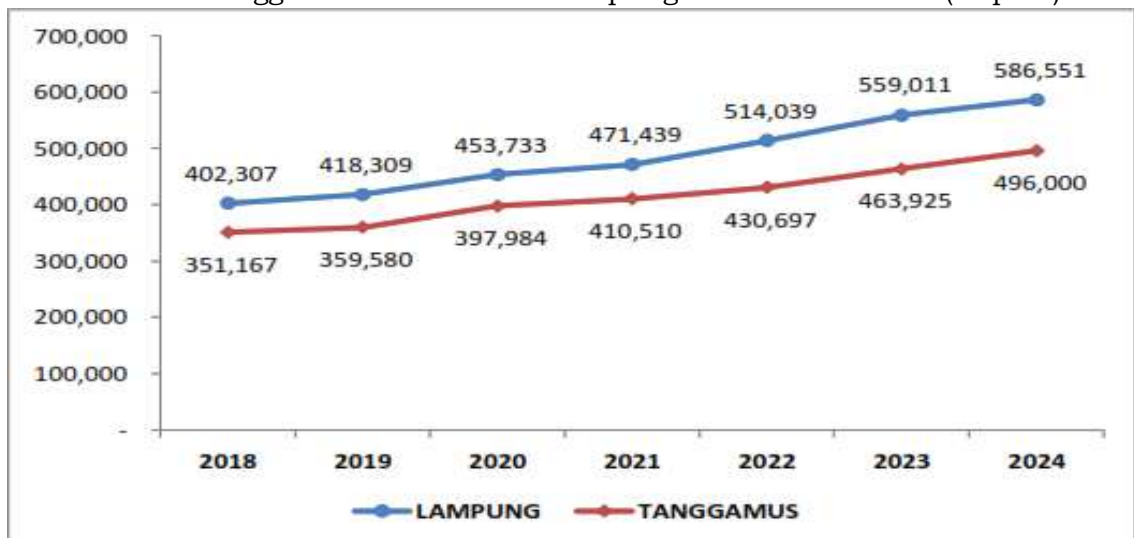
Grafik 2.8. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2024



Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan tergolong penduduk miskin. Jika Garis Kemiskinan tinggi dan tidak terjadi peningkatan pendapatan, maka akan semakin banyak penduduk yang tergolong miskin.

Grafik 2.9. Perkembangan Garis Kemiskinan Kapita Perbulan Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung Tahun 2018-2024 (Rupiah)



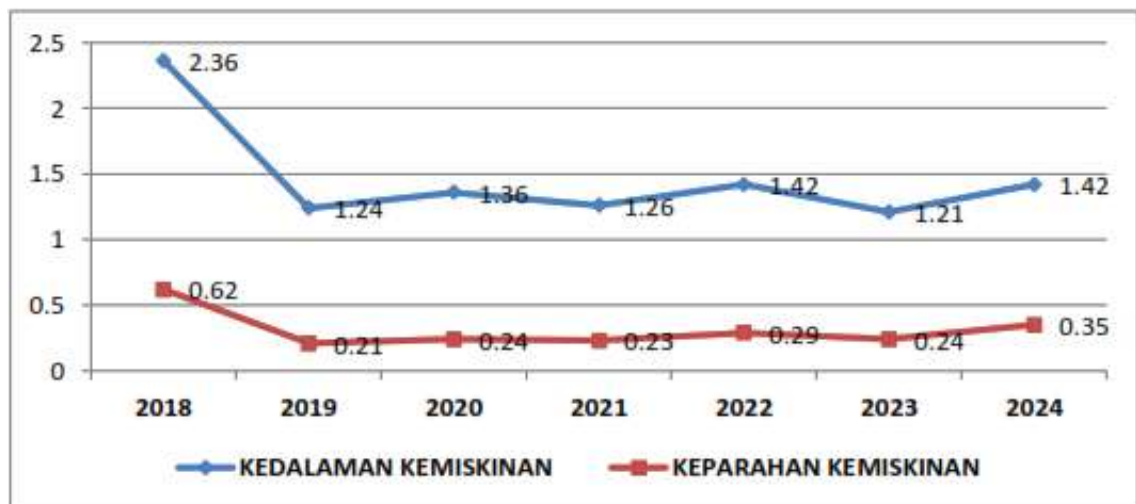
Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Selama periode 2018 sampai dengan 2024, Garis Kemiskinan Kabupaten Tanggamus terus mengalami kenaikan yang semula sebesar Rp.351.167,- per kapita per bulan menjadi Rp.496.000,- per kapita per bulan pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan sebagian penduduk miskin khususnya mereka yang berada disekitar garis kemiskinan belum mampu mengimbangi kenaikan harga pada saat garis kemiskinan mengalami kenaikan. Garis Kemiskinan di Kabupaten Tanggamus selalu lebih rendah disbanding Garis Kemiskinan Provinsi Lampung.

Indikator kemiskinan lainnya adalah index kedalaman (P1) dan keparahan (P2), dirumuskan oleh Foster-Greer-Thorbecke. P1 mengukur jarak rata-rata antara pengeluaran penduduk miskin dan garis kemiskinan. Semakin tinggi P1, semakin besar kesenjangan. Misalnya, jika daerah A memiliki P1 lebih tinggi dari B, penduduk miskin di A secara rata-rata lebih miskin daripada B.

P2 mengukur sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi P2, semakin tidak merata pengeluarannya. Misalnya, jika daerah A memiliki P2 lebih tinggi dari B, kemiskinan penduduk miskin di A lebih beragam daripada B.

Grafik 2.10. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahannya Kemiskinan (P2) Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2024



Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

2.2.1.3. Indeks Gini

Rasio Gini atau koefisien adalah alat mengukur derajat ketidakmerataan distribusi penduduk. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Gini rasio mencerminkan tingkat pemerataan pendapatan penduduk suatu daerah. Pendapatan dikatakan merata jika semua orang mendapatkan distribusi pendapatan yang sama rata, atau dengan kata lain Rasio Gininya adalah sama dengan nol (Gini Ratio = 0). Rasio Gini adalah rasio tentang distribusi pendapatan dengan angka kisaran 0 sampai dengan 1. Jika Gini rasio mendekati 0 berarti distribusi pendapatan yang diterima hampir sama dengan banyak penduduk. Berikut adalah arti nilai dari besaran gini rasio:

- Gini Rasio < 0.3 : artinya ketimpangan rendah.
- $0.3 \leq$ Gini Rasio ≤ 0.5 : artinya ketimpangan sedang.
- Gini Rasio > 0.5 : artinya ketimpangan tinggi.

Tabel 2.28. Perkembangan Nilai Gini Rasio Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2023

NO	WILAYAH	GINI RATIO					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pesawaran	0.316	0.310	0.288	0.299	0.251	0.287
2	Lampung Selatan	0.353	0.331	0.299	0.268	0.260	0.257
3	Tanggamus	0.289	0.314	0.293	0.265	0.261	0.256
4	Tulang Bawang Barat	0.316	0.316	0.272	0.282	0.261	0.274
5	Pringsewu	0.318	0.295	0.310	0.277	0.272	0.306
6	Mesuji	0.290	0.286	0.308	0.272	0.280	0.285
7	Way Kanan	0.307	0.299	0.311	0.283	0.283	0.281
8	Lampung Timur	0.346	0.302	0.315	0.284	0.283	0.315
9	Lampung Utara	0.311	0.309	0.301	0.275	0.284	0.300
10	Lampung Barat	0.314	0.296	0.295	0.281	0.284	0.284
11	Tulang Bawang	0.352	0.322	0.279	0.292	0.287	0.284
12	Pesisir Barat	-	0.330	0.281	0.322	0.290	0.315
13	Lampung Tengah	0.315	0.308	0.304	0.291	0.299	0.285
14	Metro	0.334	0.342	0.299	0.309	0.299	0.289
15	Bandar Lampung	0.342	0.316	0.359	0.344	0.369	0.381
	Provinsi Lampung	0.346	0.329	0.327	0.323	0.314	0.324
	Indonesia	0.384	0.380	0.385	0.381	0.381	0.388

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Perkembangan gini rasio Kabupaten Tanggamus terus menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun dan pada tahun 2023 gini rasio Kabupaten Tanggamus sebesar 0,256 yang merupakan ketimpangan rendah. Gini Ratio Kabupaten Tanggamus mengalami perbaikan disbanding tahun sebelumnya, peningkatan justru terjadi ketika gini rasio di Provinsi Lampung naik menjadi 0,324 dan juga gini rasio Nasional 0,388.

2.2.1.4. Indeks Ketimpangan Regional

Untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan antar wilayah/regional, umumnya digunakan Indeks Ketimpangan Regional. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita yang dikaitkan dengan jumlah penduduk masing-masing daerah. Besarnya Indeks Ketimpangan Regional antara 0 (nol) sampai dengan 1 (satu). Jika Indeks Ketimpangan Regional mendekati 0, maka ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah/regional dalam katagori rendah atau pertumbuhan ekonomi antar daerah cenderung merata. Jika Indeks Ketimpangan Regional mendekati 1, maka ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah/regional dalam kategori tinggi atau pertumbuhan ekonomi antar wilayah cenderung tidak merata. Tingkat ketimpangan yang terjadi di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung masih termasuk kategori ketimpangan rendah.

Tabel 2.29. Tingkat Ketimpangan Regional Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2019

NO	WILAYAH	2019
1	Kabupaten Lampung Barat	0,45
2	Kabupaten Tanggamus	0,58
3	Kabupaten Lampung Selatan	0,04
4	Kabupaten Lampung Timur	0,50
5	Kabupaten Lampung Tengah	1,93
6	Kabupaten Lampung Utara	0,49
7	Kabupaten Way Kanan	0,34
8	Kabupaten Tulang Bawang	0,25
9	Kabupaten Pesawaran	0,15
10	Kabupaten Pringsewu	0,40
11	Kabupaten Mesuji	0,16
12	Kabupaten Tulang Bawang Barat	0,02
13	Kabupaten Pesisir Barat	0,02
14	Kota Bandar Lampung	0,53
15	Kota Metro	0,09

Sumber : BPS, Data Diolah Hasil Analisis Kajian Resha Moniyana dan Ahmad Dhea Pratama, Universitas Lampung, 2021

2.2.1.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

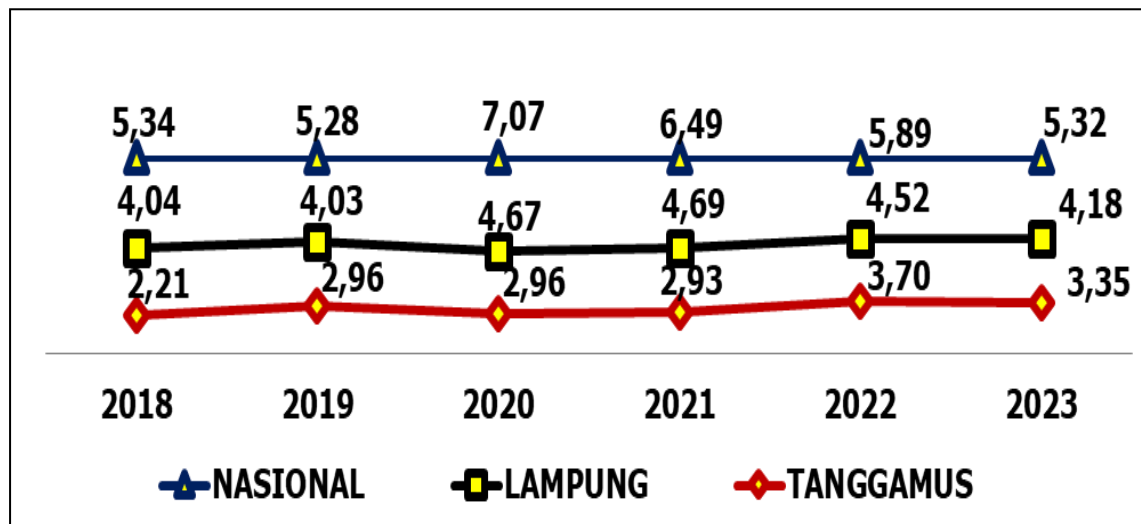
Salah satu penilaian terhadap ketenagakerjaan suatu wilayah⁶⁹ adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang menunjukkan persentase penduduk yang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, belum mulai bekerja, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. TPT dihitung sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja, yang terdiri dari penduduk usia kerja yang bekerja, sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Pandemi Covid-19 berdampak buruk pada ekonomi dan dunia usaha, menyebabkan pengurangan pekerja secara masif. Di Provinsi Lampung dan

secara nasional, angka pengangguran terbuka meningkat pada tahun 2020. Namun, di Kabupaten Tanggamus, tingkat pengangguran cenderung tetap pada 2,96% karena mayoritas pekerja di sana bekerja di sektor informal yang kurang terdampak oleh pengurangan pekerja.

TPT Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 sebesar 3,70% mengalami peningkatan disbanding tahun 2021 yang hanya 2,93%, angka tersebut juga lebih baik dari TPT Provinsi Lampung sebesar 4,52% dan TPT Nasional yang mencapai 5,89%. Namun Pada Tahun 2023 TPT Kabupaten Tanggamus kembali turun menjadi 3,35%

Grafik 2.11. Perkembangan TPT Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2023

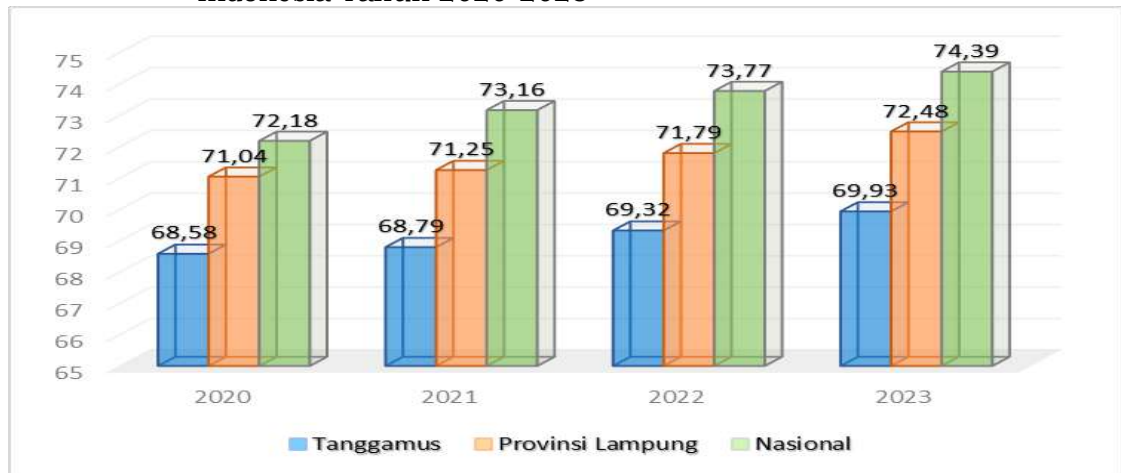


Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

2.2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Mengacu pada *Human Development Report* Pembangunan manusia adalah proses untuk meningkatkan pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia, seperti umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan untuk hidup layak. Di Kabupaten Tanggamus, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir, meskipun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2020, IPM mencapai 68,58, meningkat menjadi 69,93 pada tahun 2023. Meskipun demikian, IPM Kabupaten Tanggamus masih lebih rendah dibandingkan dengan IPM Nasional (74,39) dan IPM Provinsi Lampung (72,48) pada tahun yang sama. Sebagaimana ditunjukkan oleh diagram di bawah ini, baik IPM Nasional, Provinsi Lampung, maupun Kabupaten Tanggamus setiap tahun mengalami peningkatan.

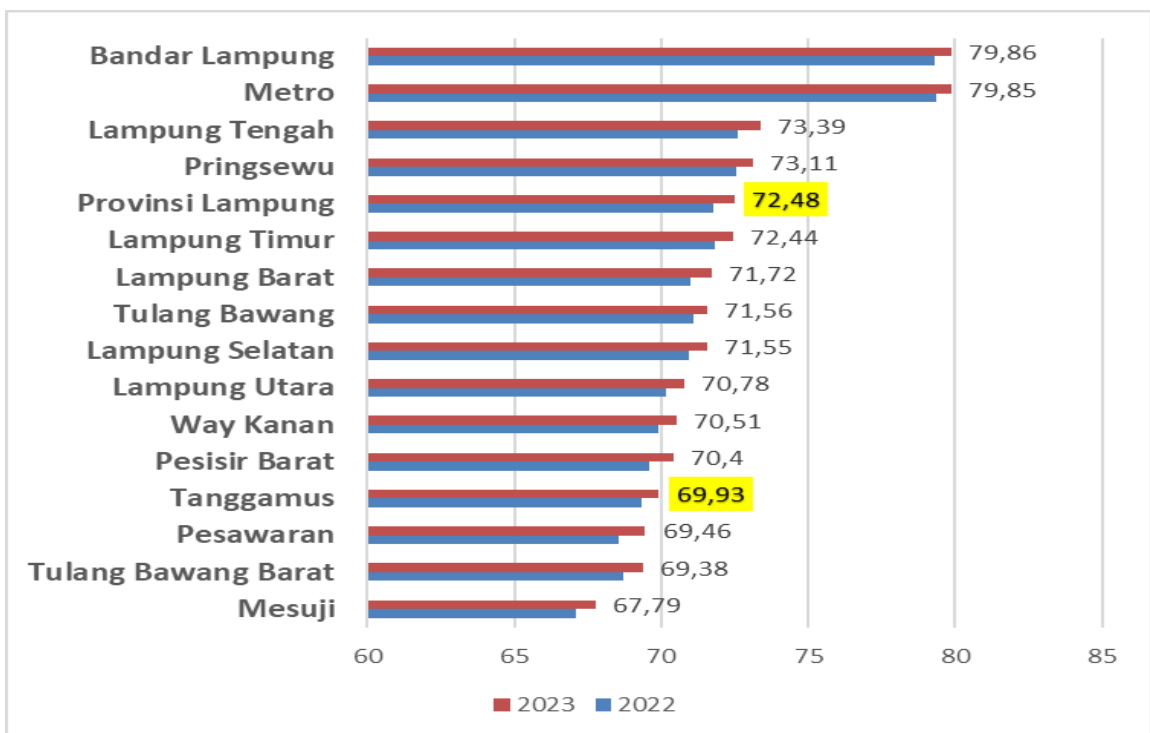
Grafik 2.12. Perkembangan IPM Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2020-2023



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Berdasarkan status capaian pembangunan manusia, IPM Kabupaten Tanggamus di tahun 2022 berada pada peringkat ke duabelas dari 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang termasuk dalam kategori sedang (capaian $60 \leq \text{IPM} < 70$) bersama tiga kabupaten lain yaitu Pesawaran, Tulang Bawang Barat dan Mesuji. Adapun Kabupaten dan kota lainnya telah mencapai status pembangunan manusia berkategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Paling Tinggi adalah kota Bandar Lampung (79,86).

Grafik 2.13. Perkembangan IPM Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2022-2023



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

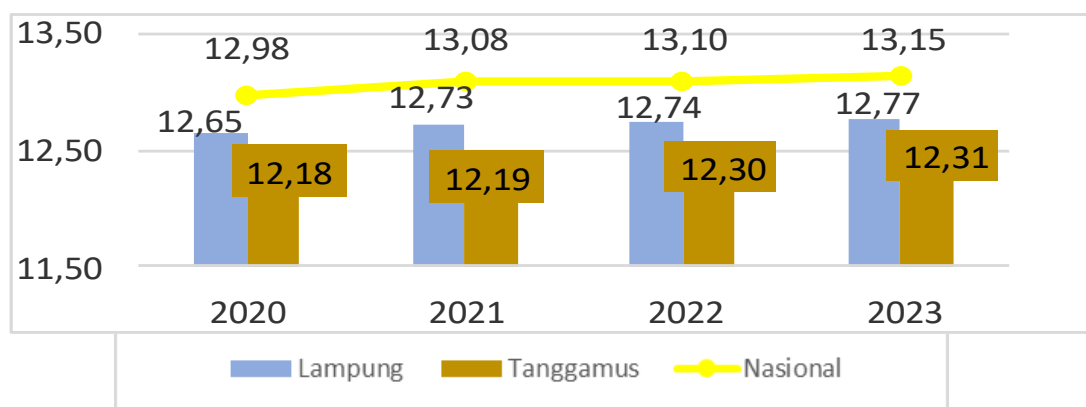
Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran pembangunan manusia yang terbentuk dari indikator-indikator pada tiga dimensi kehidupan, yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pada dimensi pendidikan, penghitungan dilakukan berdasarkan dua ukuran yakni Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), pada dimensi kesehatan digunakan Angka Harapan hidup (AHH), adapun pada dimensi ekonomi, indikator yang digunakan adalah Pengeluaran Perkapita Penduduk.

2.2.1.7. Harapan Lama Sekolah

Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tanggamus dari tahun 2020 ke tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun, bila di tahun 2020 HLS Kabupaten Tanggamus masih 12,18 tahun maka pada tahun 2023 telah mencapai 12,31 tahun.

Dengan nilai HLS Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 sebesar 12,31 tahun, hal ini berarti harapan anak untuk bersekolah di Kabupaten Tanggamus baru mencapai tingkat 3 SLTA. Kondisi ini masih lebih rendah dibandingkan dengan angka HLS Provinsi Lampung 12,77 tahun dan Nasional sebesar 13,15 tahun. Dengan demikian baik ditingkat kabupaten, provinsi maupun di tingkat nasional harapan untuk bersekolah sudah sampai pada tingkat selesai SLTA.

Grafik 2.14. Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2020-2023



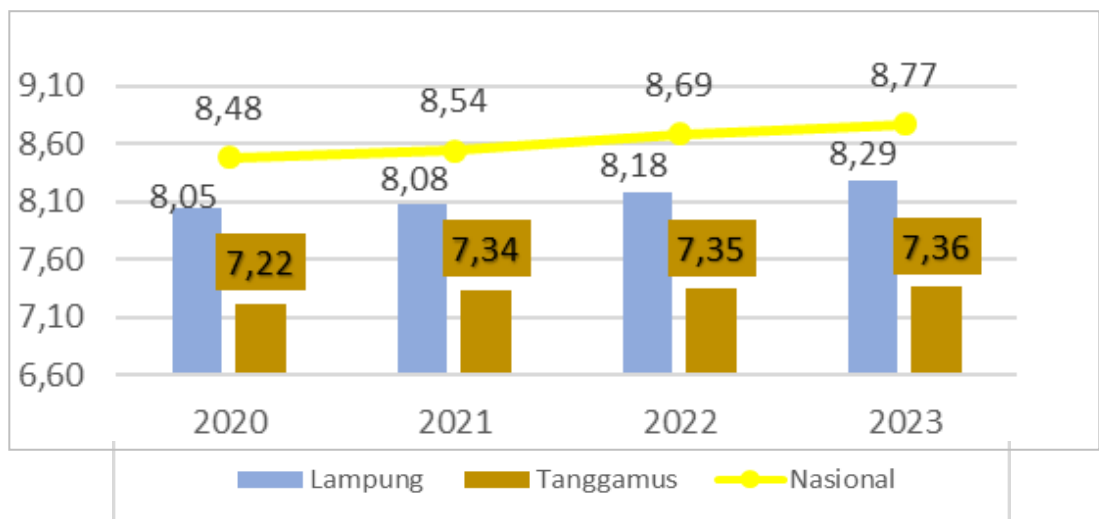
Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

2.2.1.8. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Asumsi bahwa dalam kondisi normal RLS suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan RLS adalah penduduk usia > 25 tahun.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tanggamus tahun 2023 baru mencapai 7,36 tahun meningkat dari tahun sebelumnya 7,35 tahun. Ini berarti rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tanggamus usia 25 tahun keatas masih cukup jauh dibawah program wajib belajar sembilan tahun yang sudah dicanangkan sejak tahun 1994. Namun demikian kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi Provinsi Lampung secara umum dimana angka RLS Provinsi Lampung baru mencapai 8,29 tahun. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPS, RLS di Kabupaten Tanggamus konstan menunjukkan peningkatan namun masih berada di bawah RLS Provinsi Lampung dan Nasional. Faktor yang mempengaruhi rendahnya RLS dan belum terdapat akselerasi angka RLS yaitu masih terdapat siswa yang putus sekolah dan anak usia sekolah yang tidak sekolah.

Grafik 2.15. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2020-2023



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

2.2.1.9. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Selama periode 2018-2023, capaian Angka Melek Huruf cukup mengalami penurunan. AMH pada tahun 2018 sebesar 97,95% dan tahun 2020 turun menjadi 96,84%. Di tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 97,00%, namun kembali menurun menjadi 96,62% di tahun 2022 dan kemudian naik kembali di Tahun 2023 mencapai 96,78%.

Tabel 2.30. Perbandingan Angka Melek Huruf Kabupaten Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

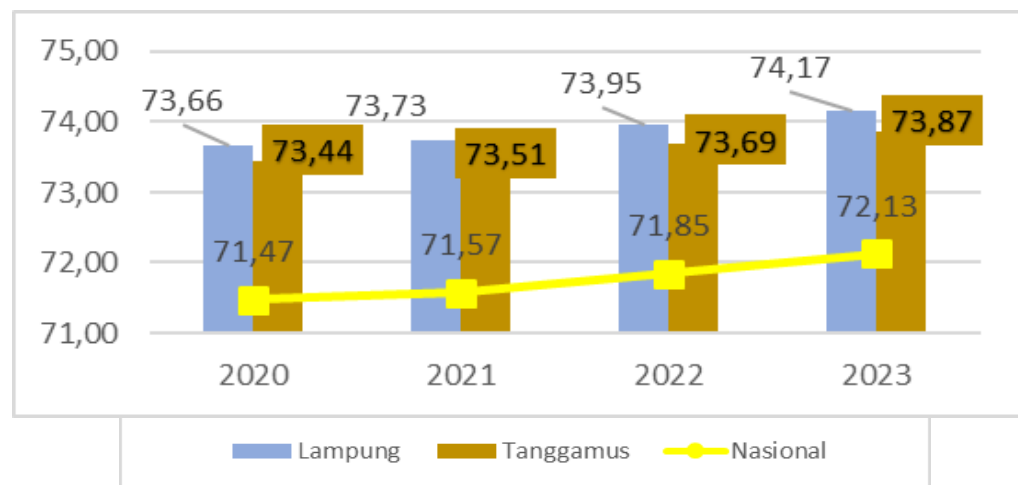
WILAYAH	ANGKA MELEK HURUF (PERSEN)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tanggamus	97,95	97,00	96,84	97,00	96,62	96,78

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

2.2.1.10. Angka Harapan Hidup

Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) adalah salah satu keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan, tingginya AHH mencerminkan makin membaiknya tingkat kesehatan masyarakat. Tren pencapaian AHH di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 mencapai 73,87 tahun meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebesar 73,69 tahun, meskipun demikian capaian AHH ini masih dibawah capaian AHH Provinsi Lampung sebesar 74,17 tahun, namun lebih baik dibanding rata-rata AHH Nasional yang mencapai 72,13 tahun.

Grafik 2.16. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2020-2023



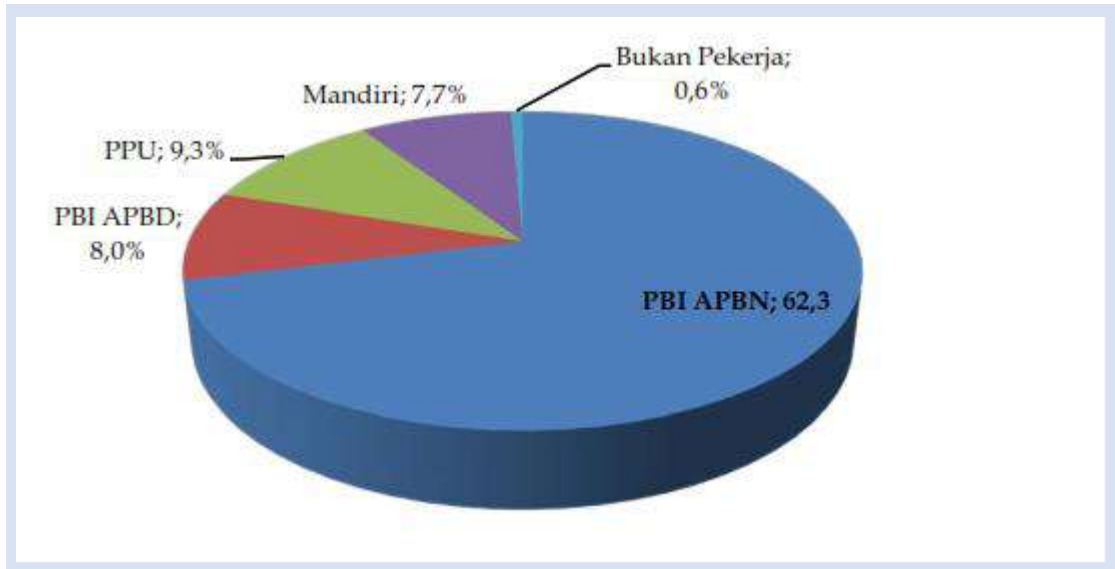
Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Tingginya Angka Harapan Hidup biasanya berhubungan erat dengan tingginya persentase penduduk yang memiliki akses ke jaminan kesehatan yang memadai, karena adanya jaminan kesehatan memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan perawatan medis yang diperlukan tanpa harus khawatir akan biaya yang besar. Saat ini sebagian besar pembiayaan kesehatan ditanggung oleh rumah tangga, hanya sebagian kecil pengeluaran yang terorganisir oleh perusahaan dan berbagai bentuk asuransi/jaminan kesehatan pra bayar.

Dari 615.496 jiwa penduduk Kabupaten Tanggamus di Tahun 2022, hanya sebanyak 545.511 jiwa (88,6%) saja yang telah terlindungi dengan jaminan

kesehatan. Pola kepesertaan jaminan kesehatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Grafik 2.17. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Kabupaten Tanggamus, Tahun 2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2023

Kesehatan ibu dan anak sangat erat hubungannya dengan Angka Harapan Hidup (UHH). Angka Kematian Ibu mengindikasikan semakin baiknya layanan kesehatan ibu, seperti akses ke perawatan prenatal, persalinan yang aman, dan perawatan pasca persalinan, semakin kecil kemungkinan kematian ibu pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan UHH. Pada Tahun 2023 Angka Kematian Ibu Kabupaten Tanggamus sebesar menurun jika dibandingkan dengan dua taun sebelumnya yang sebesar 136 di tahun 2021 dan 106 di tahun 2022. Hal ini juga sejalan dengan sudah tingginya Persentase Persalinan yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan di Kabupaten Tanggamus yaitu mencapai 95,2% di Tahun 2023.

Angka kematian bayi yang rendah menunjukkan peningkatan dalam kesehatan dan kesejahteraan anak-anak, yang juga berkontribusi pada UHH yang lebih tinggi. Faktor-faktor seperti akses ke layanan kesehatan yang baik, imunisasi, dan gizi yang memadai semuanya berperan dalam menurunkan angka kematian bayi. Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran Hidup di Tanggamus pad tahun 2023 sebesar 3,99 jauh menurun jika dibandingkan degan kondisi 5 tahun sebelumnya, pada tahun 2018 AKB sebesar 7,10.

Imunisasi dasar pada bayi adalah salah satu layanan kesehatan penting yang tidak hanya melindungi bayi dari infeksi, tetapi juga mencegah penyebaran penyakit ke anak-anak lain dan orang dewasa di sekitarnya. Hal ini membantu

menghindari wabah penyakit serius dan mematikan. Agar program imunisasi efektif dan dapat menurunkan angka kejadian penyakit, perlu dipastikan bahwa imunisasi dilaksanakan secara lengkap dan dengan kualitas layanan yang sesuai standar. Cakupan imunisasi dasar bayi di Kabupaten Tanggamus sudah sangat baik, mencapai 100% di tahun 2023. Indikator kesehatan Ibu dan Anak selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.30. Indikator Kesehatan Ibu dan Anak Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

INDIKATOR IBU & ANAK	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah lahir Hidup	11.220	11.136	10.992	10.170	10.347	10.090
Jumlah Kasus Kematian Bayi (Kasus)	74	65	54	46	36	47
Angka Kematian Bayi (per 1.000 Kelahiran Hidup)	6,60	5,80	4,91	4,52	3,48	4,66
Kasus Kematian Ibu	12	3	9	14	11	9
Angka Kematian Ibu (per 1.000 Kelahiran)	107	27	82	138	106	89
Persalinan ditolong Nakes (%)	98	98,7	99	98,2	93,7	95,2
Balita mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (%)	98,2	100	95,7	100	95,5	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2023

Angka harapan hidup dan prevalensi penyakit menular seperti tuberkulosis (TBC) sering kali saling berkaitan, terutama di negara-negara dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Tuberkulosis adalah penyakit menular yang sering kali menyerang populasi yang hidup dalam kondisi kumuh dan padat, di mana penularan bakteri *Mycobacterium tuberculosis* lebih mudah terjadi. Prevalensi TBC yang tinggi di masyarakat miskin menyebabkan peningkatan angka kematian dan penurunan angka harapan hidup. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan angka harapan hidup harus mencakup langkah-langkah untuk mengendalikan penyebaran TBC.

Selama tahun 2022 di Kabupaten Tanggamus terdapat 6.373 orang terduga Tuberkulosis, dan 795 orang telah mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar atau cakupan 95,8%. Jumlah seluruh penderita TB Paru sepanjang Tahun 2022 di Kabupaten Tanggamus pada sebanyak 795 orang yang terdiri dari laki – laki sebanyak 514 kasus dan perempuan sebanyak 281 kasus. Kasus Tuberkulosis anak 0-14 tahun sebanyak 67 kasus. Dengan perkiraan insiden tuberkulosis sebanyak 1.942 kasus, maka CDR di Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2022 sebesar 40,9%.

Tabel 2.31. Indikator Tuberkolosis Kabupaten Tanggamus Tahun 2022-2023

NO	URAIAN KASUS TUBERKOLOSIS (TBC)	2022	2023
1	Jumlah Terduga Tuberkulosis (TBC)	6373	121344
2	% Orang Terduga Tuberkulosis (TBC) Mendapatkan Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar	95,8%	90,2%
3	Jumlah Kasus TBC Yang Dilayani	795	879
4	Treatment Coverage (TC-%)	40,9%	38,5%
5	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis Anak (%)	28,75%	29,2%
6	Angka Kesembuhan (<i>Cure Rate</i>) Tuberkulosis	33,6%	34,0%
7	Angka Keberhasilan Pengobatan (<i>Treatment Success Rate/TSR</i>) Semua Kasus Tuberkulosis	60,9%	47,9%

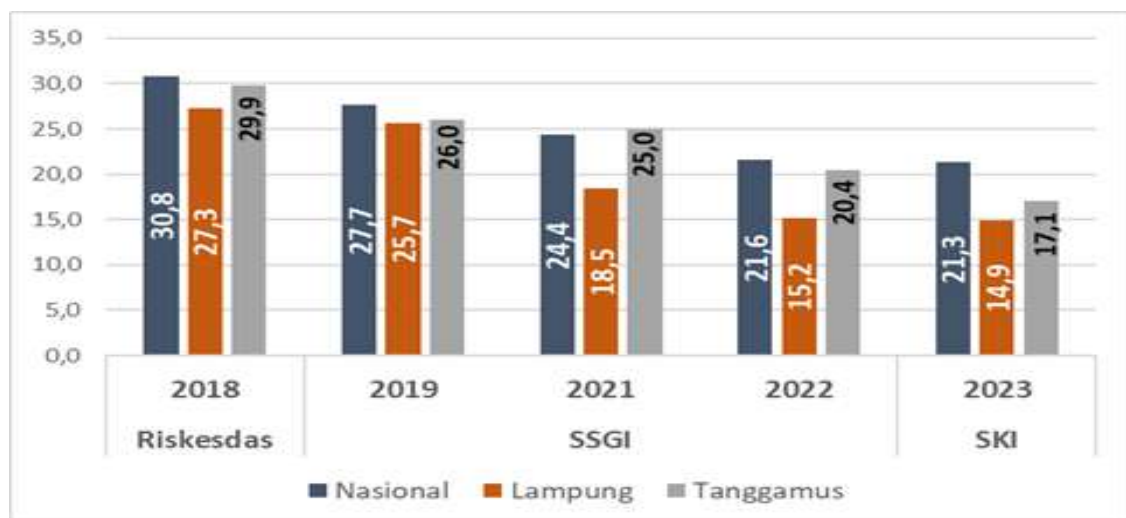
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2023

Dari seluruh kasus Tuberkulosis yang terdaftar dan mendapat pengobatan, jumlah penderita yang sembuh sebanyak 185 orang dengan angka kesembuhan (*cure rate*) 33,6 % jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan mendapat pengobatan lengkap atau *Success rate* sebanyak 484 orang (60,9 %), sedangkan jumlah kematian selama pengobatan tuberkulosis sebanyak 21 jiwa (2,6 %).

2.2.1.11. Status Gizi Balita

Kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan dengan peningkatan status gizinya, terutama pada kelompok umur balita. Penentuan status gizi balita dibagi atas gizi lebih, gizi baik, gizi kurang, dan gizi buruk. Kasus balita kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang) masih menjadi pekerjaan rumah untuk pemerintah pusat maupun daerah di wilayah Indonesia.

Grafik 2.18. Status Gizi Balita Kabupaten Tanggamus 2018-2023



Sumber: Buku Saku SSGI 2022 dan SKI 2023 Dalam Angka

Menurut Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan pada tahun 2018 terdapat 29,9% balita di Kabupaten Tanggamus mengalami masalah stunting. Sedangkan untuk Balita Stunting berdasarkan hasil survei SSGI 2022 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Prevalensi balita stunting pada tahun 2022 sebesar 20,4%, berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 Balita stunting sebanyak 17,1%. Namun penurunan ini masih jauh dari target yang ditetapkan. Indonesia punya target menurunkan pravelensi stunting sampai 14 persen di tahun 2024.

Pada tahun 2023, Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 mencatat prevalensi stunting di Kabupaten Tanggamus sebesar 17,1%, yang meskipun sudah berada di bawah angka nasional, namun tetap menempatkannya sebagai peringkat ke-4 tertinggi di Provinsi Lampung dalam hal masalah stunting. Secara keseluruhan, rata-rata angka stunting di seluruh Provinsi Lampung adalah sekitar 14,9%, dengan Kabupaten Mesuji memiliki angka stunting terendah di provinsi lampung, yakni sebesar 5,0%. Perbandingan ini menyoroti perlunya upaya yang lebih besar dalam pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Tanggamus, pentingnya fokus pada program-program gizi yang lebih efektif dan mendalam di Tanggamus untuk mengatasi masalah stunting secara menyeluruh.

Grafik 2.19. Prevalensi Stunting Provinsi Lampung 2023

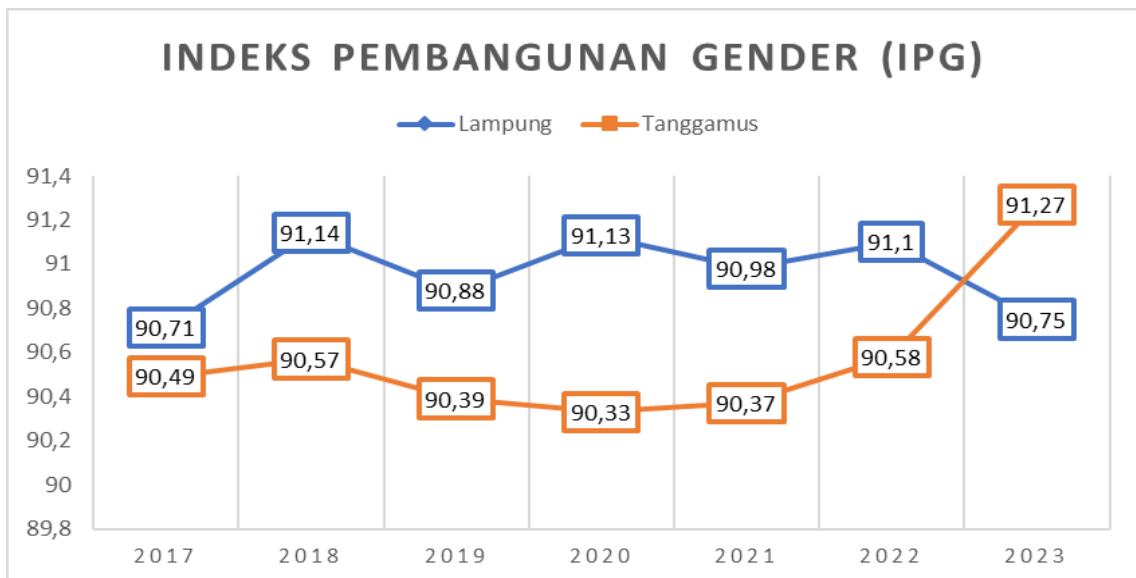


Sumber : Buku Survei Kesehatan Indonesia 2023 Dalam Angka

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kesetaraan gender merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Untuk mengukur pemberdayaan perempuan, digunakan **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**, yang menganalisis ketimpangan gender dengan memperhitungkan rasio Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2017, IPG Provinsi Lampung mencapai 90,49%, naik sedikit menjadi 90,58% pada tahun 2022. Sedangkan IPG Kabupaten Tanggamus menunjukkan angka yang lebih tinggi dari rata-rata provinsi Lampung. Pada tahun 2017 telah mencapai IPG sebesar 90,71% dan mengalami perbaikan di tahun 2022 menjadi 91,1%. Meskipun angka ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih di bawah IPG nasional tahun 2021 yang mencapai 91,27%.

Grafik 2.20. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung Tahun 2017-2022



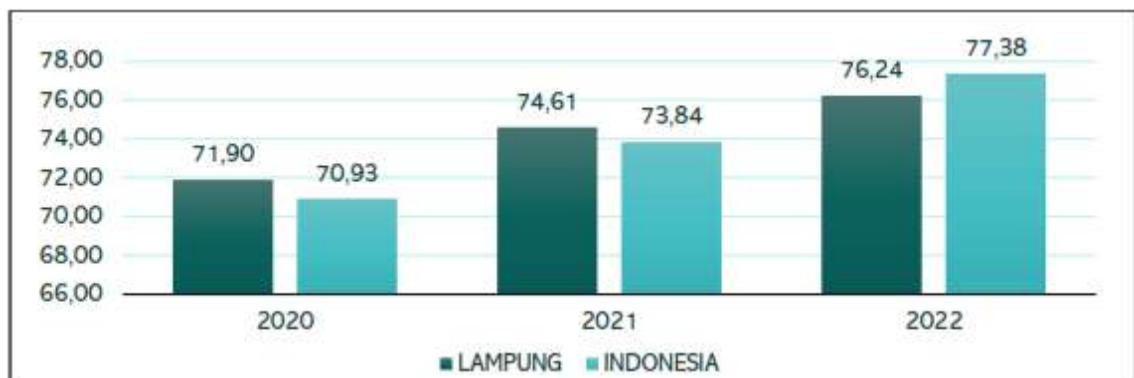
Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Perlindungan anak dapat diukur dengan capaian skor Kabupaten Layak Anak (KLA) di Tanggamus. Pada tahun 2023 skor KLA Tanggamus 740,82% sehingga berhak mendapatkan redikat KLA kategori Nindya. Peningkatan kualitas keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat penting untuk mencapai kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Keluarga yang berkualitas baik membantu anggotanya memahami pentingnya kesetaraan gender dan hak anak, menciptakan lingkungan yang harmonis, dan mendukung pertumbuhan anak yang sehat dan berpendidikan baik, sehingga mereka bisa menjadi kontributor yang lebih baik bagi masyarakat.

Kebijakan pembangunan keluarga diatur oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, yang menjadi dasar Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 06 Tahun 2013. Ini kemudian diperbarui menjadi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2022, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Peraturan ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kualitas keluarga untuk mencapai kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak di tingkat nasional.

Pengukuran Indeks Kualitas Keluarga (IKK) dilakukan hingga level provinsi sejak tahun 2020 hingga 2022. Data menunjukkan bahwa Provinsi Lampung memiliki IKK sebesar 71,90% pada tahun 2020, meningkat menjadi 77,38% pada tahun 2022, meskipun masih di bawah rata-rata nasional.

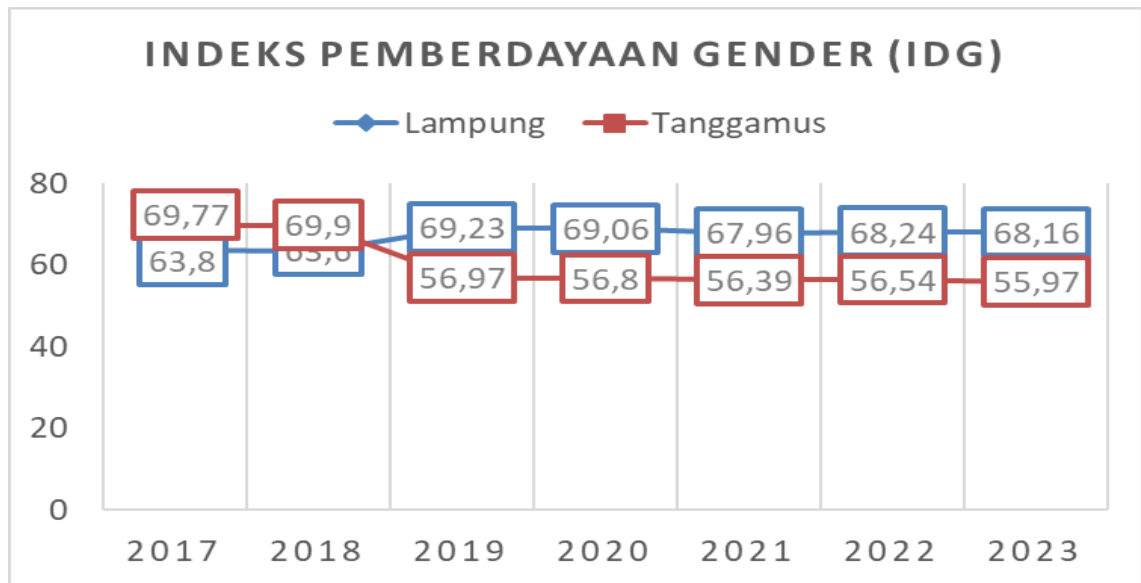
Grafik 2.21. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Lampung Tahun 2020-2022



Sumber: Website Kementerian PP-PA RI, 2023

Indikator lain yang mencerminkan peran serta perempuan dalam pembangunan adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang merupakan indeks komposit yang menggambarkan tingkat keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Capaian IDG Provinsi Lampung dari tahun 2017 hingga 2022 mengalami peningkatan dari 63,6 menjadi 68,24. Meskipun terjadi peningkatan, capaian tersebut masih di bawah capaian nasional yang mencapai 76,59 pada tahun 2022. IDG kabupaten Tanggamus justru menurun, dari 69,77 di tahun 2017 menjadi 56,54 pada tahun 2022.

Grafik 2.22. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung Tahun 2017-2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan dari dua belas indikator kesehatan keluarga yang memiliki rentang nilai antara 0 hingga 1. Menurut Kementerian Kesehatan RI (2016), sebuah keluarga dianggap sehat jika memiliki IKS lebih dari 0,8. Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan untuk mencapai status keluarga sehat meliputi kesehatan ibu dan anak, kondisi penyakit menular dan tidak menular, lingkungan rumah dan sekitarnya, kesehatan mental, serta gaya hidup.

Pendataan yang dilakukan melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) bertujuan untuk mengumpulkan data kesehatan setiap anggota keluarga, terutama terkait dengan 12 indikator yang menandai status kesehatan keluarga. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan yang komprehensif. Indikator-indikator tersebut adalah: (1) Partisipasi keluarga dalam program Keluarga Berencana (KB), (2) Persalinan ibu di fasilitas kesehatan, (3) Pemberian imunisasi dasar lengkap untuk bayi, (4) Pemberian ASI eksklusif untuk bayi, (5) Pemantauan pertumbuhan balita, (6) Pengobatan sesuai standar bagi penderita tuberkulosis paru, (7) Pengobatan teratur bagi penderita hipertensi, (8) Pengobatan dan perawatan bagi penderita gangguan jiwa, (9) Tidak ada anggota keluarga yang merokok, (10) Keanggotaan keluarga dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), (11) Akses keluarga terhadap sarana air bersih, dan (12) Akses atau penggunaan jamban sehat. Pada Tahun 2023 IKS Kabupaten Tanggamus 0,197 meningkat 2 poin dibanding tahun sebelumnya yang hanya 0,177.

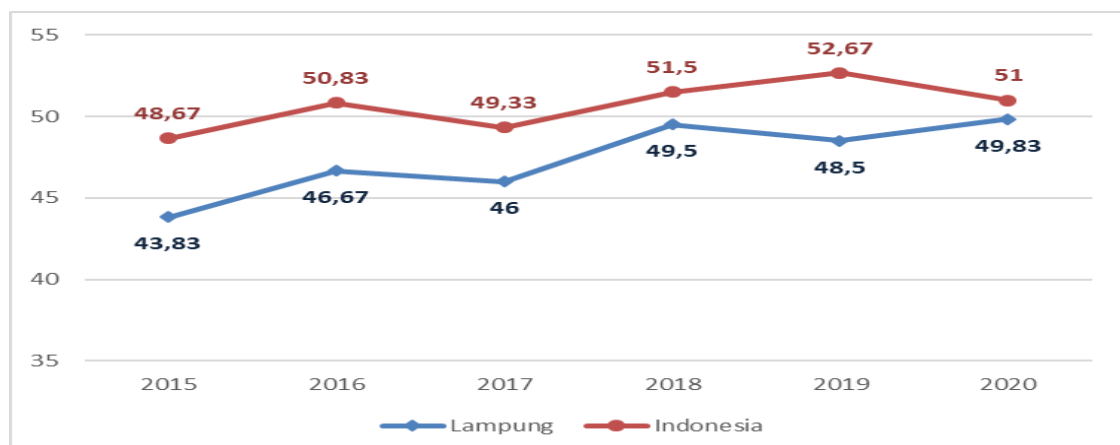
Tabel 2.33. Capaian Indikator Indeks Keluarga Sehat (IKS) kabupaten Tanggamus 2022-2023

Indikator IKS	2022	2023
Keluarga mengikuti program KB *)	56,68%	63,87%
Persalinan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan	94,99%	95,77%
Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap *)	98,40%	98,74%
Bayi mendapatkan ASI Eksklusif	89,24%	90,01%
Pertumbuhan Balita dipantau	95,03%	95,67%
Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar	32,98%	39,22%
Penderita hipertensi yang berobat teratur	42,13%	43,87%
Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan	18,29%	18,78%
Anggota keluarga tidak ada yang merokok *)	45,18%	45,66%
Keluarga sudah menjadi anggota JKN	48,22%	50,34%
Keluarga memiliki akses/menggunakan sarana air bersih	94,28%	94,58%
Keluarga memiliki akses/menggunakan jamban keluarga	83,49%	84,05%
IKS Kabupaten Tanggamus	0,177	0,197

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus

Pembangunan di Provinsi Lampung belum mencapai hasil yang optimal, terlihat dari Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Lampung yang pada tahun 2020 tercatat sebesar 49,53 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai 51 persen. Menurut data Statistik Pemuda Tahun 2022, pemuda berusia 16-30 tahun di Provinsi Lampung mencakup 23,39 persen dari total populasi. Dari kelompok pemuda tersebut, 39,50 persen telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMP, 37,30 persen tamat SMA, dan hanya 8,23 persen yang lulus dari perguruan tinggi. Data ini menunjukkan bahwa potensi pemuda di Provinsi Lampung belum dimanfaatkan secara maksimal. Akibatnya, banyak pemuda yang terlibat dalam perilaku negatif seperti tawuran, bullying, dan balapan liar.

Grafik 2.23. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2015-2020



Sumber: Laporan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Bappenas, 2021

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pemberdayaan pemuda di Lampung agar mereka dapat berkontribusi lebih baik bagi pembangunan daerah dan menghindari perilaku negatif yang merugikan masyarakat.

Aspek kesejahteraan sosial budaya dapat dilihat **dari Indeks Desa Membangun (IDM)**. IDM adalah indikator yang mengukur tingkat pembangunan di tingkat desa, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Ini mencerminkan kesejahteraan masyarakat setempat dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Melalui IDM, kita dapat melihat seberapa baik desa dalam memenuhi kebutuhan dasar penduduknya, serta sejauh mana desa memberikan akses dan peluang bagi warganya untuk berkembang secara ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, IDM dapat memberikan gambaran yang holistik tentang kesejahteraan sosial budaya di suatu wilayah. Pada tahun 2023, skor Indeks Desa Membangun di Tanggamus mengalami perbaikan signifikan. Jumlah desa yang tergolong berkembang mencapai 189, desa maju sebanyak 108 meningkat cukup banyak di bandingkan tahun 2022 yang hanya terdapat 76 desa maju. Pada tahun 2023, terdapat penambahan 2 desa mandiri dan tidak ada desa yang tergolong tertinggal lagi. Pembangunan Desa semakin meningkat di tahun 2024, terjadi peningkatan status desa berkembang menjadi desa maju sehingga menjadi 140 Desa dan juga peningkatan status desa maju menjadi desa mandiri sehingga berjumlah 11 Desa (3,68%).

Tabel 2.34. Jumlah Desa menurut satus IDM di Kabupaten Tanggamus Tahun 2015-2023

STATUS PEKON	TAHUN									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sangat Tertinggal	44	44	25	37	4	0	0	0	0	0
Tertinggal	177	177	173	174	53	24	6	3	0	0
Berkembang	74	74	95	81	218	236	242	220	189	148
Maju	4	4	6	7	24	39	51	76	108	140
Mandiri	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11
JUMLAH	299	299	299	299	299	299	299	299	299	299

Sumber: Bapperida Kabupaten Tanggamus, 2024

Indeks Pembangunan Kebudayaan Capaian indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah 55,71. Angka capaian ini telah melebihi target yang ditetapkan pada RPJMD Tahun 2020-2024 yaitu 55,3 dan berada di atas capaian nasional. Akan tetapi pada beberapa dimensi, capaian Provinsi Lampung masih berada di bawah capaian nasional, yaitu

dimensi Ekonomi Budaya, Budaya Literasi dan Gender. Pada capaian dimensi Ekonomi Budaya, capaian Provinsi Lampung hanya mencapai 18,61 sedangkan nasional 26,88. Pada dimensi Budaya Literasi Provinsi Lampung hanya mencapai 53,98 sedangkan nasional 57,40. Sedangkan pada dimensi Gender Provinsi Lampung hanya mencapai 57,61 sedangkan nasional 59,30.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1. Pertumbuhan PDRB

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), terdapat dua jenis penilaian PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2023 mencapai Rp.11.919,46 Miliar meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp.11,384,33 Miliar. Peningkatan PDRB Kabupaten Tanggamus dari tahun 2022 ke tahun 2023 menunjukkan tanda-tanda positif dari pemulihan ekonomi di wilayah tersebut. Laju pertumbuhan yang mencapai 4,70% merupakan indikasi bahwa perekonomian telah mulai bangkit kembali setelah mengalami tekanan akibat pandemi *Covid-19*. Pertumbuhan ini juga bisa dilihat sebagai hasil dari berbagai upaya pemerintah dan masyarakat dalam mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan produktivitas di berbagai sektor.

Tabel 2.35. Nilai (dalam Miliar Rupiah) dan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

LAPANGAN USAHA	PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA (Miliar Rupiah)									
	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.511,11	1,03	4.413,19	-2,17	4.323,36	-2,04	4.426,39	2,38	4.482,59	1,27
B Pertambangan dan Penggalian	768,75	5,61	787,98	2,5	740,07	-6,08	705,89	-4,62	733,88	3,97
C Industri Pengolahan	715,75	5,05	690,05	-3,59	711,04	3,04	716,25	0,73	721,78	0,77
D Pengadaan Listrik dan Gas	8,93	11,59	9,28	3,93	8,35	-9,97	8,93	6,92	9,03	1,1
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,31	8,36	13,43	9,1	14,44	7,52	14,56	0,88	14,99	2,93
F Konstruksi	773,85	9,62	754,42	-2,51	816,81	8,27	848,13	3,83	913,45	7,7
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.176,37	10,64	1.079,90	-8,2	1.261,37	16,8	1.404,71	11,36	1.544,23	9,93
H Transportasi dan Pergudangan	567,14	9,48	538,51	-5,05	569,37	5,73	694,04	21,89	800,42	15,33
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	194,64	10,04	182,41	-6,28	179,81	-1,43	205,22	14,13	238,46	16,2
J Informasi dan Komunikasi	419,89	9,68	455,74	8,54	486	6,64	487,94	0,4	524,41	7,47
K Jasa Keuangan dan Asuransi	196,4	3,61	202,3	3	207,84	2,74	207,42	-0,2	215,34	3,82
L Real Estate	330,1	6,66	319,1	-3,33	324,28	1,62	336,51	3,77	338,42	0,57

LAPANGAN USAHA	PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA (Miliar Rupiah)									
	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
M, N Jasa Perusahaan	8,61	3,2	8,49	-1,32	8,54	0,49	10,06	17,87	10,62	5,5
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	452,09	5,21	469,7	3,89	491,26	4,59	485,63	-1,15	492,46	1,41
P Jasa Pendidikan	465,07	9,86	476,85	2,53	484,55	1,61	498,13	2,8	508,31	2,04
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	138,85	6,6	153,55	10,59	179,82	17,11	179,53	-0,16	188,74	5,13
R,S,T,U Jasa Lainnya	132,24	9,43	124,93	-5,53	122,31	-2,09	154,98	26,71	182,33	17,65
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	10.872,10	5,02	10.679,82	-1,77	10.929,22	2,34	11.384,33	4,16	11.919,46	4,70

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui juga bahwa pertumbuhan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan terjadi pada seluruh lapangan usaha. Pada tahun 2023 pertumbuhan yang cukup tinggi terjadi pada jasa lainnya 17,56%, penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 16,20% dan pada sektor Transportasi dan Pergudangan 15,33%. Terdapat beberapa sektor yang perlu mendapatkan perhatian lebih untuk meningkatkannya, seperti sektor industri dan pengolahan yang hanya mencatatkan pertumbuhan sebesar 0,77%. Sektor industri dan pengolahan harus terus didorong melalui upaya kolaboratif dari pemerintah, pelaku industri, dan stakeholder lainnya untuk meningkatkan investasi, mengadopsi teknologi baru, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menciptakan kebijakan dan regulasi yang lebih mendukung pertumbuhan industri pengolahan.

Tabel 2.36. Nilai (dalam Miliar Rupiah) dan Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanggamus Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

LAPANGAN USAHA	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (Miliar Rupiah)									
	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.421,09	41,18	6.413,05	41,46	6.467,69	39,64	7.017,74	38,78	7.516,06	38,33
B Pertambangan dan Penggalian	1.086,21	6,97	1.041,41	6,73	1.159,44	7,11	1.361,70	7,52	1.315,34	6,71
C Industri Pengolahan	1.100,08	7,06	1.074,56	6,95	1.143,12	7,01	1.196,31	6,61	1.240,34	6,33
D Pengadaan Listrik dan Gas	12,45	0,08	12,83	0,08	11,05	0,07	11,91	0,07	12,12	0,06
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18,59	0,12	20,39	0,13	22,13	0,14	22,65	0,13	23,47	0,12
F Konstruksi	1.074,84	6,89	1.043,50	6,75	1.179,80	7,23	1.288,86	7,12	1.419,89	7,24
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.595,92	10,24	1.500,56	9,7	1.755,99	10,76	2.128,15	11,76	1.408,91	12,28
H Transportasi dan Pergudangan	822,25	5,27	795,88	5,15	856,77	5,25	1.141,97	6,31	1.471,98	7,51
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	313,08	2,01	296,63	1,92	294,13	1,8	340,26	1,88	396,34	2,02
J Informasi dan Komunikasi	587,4	3,77	636,18	4,11	660	4,04	666,32	3,68	716,89	3,66
K Jasa Keuangan dan Asuransi	296,15	1,9	304,9	1,97	328,47	2,01	343,99	1,9	360,75	1,84
L Real Estate	463,2	2,97	458	2,96	468,94	2,87	498,29	2,75	510,73	2,6

LAPANGAN USAHA	PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (Miliar Rupiah)									
	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
M, N Jasa Perusahaan	13,29	0,09	13,44	0,09	13,63	0,08	16,68	0,09	18,13	0,09
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	734,8	4,71	768,86	4,97	802,39	4,92	809,12	4,47	831,67	4,24
P Jasa Pendidikan	660,33	4,24	685,15	4,43	710,24	4,35	754,85	4,17	796,34	4,06
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	200,25	1,28	223,5	1,44	266,85	1,64	266,7	1,47	288,66	1,47
R,S,T,U Jasa Lainnya	190,99	1,23	178,79	1,16	176,23	1,08	230,23	1,27	281,54	1,44
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	15.590,93	100	15.467,66	100	16.316,87	100	18.095,74	100	19.609,17	100

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

Berdasarkan data yang tertera dalam tabel, dapat diketahui bahwa PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2023 mencapai Rp19.609,17 miliar, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar Rp18.095,74 miliar. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap menjadi kontributor utama dengan distribusi sebesar 38,33%. Di sisi lain, sektor Pengadaan Listrik dan Gas memiliki distribusi paling rendah, hanya sebesar 0,06%. Meskipun sektor pertanian masih mendominasi, tren menunjukkan bahwa kontribusinya terus menurun. Sebaliknya, kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta sektor Transportasi dan Pergudangan terus meningkat pada tahun 2023, masing-masing mencapai 12,28% dan 7,51%. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dinamika ekonomi, di mana sektor-sektor non-pertanian mulai mengambil peran lebih signifikan dalam perekonomian.

Tabel 2.37. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanggamus Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	70,25	71,31	71,18	71,54	72,53
2. Konsumsi LNPRT	1,61	1,58	1,60	1,53	1,61
3. Konsumsi Pemerintah	10,68	10,67	10,22	8,93	8,62
4. PMTB	25,54	24,91	25,15	24,47	24,29
5. Perubahan Inventori	0,02	0,34	0,24	0,28	0,16
6. Net Ekspor	(8,10)	(8,81)	(8,39)	(6,75)	(7,21)
Total PDRB	100	100	100	100	100

*Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

Selama periode 2019–2023, sebagian besar produk di Kabupaten Tanggamus dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ekspor memiliki peran signifikan dengan 15 hingga 23 persen produk diekspor keluar kabupaten, sementara impor memenuhi 22 hingga 30 persen permintaan domestik.

Pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga cukup besar dengan kontribusi 24 hingga 25 persen, sedangkan konsumsi akhir pemerintah berkisar antara 8,62 hingga 10,68 persen, menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Selama 2019-2023, perdagangan antar daerah menunjukkan nilai impor cenderung lebih tinggi dari ekspor, Kabupaten Tanggamus masih banyak menggunakan barang dan jasa dari wilayah lain. Namun, dalam dua tahun terakhir, nilai net ekspor menunjukkan tren penurunan, menandakan peningkatan dalam keseimbangan perdagangan

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.34. Selama periode 2019-2023, sebagian besar produk domestik dan impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga. Konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan baik dalam nominal (ADH Berlaku) maupun riil (ADH Konstan), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk dan jumlah rumah tangga. Peningkatan jumlah penduduk mendorong kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB selama periode tersebut cukup berfluktuatif, dengan titik tertinggi pada tahun 2023 sebesar 72,53 persen dan titik terendah pada tahun 2019 sebesar 70,25 persen.

Tabel 2.38. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tanggamus Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (Milyar Rp)	10.952,88	11.030,43	11.614,32	12.945,35	14.222,22
b. ADHK 2010 (Milyar Rp)	7.395,77	7.293,65	7.435,18	7.807,57	8.191,80
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	70,25	71,31	71,18	71,54	72,53
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	68.715,77	71.570,39	74.513,81	82.193,72	89.394,52
b. ADHK 2010	46.399,32	47.324,52	47.701,75	49.572,49	51.490,01
Rata-rata konsumsi per- kapita/tahun (Ribu Rp)					
a. ADHB	18.289,52	17.227,64	17.984,20	19.827,52	21.466,14
b. ADHK 2010	12.349,73	11.391,44	11.513,00	11.958,33	12.364,20
Pertumbuhan					
a. Total konsumsi RT	5,34	-1,38	1,94	5,01	4,92
b. Per-RT	3,01	1,99	0,80	3,92	3,87
c. Perkapita	4,24	-7,76	1,07	3,87	3,39
Jumlah RT (unit)	159.394	154.120	155.868	157.498	159.095
Jumlah penduduk (org)	598.861	640.275	645.807	652.898	662.542
Keterangan :					
* : Angka Sementara					
** : Angka Sangat Sementara					

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

Pandemi COVID-19 mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga, dengan peningkatan belanja didorong oleh melimpahnya barang dan bantuan social selama 2020-2022. Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, setiap rumah tangga di Tanggamus rata-rata menghabiskan sekitar empat juta Rupiah per bulan untuk konsumsi, termasuk makanan dan non-makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dll). Pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga per tahun meningkat dari 46.399,32 ribu Rupiah pada tahun 2019, menjadi 51.490,01 ribu Rupiah pada tahun 2023.

Dalam ADH Konstan 2010, rata-rata konsumsi per rumah tangga tumbuh 0,8-4 persen, dengan pertumbuhan tertinggi 3,92 persen pada 2022. Konsumsi per kapita juga meningkat, meskipun sempat turun pada 2020 akibat pandemi yang mengubah pola konsumsi menjadi lebih banyak melalui pembelian online.

2.3.1.2. PDRB Perkapita

PDRB perkapita diperoleh dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun pada waktu tertentu. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Tabel 2.39. PDRB Perkapita Kabupaten Tanggamus Tahun 2019-2023

Nilai PDRB/GRDP (Miliar Rp)					
	2019	2020	2021	2022	2023
- PDRB ADHB	15.590,93	15.467,65	16.316,87	18.095,73*	19.609,17**
- PDRB ADHK	10.872,10	10.679,82	10.929,22	11.384,33*	11.919,46**
PDRB per Kapita					
- PDRB ADHB	26.034,31	24.222,60	25.238,43	27.644,34*	29.596,87**
- PDRB ADHK	1.854,63	16.724,77	16.904,98	17.391,52*	17.990,50**
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK	4	-8	1	2,88*	3,44**
Jumlah Penduduk /	598.861	638.563	646.509	654.591	662.542
Pertumbuhan Penduduk	1,06	6,63	1,24	1,25	1,21

*) angka sementara ; **) angka sangat sementara

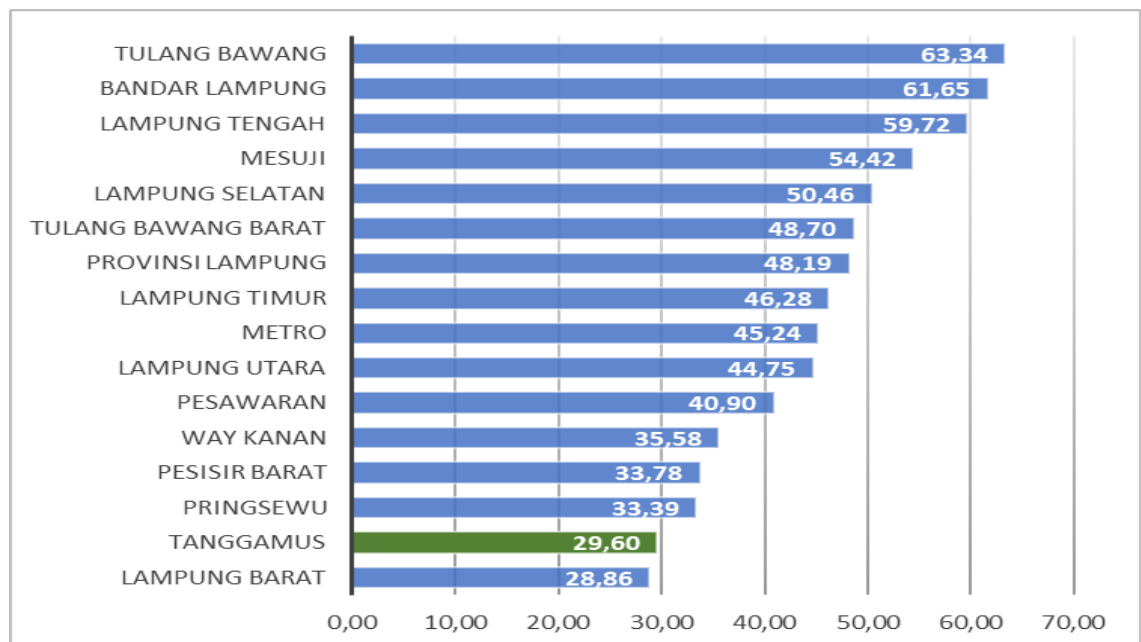
Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

PDRB per kapita Kabupaten Tanggamus di tahun 2023 ialah sebesar 29,59 Miliar rupiah, dengan pertumbuhan sebesar 3,44 persen. Secara umum, PDRB per kapita Kabupaten Tanggamus menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 hingga 2023, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Namun, pandemi

COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan penurunan PDRB per kapita. Pertumbuhan PDRB per kapita secara riil pada tahun 2021 juga mengalami perbaikan, mencapai 1,46 kali lipat dibanding tahun sebelumnya, dan 3,03 kali lipat pada tahun 2022.

Berdasarkan data PDRB per kapita tahun 2023, Kabupaten Tanggamus mencatat nilai sebesar 29,59 juta Rupiah, yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata PDRB per kapita Provinsi Lampung sebesar 48,19 juta Rupiah. Bandar Lampung, sebagai ibu kota provinsi, menunjukkan kekuatan ekonominya dengan PDRB per kapita mencapai 61,64 juta Rupiah, lebih dari dua kali lipat dibandingkan Tanggamus. Dibandingkan Kabupaten tetangga, seperti Pringsewu dan Pesisir Barat juga memiliki PDRB per kapita yang lebih tinggi, masing-masing sebesar 33,39 juta Rupiah dan 33,78 juta Rupiah, sekitar 12,8% dan 14,2% lebih tinggi dari Tanggamus. Ini menunjukkan bahwa meskipun Tanggamus masih tertinggal, terutama dibandingkan dengan wilayah-wilayah tersebut, terdapat peluang untuk peningkatan ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor potensial guna mengejar ketertinggalan

Grafik 2.24. Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Tanggamus dengan Kabupaten/Kota disekitarnya Tahun 2023



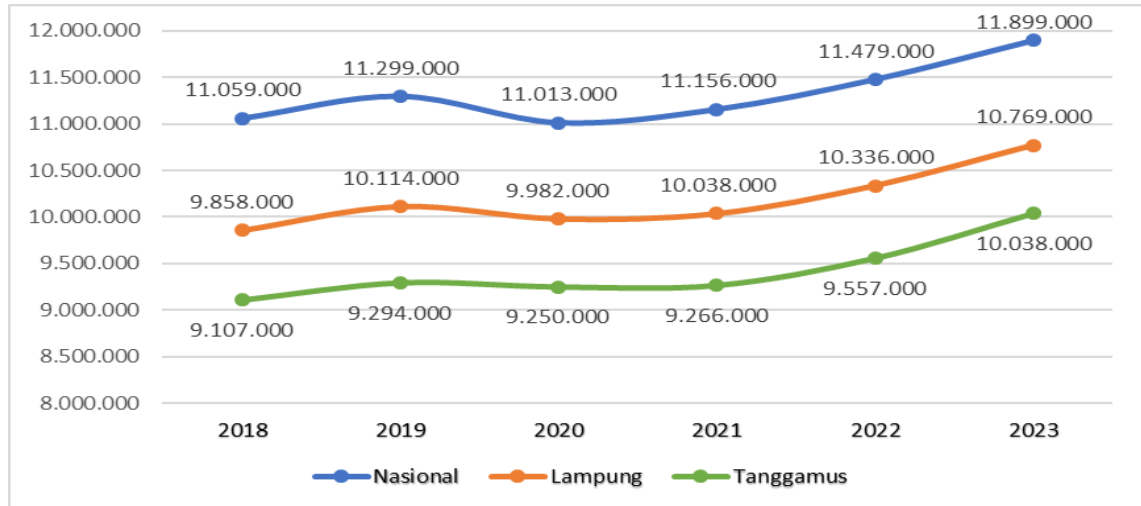
Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

2.3.1.3. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Dari dimensi ekonomi, capaian pembangunan manusia yang dilakukan di Kabupaten Tanggamus menunjukkan hasil yang relatif lebih baik dari pada capaian dalam dimensi pendidikan dan kesehatan. Pengeluaran per kapita

Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 sebesar Rp.9.557.000,- meningkat menjadi Rp.10.038.000,- pada tahun 2023.

Grafik 2.25. Pengeluaran PerKapita Nasional, Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024

Berdasarkan grafik di atas, terlihat pengeluaran per kapita yang merupakan representasi dimensi standar hidup layak senantiasa mengalami tren peningkatan, pada tahun 2018 pengeluaran per kapita Kabupaten Tanggamus mencapai Rp.9.107.000,- dan terus meningkat sampai tahun 2023 menjadi sebesar Rp.10.038.000,- meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp.9.250.000,- akibat mewabahnya pandemi *Covid-19* yang menghambat kemampuan daya beli masyarakat. Pengeluaran per kapita yang terus meningkat dari tahun ke tahun menggambarkan bahwa semakin membaiknya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan tetapi nilai tersebut masih dibawah capaian Provinsi Lampung dan Nasional. Hal ini menunjukkan daya saing perekonomian yang positif di Kabupaten Tanggamus.

2.3.1.4. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani merupakan nilai tukar (*term of trade*) antara barang/produk pertanian dengan barang-barang konsumsi dan faktor produksi yang dibutuhkan petani yang dinyatakan dalam persen. NTP berfluktuasi dari waktu ke waktu tergantung dari perkembangan harga barang yang dijual petani (It) dan barang dan jasa yang dikonsumsi petani (Ib). Apabila harga produk pertanian yang dihasilkan petani naik dengan persentase lebih besar dari persentase kenaikan barang dan jasa yang dibayar petani, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka NTP naik dan dengan sendirinya pendapatan petani naik

relatif lebih besar dari kenaikan pengeluaran atau terjadi surplus. Dengan demikian secara konseptual, hubungan antara NTP dan penambahan pendapatan petani sangat erat, maka NTP merupakan indikator yang relevan untuk menunjukkan perkembangan tingkat kesejahteraan petani.

Secara umum ada tiga macam pengertian NTP yaitu:

- NTP>100, berarti petani mengalami **surplus**. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya; dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya.
- NTP=100, berarti petani mengalami **impas/breakeven**. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan.
- NTP<100, berarti petani mengalami **defisit**. Kenaikan harga barang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya.

Tabel 2.40. Nilai Tukar Petani (NTP) Per Kecamatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

NO	KECAMATAN	NILAI TUKAR PETANI (NTP)					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cukuh Balak	195.87	165.74	46,83	64,10	91.80	104,86
2	Pugung	76.99	64.23	71,17	73,49	110.07	115,60
3	Talang Padang	181.57	174.03	77,09	78,95	106.04	113,37
4	Pulau Panggung	122.00	146.62	81,28	81,77	93.13	105,05
5	Kota Agung	221.26	204.41	39,50	78,95	100.93	109,90
6	Wonosobo	144.50	153.30	93,24	95,49	104.72	111,81
7	Kelumbayan	297.54	189.99	54,58	59,95	45.08	111,18
8	Sumberejo	200.77	181.71	37,72	75,57	103.63	112,21
9	Ulu Belu	413.17	303.41	32,62	80,97	107.92	112,75
10	Pematang Sawa	115.44	102.01	41,52	68,38	89.16	112,53
11	Semaka	53.89	60.25	95,65	95,98	99.25	104,01
12	Gisting	361.05	403.58	66,23	129,53	103.63	110,69
13	Kota Agung Timur	105.78	92.60	178,75	135,14	112.26	110,69
14	Kota Agung Barat	102.84	124.48	123,45	116,73	101.77	104,56
15	Air Nanningan	698.23	442.22	23,77	89,69	102.24	109,68
16	Limau	555.50	404.24	17,00	80,97	46.30	115,71
17	Gunung Alip	120.80	103.30	125,51	131,69	114.26	113,90
18	Bandar Negeri Semong	120.16	181.02	69,06	73,86	90.14	109,85
19	Bulok	95.73	124.25	119,01	119,20	113.61	114,27
20	Kelumbayan Barat	496.99	275.97	47,57	81,63	88.70	114,25
	Jumlah Rata-Rata	147.14	140.10	71,09	88,03	89.22	117,13

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, 2024

Berdasarkan tabel di atas, Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Tanggamus dari tahun 2018 hingga 2019 menunjukkan nilai yang lebih besar dari 100, yang menandakan surplus. Namun, pada tahun 2020, NTP mengalami penurunan drastis menjadi 71,09 (defisit), disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang memengaruhi sektor kesehatan dan ekonomi. Pada tahun 2021, NTP kembali meningkat meskipun masih di bawah 100, yaitu sebesar 88,03. Tren peningkatan berlanjut pada tahun 2022 dengan NTP mencapai 89,22. Pada tahun 2023, NTP kembali surplus dengan nilai sebesar 117,13, menunjukkan pemulihan dan peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten Tanggamus.

Tabel 2.41. Nilai Tukar Petani (NTP) menurut subsektor di Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2023

SUBSEKTOR	2018	2019	2020	2021	2022	2023
NTP Tanaman Pangan	-	-	-	112,79	106,13	111,88
NTP Hortikultura	-	-	-	101,14	96,28	109,23
NTP perkebunan	103,21	101,64	78,6	86,41	90,11	92,11
NTP peternakan	74,21	72,11	62,11	69,2	87,23	88,67
NTP TOTAL	147,14	140,1	71,09	88,03	89,22	117,13

Sumber: Dinas KPTPH dan Dinas Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Tanggamus, 2024

Pada subsektor tanaman pangan, NTP mengalami fluktuasi dari 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, NTP tercatat sebesar 112,79, namun turun menjadi 106,13 pada tahun 2022, dan kemudian meningkat kembali menjadi 111,88 pada tahun 2023, menunjukkan pemulihan kesejahteraan petani tanaman pangan. Untuk hortikultura, NTP pada tahun 2021 adalah 101,14, turun ke 96,28 pada tahun 2022, dan kembali naik signifikan ke 109,23 pada tahun 2023, menandakan perbaikan dalam subsektor ini.

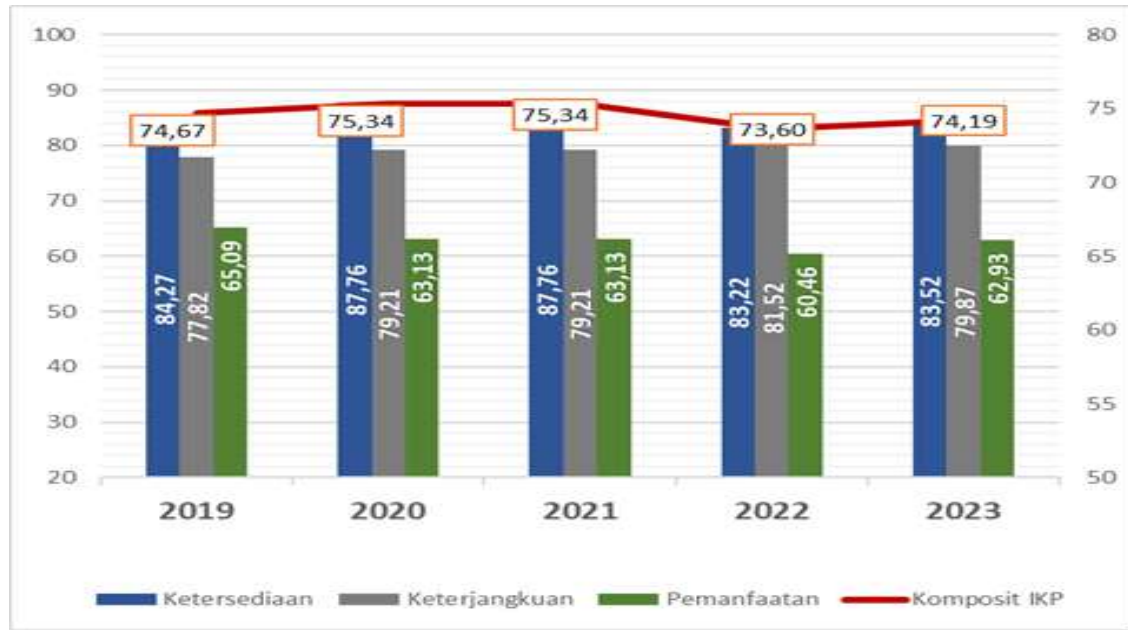
Subsektor perkebunan dan peternakan menunjukkan tren yang bervariasi dari 2018 hingga 2023. NTP perkebunan menurun dari 103,21 pada tahun 2018 menjadi 78,6 pada tahun 2020, kemudian pulih bertahap menjadi 92,11 pada tahun 2023. Sementara itu, NTP peternakan turun dari 74,21 pada tahun 2018 ke 62,11 pada tahun 2020, namun kemudian meningkat menjadi 88,67 pada tahun 2023. Kedua subsektor ini mengalami penurunan akibat pandemi, tetapi menunjukkan pemulihan yang kuat dalam beberapa tahun terakhir.

2.3.1.5. Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Ketahanan pangan bersifat multidimensi, sehingga penilaian terhadap situasi ketahanan pangan membutuhkan ukuran yang komprehensif dengan melibatkan serangkaian indikator. Indikator-indikator tersebut digabungkan untuk menghasilkan nilai komposit ketahanan pangan, yang selanjutnya

dijadikan sebagai Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Grafik 2.26. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Tanggamus 2019-2023

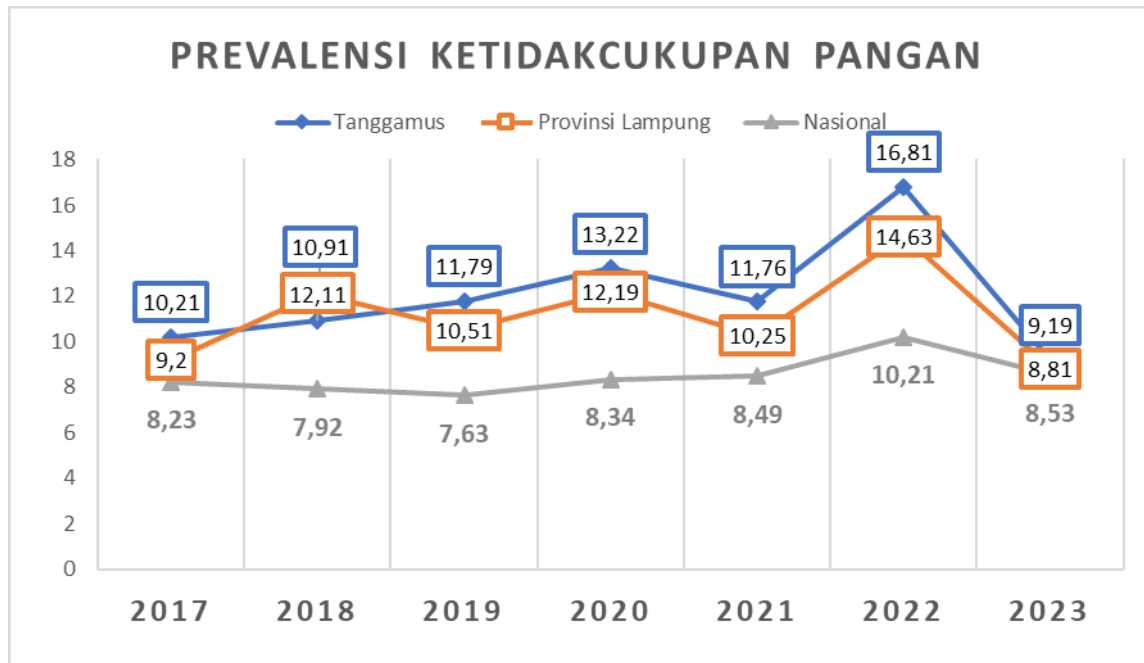


Sumber: Badan Pangan Nasional, 2020-2023

Kinerja Bidang Ketahanan Pangan difokuskan pada kegiatan peningkatan kesejahteraan petani serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemantapan ketahanan pangan daerah dengan melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 sebesar 74,19 naik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 73,60. Aspek yang mengalami peningkatan adalah Ketersediaan dan Pemanfaatan, sedangkan aspek keterjangkauan justru menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Prevalensi ketidakcukupan pangan, atau Prevalence of Undernourishment (PoU), adalah persentase orang yang tidak mendapatkan cukup makanan untuk memenuhi kebutuhannya. PoU dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kondisi kerawanan pangan dan gizi. Di Kabupaten Tanggamus, terjadi peningkatan PoU yang signifikan, dari 10,21% pada tahun 2017 hingga mencapai puncaknya di 16,81% pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023, terdapat penurunan drastis hingga menjadi 9,19%, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam ketahanan pangan di wilayah ini.

Grafik 2.27. Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2023



Sumber: Badan Pangan Nasional, 2020-2023

Untuk melihat capaian pembangunan Bidang Ketahanan Pangan maka disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Tanggamus disusun untuk penyediaan data dan informasi tentang situasi Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang akurat dan komprehensif yang dapat dinilai dari 3 aspek yaitu, 1) Ketersediaan Pangan; 2) Akses Terhadap Pangan; dan 3) Pemanfaatan Pangan (konsumsi pangan, kesehatan, dan gizi), sehingga dapat digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan ketahanan pangan secara menyeluruh dan perencanaan program-program yang berkaitan dengan masalah ketahanan pangan dan gizi secara umum, kemiskinan dan stunting sehingga dapat dilakukan intervensi secara lebih tepat, efektif, dan efisien. Disamping itu, Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ini dapat dijadikan upaya deteksi dini (*Early Warning System*) untuk permasalahan kerawanan pangan dan gizi.

Dari 3 aspek selanjutnya dijabarkan menjadi 6 Indikator yaitu, 1) Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk; 2) Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga; 3) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa; 4) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara; 5) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa; 6) Rasio jumlah tenaga Kesehatan terhadap jumlah penduduk desa.

Pekon/Kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi dengan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Wilayah Rentan Pangan dengan klasifikasi :
 - a) Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi;
 - b) Prioritas 2 rentan pangan sedang; dan
 - c) Prioritas 3 rentan pangan rendah.
- 2) Wilayah Tahan Pangan dengan klasifikasi :
 - a) Prioritas 4 tahan pangan rendah;
 - b) Prioritas 5 tahan pangan sedang; dan
 - c) Prioritas 6 tahan pangan tinggi.

Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security And Vulnerability Atlas/FSVA*) Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 menunjukkan bahwa desa rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 20 desa (6,62 %) dari 302 desa yang ada di Kabupaten Tanggamus, yang terdiri dari 0 desa (0 %) Prioritas 1; 7 desa (2,32 %) Prioritas 2; 13 desa (4,30%) Prioritas 3; sedangkan Prioritas 4-6 terdiri dari 108 desa (35,76 %) prioritas 4: 115 desa (38,08 %) Prioritas 5: dan 59 desa (19,50 %) Prioritas 6.

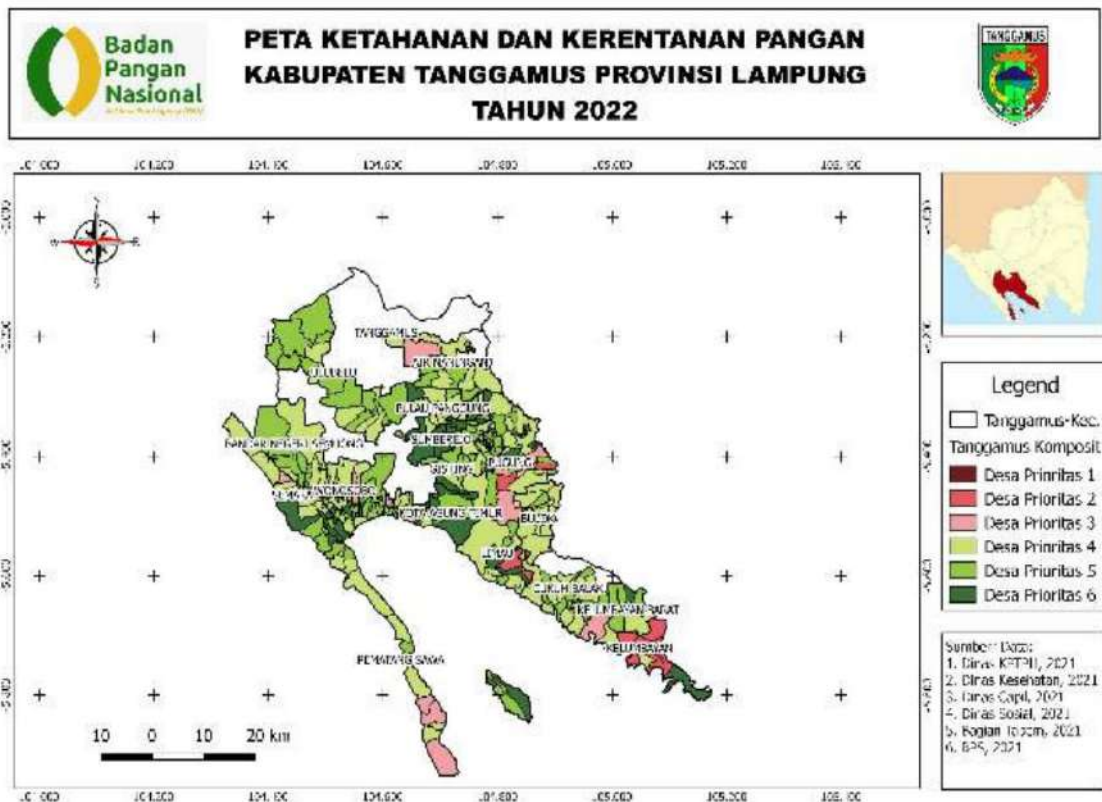
Penjabaran Peta Komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 untuk masing-masing kecamatan dan pekon sebagai berikut:

- 1) Wilayah Rentan Pangan:
 - a) Desa Prioritas 1 sebanyak 0 desa (0 %);
 - b) Desa Prioritas 2 sebanyak 7 desa (2,32 %), tersebar di Kecamatan Pugung (2 desa), Kecamatan Kelumbayan (4 desa), Kecamatan Limau (1 desa);
 - c) Desa Prioritas 3 sebanyak 13 desa (4,30 %), tersebar di Kecamatan Wonosobo (1 desa), Kecamatan Semaka (2 desa), Kecamatan Kota Agung (1 desa), Kecamatan Pematang Sawa (3 desa), Kecamatan Air Nainingan (1 desa), Kecamatan Talang Padang (1 desa), Kecamatan Pugung (3 desa), dan Kelumbayan (1 desa).
- 2) Wilayah Tahan Pangan:
 - a) Desa Prioritas 4 sebanyak 108 desa (38,08 %) tersebar di kecamatan : Wonosobo (8 desa), Semaka (8 desa), Bandar Negeri Semuong (6 desa), Kota Agung (7 desa), Pematang Sawa (8 desa), Kotaagung Timur (1 desa), Kotaagung Barat (2 desa), Pulau Panggung (10 desa), Ullu Belu (5 desa),

Air Naningan (4 desa), Talang Padang (6 desa), Sumberejo (1 desa), Gisting (2 desa), Gunung Alip (4 desa), Pugung (9 desa), Bulok (9 desa), Cuku Balak (8 desa), Kelumbayan (2 desa), Limau (6 desa), Kelumbayan Barat (1 desa).

- b) Desa Prioritas 5 sebanyak 115 desa (38,08 %) tersebar di kecamatan : Wonosobo (14 desa), Semaka (5 desa), Bandar Negeri semuong (5 desa), Kota Agung (7 desa), Pematang Sawa (3 desa), Kotaagung Timur (4 desa), Kotaagung Barat (11 desa), Pulau Panggung (6 desa), Ulu Belu (11 desa), Air Naningan (5 desa), Talang Padang (9 desa), Sumberejo (2 desa), gisting (6 desa), Gunung Alip (6 desa), Pugung (6 desa), Bulok (1 desa), Cukuh Balak (8 desa), Limau (2 desa), Kelumbayan (4 desa).
- c) Desa Prioritas 6 sebanyak 59 desa (19,50 %) tersebar di kecamatan : Wonosobo (5 desa), Semaka (7 desa), Kota Agung (1 desa), Kotaagung Timur (1 desa), Kotaagung Barat (3 desa), Pulau Panggung (5 desa), Sumberejo (10 desa), Gisting (1 desa), Gunung Alip (2 desa), Pugung (7 desa), Cukuh Balak (3 desa), Kelumbayan (1 desa), Limau (2 desa), Kelumbayan Barat (1 desa).

Gambar 2.23. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Tanggamus Tahun 2022



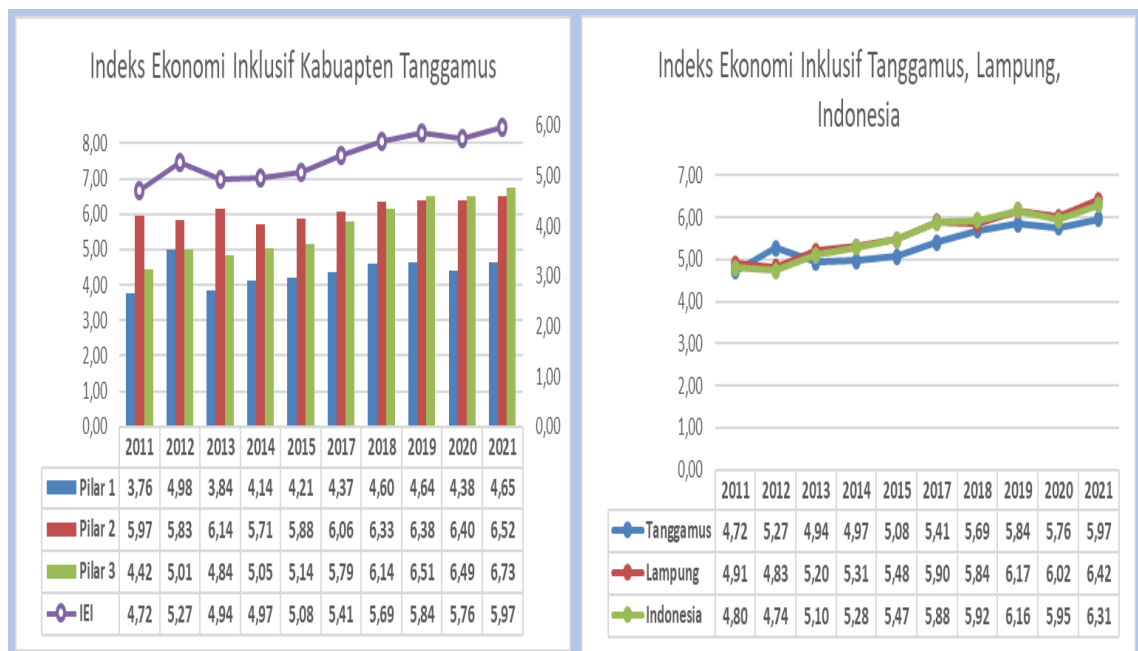
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, 2023

2.3.1.6. Inklusifitas Pembangunan Ekonomi

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur sejauh mana pembangunan ekonomi di Indonesia melibatkan seluruh lapisan masyarakat melalui tiga aspek utama: pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Indeks ini terdiri dari tiga pilar: (1) Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi; (2) Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan; dan (3) Perluasan Akses dan Kesempatan.

Secara keseluruhan, indeks ekonomi inklusif Kabupaten Tanggamus menunjukkan peningkatan dari tahun 2011 hingga 2021, meskipun tetap berada di bawah rata-rata indeks Provinsi Lampung dan nasional. Pada tahun 2021, indeks ekonomi inklusif Tanggamus tercatat sebesar 5,97. Rinciannya, Pilar 1: Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi berada di angka 4,65; Pilar 2: Pemerataan Pendapatan dan Pengurangan Kemiskinan sebesar 6,52; dan capaian Pilar 3 Perluasan Akses dan Kesempatan sebesar 6,73

Grafik 2.28. Perkembangan Indeks Ekonomi Inklusif Kabupaten Tanggamus Tahun 2011-2021



Sumber : Bappenas 2022 (<http://www.inklusif.bappenas.go.id>)

2.3.1.7. Ekonomi Hijau

Ekonomi Hijau (*Green Economy*) mengacu pada sistem ekonomi berkelanjutan di seluruh planet yang mencakup lingkungan darat dan laut (*Blue Economy*). Semua kegiatan, investasi, dan infrastruktur dalam ekonomi hijau bertujuan untuk berlawanan dengan ekonomi tradisional (*brown based economy*), yang sangat bergantung pada bahan bakar fosil dan praktik yang merusak

lingkungan. Karakteristik utama ekonomi hijau meliputi pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk industri dan sistem transportasi, peralihan ke industri rendah karbon, mempromosikan ekonomi sirkular, dan menerapkan praktik ramah lingkungan yang tidak mengeksploitasi atau merusak ekosistem. Selain itu, fokusnya adalah pada peningkatan produktivitas ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ekonomi ini dirancang untuk memberikan peluang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi tinggi dan hijau, memupuk kohesi sosial, dan meningkatkan kapasitas dukung alami lingkungan, yang secara langsung berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Green Economy Index (GEI) adalah alat ukur untuk mengevaluasi pencapaian dan efektivitas transformasi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau, dengan prinsip menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi seiring dengan kesejahteraan sosial serta menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan. Fokusnya meliputi tiga pilar: Pilar Ekonomi, yang bertujuan meningkatkan investasi hijau; Pilar Lingkungan, yang berfokus pada pengelolaan aset dan infrastruktur yang berkelanjutan serta memastikan transisi yang adil dan terjangkau; dan Pilar Sosial, yang bertujuan memberdayakan sumber daya manusia. Ketiga pilar tersebut terdiri dari 15 indikator yang meliputi:

a. Pilar Lingkungan (5 indikator)

1. Persentase luas tutupan lahan dari luas daratan Indonesia.
2. Bauran energi baru terbarukan (EBT) dari sumber energi primer.
3. Persentase sampah terkelola.
4. Persentase penurunan emisi kumulatif dari baseline.
5. Penurunan tutupan lahan **gambut**.

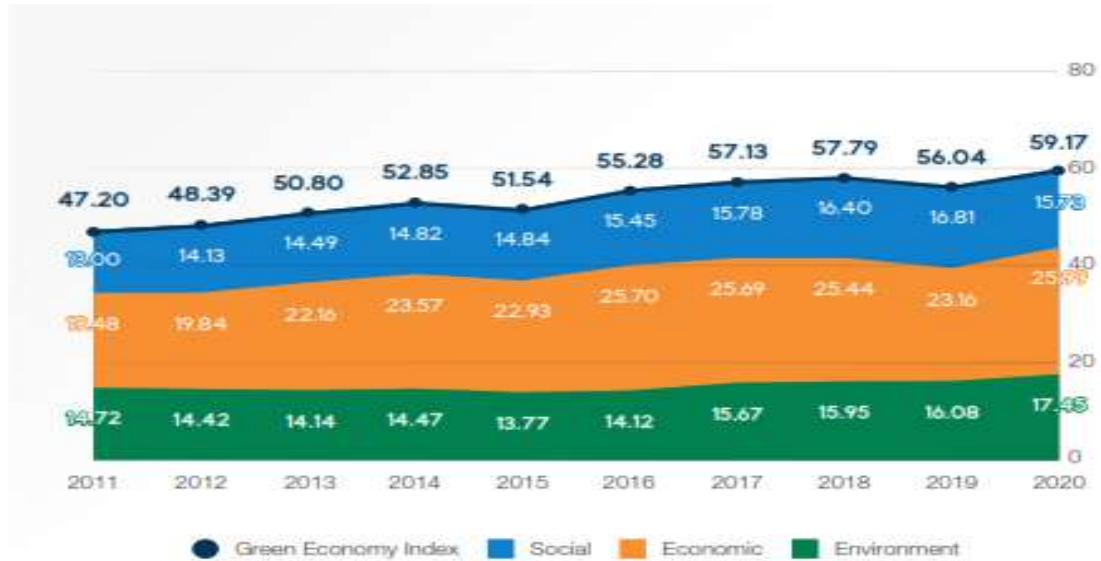
b. Pilar Ekonomi (6 indikator)

6. Intensitas emisi.
7. Intensitas energi final.
8. Pendapatan regional bruto per kapita.
9. Produktivitas pertanian.
10. Produktivitas tenaga kerja sektor industri.
11. Produktivitas tenaga kerja sektor jasa.

c. Pilar Sosial (4 indikator)

12. Rata-rata lama sekolah.
13. Angka harapan hidup.
14. Tingkat kemiskinan.
15. Tingkat pengangguran terbuka

Grafik 2.29. Indeks Ekonomi Hujau Indonesia Tahun 2011-2020



Sumber: Green Economy Index, Bappenas 2023

Secara keseluruhan, GEI Indonesia menunjukkan tren peningkatan selama sepuluh tahun terakhir, seperti yang ditampilkan pada Grafik di atas dengan skor komposit mencapai 59,17 pada tahun 2020, menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi hijau Indonesia berada di jalur yang tepat. Sejalan dengan itu kondisi Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Lampung pada tahun 2023 sebesar 59,19. Terkait pengurangan intensitas emisi yang signifikan terutama didorong oleh kebijakan terkait pemanfaatan hutan dan penggunaan lahan, seperti moratorium hutan yang berhasil menjaga luas hutan primer tetap tinggi sejak 2011.

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

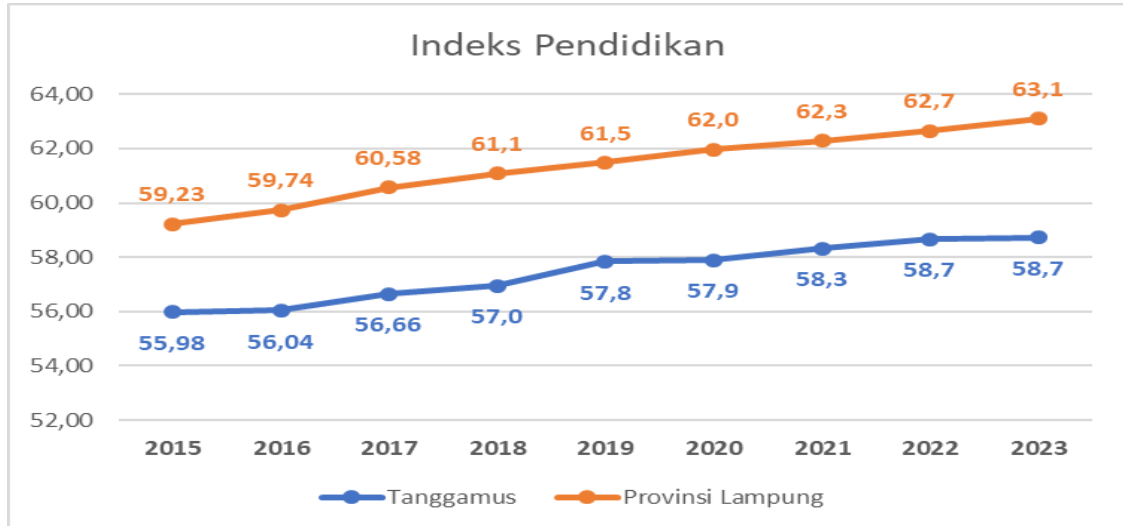
2.3.2.1. Indikator Kualitas Pendidikan

Indeks Pendidikan mencerminkan hasil pembangunan di bidang pendidikan yang memiliki peran penting, karena kualitas sumber daya manusia yang diukur dengan indeks ini sangat mempengaruhi produktivitas suatu bangsa. Penghitungan indeks pendidikan biasanya melibatkan beberapa indikator, seperti rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, sebagaimana diterapkan dalam Human Development Index (HDI) oleh UNDP.

Secara keseluruhan, baik Kabupaten Tanggamus maupun Provinsi Lampung telah mengalami peningkatan dalam Indeks Pendidikan selama periode 2015-2023. Pada tahun 2023, selisih antara Indeks Pendidikan Provinsi Lampung dan Kabupaten Tanggamus adalah sekitar 4,4 poin (63,1 - 58,7). Meskipun

Tanggamus mengalami peningkatan dalam indeks pendidikan, masih ada kesenjangan yang signifikan dibandingkan dengan rata-rata provinsi.

Grafik 2.30. Indeks Pendidikan Kabupaten Tanggamus dan Provinsi Lampung 2015-2023



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2024 (diolah)

Tingkat pendidikan yang ditamatkan bagi penduduk berumur 15 tahun keatas di Kabupaten Tanggamus masih didominasi dengan tamatan SD/ sederajat yang mencapai 30,17% sedangkan yang memiliki ijazah tertinggi SMA/keatas baru mencapai 24,44%.

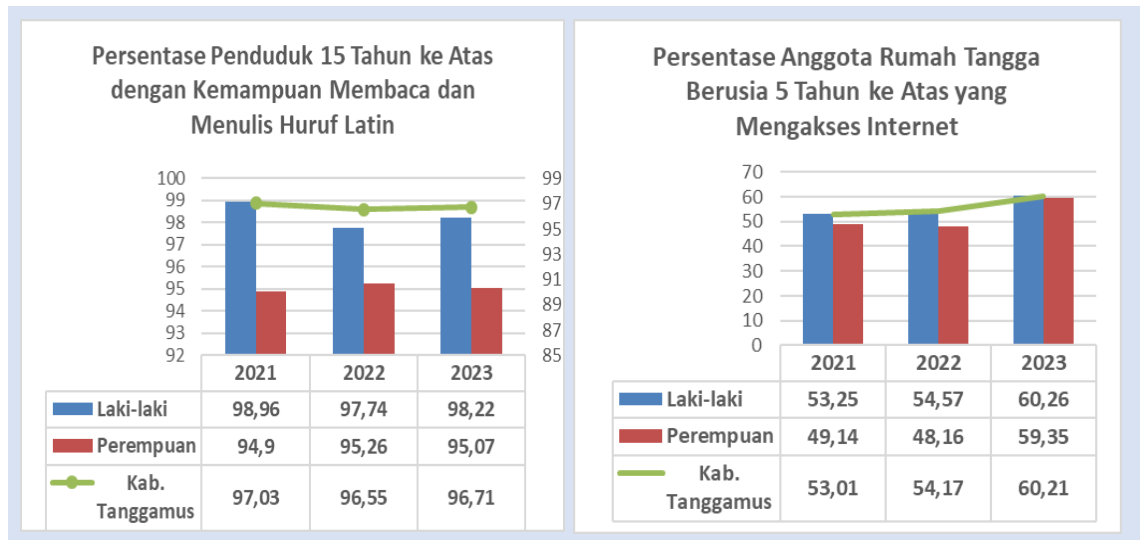
Tabel 2.42. Persentase Penduduk Kabupaten Tanggamus Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2022

NO	KARAKTERISTIK	TIDAK PUNYA IJAZAH SD	SD/ SEDERAJAT	SMP/ SEDERAJAT	SMA/ KEATAS
1	Jenis Kelamin				
	Laki-Laki	16.22	30.47	28.32	24.99
	Perempuan	21.46	29.84	24.87	23.83
2	Kelompok Pengeluaran				
	40 Persen Terbawah	21.19	31.20	23.15	24.45
	40 Persen Tengah	17.14	31.96	30.53	20.09
	20 Persen Teratas	16.91	25.03	25.58	32.48
	Kabupaten Tanggamus	18.74	30.17	26.66	24.44

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

Kualitas pendidikan di suatu daerah juga terlihat dari angka literasi. Angka literasi, yang menunjukkan persentase penduduk yang mampu membaca dan menulis, merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas sistem pendidikan di daerah tersebut. Tingginya angka literasi mencerminkan akses yang baik terhadap pendidikan dasar serta keberhasilan program-program pendidikan dalam meningkatkan kemampuan dasar penduduk.

Grafik 2.31. Persentase Penduduk menurut kemampuan Literasi dan Akses Internet



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat BPS Kabupaten Tanggamus, 2021-2023

Tingkat kemampuan membaca dan menulis huruf latin di Kabupaten Tanggamus sudah tinggi, dengan persentase di atas 95% untuk penduduk berusia 15 tahun ke atas. Meskipun laki-laki selalu memiliki persentase yang lebih tinggi dibandingkan perempuan dalam hal ini, kesenjangan antara kedua gender bervariasi sedikit dari tahun ke tahun. Namun, tingkat literasi di Kabupaten Tanggamus tetap tinggi untuk laki-laki maupun perempuan.

Literasi digital menjadi semakin penting di era Revolusi Industri 4.0. Literasi digital mengacu pada kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi digital dengan efektif dan bijaksana. Pada tahun 2021, Indeks Literasi Digital Provinsi Lampung mencapai 3,52, yang menempatkannya di 15 besar secara nasional. Namun, pada tahun 2022, peningkatan indeks literasi digital di Lampung tidak secepat provinsi lain, sehingga Lampung terdegradasi dari 15 besar.

Data indeks literasi digital di Kabupaten Tanggamus belum tersedia. Namun, aktivitas penggunaan internet di masyarakat Tanggamus dapat dilihat dari data persentase anggota rumah tangga usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet. Data ini memberikan gambaran mengenai seberapa banyak penduduk yang terlibat dalam aktivitas digital sehari-hari, yang merupakan indikator awal dari literasi digital. Data menunjukkan penduduk yang mengakses internet di Kabupaten Tanggamus dari tahun 2021 hingga 2023 meningkat signifikan. Pada tahun 2023 Persentase laki-laki yang mengakses internet melonjak menjadi 60,26%, sementara persentase perempuan meningkat menjadi 59,35%. Secara

keseluruhan, persentase penduduk Kabupaten Tanggamus yang mengakses internet mencapai 60,21%.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan tren peningkatan yang kuat dalam penggunaan internet di Kabupaten Tanggamus, baik di kalangan laki-laki maupun perempuan. Meskipun laki-laki selalu menunjukkan persentase yang sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan, kesenjangan antara kedua gender semakin menipis seiring waktu. Hal ini mencerminkan peningkatan literasi digital yang konsisten di wilayah tersebut.

2.3.2.2. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja).

Tabel 2.43. Rasio Ketergantungan Kabupaten Tanggamus Tahun 2010-2023

NO	WILAYAH	CAPAIAN							
		2010	2012	2014	2016	2018	2020	2022	2023
1	Kabupaten Tanggamus	51,03	50,31	47,84	46,67	46,31	46,08	45,96	46,55

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

Dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2022 rasio ketergantungan Kabupaten Tanggamus terus menurun, apabila pada tahun 2010 rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Tanggamus sebesar 51,03% maka pada tahun 2022 menjadi 45,96%. Dengan kecenderungan angka yang semakin menurun menandakan beban yang harus ditanggung oleh usia produktif menjadi semakin sedikit. Kondisi ini sebenarnya merupakan fenomena umum yang terjadi secara nasional yaitu adanya bonus demografi. Kabupaten Tanggamus mulai memasuki bonus demografi pada tahun 2014 pada saat RK di bawah 50%. Bonus demografi ini harus dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bonus demografi harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi permasalahan kedepan.

Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Berdasarkan data

diatas maka dengan nilai RK tahun 2022 sebesar 45,96 berarti setiap 100 penduduk angkatan kerja (produktif) menanggung sebanyak 45 penduduk usia non produktif.

2.3.2.3. Sumber Daya Aparatur

Dalam rangka pelaksanaan roda pemerintahan dan pelayanan publik, kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur memegang peranan yang sangat penting, sampai saat ini sumber daya apatur di Kabupaten Tanggamus sebanyak 10.544 orang yang terdiri dari 5.003 orang PNS, 1.418 orang PPPK dan 4.123 orang Non ASN.

Tabel 2.44. Kondisi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Jenis Kelamin Sampai Dengan Tahun 2023

NO	URAIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	%
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	PNS	2,167	2,836	5,003	47.45%
2	PPPK	457	961	1,418	13.45%
3	NON ASN	2,047	2,076	4,123	39.10%
JUMLAH		4,671	5,873	10,544	100.00%

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan data diatas, sumber daya aparatur di Kabupaten Tanggamus paling banyak berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 5.873 orang dan sisanya laki-laki sebanyak 4.671 orang.

Tabel 2.45. Kondisi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sampai Dengan Tahun 2023

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	SUMBER DAYA APARATUR			JUMLAH	%
		PNS	PPPK	NON ASN		
1	S3	-	-	-	-	0.00%
2	S2	340	-	12	352	3.34%
3	S1	3,362	1,368	1,315	6,045	57.33%
4	D4	128	1	33	162	1.54%
5	D3	608	37	608	1,253	11.88%
6	D2	130	-	149	279	2.65%
7	D1	17	-	34	51	0.48%
8	SMA	401	12	1,687	2,100	19.92%
9	SMP	12	-	144	156	1.48%
10	SD	5	-	141	146	1.38%
JUMLAH		5,003	1,418	4,123	10,544	100.00%

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus, 2023

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki, sumber daya aparatur di Kabupaten Tanggamus paling banyak berpendidikan setingkat S1 yang mencapai 57,33% dan yang paling sedikit berpendidikan setingkat D1 yang hanya 0,48%.

Tabel 2.46. Kondisi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Golongan Sampai Dengan Tahun 2023

NO	GOLONGAN	PNS	PPPK	JUMLAH	TOTAL	%
1	IV/d / XVI	1	-	1	1.351	21,04%
	IV/c / XV	33	-	33		
	IV/b / XIV	741	-	741		
	IV/a / XIII	576	-	576		
2	III/d / XII	813	-	813	4.429	68,98%
	III/c / XI	731	-	731		
	III/b / X	798	9	807		
	III/a / IX	719	1,359	2,078		
3	II/d / VIII	297	-	297	627	9,76%
	II/c / VII	202	37	239		
	II/b / VI	50	-	50		
	II/a / V	29	12	41		
4	I/d / IV	9	1	10	14	0,22%
	I/c / III	3	-	3		
	I/b / II	1	-	1		
	I/a / I	-	-	-		
	JUMLAH	5,003	1,418	6,421	6,421	100,00%

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan data diatas, apabila dilihat dari sisi golongan yang dimiliki maka komposisi terbanyak berada pada Golongan III/a – III/d atau IX – XII yang mencapai 68,98% sedangkan yang paling sedikit berada pada Golongan I/a – I/d atau I – IV yang hanya 0,22%.

Selain capaian kinerja pembangunan yang telah dijabarkan dalam aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah sebagaimana tersebut di atas, terdapat beberapa capaian kinerja pembangunan lain yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus.

2.3.2.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

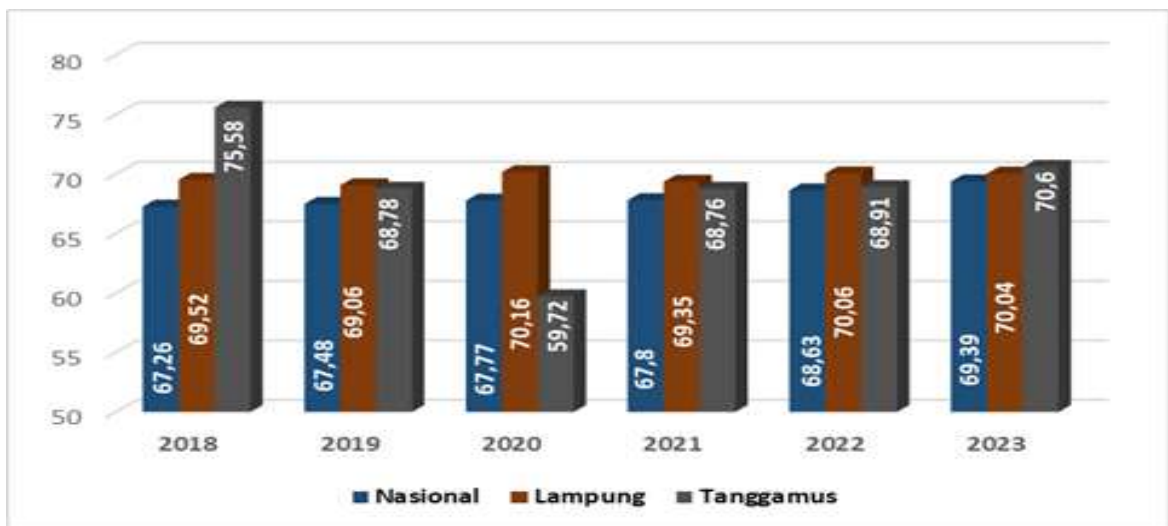
Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Proporsi penduduk usia kerja yang termasuk ke dalam angkatan kerja disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada tahun 2023, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Tanggamus berjumlah 350.735 orang sedangkan yang bukan angkatan kerja sebanyak 146.047 orang.

Penduduk Usia Kerja yang bekerja sebanyak 338.982 sehingga persentasenya terhadap angkatan kerja mencapai 96,65% dan Berdasarkan lapangan pekerjaannya, penduduk yang bekerja di Kabupaten Tanggamus 2023 mayoritas

bekerja di sektor pertanian (54,63%), di bidang jasa (36,60%) dan sisanya di bidang manufaktur (8,77%). Jumlah pencari kerja di Kabupaten Tanggamus tahun 2023 ada sebanyak 2.699 orang. Jumlah tersebut menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 3.616 orang. Mayoritas pencari kerja merupakan lulusan SMA/SMK/ sederajat.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 sebesar 70,60% lebih tinggi dari capaian TPAK Provinsi Lampung sebesar 70,04% dan lebih tinggi dari TPAK Nasional sebesar 69,39%, secara lebih lengkap, perkembangan TPAK Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.32. Perkembangan TPAK Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

2.3.3.1. Kondisi Infrastruktur Jalan

Jaringan jalan di Kabupaten Tanggamus, yang berfungsi sebagai moda utama angkutan penumpang dan logistik, masih menghadapi tantangan dalam hal kualitas infrastruktur yang belum optimal serta keterbatasan dalam ketersediaan jalan untuk mendukung pengembangan wilayah. Transportasi merupakan elemen kunci dalam pengembangan wilayah dan kemajuan ekonomi. Oleh karena itu, tujuan utama pembangunan transportasi di Kabupaten Tanggamus adalah untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan efisiensi antar daerah potensial, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah secara keseluruhan.

Tabel 2.47. Kondisi Infrstruktur Jalan di Kabupaten Tanggamus 2018-2023

TAHUN	KONDISI JALAN (KM)					JUMLAH KONDISI JALAN BAIK & SEDANG (KM)	PERSENTASE JALAN MANTAP (%)
	BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	JUMLAH		
2018	426,93	197,92	237,58	476,94	1.339,37	624,85	46,65
2019	381,91	271,22	160,48	525,76	1.339,37	653,13	48,76
2020	394,23	265,46	245,03	434,65	1.339,37	659,69	49,25
2021	412,75	251,67	315,63	359,31	1.339,37	664,42	49,61
2022	319,38	182,15	82,1	755,74	1.339,37	501,53	37,45
2023	226,67	192,23	100,32	419,91	939,13	418,90	44,61

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Tanggamus, 2023

2.3.3.2. Akses Transportasi

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (farm gate price) di daerah perdesaan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari desa surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap

pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi kehidupan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data PODES (Potensi Desa) 2021 yang dipublish oleh BPS di Kabupaten Tanggamus, hampir semua desa memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 2 atau roda 4. Jalan merupakan moda transportasi utama di Kabupaten Tanggamus, akan tetapi terdapat beberapa kecamatan di mana moda transportasi air masih menjadi alternatif penting untuk memperpendek waktu tempuh dan transportasi barang ke daerah lain. Masyarakat sebagian menggunakan perahu motor sebagai moda transportasinya, seperti di wilayah Kecamatan Pematang Sawa (Tamang Tua, Kaur Gading, Tirom, Teluk Brak, Karang Brak, Way Asahan, Tamang Muda, dan Matanda) serta sebagian kecil Kecamatan Cukuh Balak (Kuta Kakhang, Karang Buah, Suka Banjar dan Sawang Balak).

2.3.3.3. Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

Berdasarkan data kondisi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tanggamus dari tahun 2018 hingga 2023, terdapat tren penurunan jumlah unit RTLH dari tahun ke tahun. Pada tahun 2018, jumlah RTLH tercatat sebanyak 12.258 unit, dan jumlah ini terus berkurang hingga menjadi 8.767 unit pada tahun 2023. Secara keseluruhan, selama periode 2018 hingga 2023, sebanyak 3.779 unit RTLH telah berhasil ditangani di Kabupaten Tanggamus. Meskipun jumlah unit RTLH berkurang, tantangan dalam penanganan unit-unit tersebut masih cukup besar, terutama dengan adanya fluktuasi dalam jumlah unit yang tertangani setiap tahunnya. Ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih konsisten dan terencana untuk memastikan lebih banyak RTLH dapat ditangani dan ditingkatkan menjadi rumah layak huni.

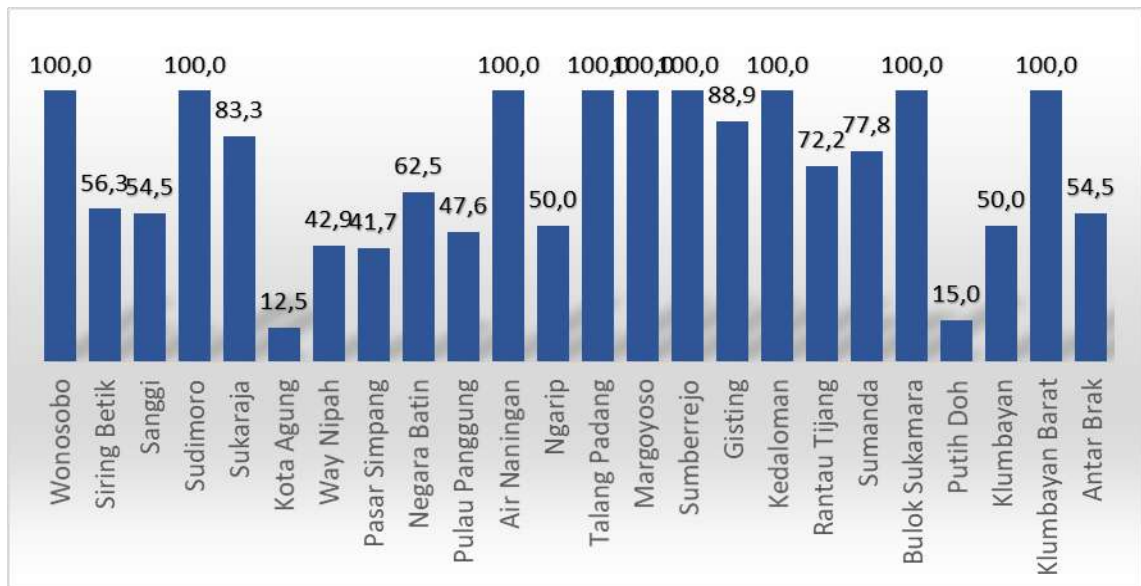
Tabel 2.48. Kondisi RTLH di Kabupaten Tanggamus 2018-2023

TAHUN	RTLH (unit)	RTLH YANG TERTANGANI
2018	12258	455
2019	11803	881
2020	10922	1065
2021	9857	282
2022	9575	808
2023	8767	288
		3779

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Tanggamus, 2023

Sanitasi layak merujuk pada fasilitas dan layanan yang memenuhi standar kebersihan dan kesehatan untuk pembuangan limbah manusia, seperti air kotor dan kotoran. Sanitasi layak mencakup akses terhadap toilet yang aman dan higienis, pembuangan limbah yang tepat, serta praktik-praktik kebersihan yang baik, seperti mencuci tangan dengan sabun setelah menggunakan toilet. Pada tahun 2023 Jumlah pekon ODF di kabupaten Tanggamus baru mencapai 66,2% atau sebanyak 200 pekon. Sedangkan Jumlah Keluarga yang memiliki pengelolaan Air minum Layak sebesar 52,11%. Persentase keluarga yang memiliki pengelolaan sampah baru 27,59 % dan persentasi keluarga yang memiliki pengelolaan limbah cair sebesar 27,90%.

Grafik 2.33. Persentase Desa ODF menurut cakupan Puskesmas di Kabupaten Tanggamus Tahun 2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, 2023

2.3.3.4. Rasio Luas Lahan Pertanian Terhadap Jumlah Penduduk

Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk adalah perbandingan antara luas lahan pertanian dengan jumlah penduduk di wilayah desa tersebut. Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan pertanian memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk maka diasumsikan ketersediaan pangan juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Dari 302 Pekon/Kelurahan di Kabupaten Tanggamus, 49 Pekon masuk dalam prioritas 1 (16.23 %), 24 Pekon prioritas 2 (7.95 %), 61 Pekon prioritas 3 (20.20

%), 81 Pekon prioritas 4 (28.82 %), 44 Pekon prioritas 5 (14.57 %) dan 43 Pekon prioritas 6 (14.24 %). Kecamatan yang memiliki rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk prioritas 1-3 sebagian besar tersebar di Kecamatan Ulu Belu, Air Nainingan, Pematang Sawa, Wonosobo, Semaka, Kotaagung Pusat, Gisting, Kelumbayan, Kelumbayan Barat, Cuku Balak dan kecamatan lain yaitu sebanyak 134 Pekon.

Tabel 2.49. Sebaran Rasio Luas Lahan Pertanian Terhadap Jumlah Penduduk Berdasarkan Skala Prioritas Tahun 2022

NO	PRIORITAS	RASIO LAHAN SAWAH	JUMLAH PEKON/KELURAHAN	PERSENTASE
1	1	≤ 0.0804	49	16.23 %
2	2	$> 0.0804 - 0.1117$	24	7.95 %
3	3	$> 0.1117 - 0.1721$	61	20.20 %
4	4	$> 0.1117 - 0.1721$	81	28.82 %
5	5	$> 0.2846 - 0.4573$	44	14.57 %
6	6	> 0.4573	43	14.24 %

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, 2023

2.3.3.5. Rasio Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan Terhadap Jumlah Rumah Tangga

Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di desa. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpanan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di desa maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di desa tersebut.

Dari 302 Pekon/Kelurahan di Kabupaten Tanggamus, 44 Pekon masuk dalam prioritas 1 (14.57 %), 42 Pekon prioritas 2 (13.91 %), 64 Pekon prioritas 3 (21.19 %), 61 Pekon prioritas 4 (20.20 %), 44 Pekon prioritas 5 (14.57 %) dan 47 Pekon prioritas 6 (15.56 %).

Tabel 2.50. Sebaran Rasio Sarana dan Prasarana Ekonomi Terhadap Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Skala Prioritas Tahun 2022

NO	PRIORITAS	RASIO SARANA PRASARANA EKONOMI	JUMLAH PEKON/KELURAHAN	PERSENTASE
1	1	≤ 0.0233	44	14.57 %
2	2	$> 0.0233 - 0.0321$	42	13.91 %
3	3	$> 0.0321 - 0.0425$	64	21.19 %
4	4	$> 0.0425 - 0.0544$	61	20.20 %
5	5	$> 0.0544 - 0.0660$	44	14.57 %
6	6	> 0.0660	47	15.56 %

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus, 2023

2.3.4. Daya Saing Iklim Berinvestasi

2.3.4.1. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah alat untuk menilai seberapa baik suatu daerah bersaing dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. IDSD membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan daerah serta area yang perlu diperbaiki untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Ada empat komponen utama dalam IDSD. Pertama, Lingkungan Pendukung, yang meliputi 4 pilar yaitu institusi, infrastruktur, adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta stabilitas ekonomi makro. Kedua, Sumber Daya Manusia, yang mencakup pilar kesehatan dan pilar keterampilan tenaga kerja. Ketiga, Pasar, yang terdiri dari pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, dan ukuran pasar. Terakhir, Ekosistem Inovasi, yang meliputi pilar dinamisme bisnis dan pilar kapabilitas inovasi.

Tabel 2.51. Skor Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2023



NAMA PROVINSI	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM				PASAR		EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL*	4,30	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,22	3,03	3,44
PROV. LAMPUNG	4,16	2,76	3,66	3,70	3,84	3,48	2,12	3,41	2,10	4,55	3,81	2,80	3,36
RATA-RATA KAB/KOTA	4,11	2,46	4,40	3,22	3,81	3,22	2,61	3,06	1,61	4,21	3,07	1,64	3,25
LAMPUNG BARAT	4,42	1,98	4,41	3,37	3,68	3,25	2,85	2,72	0,88	3,82	2,70	0,88	2,91
TANGGAMUS	4,02	2,33	3,81	2,72	3,76	3,08	2,69	3,04	1,42	4,16	2,73	0,99	2,90
LAMPUNG SELATAN	3,97	2,06	4,69	3,23	3,82	2,97	2,26	3,38	1,66	4,62	2,60	2,67	3,16
LAMPUNG TIMUR	3,93	2,45	4,37	3,56	3,92	3,14	1,81	2,76	-	4,59	2,73	1,51	-
LAMPUNG TENGAH	3,90	2,32	4,31	3,38	3,85	3,04	1,89	3,09	2,28	4,83	2,97	1,54	3,12
LAMPUNG UTARA	-	2,79	4,19	2,74	3,81	3,14	2,67	3,13	1,48	4,35	3,09	1,84	-
WAY KANAN	4,21	2,50	4,49	3,31	3,82	3,03	2,03	3,01	-	4,11	2,43	0,72	-
TULANGBAWANG	4,01	2,14	4,54	3,52	3,86	3,03	1,97	2,99	0,82	4,33	3,74	1,30	3,02
PESAWARAN	4,10	2,55	4,31	3,24	3,80	3,15	2,34	2,93	-	4,19	3,24	1,48	-
PRINGSEWU	4,31	2,81	4,45	3,13	3,89	3,40	3,34	3,10	0,58	4,02	2,53	2,23	3,15
MESUJI	4,05	1,87	4,62	3,65	3,73	2,59	1,83	2,31	-	3,97	4,01	0,74	-
TULANG BAWANG BARAT	4,12	2,64	4,48	3,25	3,86	2,92	1,91	3,23	-	4,02	3,28	0,61	-
PESISIR BARAT	4,06	1,76	3,49	3,30	3,38	3,07	2,48	2,77	-	3,60	2,24	0,76	-
BANDAR LAMPUNG	3,90	3,01	4,88	2,92	3,97	4,04	4,20	3,67	2,74	4,74	3,38	3,59	3,75
METRO	4,54	3,74	4,90	2,94	3,99	4,38	4,88	3,73	2,65	3,75	4,33	3,69	3,96

Sumber: BRIN, IDSD 2023

Pada Tahun 2023 Skor IDSD Kabupaten Tanggamus sebesar 2,90 meningkat bila disbanding tahun sebelumnya yang hanya 2,53. Jika dilihat lebih rinci dari berbagai komponen pembentuknya kenaikan tersebut terjadi pada komponen lingkungan dan SDM. Lebih rinci pada Pilar Ekosistem Investasi pilar dinamisme Bisnis mengalami penurunan akan tetapi pilar kapabilitas investasi naik signifikan

Grafik 2.34. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Tanggamus 2022-2023



Sumber : BRIN, 2022-2023

2.3.4.2. Angka Kriminalitas

Salah satu penyumbang iklim berinvestasi adalah faktor keamanan dan ketertiban. Pembangunan bidang keamanan dan ketertiban masyarakat harus difokuskan pada terwujudnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan masyarakat lingkungan masing-masing serta peran aktif masyarakat dalam memberantas kejahatan yang terjadi. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (kepolisian). Data mengenai perkembangan angka kriminalitas pada tahun 2017-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.52. Angka Kriminalitas Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2022

NO	WILAYAH	CAPAIAN						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Tanggamus	30,85	32,23	29,92	40,58	36,54	93,58	105,95

Sumber : Kepolisian Resort, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanggamus, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas di Kabupaten Tanggamus terjadi secara fluktuatif, angka kriminalitas di tahun 2021 mengalami perbaikan dari tahun 2020 yang semula 40,58 menjadi 36,54 akan tetapi kriminalitas meningkat pada tahun 2022 dan 2023 menjadi 93,58 dan 105,95 yang berarti dalam setiap 100.000 penduduk terjadi 106 tindak kriminalitas.

2.3.4.3. Jenis Tindak Kriminal

Seiring dengan meningkatnya angka kriminalitas, maka dipastikan jenis tindak kriminal yang terjadi juga semakin tinggi, hal tersebut tentu saja menjadi fokus perhatian untuk ditangani dalam upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Tabel 2.53. Jenis Tindak Kriminal Di Kabupaten Tanggamus Tahun 2017-2023

NO	JENIS TINDAK KRIMINAL	CAPAIAN						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kasus Narkoba	78	79	105	89	103	105	87
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	2	2	1	-	2	4	3
3	Jumlah Kejahatan Seksual	17	21	8	36	22	28	13
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	36	35	13	41	40	98	141
5	Jumlah Kasus Pencurian	21	23	23	46	39	213	274
6	Jumlah Kasus Penipuan	27	30	29	32	30	130	115
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	-	1	-	1	-	-	-
8	Jumlah Kasus ITE	-	-	-	-	-	8	15
9	Jumlah Kasus Kriminal lainnya	-	-	-	-	-	25	54
Jumlah Tindak Kriminal Selama Satu Tahun		181	191	179	245	236	611	293

Sumber : Kepolisian Resort, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanggamus, 2023

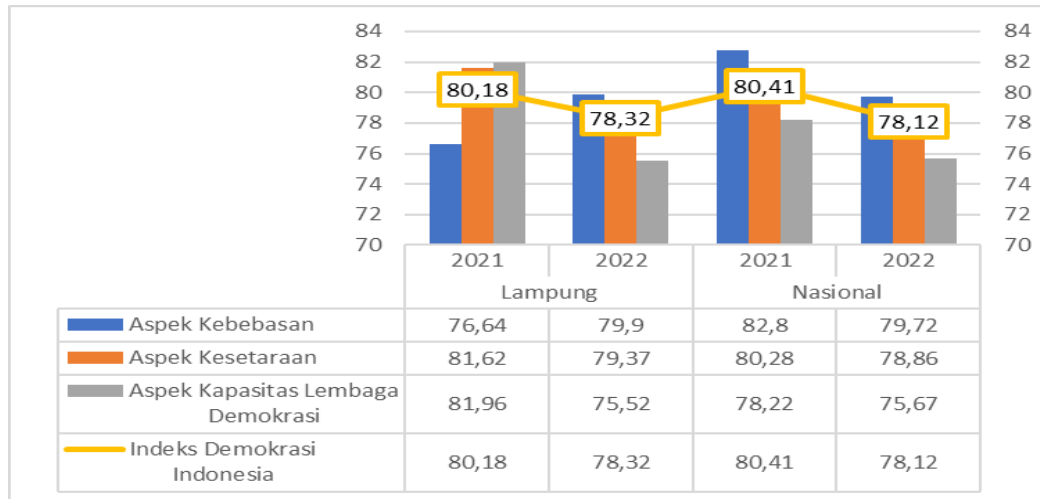
2.3.4.4. Indeks Demokrasi

Daerah dengan indeks demokrasi yang tinggi biasanya menikmati stabilitas politik yang lebih baik, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan investor. Pemerintahan yang demokratis cenderung lebih transparan dan akuntabel, mengurangi risiko politik dan membuat daerah tersebut lebih menarik bagi investasi. Sistem demokrasi yang kuat sering kali juga berkaitan dengan sistem hukum yang lebih andal, di mana hak-hak properti dan kontrak bisnis dilindungi dengan baik. Hal ini sangat penting bagi investor yang mencari jaminan bahwa investasi mereka aman dari tindakan sewenang-wenang.

Pada tahun 2022, Indeks Demokrasi Provinsi Lampung mengalami penurunan dari 80,18 pada tahun 2021 menjadi 78,32. Meskipun aspek kebebasan meningkat, penurunan ini disebabkan oleh penurunan dalam aspek kesetaraan dan kapasitas lembaga. Penurunan di Lampung ini sejalan dengan tren nasional, di mana Indeks Demokrasi Nasional juga mengalami penurunan di seluruh aspek, termasuk kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga. Hal ini

mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas demokrasi baik di Lampung maupun di tingkat nasional.

Grafik 2.35. Indeks Demokrasi Provinsi Lampung dan Indonesia



Sumber : BPS RI, 2023

Meskipun data Indeks Demokrasi Kabupaten Tanggamus belum tersedia, kondisi demokrasi di Tanggamus dapat dilihat dari tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan umum. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tanggamus, partisipasi pemilih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada Pemilu Presiden dan Legislatif tahun 2014, partisipasi pemilih mencapai 76,28%, namun menurun menjadi 74,44% pada Pemilu Presiden dan Legislatif tahun 2019. Dalam Pemilihan Umum Bupati Tanggamus tahun 2018, tingkat partisipasi pemilih tercatat sebesar 69,62%, dengan 315.316 dari 452.905 pemilih terdaftar yang berpartisipasi, sementara 137.589 pemilih (30,38%) tidak ikut serta. Persentase partisipasi ini masih belum mencapai target yang ditetapkan oleh KPU RI, yaitu sebesar 80%.

Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi pemilih di Kabupaten Tanggamus antara lain kurangnya kesadaran politik masyarakat, persepsi bahwa pemilu tidak berpengaruh terhadap kehidupan mereka, dan pandangan bahwa pemilu merupakan ajang transaksi politik. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih, diperlukan upaya peningkatan pendidikan politik, membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Kesadaran dan partisipasi masyarakat yang semakin baik dapat terlihat dari keikutsertaan mereka secara sadar dalam berbagai pemilihan di tingkat desa, seperti pemilihan kepala pekon, dan Badan Permusyawaratan Pekon (BHP), serta keikutsertaan dalam musyawarah desa.

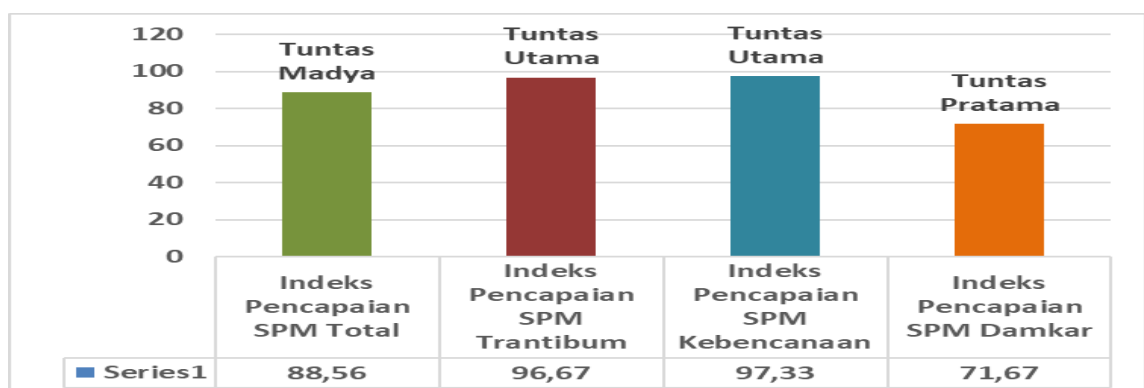
2.3.4.5. Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Kondisi Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban (K3) memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing investasi suatu wilayah. Tingkat K3 yang tinggi menciptakan kepercayaan investor, mengurangi risiko investasi, dan menarik investasi jangka panjang. Pada tahun 2022, Kabupaten Tanggamus mencapai kategori Tuntas Madya dengan persentase 88,56% dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Rinciannya sebagai berikut:

- Indeks SPM untuk ketenteraman dan ketertiban umum mencapai 96,67%, yang masuk dalam kategori Tuntas Utama, mencerminkan upaya maksimal dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat.
- Indeks Kebencanaan mencapai 97,33%, masuk dalam kategori Tuntas Utama menunjukkan kesiapsiagaan yang tinggi dalam menghadapi bencana dan melindungi masyarakat.
- Indeks SPM untuk pemadam kebakaran hanya mencapai 71,67%, yang masuk dalam kategori Tuntas Pratama.

Rendahnya capaian dalam sektor pemadam kebakaran disebabkan oleh keterbatasan armada dan jumlah personel yang masih kurang memadai. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan sumber daya dan kapasitas di bidang pemadam kebakaran untuk mencapai tingkat pelayanan yang lebih optimal.

Grafik 2.36. Indeks Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanggamus Tahun 2022



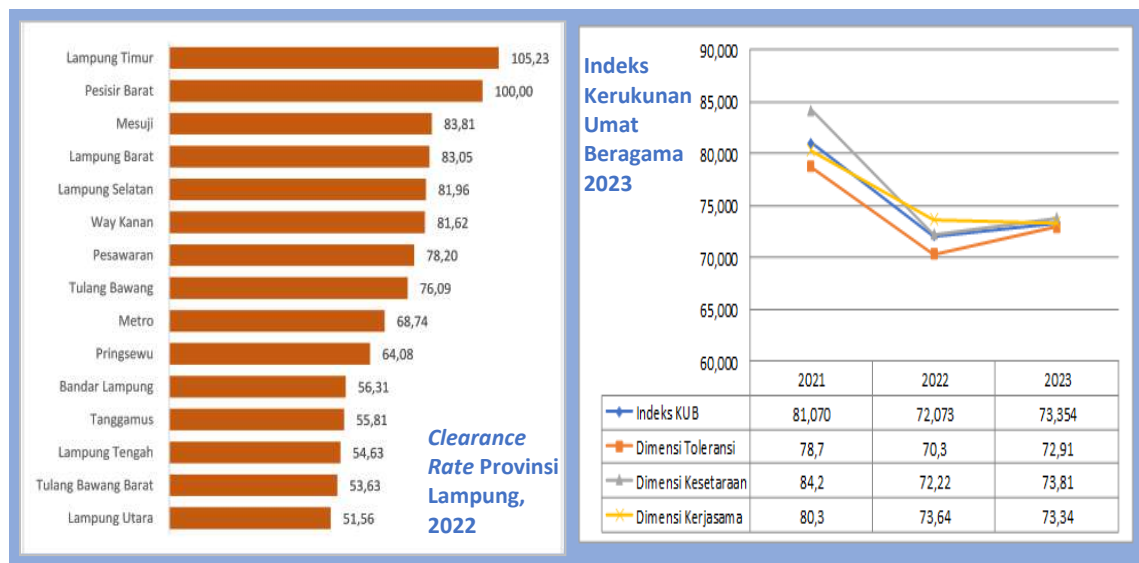
Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, 2023

2.3.4.6. Rasa Aman dan Kerukunan Umat Beragama

Dalam konteks daya saing investasi, Rasa Aman dan Kerukunan Umat Beragama memainkan peran kunci. Meskipun Indeks Rasa Aman mungkin belum tersedia, *Clearance Rate* atau tingkat penyelesaian tindak kriminal dapat

memberikan gambaran tentang keefektifan penegakan hukum dan tingkat keamanan suatu wilayah. Semakin tinggi *Clearance Rate*, semakin efisien penegakan hukum dan semakin rendah tingkat kejahatan yang terjadi, yang pada gilirannya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil bagi investasi. Jika tingkat kejahatan berhasil ditekan dan kasus-kasus kriminal ditangani dengan baik, maka investor cenderung merasa lebih percaya diri dalam berinvestasi di wilayah tersebut, yang dapat meningkatkan daya saing investasi secara keseluruhan.

Gambar 2.37. Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (*Clearance Rate*) Tahun 2022 dan Indeks Kerukunan Umat Beragama Tahun 2023 di Provinsi Lampung



Sumber : Laporan Polres/Polresta se Provinsi Lampung, 2022 & Balitbang Kemenag RI, 2023

Meskipun rerata Indeks Rasa Aman dan Kerukunan Umat Beragama (KUB) Provinsi Lampung pada tahun 2023 tergolong tinggi dengan angka 73.35, menunjukkan kondisi keamanan dan kerukunan yang baik secara umum, namun kenyataannya, Kabupaten Tanggamus masih menghadapi tantangan signifikan dalam penanganan tindak kriminal. Dengan *Clearance Rate* sebesar 55.81 pada tahun 2022, yang merupakan salah satu yang terendah di Provinsi Lampung, hanya sebagian kecil dari kasus-kasus kriminal yang berhasil diselesaikan. Hal ini menempatkan Kabupaten Tanggamus di posisi keempat terbawah di tingkat provinsi. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa Indeks KUB Provinsi Lampung mengalami penurunan dibandingkan dua tahun sebelumnya, menunjukkan adanya perubahan atau pergeseran dalam situasi keamanan dan kerukunan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, meskipun secara umum Provinsi Lampung memiliki tingkat keamanan yang tinggi, perlu perhatian khusus dalam meningkatkan efisiensi penegakan hukum dan menangani tantangan keamanan di tingkat lokal, terutama di Kabupaten Tanggamus.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik.

Berdasarkan Hasil Survey pada Kepuasan Masyarakat di Pemerintah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022 bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tanggamus berada pada Indeks 86,95 dengan Kategori “B” mengalami peningkatan dari tahun 2021 dengan nilai 86,43. Namun pada tahun 2023 turun menjadi 83,44 hal ini disebabkan perubahan metode penghitungan dengan penambahan jumlah sampel dan unit pelayanan yang diukur.

Tabel 2.54. Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tanggamus Tahun 2016-2023

NO	WILAYAH	CAPAIAN							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kabupaten Tanggamus	73,30	73,47	77,14	75,27	70,93	86,43	86,95	83,44

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus, 2024

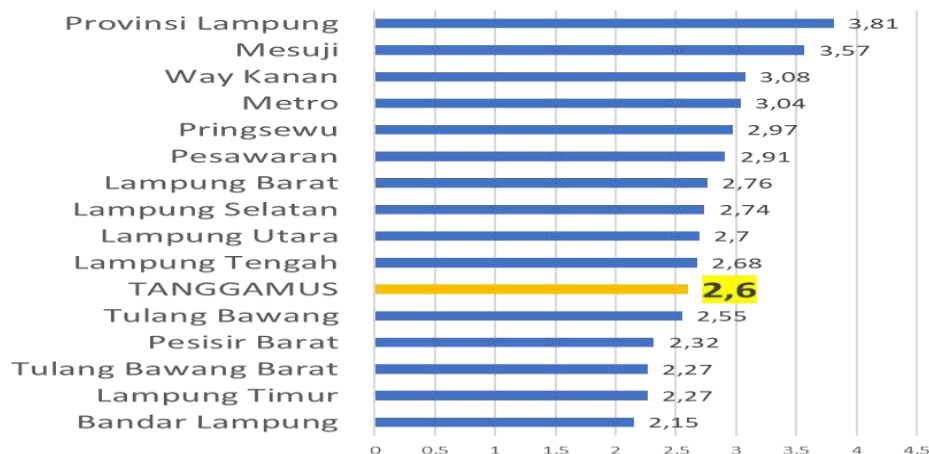
2.4.2. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Layanan

Reformasi Birokrasi merupakan upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani masyarakat secara profesional tanpa praktek KKN. Ditetapkan sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, dan dijabarkan melalui Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pemerintah pusat dan daerah, termasuk Provinsi Lampung, mengimplementasikan kebijakan ini melalui peraturan seperti Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri, serta peraturan daerah dan gubernur. Tujuannya adalah meningkatkan

kualitas pelayanan publik dan kinerja birokrasi sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi.

Transformasi dalam tata kelola pemerintahan dilakukan melalui penguatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Namun, capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) baru mencapai 59,14 pada tahun 2022 dan menurun di tahun 2023 menjadi 57,03 (predikat CC). Meskipun pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan terlihat dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang berada di angka 2,60 dengan kategori baik, namun perlu ditingkatkan untuk meningkatkan efisiensi dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Perbaikan juga masih diperlukan dalam tingkat akuntabilitas kinerja yang pada tahun 2022 mencapai nilai 64,99 (Kategori B) dan mengalami perbaikan di tahun 2023 menjadi 65,16 (kategori B).

Grafik 2.38. Indeks SPBE Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tahun 2023



Sumber: Dinas Kominfo Kab. Tanggamus 2024

2.4.3. Indeks Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah

Indeks Pelayanan Publik dan Indeks Inovasi Daerah adalah dua aspek penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan umum di suatu daerah. Indeks Pelayanan Publik mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu memberikan layanan yang efektif, efisien, dan responsif kepada masyarakat. Ini mencakup berbagai bidang, mulai dari layanan kesehatan dan pendidikan hingga infrastruktur dan administrasi publik. Pengukuran kinerja pelayanan publik dapat melibatkan faktor seperti waktu tunggu, kepuasan pelanggan, dan tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan permintaan masyarakat.

Sementara itu, Indeks Inovasi Daerah menyoroti kemampuan suatu daerah dalam menciptakan dan menerapkan solusi-solusi baru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Inovasi dapat terjadi dalam berbagai

bentuk, seperti penggunaan teknologi baru untuk meningkatkan aksesibilitas layanan, pengembangan model layanan baru yang lebih efisien, atau pengimplementasian kebijakan yang progresif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 2021, Kabupaten Tanggamus mencapai hasil yang cukup baik dalam Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI dengan skor 85,84, masuk dalam zona hijau dengan kategori tinggi. Namun, pada tahun berikutnya, terjadi penurunan signifikan menjadi 63,94, yang menempatkannya dalam zona kuning dengan kategori sedang. Meskipun begitu, terdapat peningkatan pada tahun 2023 menjadi 71,99, meskipun masih dalam kategori sedang. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, meskipun masih ada ruang untuk peningkatan lebih lanjut.

Tabel 2.55. Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021-2023

Tahun	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik				Indeks Inovasi Daerah	
	Nilai	Zona	Kategori	Opini	Nilai	Predikat
2021	85,84	Hijau	B	Kualitas Tinggi	63,32	Sangat Inovatif
2022	63,94	Kuning	C	Kualitas Sedang	70,14	Sangat Inovatif
2023	71,99	Kuning	C	Kualitas Sedang	60,94	Sangat Inovatif

Sumber: Ombudsman RI dan Kementerian Dalam Negeri RI 2021-2023

Sementara itu, dalam hal indeks inovasi daerah, Kabupaten Tanggamus menunjukkan tingkat inovasi yang cukup tinggi. Pada tahun 2021, skornya mencapai 62,32, yang meningkat menjadi 70,14 pada tahun 2022, menunjukkan peningkatan signifikan dalam upaya-upaya inovatif. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi 60,94, tetapi tetap berada pada predikat sangat inovatif (60,01-100) menunjukkan komitmen yang berkelanjutan terhadap inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Berdasarkan Visi RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2005-2025, yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Yang Sejahtera dan Tanggamus Sai Tanggom”** maka di tetapkan Visi Pembangunan di setiap periode pembangunan sebagai berikut:

- 1) **RPJMD 2008-2013** : *“Terwujudnya Masyarakat Yang Tangguh, Sejahtera dan Agamis Dalam Suasana dan Tataan Daerah Yang Aman, Tertib, Lestari dan Mandiri”*.
- 2) **RPJMD 2013-2018** : *“Masyarakat Tanggamus yang Sejahtera, Agamis, Mandiri, Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kerakyatan”*

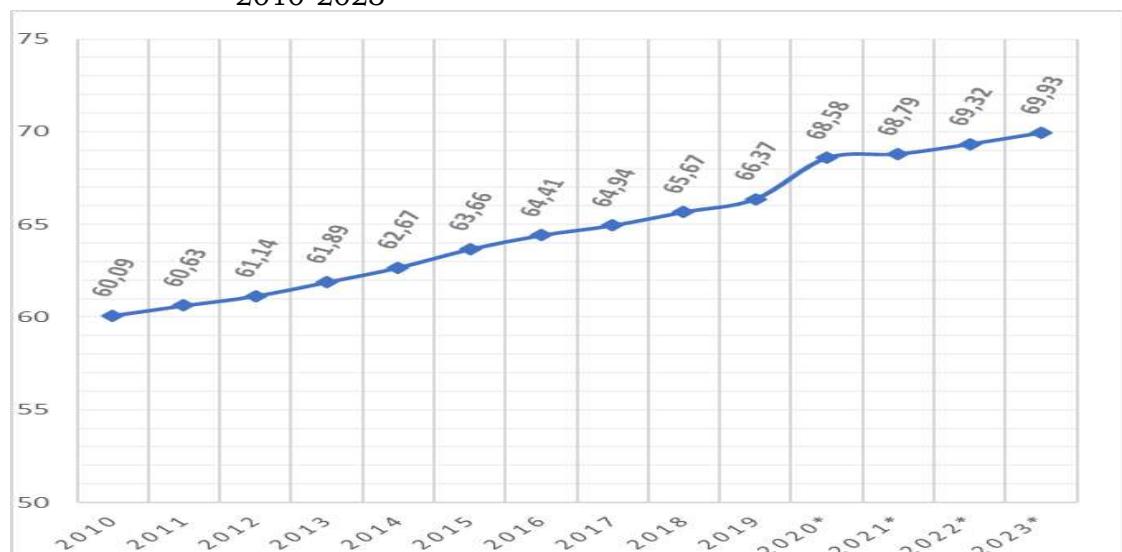
3) **RPJMD 2018-2023** : “Tanggamus yang Tangguh, Agamis, Mandiri, Unggul dan Sejahtera”

Dari Visi pembangunan Kabupaten Tanggamus 2005-2025, dijabarkan dalam 4 (empat) misi pembangunan yang ditetapkan yakni: (1) Membangun Manusia Yang Berkualitas dan Agamis, (2) Menata Kehidupan Sosial Yang Demokratis dan Harmonis, (3) Menata Pemerintahan Yang Bersih dan Baik, dan (4) Mengembangkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing dan Berkeadilan. Evaluasi Pencapaian Visi Pembangunan Jangka Panjang periode 2005-2025 dapat dilihat dari berbagai aspek capaian indikator disetiap misi pembangunan sebagai berikut.

2.5.1. Misi 1: Membangun Manusia yang Berkualitas dan Agamis

Misi ini berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan penguatan nilai-nilai agama. Keberhasilan Misi 1 RPJPD 2005-2025 dapat dilihat dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama periode 2010-2023. Nilai IPM meningkat dari 60,09 pada tahun 2010 menjadi 69,93 pada tahun 2023, meskipun masih dalam kategori sedang. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan dalam sektor pendidikan, dengan rata-rata lama sekolah meningkat dari 6,19 tahun pada 2011 menjadi 7,36 tahun pada 2023. Harapan lama sekolah juga mengalami peningkatan dari 10,86 tahun pada 2011 menjadi 12,31 tahun pada 2022. Selain itu, peningkatan usia harapan hidup menjadi 68,95 tahun pada 2023 menunjukkan perbaikan dalam kualitas kesehatan penduduk, yang ditandai dengan penurunan angka kematian bayi.

Grafik 2.39. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tanggamus tahun 2010-2023



Sumber: BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

Capaian pembangunan pada misi ini tergambar dari beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2.56. Indikator Capaian Pembangunan pada Misi 1 RPJPD Kabupaten Tanggamus 2005-2045

No	Indikator	Target RPJPD	Baseline	Kondisi Awal Perencanaan	Kondisi Terakhir
A	Sasaran Pokok : Tingkat pendidikan masyarakat meningkat				
1	Angka Melek Huruf	Meningkat	2010	94,27	96,78
2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Meningkat	2011	6,19	7,36
3	Angka Harapan Lama Sekolah	Meningkat	2011	10,86	12,31
4	Jumlah Sekolah setingkat SLTP	Bertambah	2008	31	75
5	Jumlah Sekolah setingkat SD	Bertambah	2008	421	463
B	Sasaran Pokok : Kesehatan masyarakat semakin baik dengan sasaran indeks kelangsungan hidup mencapai 75 tahun				
6	Usia Harapan Hidup (UHH)	Meningkat	2011	66,58	73,87
7	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkat	2010	60,09	69,93
8	Angka Kematian Ibu	Menurun	2010	104,77	107
9	Angka Kematian Bayi	Menurun	2011	9,1	6,6
10	Laju Pertumbuhan Penduduk	Menurun	2011	1,39	1,21
C	Sasaran Pokok : Agama menjadi kepribadian masyarakat serta terbangunnya kondisi yang menjamin setiap orang menjalankan agamanya				
11	Kegiatan keagamaan meningkat	Meningkat	2010	2333	959
12	Rumah ibadah kondisi baik	Meningkat	2011	1584	1726
13	Jumlah Insiden yang Disebabkan Masalah Perbedaan Agama	Menurun	2011	0	0
14	Terbentuknya Forum Komunikasi antar umat beragama	Ada	2008	Tidak Ada	Ada

Sumber: Bapperida Kabupaten Tanggamus, 2023

- Peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Tanggamus yang ditunjukkan melalui indikator Indeks Pembangunan Manusia, menghasilkan capaian kinerja sebesar 99,94%.
- Peningkatan derajat kesehatan di Kabupaten Tanggamus yang ditunjukkan melalui indikator Angka Harapan Hidup (AHH), pada akhir periode 2023 mengalami menjadi 68,95 tahun sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%.
- Pencapaian kualitas pendidikan di Kabupaten Tanggamus mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan indikator Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) mengalami peningkatan dari angka 10,7 tahun menjadi 12,31 tahun sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%.

- Hal ini didukung dengan peningkatan pada indikator Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dari angka 6,96 menjadi 7,36 pada tahun 2023, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%.

2.5.2. Misi 2: Menata Kehidupan Sosial yang Demokratis dan Harmonis

Misi 2 bertujuan menciptakan masyarakat yang inklusif, menghormati keragaman, dan mampu menjalankan kehidupan sosial yang adil dan harmonis. Capaian pembangunan pada misi ini tergambar dari beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2.57. Indikator Capaian Pembangunan pada Misi 2 RPJPD Kabupaten Tanggamus 2005-2045

No	Indikator	Target RPJPD	Baseline	Kondisi Awal Perencanaan	Kondisi Terakhir
A Sasaran Pokok : Kesadaran Politik dan partisipasi masyarakat makin baik					
1	Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada	Meningkat	2014	60%	68%
2	Persentase partisipasi perempuan di parlemen	Meningkat	2010	<10%	26,67%
B Sasaran Pokok : Keamanan, Ketenraman dan Keteriban Masyarakat					
3	Angka Kriminalitas	Menurun	2016	24,98	44,88
4	Indeks Rasa Aman	Meningkat	2018	0,45	0,66
5	Indeks Pelayanan Trantibum	Meningkat	2018	94,08	96,67
6	Jumlah Pekon Maju	Meningkat	2015	4	108

Sumber: Bapperida Kabupaten Tanggamus, 2023

- Peningkatan kehidupan masyarakat yang sejahtera, harmonis, tertib, tentram, aman dan religius yang ditunjukkan melalui indikator indeks rasa aman, menghasilkan capaian kinerja sebesar 70,21%.
- Peningkatan pekon maju di Kabupaten Tanggamus yang ditunjukkan dengan indikator persentase pekon maju, pada akhir periode 2023 mengalami peningkatan 23,41 dibandingkan periode sebelumnya, dari 2, 01% menjadi 25,42% sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%.
- Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Tanggamus yang ditunjukkan melalui indikator Indeks Pemberdayaan Gender, menghasilkan capaian kinerja sebesar 83,76%.
- Pada indikator Nilai Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tanggamus, menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%, Nilai Kabupaten Layak ANakn tahun 2022 sebesar 736,15.

- Peningkatan pengarusutamaan gender Pada indikator Indeks Pembangunan Gender, menghasilkan capaian kinerja sebesar 99,93% dengan nilai IPG sebesar 91,1 di tahun 2022
- Peningkatan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan yang ditunjukkan melalui indikator tingkat rata-rata capaian kondisi kemantapan jalan Kabupaten, infrastruktur dasar wilayah dan ketahanan energi, menghasilkan capaian sebesar 100%.
- Peningkatan kondisi kemantapan jalan Kabupaten yang ditunjukkan melalui indikator kondisi kemantapan jalan Kabupaten, menghasilkan capaian kinerja sebesar 78,87%.
- Peningkatan infrastruktur dasar wilayah yang ditunjukkan melalui indikator tingkat pelayanan infrastruktur dasar wilayah, menghasilkan capaian kinerja sebesar 90,49%.
- Peningkatan ketahanan dan kemandirian energi yang ditunjukkan melalui Rasio elektrifikasi, menghasilkan capaian kinerja sebesar 99,98%.
- Penurunan tingkat emisi gas rumah kaca yang ditunjukkan melalui indikator penurunan angka emisi gas rumah kaca, menghasilkan capaian kinerja sebesar 42,86%.
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang ditunjukkan melalui indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, menghasilkan capaian kinerja sebesar 94,66%
- Peningkatan ketangguhan terhadap bencana yang ditunjukkan melalui indikator Indeks Risiko Bencana, menghasilkan capaian kinerja sebesar 78,70%

2.5.3. Misi 3: Menata Pemerintahan yang Bersih dan Baik

Fokus pada reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Capaian pembangunan pada misi ini tergambar dari beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2.58. Indikator Capaian Pembangunan pada Misi 3 RPJPD Kabupaten Tanggamus 2005-2045

No	Indikator	Target RPJPD	Baseline	Kondisi Awal Perencanaan	Kondisi Terakhir
A	Sasaran Pokok : Pemerintah Berkinerja baik dan dipercaya masyarakat				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkat	2017	73,47	83,44
2	Kepatuhan dalam Pelayanan Publik	Meningkat	2022	63,94	71,99
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkat	2020	CC	CC (57,03)
4	Persentase SKPD yang Memiliki Perkantoran yang Berstatus Aset Pemda Dalam	Meningkat	2008	< 50%	95%

No	Indikator	Target RPJPD	Baseline	Kondisi Awal Perencanaan	Kondisi Terakhir
	Kondisi Baik				
B	Sasaran Pokok : Pemerintahan dikelola dengan bersih				
5	Opini Pemeriksaan BPK	Wajar	2010	WDP	WTP
6	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Meningkat	2013	CC	B (65,16)
C	Sasaran Pokok : Kemandirian daerah makin meningkat				
6	Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan Daerah	Meningkat		-	4,02%
7	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkat		72,94	64,60

Sumber: Bapperida Kabupaten Tanggamus, 2023

- Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik yang ditunjukkan elalui indikator indeks reformasi birokrasi, menghasilkan capaian kinerja sebesar 99%.
- Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah Daerah yang ditunjukkan melalui indikator tingkat akuntabilitas kinerja, menghasilkan capaian kinerja sebesar 92%.
- Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditunjukkan melalui indikator indeks pengelolaan keuangan Daerah, menghasilkan capaian kinerja sebesar 56,88%.

2.5.4. Misi 4: Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkeadilan

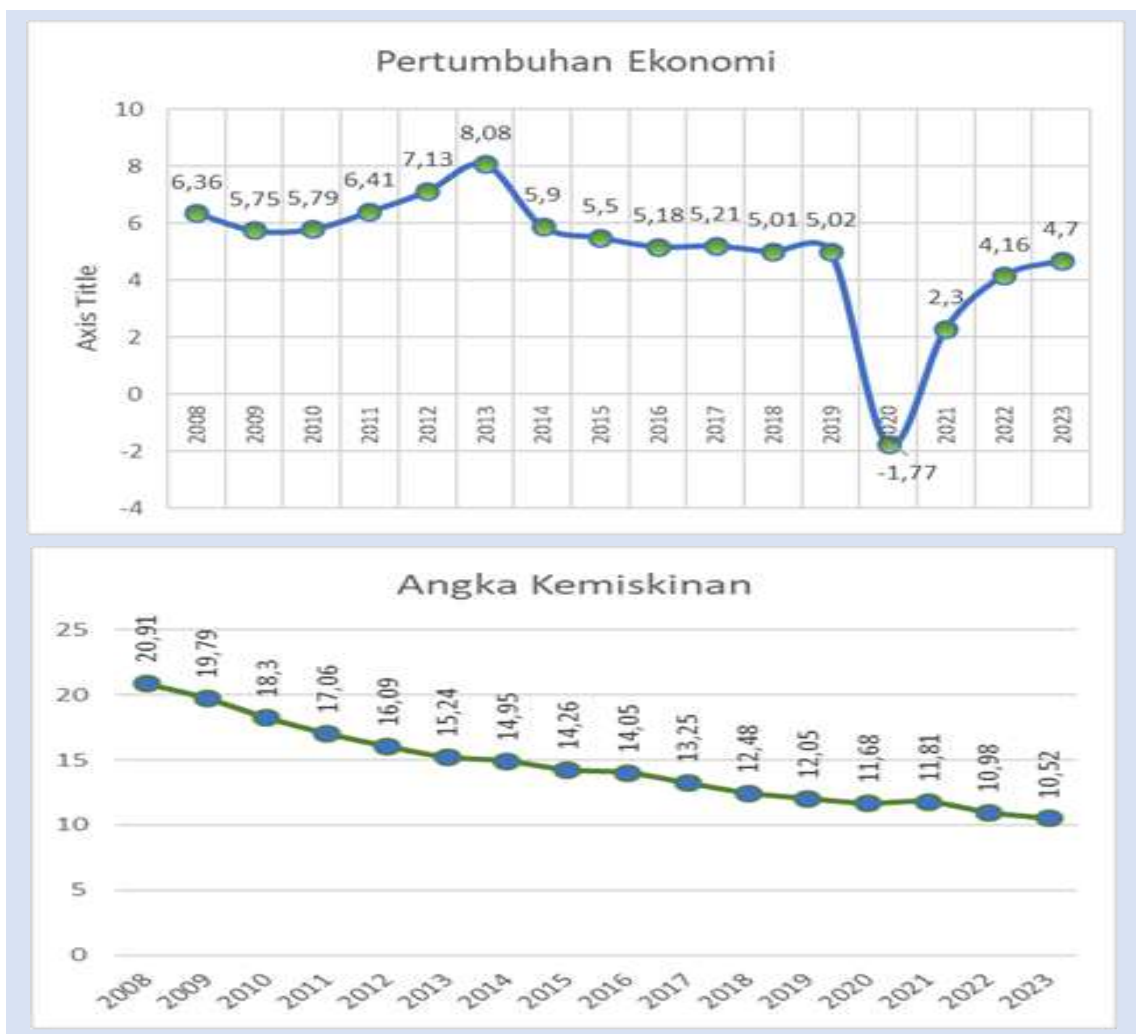
Misi ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang merata, inklusif, dan kompetitif, serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Secara keseluruhan, meskipun menghadapi tantangan seperti fluktuasi pertumbuhan ekonomi dan dampak pandemi COVID-19, Tanggamus berhasil menunjukkan pemulihan yang signifikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi di Tanggamus menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2008, ekonomi Tanggamus mencatat pertumbuhan yang cukup baik sebesar 6,36%, namun mengalami penurunan hingga tahun 2010. Setelah itu, perekonomian Tanggamus kembali meningkat dan mencapai puncaknya pada tahun 2013 dengan laju pertumbuhan tertinggi sebesar 8,08% selama 15 tahun terakhir. Namun, setelah mencapai puncaknya, laju pertumbuhan ekonomi Tanggamus kembali melambat dengan nilai dikisaran 5% sari 2014-2019. Pandemi COVID-19 kemudian mengakibatkan degradasi ekonomi hingga mencapai titik terendah -1,77% di tahun 2020. Bangkit dari keterpurukan pasca

pandemi, perekonomian Tanggamus menunjukkan pertumbuhan positif hingga mencapai 4,7% pada tahun 2023.

Perbaikan kondisi ekonomi masyarakat juga terlihat dari menurunnya angka kemiskinan di Tanggamus. Angka kemiskinan menunjukkan penurunan setiap tahun, dari 20,1% pada tahun 2008 menjadi 10,52% pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan upaya yang berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan ekonomi dan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Grafik 2.40. Pertumbuhan Ekonomi dan Angka Kemiskinan Kabupaten Tanggamus tahun 2010-2023



Sumber: BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

Capaian pembangunan pada misi ini tergambar dari beberapa indikator sebagai berikut:

Tabel 2.59. Indikator Capaian Pembangunan pada Misi 4 RPJPD Kabupaten Tanggamus 2005-2045

No	Indikator	Target RPJPD	Baseline	Kondisi Awal Perencanaan	Kondisi Terakhir
A	Sasaran Pokok : Peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi				
1	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkat	2008	6,36	4,7
2	PDRB Perkapita	Meningkat	2008	5,68 Juta	71,99
B	Sasaran Pokok : Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan				
5	Angka Kemiskinan	Menurun	2008	20.91	10,52
6	Angka Pengangguran	Menurun	2008	3,91	3,35
7	Ketimpangan Pendapatan	Menurun		-	0,261
C	Sasaran Pokok : Daya Saing Daerah yang meningkat				
6	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Meningkat	2010	6,33	6,33
7	Indeks Daya Saing Daerah	Meningkat	2020	1,85	2,90 (sedang)

Sumber: Bapperida Kabupaten Tanggamus, 2023

- Dalam Rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan angka kemiskinan dan pengangguran yang ditunjukkan dengan indikator angka kemiskinan di Kabupaten Tanggamus, menghasilkan capaian kinerja sebesar 98,33%.
- Pada indikator tingkat pengangguran terbuka, menghasilkan capaian kinerja sebesar 81,08%.
- Pada indikator persentase angka penyandang masalah kesejahteraan sosial, menghasilkan capaian kinerja sebesar 98,09%.
- Penurunan ketipangan pendapatan masyarakat yang ditunjukkan melalui indikator indeks gini, menghasilkan capaian kinerja sebesar 99,24%.
- Peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkualitas yang ditunjukkan melalui indikator laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanggamus, menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%.
- Peningkatan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk yang ditunjukkan melalui indikator persentase pertumbuhan PDRB perkapita, menghasilkan capaian kinerja sebesar 88,60%.

Pembangunan Sektor Pertanian dan Perikanan dengan Dukungan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi :

- Peningkatan pembangunan sektor pertanian dan perikanan yang ditunjukkan melalui indikator persentase pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dalam PDRB, menghasilkan capaian kinerja sebesar 81%.
- Peningkatan kesejahteraan petani dan ketahann pangan yang ditunjukkan melalui indikator nilai tukar petani, menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%.

- Pada indikator skor pola pangan harapan di Kabupaten Tanggamus mengalami peningkatan sebesar 14,29 poin dibandingkan periode sebelumnya, dari angka 73,32 menjadi 87,61 sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%.

Pembangunan dan Pengelolaan Sektor Pariwisata Berbasis Kemasyarakatan dan Potensi Lokal :

- Peningkatan kontribusi sektor pariwisata sebagai unggulan daerah berbasis ekonomi kreatif dan kearifan budaya lokal yang ditunjukkan melalui indikator persentase pertumbuhan pendukung sektor pariwisata pada PDRB, menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%.
- Peningkatan daya saing pariwisata di Kabupaten Tanggamus yang ditunjukkan dengan persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan pada akhir periode 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan periode tahun 2013-2018, dari 8,00% menjadi 394,31% sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 100%. Hal ini disebabkan adanya penerapan daya saing pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif, kemasyarakatan dan kearifan budaya lokal di Kabupaten Tanggamus.

2.5.5. Faktor Pendorong dan Penghambat Ketercapaian Sasaran RPJPD 2005-2025

Permasalahan pencapaian Misi 1

Hasil perumusan masalah dalam pencapaian Misi 1: *Membangun Manusia yang Berkualitas dan Agamis* ditemukan adalah sebagai berikut:

- a. IPM Kabupaten Tanggamus: Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanggamus terus meningkat dari 60,09 pada tahun 2010 menjadi 69,93 pada tahun 2023, angka ini masih berada dalam kategori sedang dan masih di bawah capaian IPM Provinsi Lampung (72,48) dan Nasional (74,39).
- b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS): Pada tahun 2023, Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tanggamus hanya mencapai 7,36 tahun, meningkat dari 6,319 tahun pada tahun 2011. Ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tanggamus usia 25 tahun ke atas masih jauh di bawah program wajib belajar sembilan tahun yang sudah dicanangkan sejak tahun 1994.
- c. Usia Harapan Hidup (AHH): Usia harapan hidup meningkat menjadi 73,87 tahun pada tahun 2023, dibandingkan dengan 66,58 tahun pada tahun 2011. Meskipun demikian, capaian ini masih di bawah AHH Provinsi

Lampung (74,17 tahun), namun lebih baik dibandingkan rata-rata nasional (72,13 tahun).

- d. Fasilitas Kesehatan: Di bidang kesehatan, Kabupaten Tanggamus hanya memiliki 1 RSUD dan 1 rumah sakit swasta, keduanya merupakan tipe C.
- e. Pemanfaatan Teknologi Informasi: Persentase penduduk Kabupaten Tanggamus yang mengakses internet baru mencapai 60,21%.

Permasalahan pencapaian Misi 2

Hasil perumusan masalah dalam pencapaian Misi 2: *Menata Kehidupan Sosial yang Demokratis dan Harmonis* ditemukan adalah sebagai berikut:

- a. Angka Kriminalitas: Angka kriminalitas di Kabupaten Tanggamus meningkat pada tahun 2022 menjadi 44,88 dibandingkan dengan 24,98 pada tahun 2016, yang berarti terdapat 44 tindak kriminalitas untuk setiap 100.000 penduduk.
- b. Tantangan Penanganan Kriminalitas: Kabupaten Tanggamus masih menghadapi tantangan signifikan dalam penanganan tindak kriminal. Dengan tingkat penyelesaian kasus (Clearance Rate) sebesar 55,81 pada tahun 2022, yang merupakan salah satu yang terendah di Provinsi Lampung, hanya sebagian kecil dari kasus kriminal yang berhasil diselesaikan. Hal ini menempatkan Kabupaten Tanggamus di posisi keempat terbawah di tingkat provinsi. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa upaya penanganan dan pencegahan terus dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di daerah tersebut.

Permasalahan pencapaian Misi 3

Hasil perumusan masalah dalam pencapaian Misi 3: *Menata Pemerintahan yang Bersih dan Baik* ditemukan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam tata Kelola birokrasi penilaian SAKIP Kabupaten Tanggamus dalam kategori B sementara untuk penilaian reformasi birokrasi mendapatkan nilai 59,14 kategori CC dengan 2022.
- b. Pada sektor kinerja pelayanan publik, Kabupaten Tanggamus smapi dengan saat ini belum membentuk Mall Pelayanan Publik sejak tahun 2022.
- c. Pada pengelolaan keuangan, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tanggamus justru menurun menjadi 64,6

Permasalahan pencapaian Misi 4

Hasil perumusan masalah dalam pencapaian Misi 4: *Mengembangkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkeadilan*. ditemukan adalah sebagai berikut:

- a. **Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi:** Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanggamus cenderung melambat sejak tahun 2013, dari 8,08% pada tahun 2013 menjadi 4,7% pada tahun 2023. Perlambatan ini sudah terjadi sebelum pandemi COVID-19 dan diperparah oleh kondisi pandemi.
- b. **Persentase Penduduk Miskin:** Persentase penduduk miskin masih cukup tinggi, yaitu 10,52%. Meskipun lebih rendah dari rata-rata Provinsi Lampung, angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang hanya 9,36%.
- c. **Investasi Rendah Dibanding Konsumsi:** Investasi masih rendah dibandingkan konsumsi masyarakat. Pada tahun 2022, jumlah investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebanyak 20 investor dengan nilai investasi Rp15,06 Milyar dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 5 investor dengan nilai investasi Rp45,28 Milyar.

Tercapainya target kinerja indikator sasaran RPJPD Kabupaten Tanggamus tahun 2005-2025 tidak lepas dari faktor-faktor yang mendorong dan menghambat seperti berikut:

Faktor Pendorong

- 1. Penerapan Teknologi Lanjutan:** Implementasi teknologi lebih canggih pada beberapa sektor untuk mendukung pencapaian kinerja.
- 2. Partisipasi Masyarakat:** Peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- 3. Potensi Sektor Pertanian dan Perikanan:** Potensi unggulan di sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Tanggamus meningkatkan nilai tambah dalam kegiatan ekonomi pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta berkontribusi pada pertumbuhan PDRB.
- 4. Potensi Wisata:** Kondisi geografis Kabupaten Tanggamus yang bervariasi, dengan bukit dan pegunungan serta berbatasan langsung dengan Teluk Semaka, menawarkan banyak potensi wisata.
- 5. Pemerataan Pembangunan Daerah:** Pembangunan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan.

Faktor Penghambat:

- 1. Kurangnya Pemahaman Stakeholder:** Stakeholder kurang memahami sistem perencanaan pembangunan sesuai peraturan yang berlaku.
- 2. Koordinasi Antar Instansi Lemah:** Tingkat koordinasi antar instansi terkait masih rendah.
- 3. Sistem Tata Kelola Manual:** Banyak aspek tata kelola pemerintahan (database, sistem, pola kerja, dll.) masih bersifat manual.
- 4. Perubahan dan Tumpang Tindih Regulasi:** Terjadi perubahan atau tumpang tindih regulasi dari pemerintah pusat/provinsi.
- 5. Pemanfaatan Hasil Kajian Tidak Optimal:** Pemanfaatan hasil kajian/penelitian belum optimal sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah.
- 6. Minimnya Pemanfaatan IPTEK dan Inovasi:** Pemanfaatan IPTEK dan pengembangan inovasi daerah masih minim.
- 7. Rendahnya Investasi Dibanding Konsumsi:** Investasi masih rendah dibanding konsumsi masyarakat, yang meskipun menunjukkan daya beli stabil, juga mencerminkan tingginya biaya pengeluaran rumah tangga karena naiknya harga-harga.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan

Indonesia akan memasuki usia 100 tahun kemerdekaan pada tahun 2045. Pada tahun tersebut, Indonesia memiliki peluang dan tantangan dalam memanfaatkan bonus demografi, yaitu kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar daripada yang tidak atau belum produktif. Bonus demografi dapat menjadi modal bagi pembangunan manusia, ekonomi, sosial, dan lingkungan di Indonesia, jika dikelola dengan baik, namun jika tidak, bonus demografi dapat menjadi beban bagi negara.

Menurut data hasil Sensus Penduduk 2020, penduduk Indonesia pada tahun 2020 berjumlah sekitar 270 juta jiwa, dengan persentase penduduk usia 0-14 tahun sebesar 24,56%, usia 15-64 tahun sebesar 69,28% dan usia 65 tahun ke atas sebesar 6,16%. Rasio ketergantungan atau *dependency ratio* yaitu rasio antara jumlah penduduk belum/tidak produktif dengan penduduk produktif, sebesar 44,17%. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memasuki era

bonus demografi sejak tahun 2015, dengan periode puncaknya diperkirakan terjadi pada periode 2020-2035.

Proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2045 bergantung pada asumsi angka kelahiran, kematian dan migrasi. Berdasarkan data Bappenas, ada tiga skenario proyeksi penduduk Indonesia pada tahun 2045, yaitu:

- 1) Skenario pertama adalah **tren tanpa ada kebijakan**, di mana TFR (rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa reproduksi) terus menurun hingga 1,9 dan IMR (angka kematian bayi) mencapai 7,85. Dalam skenario ini, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 akan mencapai **324 juta jiwa**, dengan proporsi penduduk usia 0-14 tahun turun dari 24,56% menjadi 19,61% dan penduduk usia 65 tahun ke atas naik dari 6,16% menjadi 14,61%. Indonesia akan menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-6 di dunia, turun dari peringkat ke-4 pada tahun 2025.
- 2) Skenario kedua adalah **moderat**, di mana TFR dijaga di angka 2,0 dan IMR mencapai 5,8. Dalam skenario ini, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 akan mencapai **327 juta jiwa**, dengan proporsi penduduk usia 0-14 tahun turun dari 24,56% menjadi 20,05% dan penduduk usia 65 tahun ke atas naik dari 6,16% menjadi 13,83%. Indonesia akan tetap menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-6 di dunia, setelah disalip oleh Nigeria dan Pakistan.
- 3) Skenario ketiga adalah **optimis**, di mana TFR dijaga di angka 2,0 dan IMR mencapai 4,2. Dalam skenario ini, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 akan mencapai **330 juta jiwa**, dengan proporsi penduduk usia 0-14 tahun turun dari 24,56% menjadi 20,51% dan penduduk usia 65 tahun ke atas naik dari 6,16% menjadi 13,07%. Indonesia akan kembali menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-5 di dunia, mengalahkan Pakistan.

Dari ketiga skenario tersebut, terlihat bahwa Indonesia akan mengalami penurunan persentase penduduk usia produktif dan kenaikan persentase penduduk usia lanjut atau lansia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia akan mulai memasuki struktur penduduk yang menua atau *aging population*. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang timbul akibat perubahan struktur penduduk ini, seperti meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan, jaminan sosial, dan kesejahteraan bagi penduduk lansia, serta menurunnya ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif.

2.6.1. Proyeksi Kependudukan

2.6.1.1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk merupakan asset terpenting dalam pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan proyeksi jumlah penduduk untuk perencanaan pembangunan di masa mendatang.

Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk Kabupaten Tanggamus pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar 674.482 jiwa. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 2,22% dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2023. Kemudian pada tahun 2030, jumlah penduduk Tanggamus diproyeksikan berada pada kisaran 674.482 jiwa. Terjadi peningkatan sekitar 3,64% dari proyeksi 2025. Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Tanggamus dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk natalitas yang tinggi, mortalitas yang rendah dan faktor-faktor seperti tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan tingkat kemiskinan.

Selanjutnya, proyeksi jumlah penduduk Tanggamus tahun 2035 adalah sekitar 723.612 jiwa. Artinya, terjadi pertumbuhan sebesar 3,51% atau rata-rata pertumbuhan sebesar 0,7% per tahun sejak 2030 hingga 2035. Pertumbuhan ini masih akan terus berlanjut. Diperkirakan pada 2040 nanti jumlah penduduk Kabupaten Tanggamus mencapai sekitar 748.183 jiwa. Kemudian pada tahun 2045, jumlahnya bertambah menjadi sekitar 768.256 jiwa.

Grafik 2.41. Proyeksi Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tanggamus



Sumber: Data diolah, 2024

Seiring dengan perkembangan zaman, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanggamus diproyeksikan menurun dalam 20 tahun ke depan. Dari 1,21% di tahun 2023, akan menurun dibawah 1% mulai tahun 2025, penurunan laju pertumbuhan terus terjadi hingga sampai 0,53% di tahun 2045. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penurunan angka kelahiran akibat peningkatan tingkat pendidikan dan kesadaran keluarga berencana, urbanisasi yang mendorong migrasi ke kota-kota besar, dan peningkatan kualitas hidup yang membuat pasangan memilih memiliki anak lebih sedikit. Selain itu, kebijakan pemerintah yang mendukung kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender, perubahan sosial dan budaya seperti peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan penundaan usia pernikahan, serta pertumbuhan ekonomi yang stabil yang meningkatkan biaya hidup dan preferensi keluarga kecil turut berkontribusi. Perubahan demografis ini akan mempengaruhi perencanaan infrastruktur, layanan publik, dan strategi pembangunan berkelanjutan di Tanggamus.

2.6.1.2. Proyeksi dan Distribusi Penduduk Menurut Kecamatan

Distribusi penduduk menggambarkan pola penyebaran manusia di suatu wilayah dan faktor-faktor yang memengaruhi distribusi ini dapat bervariasi. Pertama, faktor fisik seperti topografi, iklim dan ketersediaan sumber daya alam berperan penting dalam menentukan di mana manusia memilih untuk tinggal. Wilayah dengan kondisi geografis yang menguntungkan, seperti dataran rendah yang subur atau iklim yang nyaman, cenderung menarik lebih banyak penduduk. Sebaliknya, wilayah yang sulit diakses atau memiliki iklim ekstrem mungkin kurang diminati.

Faktor kedua adalah ekonomi dan peluang pekerjaan. Daerah yang menawarkan lapangan pekerjaan yang luas dan peluang ekonomi yang baik akan cenderung menarik lebih banyak penduduk. Kecamatan-kecamatan yang berada di dekat pusat perkotaan seringkali menjadi magnet bagi mereka yang mencari pekerjaan dan peluang hidup yang lebih baik. Akibatnya, distribusi penduduk dapat cenderung berkumpul di sekitar pusat-pusat urban atau daerah dengan sektor ekonomi yang berkembang pesat.

Terakhir, faktor sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam distribusi penduduk. Keberadaan infrastruktur sosial seperti sekolah, rumah ibadah dan pusat kegiatan sosial dapat menjadi daya tarik bagi penduduk. Selain itu, faktor-faktor budaya seperti keberagaman etnis, bahasa dan tradisi juga dapat memengaruhi bagaimana manusia memilih lokasi tinggal mereka. Dengan

demikian, distribusi penduduk mencerminkan kompleksitas interaksi antara faktor-faktor geografis, ekonomi, dan sosial di suatu wilayah.

Data di atas menggambarkan proyeksi perkembangan jumlah dan distribusi penduduk di 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus hingga kurun waktu 2045. Terlihat bahwa secara umum hampir semua kecamatan menunjukkan pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun, meskipun dengan tingkat yang berbeda-beda.

Tabel 2.60. Proyeksi dan Distribusi Penduduk Kabupaten Tanggamus Menurut Kecamatan Tahun 2024-2045

No	Kecamatan	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	Wonosobo	43.441	45.021	46.602	48.183	49.765
2	Semaka	41.779	43.455	45.131	46.808	48.485
3	Bandar Negeri Semuong	18.230	18.923	19.615	20.308	21.001
4	Kota Agung	49.885	51.751	53.618	55.484	57.351
5	Pematang Sawa	18.848	19.550	20.252	20.954	21.656
6	Kota Agung Timur	22.814	23.917	25.020	26.124	27.227
7	Kota Agung Barat	24.137	25.272	26.408	27.544	28.681
8	Pulau Panggung	42.534	44.352	46.170	47.989	49.807
9	Ulu Belu	46.185	47.948	49.712	51.475	53.238
10	Air Naningan	33.059	34.267	35.474	36.682	37.890
11	Talang Padang	56.019	57.791	59.564	61.336	63.109
12	Sumberejo	37.970	39.293	40.616	41.940	43.263
13	Gisting	45.323	46.986	48.648	50.311	51.973
14	Gunung Alip	23.222	23.948	24.675	25.402	26.129
15	Pugung	69.336	71.588	73.841	76.093	78.346
16	Bulok	25.277	26.045	26.813	27.581	28.349
17	Cukuh Balak	26.105	26.822	27.538	28.255	28.972
18	Kelumbayan	12.952	13.479	14.008	14.536	15.065
19	Limau	22.764	23.492	24.220	24.949	25.677
20	Kelumbayan Barat	14.602	15.144	15.687	16.229	16.772
	Jumlah Penduduk Tanggamus	674.482	699.044	723.612	748.183	768.256

Sumber : Data diolah, 2024

Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar dan terus meningkat hingga 2045 adalah Pugung. Pada 2025 diperkirakan jumlah penduduk Kecamatan Pugung mencapai 69.336 jiwa, kemudian terus bertambah hingga 78.346 jiwa di 2045. Empat kecamatan lainnya yang juga signifikan kontribusinya terhadap distribusi penduduk Kabupaten Tanggamus adalah Talang Padang, Kota Agung, Ulu Belu dan Gisting.

Ketiga kecamatan setelah Pugung dengan distribusi penduduk terbesar pada 2045 berturut-turut adalah Talang Padang (63.109 jiwa), Kota Agung (57.351 jiwa), dan Ulu Belu (53.238 jiwa). Sedangkan Gisting menempati urutan kelima dengan jumlah penduduk 51.973 jiwa di 2045.

Sementara itu, Kecamatan Kelumbayan dan Kelumbayan Barat konsisten menempati posisi dengan distribusi penduduk Kabupaten Tanggamus paling rendah sepanjang 2025 hingga 2045. Pada 2045, jumlah penduduk Kelumbayan hanya mencapai 15.065 jiwa. Kondisi yang hampir serupa terjadi di Kelumbayan Barat, dengan proyeksi 16.772 jiwa total penduduk pada tahun yang sama.

Tabel 2.61. Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-laki (Jiwa)	340.963	337.729	351.192	364.410	377.336	387.743
Perempuan (Jiwa)	318.855	336.753	347.852	359.202	370.847	380.513
Rasio	106,93	100,29	100,96	101,45	101,75	101,90

Sumber : Data diolah, 2024

2.6.1.3. Bonus Demografi

Bonus demografi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak daripada jumlah penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Bonus demografi terjadi ketika jumlah penduduk usia produktif meningkat secara signifikan dalam suatu negara atau wilayah.

Bonus demografi dapat memberikan dampak positif pada perekonomian suatu wilayah. Dengan jumlah penduduk usia produktif yang lebih banyak, wilayah tersebut memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, untuk memanfaatkannya dengan baik, pemerintah harus menciptakan kebijakan sosial dan ekonomi yang tepat. Selain itu, pemerintah juga perlu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk agar tidak terjadi ledakan penduduk yang dapat mengancam ketersediaan sumber daya dan kualitas hidup masyarakat.

Data proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Tanggamus per kelompok umur tersebut di atas menunjukkan bahwa Tanggamus berpotensi menikmati bonus demografi pada rentang waktu 2025-2035. Hal ini ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang terus meningkat pesat dibandingkan kelompok usia non-produktif.

Pada 2025, total penduduk usia produktif Tanggamus adalah 455.650 jiwa atau sekitar 67,56% dari total penduduk. Jumlah ini terus bertambah hingga mencapai puncaknya sebanyak 494.578 jiwa (68,35% dari total) di 2035. Sementara penduduk usia non-produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun) justru mengalami penurunan porsi, dari 32,44% di 2025 menjadi 31,65% di 2035.

Tabel 2.62. Proyeksi dan Distribusi Penduduk Kabupaten Tanggamus Menurut Kelompok Umur, 2024-2045

Umur	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	57.658	59.408	48.020	49.003	47.533
5-9	56.739	57.362	58.399	57.844	54.900
10-14	55.755	56.660	58.068	57.879	55.136
15-19	50.976	51.389	53.545	53.124	52.471
20-24	53.550	52.976	54.738	54.305	56.078
25-29	54.285	53.524	54.283	54.022	54.714
30-34	52.656	52.399	53.877	54.159	56.455
35-39	52.745	53.620	55.305	52.328	52.175
40-44	47.430	49.186	51.634	49.659	50.105
45-49	44.648	46.897	49.761	48.256	48.979
50-54	38.250	41.482	45.124	44.928	46.532
55-59	33.938	38.087	42.314	43.739	45.841
60-64	27.172	30.354	33.997	34.141	35.095
65-69	20.794	23.381	27.402	39.632	46.954
70-74	13.988	16.206	18.612	27.630	32.678
75+	13.899	16.110	18.532	27.534	32.610
Total	674.482	699.044	723.612	748.183	768.256

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus, 2024

Kondisi inilah yang menggambarkan Tanggamus tengah memasuki fase bonus demografi, dimana penduduk usia produktif jauh lebih besar dari kelompok non-produktif. Fase bonus demografi diperkirakan berlangsung hingga 2040, sebelum rasio kedua kelompok tersebut kembali menyempit.

Untuk memaksimalkan bonus demografi, maka perlu dipersiapkan lapangan kerja yang cukup bagi angkatan kerja yang terus bertambah. Selain itu, produktivitas penduduk usia kerja perlu terus ditingkatkan melalui pelatihan keterampilan yang memadai.

Komposisi penduduk Tanggamus yang didominasi kelompok usia produktif pada 2025-2035 dapat dimanfaatkan untuk mendorong pembangunan daerah. Sektor-sektor strategis seperti manufaktur, jasa, dan pariwisata sangat potensial untuk dikembangkan guna menyerap bonus demografi.

Namun perlu diwaspadai, bonus demografi yang tidak ditangani dengan baik justru akan menimbulkan pemborosan. Sebab, angkatan kerja yang menganggur dan minim keterampilan tidak akan memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian Tanggamus.

2.6.1.4. Penduduk Usia Lanjut

Penduduk usia 60 tahun ke atas, atau yang sering disebut lansia, merupakan kelompok yang semakin meningkat jumlahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia, usia 60 tahun ke atas merupakan batas usia untuk dikategorikan sebagai lansia. Di Indonesia, jumlah penduduk lansia terus meningkat, dengan proyeksi mencapai 28,8 juta jiwa atau 11,34%

dari total populasi pada tahun 2020. Peningkatan jumlah lansia ini menuntut perhatian khusus dalam merumuskan kebijakan dan program yang mendukung kesejahteraan mereka.

Penduduk usia lanjut memiliki dampak signifikan terhadap struktur sosial dan kesehatan masyarakat yang menuntut perhatian dalam penyediaan pelayanan kesehatan dan sosial secara memadai untuk memenuhi kebutuhan lansia.

Peningkatan jumlah penduduk lansia juga menuntut perhatian terhadap kesejahteraan mereka. Studi menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan lansia, baik yang tinggal bersama keluarga maupun di panti sosial, perlu mendapat perhatian serius, termasuk dalam hal pelayanan kesehatan dan psikososial. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan dan kebijakan yang memperhatikan kebutuhan khusus dari populasi lansia, baik dalam hal pelayanan kesehatan, sosial, maupun lingkungan, guna mendukung kualitas hidup mereka di usia lanjut.

Berdasarkan table II.52 di atas, menunjukkan penduduk lanjut usia (lansia) di Kabupaten Tanggamus diproyeksikan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada 2025, proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas mencapai 11,25% dari total penduduk, atau sebanyak 75.853 jiwa. Jumlah ini terus bertambah menjadi 86.051 jiwa (12,31%) pada 2030 dan 98.543 jiwa (13,62%) pada 2035.

Sementara kelompok lanjut usia paling tua (70 tahun ke atas) juga mengalami tren kenaikan. Tercatat sebanyak 27.887 jiwa pada 2025, kemudian 32.316 jiwa pada 2030 dan 34.744 jiwa pada 2045. Total keseluruhan penduduk lansia Tanggamus diprediksi terus bertambah, dari 4,13% pada 2025 menjadi 4,52% pada 2045.

Peningkatan jumlah penduduk lansia ini perlu diantisipasi dengan beragam program pelayanan. Terutama di bidang kesehatan, mengingat tingginya resiko penyakit pada kelompok ini, juga bantuan sosial dan perlindungan agar dapat menjalani masa tua dengan tercukupi.

Selain itu, infrastruktur ramah lansia seperti fasilitas umum aksesibel perlu terus ditingkatkan di Tanggamus. Begitu pula dengan ketersediaan panti jompo bagi lansia terlantar agar mendapat pengasuhan yang layak. Program padat karya dengan memanfaatkan penduduk lansia masih produktif juga bisa diterapkan. Lebih jauh, kampanye dan edukasi untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam merawat anggota keluarga lansia dirasa perlu. Sebab, peran keluarga dalam merawat lansia tak kalah penting dibanding upaya pemerintah semata.

2.6.2. Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Kabupaten Tanggamus diperkirakan akan mengalami peningkatan jumlah penduduk dari sekitar 589.818 jiwa pada tahun 2023 menjadi sekitar 768.256 jiwa pada tahun 2045. Pertumbuhan penduduk ini perlu diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai agar standar hidup masyarakat tetap terjamin.

2.6.2.1. Rumah/Tempat Tinggal

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, selain pakaian dan makanan. Rumah berfungsi sebagai tempat berlindung dari segala rintangan dan sebagai tempat berkumpul dan menjalankan berbagai kegiatan keluarga. Fungsi rumah juga telah mengalami perubahan, dari yang awalnya hanya sebagai tempat berlindung, menjadi tempat yang mengakomodir kebutuhan dan keinginan pemiliknya.

Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana rumah/tempat tinggal hingga tahun 2045, terdapat beberapa aspek yang perlu dianalisis. Pertumbuhan populasi, urbanisasi dan perubahan gaya hidup akan berdampak langsung pada permintaan akan rumah dan fasilitas pendukungnya. Proyeksi pertumbuhan penduduk Kabupaten Tanggamus yang diiringi dengan kebutuhan rumah dapat diproyeksikan dalam berikut :

Tabel 2.63. Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Tanggamus

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	659.818	674.482	699.044	723.612	748.183	768.256
Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)	131.964	134.896	139.809	144.722	149.637	153.651

Sumber: Data diolah, 2024

Catatan: Berdasarkan SNI 03-1733-2004, diasumsikan jumlah penghuni rumah rata-rata 5 jiwa per rumah.

2.6.2.2. Air Bersih

UNESCO adalah organisasi internasional yang memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan, ilmu pengetahuan serta kebudayaan juga turut memberikan penjelasan terkait kebutuhan air bersih per hari satu orang.

Menurut organisasi UNESCO, rata-rata hak manusia atas air ialah 60 liter per orang setiap harinya. Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum juga menyampaikan hal senada. Hal ini dapat dijadikan dasar dalam melakukan analisis proyeksi kebutuhan air bersih di Kabupaten Tanggamus sampai tahun 2045.

Tabel 2.64. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Tanggamus

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	659.818	674.482	699.044	723.612	748.183	768.256
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih/ tahun	14.450.014.200	14.771.155.800	15.309.063.600	15.847.102.800	16.385.207.700	6.824.806.400

Sumber: Data diolah, 2024

2.6.2.3. Energi/Listrik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan energi dan sumber daya mineral terdiri atas sub urusan geologi, mineral dan batubara dan sub urusan energi baru dan terbarukan dan ketenagalistrikan. Pembangunan bidang energi diarahkan untuk mendorong kegiatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat serta memenuhi kebutuhan energi masyarakat dengan menjamin tersedianya energi dan peningkatan mutu serta pelayanannya. Begitu pula dengan pembangunan dan pengembangan energi kelistrikan terus ditingkatkan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan.

Pembangunan sarana dan prasarana energi kelistrikan dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan koperasi. Untuk tersedianya pelayanan kelistrikan sampai ke dusun-dusun di semua wilayah kecamatan dalam Kabupaten Tanggamus.

Tabel 2.65. Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Tanggamus

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	659.818	674.482	699.044	723.612	748.183	768.256
Jumlah Rumah (unit)	131.964	134.896	139.809	144.722	149.637	153.651
Proyeksi Kebutuhan Listrik (kVA)	151.758.140	155.130.860	160.780.120	166.430.760	172.082.090	176.698.880

Sumber: Data diolah, 2024

Catatan: Berdasarkan SNI 03-1733-2004, setiap unit rumah tangga harus dapat dilayani daya listrik minimum 450 VA per jiwa dan untuk sarana lingkungan sebesar 40% dari total kebutuhan rumah tangga.

2.6.2.4. Persampahan

Untuk menjamin kualitas lingkungan hidup masyarakat saat ini dan di masa depan, dibutuhkan dukungan berupa lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat ditentukan oleh seberapa baik pengolahan sampah dilakukan. Pertumbuhan populasi penduduk di Kabupaten Tanggamus menjadikan pengolahan sampah sebagai fokus utama dalam upaya pelestarian lingkungan. Semakin bertambahnya jumlah penduduk berarti volume sampah yang dihasilkan juga akan semakin banyak.

Tabel 2.66. Proyeksi Timbulan Sampah Kabupaten Tanggamus

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	659.818	674.482	699.044	723.612	748.183	768.256
Proyeksi Timbulan Sampah	134.867	137.777	142.455	147.292	152.293	157.463

Sumber: Data diolah, 2024

2.6.2.5. Sarana Kesehatan

1. Rumah Sakit

Kabupaten Tanggamus memiliki dua Rumah Sakit yang terdiri atas satu Rumah Sakit Pemerintah dan satu Rumah Sakit Swasta, angka Rasio Rumah Sakit perjumlah penduduk pada tahun 2023 adalah 1: 329.909 yang artinya satu Rumah Sakit melayani kurang lebih 329.909 jiwa, idealnya satu Rumah Sakit melayani 100.000 jiwa.

Tabel 2.67. Proyeksi Kebutuhan Rumah Sakit Kabupaten Tanggamus

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah Sakit				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	659.818	674.482	699.044	723.612	748.183	768.256
Proyeksi Kebutuhan Rumah Sakit (Unit)	2	7	7	7	7	8

Sumber: Data diolah, 2024

2. Puskesmas

Puskesmas sebagai ujung tombak dalam mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat. Dengan demikian keberadaan puskesmas menjadi sangat penting sehingga perlu dipastikan bahwa puskesmas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan standar. Untuk memenuhi pelayanan

sesuaistandar sudah tentu harus terpenuhi standar inputnya, standar prosesdiarahkan pada terwujudnya penyelenggaraan puskesmas yang bermutuumudah di akses dan terjangkau oleh msyarakat.

Puskesmas sebagai salah satu satu jenis fasilitas pelayanan tingkatpertama, penyelenggaraannya perlu penataan untuk meningkatkanaksesibilitas, keterjangkauan dan kualitas pelayanan dalam rangkameningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Saat ini, jumlah Puskesmas yang ada di Kabupaten Tanggamus sebanyak 24 unit yang tersebar di setiap kecamatan. Sehingga dengan jumlah penduduk Kabupaten Tanggamus yang berjumlah 659.818 jiwa, maka rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk adalah 1 : 27.492. Idealnya, rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk adalah 1 : 16.000. Sehingga KabupatenTanggamus membutuhkan41 Puskesmas.

Tabel 2.68. Proyeksi Kebutuhan Puskesmas Kabupaten Tanggamus

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Puskesmas				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	659.818	674.482	699.044	723.612	748.183	768.256
Proyeksi Kebutuhan Puskesmas (Unit)	24	42	44	45	47	48

Sumber: Data diolah, 2024

3. Dokter dan Tenaga Medis

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkatpelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlahpenduduk yang ada.Jumlah dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi di KabupatenTanggamus belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk.Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis yang tidak merata sertakualitas para dokter masih perlu ditingkatkan.

Jumlah dokter yang ada di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022adalah 97 orang.Dengan demikian, jikasaat ini penduduk Kabupaten Tanggamus berjumlah 659.818 jiwa, maka rasio dokter terhadap jumlah penduduk adalah 1 :6.802. Standar ideal jumlah dokter terhadap jumlah penduduk adalah 1 dokter per 2.500 penduduk.

Tenaga medis dibutuhkan masyarakat sebagai penunjang aktivitaspelayanan kesehatan.Dalam rangka meningkatkan pelayanankesehatan, tenaga medis perlu terus menerus ditambahkan agar rasioper 1.000 penduduk minimal

terdapat satu tenaga medis. Keberadaan tenaga medis sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat.

Tabel 2.69. Proyeksi Kebutuhan Tenaga Dokter dan Tenaga Paramedis Kabupaten Tanggamus

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Dokter				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	659.818	674.482	699.044	723.612	748.183	768.256
Jumlah Tenaga Dokter	97	270	280	289	299	307
Jumlah Tenaga Paramedis	103	674	699	724	748	768

Sumber: Data diolah, 2024

2.6.2.6. Fasilitas Pendidikan

Peningkatan jumlah penduduk usia sekolah perlu diimbangi dengan ketersediaan sekolah dan fasilitas penunjang pendidikan. Ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai merupakan salah satu faktor penentu kualitas penyelenggaraan pendidikan. Rasio ini merupakan indikator penting yang menggambarkan seberapa banyak sekolah yang tersedia dalam suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah di wilayah tersebut. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini menjadi penting karena dapat menunjukkan sejauh mana aksesibilitas pendidikan bagi setiap individu dalam komunitas.

Tabel 2.70. Proyeksi Kebutuhan Sekolah Kabupaten Tanggamus

Uraian	Proyeksi Kebutuhan Sekolah				
	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	674.482	699.044	723.612	748.183	768.256
Jumlah Penduduk Usia Sekolah	163.470	165.411	170.012	168.847	162.507
Jumlah fasilitas pendidikan/1000 penduduk usia sekolah	163	165	170	168	162

Sumber: Data diolah, 2024

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Secara garis besar rencana sistem pusat kegiatan wilayah Kabupaten Tanggamus dirumuskan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.71. Rencana Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Tanggamus Tahun 2011–2031

NO	LOKASI	HIRARKI FUNGSI	FUNGSI
1	Kota Agung	PKW	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintahan • Perdagangan dan Jasa • Perikanan dan Minapolitan • Industri
2	Wonosobo	PKL	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Perdagangan dan Jasa • Kehutanan • Minapolitan
3	Talang Padang	PKLp	<ul style="list-style-type: none"> • Perdagangan dan Jasa • Pertanian • Pendukung Kegiatan Pertanian
4	Gisting	PKLp	<ul style="list-style-type: none"> • Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Agropolitan/Kawasan Pendukung Pertanian
5	Sri Kuncoro Kecamatan Semaka	PPK	<ul style="list-style-type: none"> • Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Kawasan Lindung
6	Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak	PPK	<ul style="list-style-type: none"> • Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Pertanian
7	Pulau Panggung	PPK	<ul style="list-style-type: none"> • Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Pertanian
8	Ngarip Kecamatan Ulu Belu	PPL	<ul style="list-style-type: none"> • Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Pertanian
9	Margoyoso Kecamatan Sumberejo	PPL	<ul style="list-style-type: none"> • Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Pertanian
10	Sukamara Kecamatan Bulok	PPL	<ul style="list-style-type: none"> • Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Pertanian
11	Kuripan Kecamatan Limau	PPL	<ul style="list-style-type: none"> • Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Perikanan
12	Napal Kecamatan Kelumbayan	PPL	<ul style="list-style-type: none"> • Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Perikanan
13	Sidoarjo Kecamatan Kelumbayan Barat	PPL	<ul style="list-style-type: none"> • Permukiman • Perdagangan dan Jasa • Pertanian

Sumber : RTRW Kabupaten Tanggamus 2011-2031

Wilayah perdesaan sebagai hinterland kawasan perkotaan dilayani oleh masing-masing pusat kecamatan yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Lokal (PPL). Untuk kebutuhan yang lebih besar, wilayah perdesaan dilayani oleh adanya PPK di Kabupaten Tanggamus.

Rencana pola ruang kawasan budidaya meliputi Kawasan Hutan Rakyat, Kawasan Peruntukan Pertanian, Kawasan Peruntukan Perkebunan, Kawasan Peruntukan Perikanan, Kawasan Peruntukan Pertambangan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Peruntukan Pariwisata, Kawasan Peruntukan Permukiman.

2.7.1. Kawasan Hutan Rakyat

Kabupaten Tanggamus merupakan daerah agraris yang sektor perkonomiannya didominasi oleh sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan. Saat ini di Kabupaten Tanggamus terdapat penggunaan lahan berupa hutan rakyat, yaitu seluas 35.383 Ha merupakan luasan yang relatif besar dibandingkan dengan penggunaan lahan lainnya.

2.7.2. Kawasan Peruntukan Pertanian

Selain berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian di Kabupaten Tanggamus berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 8 yang menetapkan luas Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) sebesar 18.690 Ha. Menindaklanjuti hal tersebut maka untuk menjaga ketersediaan pangan dan mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten Tanggamus ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Peraturan tersebut disusun dengan cara melakukan updating dan pemetaan lahan pertanian secara geospasial yang berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang sehingga ditetapkan luasan LP2B seluas 16.331,65 Ha.

Tabel 2.72. Luasan dan Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten Tanggamus

NO	KECAMATAN	LUAS LP2B (Ha)	KETERANGAN
1	Air Naningan	302,54	
2	Bandar Negeri Semuong	653,93	
3	Bulok	796,30	
4	Cukuh Balak	581,71	
5	Gisting	343,02	
6	Gunung Alip	1.160,57	
7	Kelumbayan	502,84	
8	Kelumbayan Barat	273,78	
9	Kota Agung	431,15	
10	Kota Agung Barat	757,14	
11	Kota Agung Timur	834,64	
12	Limau	192,32	
13	Pematang Sawa	636,56	

NO	KECAMATAN	LUAS LP2B (Ha)	KETERANGAN
14	Pugung	1.850,66	
15	Pulau Panggung	1.097,18	
16	Semaka	1.824,99	
17	Sumberejo	792,50	
18	Talang Padang	1.029,54	
19	Ulu Belu	587,60	
20	Wonosobo	1.682,69	
	Jumlah	16.331,65	

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Dalam rangka mengantisipasi perubahan luasan LP2B, ditetapkan juga luasan Lahan Cadangan P2B seluas 1.436,12 Ha.

Tabel 2.73. Luasan dan Sebaran Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) Kabupaten Tanggamus

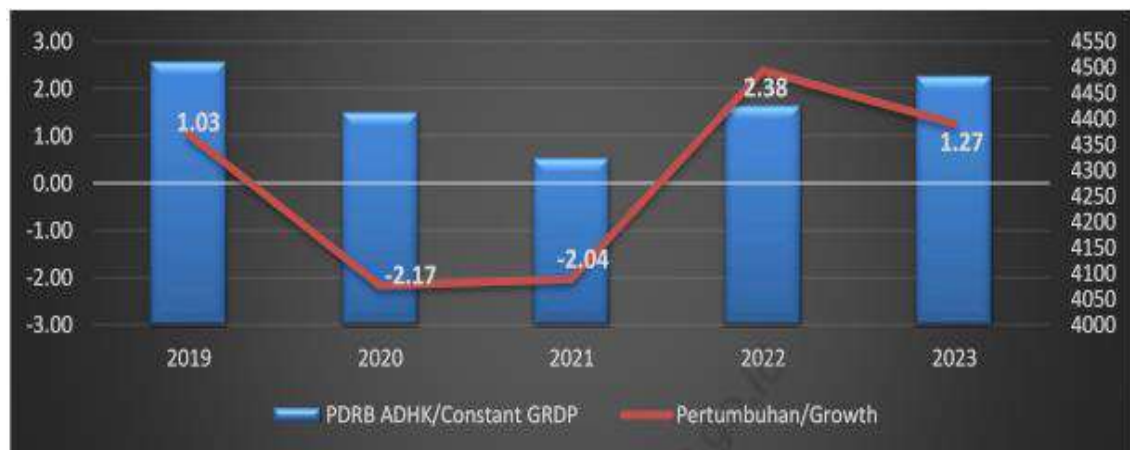
NO	KECAMATAN	LUAS LAHAN (Ha)	KETERANGAN
1	Air Nangingan	57,89	
2	Bandar Negeri Semuong	32,51	
3	Bulok	0	
4	Cukuh Balak	0	
5	Gisting	0	
6	Gunung Alip	164,52	
7	Kelumbayan	85,73	
8	Kelumbayan Barat	126,90	
9	Kota Agung	6,76	
10	Kota Agung Barat	0	
11	Kota Agung Timur	0	
12	Limau	2,36	
13	Pematang Sawa	0	
14	Pugung	367,19	
15	Pulau Panggung	125,35	
16	Semaka	358,02	
17	Sumberejo	0	
18	Talang Padang	0	
19	Ulu Belu	108,89	
20	Wonosobo	0	
	Jumlah	1.436,12	

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Tanggamus masih menjadi sektor unggulan yang memiliki kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi. Selama periode 2019-2023, pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 melanda, sektor ini mengalami kontraksi sebesar -2,17 persen. Pandemi, ditambah dengan kendala cuaca, serta bencana alam seperti longsor dan banjir di beberapa kecamatan, menyebabkan penurunan produksi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah meluncurkan program intensifikasi dan mekanisasi alat serta mesin

pertanian untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. Meskipun ada upaya tersebut, perbaikan harga komoditas perkebunan seperti kakao, lada, dan kopi masih belum signifikan. Sektor ini kemudian mencatat pertumbuhan sebesar 2,38 persen pada tahun 2022 dan 1,27 persen pada tahun 2023.

Grafik 2.42. Laju Pertumbuhan dan Produktivitas Sektor Pertanian Kabupaten Tanggamus 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus 2023

Komoditas unggulan sektor pertanian di Kabupaten Tanggamus adalah tanaman perkebunan berupa kopi dan kakao. Pada tahun 2023 Luas tanaman kopi (41,60 ribu hektar) dengan produksi sebesar 28,91 ribu ton. Sementara luas tanam kakao (14,65) ribu hektar dengan produksi sebesar 7,17 ribu ton. Selain kopi dan kakao, Kabupaten Tanggamus juga memiliki potensi besar dalam hortikultura, termasuk pisang mas, jambu kristal, serta sayuran dan buah semusim seperti cabai, kubis dan bawang merah.

Gambar 2.65. Produksi Perkebunan Kabupaten Tanggamus Tahun 2022-2023

		2022	2023
Kakao Cocoa 	Luas Area	13,66 ribu ha	14,65 ribu ha
	Produksi	7,17 ribu ton	7,17 ribu ton
Kopi Coffee 	Luas Area	41,55 ribu ha	41,36 ribu ha
	Produksi	33,48 ribu ton	28,91 ribu ton
Kelapa Coconut 	Luas Area	14,28 ribu ha	14,18 ribu ha
	Produksi	16,45 ribu ton	18,48 ribu ton

Sumber : BPS Kabupaten Tanggamus 2023

Kawasan peruntukan pertanian dibagi menjadi beberapa kawasan yaitu :

a) Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan memiliki luas kurang lebih 31.671 Hektar terdapat di Kecamatan Pugung, Talang Padang, Gunung Alip, Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, Wonosobo, Semaka dengan komoditas unggulan padi dan jagung.

b) Kawasan Peruntukan Holtikultura

Kawasan peruntukan holtikultura dengan luas kurang lebih 9.957 Hektar berada di Kecamatan Gisting, Sumberejo, Pematang Sawa, Pulau Pangung, Kota Agung Timur, Kota Agung, Kota Agung Barat, Bandar Negeri Semuong, Kelumbayan Barat, Kelumbayan, Limau dan Cukuh Balak dengan komoditas unggulan sayur-sayuran, buah manggis, dan buah durian.

c) Kawasan Peruntukan Perkebunan

Keadaan topografi Kabupaten Tanggamus yang hampir 50% nya adalah wilayah bukit dan pegunungan membuat Kabupaten Tanggamus potensial akan daerah perkebunan. Luas total areal rencana peruntukan perkebunan di Kabupaten Tanggamus adalah 69.971 Ha tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Tanggamus, yang didominasi oleh Kelapa, Kopi dan Kakao. Komoditas Kelapa, Kopi dan Kakao hampir merata tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Tanggamus. Dari ketiga komoditas yang dominan tersebut, komoditas kopi robusta dan kakao menjadi komoditas yang memiliki keunggulan kompetitif maupun komparatif. Luas lahan kopi robusta dan kakao cukup dominan jika dibandingkan dengan komoditas lainnya. Bahkan untuk kopi robusta, Pemerintah Provinsi Lampung akan menjalankan program penanaman bibit kopi robusta dengan teknologi kultur jaringan.

Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas 102.110,76 Hektar yang tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kota Agung di Kabupaten Tanggamus dengan komoditas unggulan Kelapa, Kopi, dan Kakao.

d) Kawasan Peruntukan Peternakan

Kawasan peruntukan peternakan berada di seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanggamus. Kawasan peruntukan peternakan di Kabupaten Tanggamus dibedakan menjadi tiga jenis ternak sesuai dengan ukuran dan jenis ternak yaitu ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas. Peternakan besar di arahkan di Kecamatan Wonosobo, Gisting, Talang Padang dan Sumberejo. Sedangkan kawasan peternakan kecil diarahkan di Kecamatan Gisting, Pulau Pangung, Talang Padang, Sumberejo, Kota Agung Timur dan Kota Agung Barat. Untuk kawasan peternakan unggas diarahkan di Kecamatan Talang Padang dan Sumberejo.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 472/KPTS/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional, bahwa Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu lokasi pengembangan kawasan pertanian nasional untuk beberapa komoditas. Komoditas yang akan dikembangkan di Kabupaten Tanggamus antara lain padi (tanaman pangan), cabai, bawang merah, bawang putih, pisang dan manga (hortikultura), kopi dan lada (perkebunan) serta kambing (peternakan).

2.7.3. Kawasan Peruntukan Perikanan

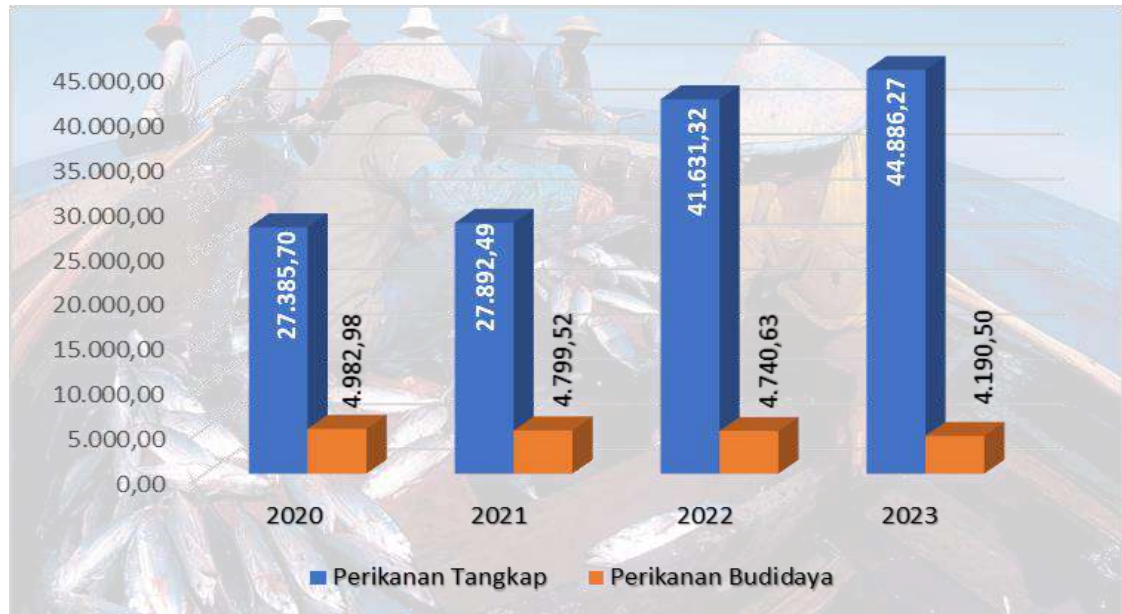
Potensi perikanan di wilayah Kabupaten Tanggamus berasal dari 3 (tiga) jenis perikanan, yaitu (1) Perikanan tangkap, yang terdiri dari penangkapan laut dan perairan umum, (2) Perikanan budidaya, yang terdiri dari budidaya air tawar, payau dan laut dan (3) Pengolahan Hasil Perikanan. Jumlah rumah tangga perikanan tangkap tahun 2023 yaitu perikanan laut sebanyak 5.704 rumah tangga dan perairan umum sejumlah 212 rumah tangga. Kecamatan dengan jumlah rumah tangga perikanan laut terbanyak adalah Kecamatan Kota Agung dengan 1.389 rumah tangga sedangkan untuk perairan umum yaitu Kecamatan Air Naningan dengan 212 rumah tangga. Produksi perikanan laut pada tahun 2023 di Kabupaten Tanggamus mencapai 44.524,57 ton mengalami peningkatan 3.261,14 ton dari tahun 2022, sedangkan untuk produksi perairan umum mencapai 361,70 ton yang justru mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sebanding dengan jumlah rumah tangga perikanannya, Kecamatan Kota Agung merupakan kecamatan dengan produksi perikanan laut terbanyak dari 11.141,13 ton pada tahun 2022 menjadi 11.572,65 ton pada tahun 2023.

Jumlah rumah tangga perikanan budidaya yang ada di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 sebanyak 2.812 rumah tangga yang terdiri dari perikanan budidaya tambak sebanyak 207 rumah tangga dan kolam sebanyak 2.605 rumah tangga. Produksi perikanan budidaya sebesar 4.196,50 ton yang terdiri atas produksi perikanan tambak sebesar 1.900 ton dan kolam 2.296,5 ton. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2023 terdapat di Kecamatan Pugung dengan 1.022,85 ton. Sedangkan jumlah perahu/kapal pada tahun 2023 di Kabupaten Tanggamus menurut jenisnya, yaitu perahu tanpa motor sebanyak 135 perahu, perahu motor tempel sebanyak 1.415 perahu dan kapal motor sebanyak 291 perahu.

Hasil tangkapan di laut terbesar bersumber dari Kecamatan Kota Agung yang merupakan wilayah kawasan minapolitan tangkap. Hasil tangkapan yang didapat antara lain layang, selar, kapas-kapas, kurisi, tongkol, kembang, layur, bentong dan lain-lain. Untuk produksi budidaya perikanan air tawar terbesar di sumbang oleh Kecamatan Pugung, Wonosobo dan Talang Padang yang

didominasi oleh ikan mas, lele, nila dan gurame. Budidaya perikanan tambak (payau) terbesar disumbang oleh Kecamatan Limau, Kota Agung Barat, Kelumbayan dan Cukuh Balak yang didominasi oleh udang vaname, nila, bandeng dan jenis udang lainnya. Sedangkan untuk sentra produksi pengolahan hasil perikanan seperti penggaraman, pengasapan, dan jelly ikan terpusat di Kecamatan Limau.

Grafik 2.43. Produksi Perikanan Kabupaten Tanggamus Tahun 2020-2023



Sumber : Dinas Perikanan Kab. Tanggamus, 2023

2.7.4. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat. Wilayah usaha pertambangan terdiri atas peruntukan pertambangan mineral, pertambangan batu bara dan Panas Bumi.

a) Kawasan Peruntukan Pertambangan Mineral

Kawasan peruntukan pertambangan mineral meliputi mineral logam, mineral bukan logam dan batuan tersebar di seluruh kecamatan dikecualikan Kota Agung, daerah perkotaan dan daerah rawan bencana di Kabupaten Tanggamus.

b) Kawasan Peruntukan Pertambangan Batu Bara

Kawasan peruntukan pertambangan batu bara terdapat di Kecamatan Pematang Sawa, Kecamatan Pugung, Kecamatan Kelumbayan, Kecamatan Kelumbayan Barat dan Kecamatan Air Nanningan.

c) Kawasan Peruntukan Pertambangan Panas Bumi

Kawasan peruntukan panas bumi terdapat di Kecamatan Ulu Belu.

Sedangkan wilayah pertambangan rakyat meliputi mineral bukan logam dan batuan tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Kota Agung dengan potensi pertambangan paling banyak terdapat di Kecamatan Pugung.

Tabel 2.74. Potensi Tambang Kabupaten Tanggamus

NO	KECAMATAN	POTENSI TAMBANG
1	Wonosobo	Pasir, Granit, Silika/Batu Kuarsa, Andesit, Sirtu, Pasir
2	Semaka	Granit, Andesit, Sirtu, Pasir
3	Bandar Negeri Semuong	Emas, Andesit, Pasir, Sirtu
4	Kota Agung	Andesit, Pasir, Sirtu...
5	Pematang Sawa	Andesit, Batu Apung, Batu Bara, Sirtu, Pasir
6	Kota Agung Timur	Zeolit, Andesit, Sirtu, Pasir
7	Kota Agung Barat	Andesit, Pasir, Sirtu
8	Pulau Panggung	Andesit, Batubara
9	Air Naningan	Batubara, Silika/Batu Kuarsa, Andesit
10	Ulu Belu	Belerang (Panas Bumi), Andesit
11	Talang Padang	Andesit
12	Sumberrejo	Andesit
13	Gisting	Andesit
14	Gunung Alip	Andesit
15	Pugung	Mangan, Batubara, Batu Gamping, Bentonit, Lempung, Silika (Batu Kuarsa), Pasir Kuarsa, Andesit, Marmer, Seng
16	Bulok	Bijih Besi, Andesit
17	Cukuh Balak	Emas, Pasir Besi, Zeolit, Andesit, Pasir, Sirtu
18	Kelumbayan	Batubara, Emas, Galena, Bijih Besi, Pasir Besi, Andesit, Sirtu, Pasir
19	Limau	Bijih Besi, Pasir Besi, Andesit, Pasir, Sirtu
20	Kelumbayan Barat	Emas, Galena, Batubara, Andesit, Sirtu, Pasir

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tanggamus, 2023

2.7.5. Kawasan Peruntukan Industri

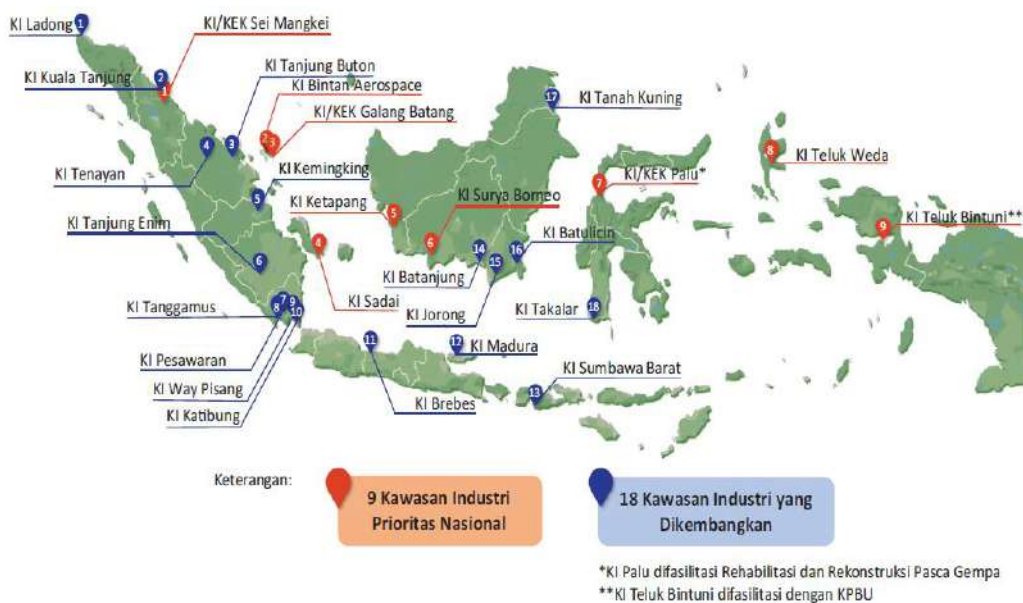
Industri di Kabupaten Tanggamus didominasi oleh Industri Kecil dan Menengah yang meliputi beberapa jenis, yaitu industri pangan, kerajinan umum, kimia bahan bangunan, jasa, logam dan industri pengolahan lainnya. Nilai investasi paling besar terserap pada kegiatan konveksi dengan tingginya nilai investai tersebut tentunya diharapkan sektor industri tersebut dapat berkembang dengan baik di Kabupaten Tanggamus. Untuk kedepannya perlu pemantauan terhadap sektor-sektor industri yang memiliki nilai investasi paling tinggi, sehingga kegiatan perekonomian yang dipengaruhi oleh sektor industri dapat terus berjalan dengan baik.

Industri pangan yang ada di Kabupaten Tanggamus berjumlah 841 industri, mulai dari industri perkebunan, hingga kehutanan. Jenis industri yang paling banyak terdapat di Kabupaten Tanggamus adalah industri pengolahan kebutuhan pokok, dan sisanya adalah industri kehutanan yang berkaitan dengan kebutuhan peralatan rumah tangga. Industri yang banyak dilakukan di

Kabupaten Tanggamus adalah industri anyaman bambu dengan jumlah 598 unit.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dari 27 Kawasan Industri yang ada dibagi menjadi 9 Kawasan Industri Prioritas Nasional dan 18 Kawasan Industri yang Dikembangkan, pada Pulau Sumatera terdapat 10 KI dan 4 KEK, dimana Kawasan Industri Tanggamus (KIT) menjadi salah satu kawasan industri yang akan dikembangkan.

Gambar 2.25. Sebaran Pembangunan Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus di Indonesia



Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas RI, 2023

Disamping pengembangan Kawasan Industri Tanggamus, di Kabupaten Tanggamus juga direncanakan akan dibangun Kawasan Industri Pertahanan oleh Kementerian Pertahanan RI dengan membangun PT. Pindad dan PT. PAL yang berlokasi di Register 28 yang berdampingan dengan Kawasan Industri Tanggamus atau mengarah ke Hutan Lindung Register 27.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut maka telah ditandatangani MoU antara Universitas Pertahanan dengan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dilakukan oleh Pj. Bupati Tanggamus Ir. Zainal Abidin, M.T. dengan Rektor Unhan Mayjen TNI DR. Yoedhi Swastanto, disamping itu juga telah dilaksanakan Rapat Koordinasi antara Kementerian Pertahanan dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus terkait pembangunan Kawasan Industri Pertahanan.

Secara umum pengembangan kawasan industri di Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut :

- a) **Kawasan peruntukan industri besar**, dikembangkan industri maritim berupa industri perkapalan dan manufaktur yang terdapat di Teluk Semangka berlokasi di Kecamatan Kota Agung Timur, Limau dan Cukuh Balak, industri pertahanan yang berlokasi di Register 28 yang berdampingan dengan KIT atau mengarah ke Hutan Lindung Register 27 serta Kecamatan Pulau Panggung untuk industri olahan hasil pertanian.
- b) **Kawasan peruntukan industri sedang**, dikembangkan di Kecamatan Gisting, Talang Padang, Pulau Panggung, Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, Kota Agung, Sumberejo, Wonosobo, Semaka dan Pematang Sawa.
- c) **Kawasan peruntukan industri kecil**, dikembangkan di seluruh Kabupaten Tanggamus, dikembangkan dalam bentuk klaster industri.

2.7.6. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kondisi fisik geografis Kabupaten Tanggamus yang bervariasi dengan bentuk daratan berupa bukit dan pegunungan serta berbatasan langsung dengan Teluk Semangka cukup banyak memberikan potensi wisata. Berdasarkan data yang diperoleh dari Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Lampung dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Tanggamus, obyek wisata yang terdapat di Kabupaten Tanggamus cukup banyak dibandingkan dengan Kabupaten/Kota, dengan jenis wisata budaya, wisata alam dan wisata buatan. Wisata-wisata yang ada di Kabupaten ini umumnya masih belum diolah secara optimal.

Pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tanggamus selain meningkatkan pengelolaan yang ada juga menggali potensi pariwisata yang belum dikelola. Pulau Tabuan salah satu pulau kecil di Kabupaten Tanggamus memiliki prospek pengembangan untuk kegiatan pariwisata.

Tabel 2.75. Daftar Obyek Wisata di Kabupaten Tanggamus

A. Obyek Wisata Bahari

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT
1	Pantai Mulang Sayang	Pekon Way Nipah Kec. Pematang Sawa
2	Pantai Bahari	Pekon Way Nipah Kec. Pematang Sawa
3	Pantai Mutiara	Pekon Betung Kec. Pematang Sawa
4	Pantai Batu Malang	Pekon Telukbrak Kec. Pematang Sawa
5	Pantai Batu Kebo	Pekon Kaur Gading Kec. Pematang Sawa
6	Pantai Cukuh Pandan	Pekon Tampang Tua Kec. Pematang Sawa
7	Pantai Harapan	Pekon Guring Kec. Pematang Sawa
8	Pantai Soumil	Pekon Karang Anyar Kec Wonosobo
9	Pantai Harapan	Pekon Way Gelang Kec. Kota Agung Barat
10	Pantai Digul	Pekon Tanjung Agung Kec. Semaka
11	Pantai Karang Teritos	Pekon Talagening Kec. Kota Agung Barat
12	Pantai Terbaya	Pekon Terbaya Kec. Kota Agung

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT
13	Pantai Teba	Pekon Teba Kec. Kota Agung Timur
14	Pantai Pihabung	Pekon Suka banjar Kec. Kota Agung Timur
15	Pantai Kerta	Pekon Kerta Kec. Kota Agung Timur
16	Pantai Karang Putih	Pekon Putih Doh Kec. Cukuh Balak
17	Pantai Teluk Tengor	Pekon Doh Kec. Cukuh Balak
18	Pantai Cumuk	Pekon Doh Kec. Cukuh Balak
19	Pantai Badak Indah	Pekon Badak Kec. Cukuh Balak
20	Pantai Karang Indah	Pekon Ketapang Kec. Limau
21	Pantai Karang Bolong	Pekon Tegi Neneng Kec. Limau
22	Pantai Harapan Jaya	Pekon Tegi Neneng Kec. Limau
23	Pantai Batu Naga	Pekon N. Kelumbayan Kec. Kelumbayan
24	Pantai Selancar	Pekon N. Kelumbayan Kec. Kelumbayan
25	Pantai Pasir Putih	Pekon Kiluan Kec. Kelumbayan
26	Pantai Pegadungan	Pekon Susuk Kec. Kelumbayan
27	Pantai Karang Mulya	Pekon Susuk Kec. Kelumbayan
28	Pantai Harapan	Pekon Penyandingan Kec. Kelumbayan
29	Pantai Batu Suluh	Pekon N. Kelumbayan Kec. Kelumbayan
30	Pantai Pegadungan	Pekon Susuk Kec. Kelumbayan
31	Pantai Karang Bebay	Pekon Tengor Kec. Cukuh Balak

B. Obyek Wisata Tirta

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT
1	Air Terjun Way Lalaan	Kampung Baru K Kec. Kota Agung Timur
2	Air Terjun Lembah Pelangi	Suka Maju Kec. Ulu Belu
3	Air Terjun Tirai	Datar Lebuay Kec. Air Nanningan
4	Air Terjun Jarum	Datar Lebuay Kec. Air Nanningan
5	Air Terjun Ratu	Datar Lebuay Kec. Air Nanningan
6	Air Terjun Beranak	Datar Lebuay Kec. Air Nanningan
7	Air Terjun Batu Lapis	Talang Beringin Kec. Pulau Panggung
8	Air Terjun Curup	Air Bakoman Kec. Pulau Panggung
9	Air Terjun Talang Ogan	Talang Ogan Kec. Sumberjo
10	Air Terjun Jeram Semaka TNBBS	Kec.Semaka
11	Air Terjun Curup Way Kerap	Way Kerap Kec. Semaka
12	Air Terjun Mak Kunyana	Teratas Kec. Kota Agung
13	Air Terjun Lamuran	Teratas Kec. Kota Agung
14	Air Terjun Batu Kramat Sari	Datar Lebuay Kec. Air Nanningan
15	Air Terjun Cihandak	Kec. Air Nanningan
16	Air Terjun Tirta Rima	Margoyoso Kec. Sumberjo
17	Air Terjun Kelahang	Taman Sari Kec. Limau
18	Air Terjun Asmara	Datarajan Kec. Ulu Belu

C. Obyek Wisata Alam Buatan

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT
1	Waduk Batu Tegi	Way Harong Kec. Air Nanningan
2	Dam Margo Tirta	Landsbaw Kec Gisting

D. Obyek Wisata Alam

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT
1	Ekowisata Tampang Blimbing	Kec. Pematang Sawa
2	TNBBS	Sedayu Kec. Semaka
3	Lembah Sanggi	Sanggi Kec. Semaka
4	Gua Walet Putih	Kec. Kelumbayan
5	Karang Bebay	Kec. Cukuh Balak
6	Pulau Kelapa (Kiluan)	Kiluan Negri Kec. Kelumbayan
7	Pulau Tabuan	Tabuan Kec. Cukuh Balak
8	Eko Wisata Cikal Negri	Kiluan Negri Kec. Kelumbayan
9	Base Camp Sono Keling	Sidokaton Kec. Gisting
10	Danau Hijau	Muara Dua Kec. Ulu Belu
11	Sumber Air Panas Ulu Belu	Muara Dua Kec. Ulu Belu
12	Pulau Tanjungan	Air Nanningan Kec. Air Nanningan
13	Puncak Batu Kapal	Way Harong Kec. Air Nanningan
14	Tanjung Harapan	Way Harong Kec. Air Nanningan

E. Obyek Wisata Kolam Renang

NO	NAMA KOLAM RENANG	ALAMAT
1	Villa Q	Gisting Bawah Kec. Gisting
2	Buterfly	Gisting Atas Kec. Gisting
3	Hosana	Gisting Bawah Kec. Gisting
4	Lentana Garden	Gisting Atas Kec. Gisting
5	Villa Voda Batu Kramat	Batu Kramat Kec. Kota Agung Timur
6	Kodim	Waysem Kec. Kota Agung Timur
7	Suharto	Pasar Madang Kec. Kota Agung

F. Obyek Wisata Budaya

NO	NAMA OBYEK WISATA	ALAMAT	KECAMATAN
1	Makam Gunung Putri	Tiuh Memon	Pugung
2	Makam Ratu Sangkhira	Tiuh Memon	Pugung
3	Gua Semedi	Penyandingan	Kelumbayan
4	Makam Kuno	Padang Manis	Wonosobo
5	Gunung Dalam	Karangbrak	Pematang Sawa

G. Obyek Wisata Situs Pubakala/Peninggalan Sejarah

NO	PENINGGALAN SEJARAH	ASAL PENINGGALAN	ALAMAT	KECAMATAN
1	Megalitik Batu Gajah	Budaya Hindu Budha	Batu Bedil Ilir	Pulau Panggung
2	Arca Nandi	Hindu	Batu Bedil Ilir	Pulau Panggung
3	Situs Batu Tulis	Jawa Kuno	Batu Bedil Ilir	Pulau Panggung
4	Prasasti Batu Bedil	Jawa Kuno	Batu Bedil Ilir	Pulau Panggung
5	Meriam Belanda	Peninggalan Belanda	Negeri Kelumbayan	Kelumbayan
6	Pusaka Kuno	-	N. Kelumbayan	Kelumbayan
7	Keris Singa Khalang	-	Pekon Unggak	Kelumbayan
8	Tugu Pidato Presiden RI	-	Kelurahan Kuripan	Kota Agung
9	Japan	Japan	Pantai Laut	Kota Agung

NO	PENINGGALAN SEJARAH	ASAL PENINGGALAN	ALAMAT	KECAMATAN
10	Barang Pusaka	Kerajaan Pajajaran	Pajajaran	Kota Agung Barat
11	Taboh Adat Beban	Adat	Tala Gening	Kota Agung Barat
12	Barang-Barang Kuno	Warisan	Sanggi Unggak	Bandar Negeri Semuong

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2023

Gambar 2.26. Peta Pola Perjalanan Wisata Kabupaten Tanggamus



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, 2023

2.7.7. Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman di Kabupaten Tanggamus dibagi kedalam kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan.

a) Permukiman Perkotaan

Mencermati perkembangan kawasan dan kebijakan penataan ruang nasional dan provinsi, pertumbuhan kawasan perkotaan di Kabupaten Tanggamus maka Kecamatan Kota Agung, Wonosobo, Gisting, dan Talang Padang akan mempunyai ciri kawasan permukiman perkotaan. Kawasan ini memiliki ketersediaan infrastruktur yang cukup memadai, beberapa sektor perkotaan terkonsentrasi di keempat kecamatan tersebut. Secara eksisting, jumlah penduduk di Kawasan perkotaan mencapai 184.774 jiwa. Untuk perumahan kepadatan tinggi diarahkan pada Kecamatan Kota Agung, Kota Agung Barat, Talang Padang dan Gisting. Sedangkan Kecamatan Wonosobo, diarahkan untuk perumahan dengan kepadatan menengah.

Kawasan peruntukan pemukiman perkotaan dikembangkan di Kecamatan Kota Agung, Kota Agung Barat, Kota Agung Timur, Gisting, Wonosobo, dan Talang Padang.

b) Permukiman Pedesaan

Pemukiman pedesaan merupakan permukiman yang cukup dominan berada di Kabupaten Tanggamus. Secara umum kawasan permukiman pedesaan ini memiliki karakter, sebagian besar penduduk bekerja sektor pertanian, kondisi perumahan yang cukup renggang, distribusi mengelompok namun tersebar dan memiliki keterbatasan pelayanan sarana dan prasarana. Secara eksisting masyarakat pedesaan di Kabupaten Tanggamus mencapai 399.901 jiwa. Kawasan perumahan pedesaan merupakan perumahan dengan kepadatan rendah.

Kawasan peruntukan permukiman pedesaan dikembangkan menyebar pada wilayah Kabupaten Tanggamus, terutama pada pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lokal.

2.7.8. Kawasan Budidaya Peruntukan Lainnya

Kawasan budidaya peruntukan lainnya di Kabupaten Tanggamus meliputi peruntukan pertahanan dan keamanan, kawasan pengembangan sektor informal, kawasan pesisir, pengembangan ruang terbuka hijau (RTH), dan ruang dalam bumi.

a) Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan terdiri atas :

1. Kantor dan/atau Markas Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan Kota Agung Timur dan Kota Agung;
2. Pos Angkatan Laut di Kecamatan Kota Agung, Pematang Sawa dan Kelumbayan;
3. Komando Rayon Militer (Koramil) dan menyebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Tanggamus; dan
4. Kantor Kepolisian Sektor yang tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Tanggamus.
5. Markas Komando Kompi 4 Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Lampung di Kecamatan Bandar Negeri Semuong.

b) Kawasan Pengembangan Sektor Informal

Kawasan pengembangan sektor informal diarahkan pada pengembangan kawasan khusus untuk perdagangan dan jasa, meliputi:

1. Kawasan perdagangan dan jasa skala regional untuk melayani wilayah Kabupaten Tanggamus diarahkan di pusat perkotaan Kota Agung; dan
2. Kawasan perdagangan skala kecamatan pada kawasan perkotaan di Kota Agung Barat, Kota Agung Timur, Gisting, Wonosobo, dan Talang Padang.

c) Kawasan Pesisir

Pengembangan wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus sebagai satu kesatuan wilayah akan memberikan peluang dalam banyak hal, khususnya pengembangan wilayah Provinsi Lampung. Peluang tersebut adalah dalam keterpaduan perencanaan serta perkembangan kawasan yang lebih cepat yang didukung oleh potensi masing-masing sumber daya, baik barang maupun jasa. Di sisi lain perpaduan kewilayahan ini juga akan membuka peluang untuk timbulnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan penduduk dalam wilayah pengembangan ini. Dalam rangka untuk menjalankan tujuan pembangunan wilayah Kabupaten Tanggamus pada umumnya dan pembangunan kawasan pesisir dan laut pada khususnya, maka diperlukan strategi pengembangan kawasan pesisir Kabupaten Tanggamus yang matang dan terarah dengan melibatkan peran serta semua stakeholder. Strategi ini akan memberikan arah dan bahan acuan bagi Pemerintah Daerah untuk penyusunan yang lebih terinci seperti rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana aksi di masa mendatang. Visi yang dikembangkan dalam Pengembangan Kawasan Pesisir Kabupaten Tanggamus adalah “Terwujudnya Kawasan Pesisir Kabupaten Tanggamus yang Bersih, Indah, Aman, Tertata dan Produktif yang Dikelola secara Optimal, Terpadu dan Berkelanjutan bagi Kesejahteraan Masyarakat”

d) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi:

1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik yaitu taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai, dengan proporsi paling sedikit 20% (dua puluh persen);
2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat yaitu kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/ swasta yang ditanami tumbuhan, dengan proporsi 10% (sepuluh persen); dan
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai RTH Perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang.

e) Pengembangan Ruang Dalam Bumi

Rencana ruang dalam bumi meliputi:

1. Wilayah-wilayah yang sudah diketahui cadangannya dan/atau wilayah yang tengah dalam masa penyelidikan pendahuluan/ eksplorasi/eksploitasi dan secara legal telah ada izin atau kontraknya

maka harus dilindungi secara hukum di dalam tata ruang sebagai kawasan peruntukan pertambangan;

2. Wilayah yang berpotensi bahan tambang harus diberikan alokasi ruang dalam bentuk wilayah prospek usaha pertambangan sebagai arahan prospek pertambangan ke depan;
3. Wilayah prospek pertambangan tidak dipengaruhi oleh kendala sektor budi daya atau lindung lainnya, namun dalam pengusahaannya tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Pengembangan wilayah pertambangan harus mengkaji antara aspek-aspek riil, antara resiko dan manfaat, sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangan.

Kebijakan struktur ruang wilayah nasional yang berlaku untuk Kabupaten Tanggamus yaitu :

- 1) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) : adalah Kota Agung
- 2) Jalan Nasional : adalah jalan yang membentang di sepanjang pantai barat yang merupakan jalan lintas Barat Sumatera (Pringsewu - Kota Agung - Bengkunt Belimbing).

Sedangkan kebijakan RTRW Provinsi Lampung dalam rencana struktur ruang Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut :

- 1) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) : adalah Kota Agung dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa.
- 2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) : adalah Wonosobo dengan kegiatan utama pusat pengembangan perdagangan jasa pendukung kegiatan perikanan laut.
- 3) Sistem jaringan jalan, yaitu :
 - a) Jaringan jalan Kolektor Primer jaringan jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), antara Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), atau antara Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) terdiri dari Rantau Tijing - Kota Agung - Wonosobo – Sanggi.
 - b) Jaringan jalan strategis provinsi adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan provinsi; mengacu pada Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, jaringan jalan strategis merupakan jalan yang memiliki status sebagai jalan provinsi terdiri dari Talang Padang - Ulu Belu - Ulu Semong – Suoh - Sukabumi;

Tabel 2.72. Ruas Jalan Provinsi Lampung yang ada di Kabupaten Tanggamus

NO	NOMOR RUAS	NAMA RUAS	PANJANG (Km)	FUNGSI	TITIK REFERENSI	
					AWAL RUAS	AKHIR RUAS
1	036	Sukamara - Kuripan	21,777	JKP-3	Sp. Tiga Pasar Sukamara	Sp. Tiga Kuripan
2	044	Sp. Teluk Kiluan - Sp. Umbar	25,157	JKP-2	Sp. Teluk Kiluan	Sp. Umbar
3	045	Sp. Umbar - Putih Doh	20,000	JKP-2	Sp. Tiga Umbar	Sp. Tiga Putih Doh
4	046	Putih Doh - Kuripan	11,746	JKP-2	Sp. Tiga Putih Doh	Sp. Tiga Kuripan
5	047	Kuripan - Sp. Kota Agung	22,215	JKP-2	Sp. Tiga Kuripan	Sp. Tiga Kagungan (Jalan Nasional)
6	050	Sp. Blok 9 - Sanggi	20,873	JKP-3	Sp. Tiga Blok 9	Sp. Tiga Sanggi (Jalan Nasional)
7	056	Talang Padang - Ngarip	35,600	JSP	Sp. Tiga Pasar Talang Padang (Jalan Nasional)	Bts. Desa Ngarip
8	057	Ngarip - Ulu Semong	21,500	JSP	Bts. Desa Ngarip	Sp. Tiga Ulu Semong
9	058	Ulu Semong - Sp. Trimulyo	9,660	JSP	Sp. Tiga Ulu Semong	Sp. Tiga Ke Trimulyo
10	060	Tekad - Batu Tegi	8,000	JSP	Sp. Tiga Tekad	Sp. Empat Bendungan Batu Tegi
		JUMLAH	196,528			

Sumber : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/243.A/III.09/HK/2016 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Provinsi Lampung

Gambar 2.27. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tanggamus



Sumber : Materi Teknis RTRW Kabupaten Tanggamus 2024-2044

2.7.9. Rencana Pengembangan Kawasan Strategis

Terdapat tiga Kawasan Strategis Provinsi Lampung yang ditetapkan di Kabupaten Tanggamus, yaitu :

1. Kawasan Strategis Agropolitan Gisting.

Kawasan Strategis Agropolitan Gisting merupakan kawasan untuk kepentingan ekonomi yang di tetapkan Provinsi Lampung di Kabupaten Tanggamus. Gisting sebagai wilayah Kabupaten Tanggamus memiliki potensi sektor pertanian, khususnya pertanian hortikultura dengan komoditas tanaman hortikultura dan palawija dengan tingkat pelayanan regional (Provinsi Lampung). Dengan penetapan Gisting sebagai Kawasan Strategis diharapkan akan meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut serta memberikan efek pada wilayah- wilayah disekitarnya, umumnya meningkatkan kondisi perekonomian Kabupaten Tanggamus.

Konsep agropolitan ini diarahkan terpusat pada pada Kecamatan Gisting dimana kecamatan ini memiliki potensi perkebunan dan pertanian (sayuran dan buah-buahan) yang baik dan memiliki aksesibilitas yang memadai dalam mendistribusikan hasil-hasil pertanian. Keberadaan berbagai infrastruktur beserta fasilitas pendukung lainnya tentu sangat diperlukan agar Kecamatan Gisting bisa menjalankan fungsinya dengan baik sebagai sebuah pusat kawasan agropolitan. Beberapa fasilitas tersebut antara lain adalah terminal agribisnis, rumah potong hewan, dan sebagainya.

Kecamatan Gisting ini nantinya akan ditunjang oleh daerah-daerah penyangga (hinterland) seperti Kecamatan Sumberejo, Talang Padang, dan Pulau Panggung. Pada kecamatan- kecamatan ini, ditempatkan masing-masing sebuah sub-terminal agribisnis yang berfungsi untuk mengumpulkan berbagai produk pertanian, dan selanjutnya dari sub-terminal ini produk tersebut akan diteruskan ke terminal agribisnis di Kecamatan Gisting. Selanjutnya produk ini akan disebar ke daerah pemasaran ataupun ke industri pengolahan hasil pertanian turunannya.

2. Kawasan Strtategis Batutegi

Kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan yang mendukung keberlangsungan lingkungan hidup, yang ditetapkan di Kabupaten Tanggamus. Penetapan kawasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kondisi lingkungan yang baik di Kabupaten Tanggamus khususnya, dan Provinsi Lampung pada umumnya.

3. Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS)

Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati dan aset nasional (Kawasan Lindung Nasional) yang

ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan dilestarikan. Terkait dengan penetapan kawasan strategis ini, maka kewenangan dari Pemerintah Provinsi adalah dimulai dari penyusunan Rencana Rinci Kawasan Strategis serta pengawasannya, penyusunan masterplan prasarana kawasan, serta pengelolaannya.

4. Kawasan Strategis Kabupaten Tanggamus

Kawasan strategis wilayah Kabupaten Tanggamus merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif.

Dengan mempertimbangkan dasar, kriteria dan rencana kawasan strategis Provinsi Lampung serta potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Tanggamus, maka terdapat beberapa rencana kawasan strategis yang dapat dikembangkan di Kabupaten Tanggamus, yaitu :

a. Kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan potensi ekonomi

➤ Kawasan Strategis Minapolitan

Kawasan Minapolitan merupakan suatu kawasan yang diperuntukan untuk pengembangan kegiatan perikanan yang ditetapkan di Kecamatan Wonosobo. Pada dasarnya, kawasan minapolitan dipersiapkan untuk pengembangan kegiatan perikanan. Pada kawasan ini diharapkan terjamin keterpaduan antar sektor, baik yang bersentuhan langsung dengan sektor perikanan maupun yang tidak langsung, selain adanya integrasi antar kawasan sentra produksi.

➤ Kawasan Strategis Teluk Kiluan

Kawasan ini merupakan salah satu kawasan tujuan wisata yang terletak di Kecamatan Kelumbayan. Kawasan Teluk Kiluan memiliki daya tarik pada aktivitas bahari seperti memancing jenis ikan tertentu seperti blue merlin dan juga lumba – lumba (dolphin tour). Kawasan ini menjadi kawasan wisata andalan bagi Kabupaten Tanggamus. Selain itu, berdekatan dengan kawasan yang ada juga akan di kembangkan kawasan taman buru. Sehingga kawasan ini dikemudian hari dapat tumbuh sebagai kawasan ekowisata.

b. Kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi

➤ Kawasan Strategis Ulu Belu

Pembangkit listrik tenaga geothermal (panas bumi) di Kecamatan Ulu Belu. Seperti halnya pembangkit listrik lainnya, tentunya keberadaan kawasan ini sangat vital. Secara eksisting sedang dikembangkan pembangkit dengan kapasitas produk mencapai 2 X 55 MW. Panas bumi yang dihasilkan diperkirakan mampu memproduksi hingga mencapai 5 x 55 MW. Tentunya dengan kapasitas produksi yang demikian dapat mensuply kebutuhan listrik Provinsi Lampung.

➤ Kawasan Strategis Industri Pengolahan Hasil Pertanian Pulau Panggung

Kawasan Strategis Industri Pengolahan Hasil Pertanian berlokasi di Kecamatan Pulau Panggung. Kawasan ini memiliki nilai strategis karena memiliki akses cukup tinggi terhadap Kawasan Strategis Ulu Belu sebagai sumber energi di Kabupaten Tanggamus. Kawasan strategis ini dikembangkan untuk beberapa aktifitas kegiatan, baik skala lokal dan regional, yaitu :

1. Pengembangan industri olahan hasil pertanian dan perkebunan
2. Penetapan sumber-sumber hasil pertanian dn perkebunan
3. Pembangunan infrastruktur industri
4. Perencanaan tata niaga pasar

➤ Kawasan Strategis Batu Balai

Kawasan Strategis Batu Balai berada di Kecamatan Kota Agung Timur memiliki nilai strategis di wilayah Kabupaten Tanggamus. Kawasan strategis ini dikembangkan untuk beberapa aktifitas kegiatan, baik skala lokal, regional maupun nasional, yaitu terdiri atas :

1. Pengembangan industri maritim, yang bergerak dibidang pembuatan kapal.
2. Kilang Minyak Pertamina, sebagai lokasi penampungan suplay minyak untuk wilayah Sumatera
3. Demaga Pelabuhan Nasional

Gambar 2.28. Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Tanggamus



Sumber : Materi Teknis RTRW Kabupaten Tanggamus 2024-2044

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan

3.1.1. Permasalahan dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

3.1.1.1. Pendidikan

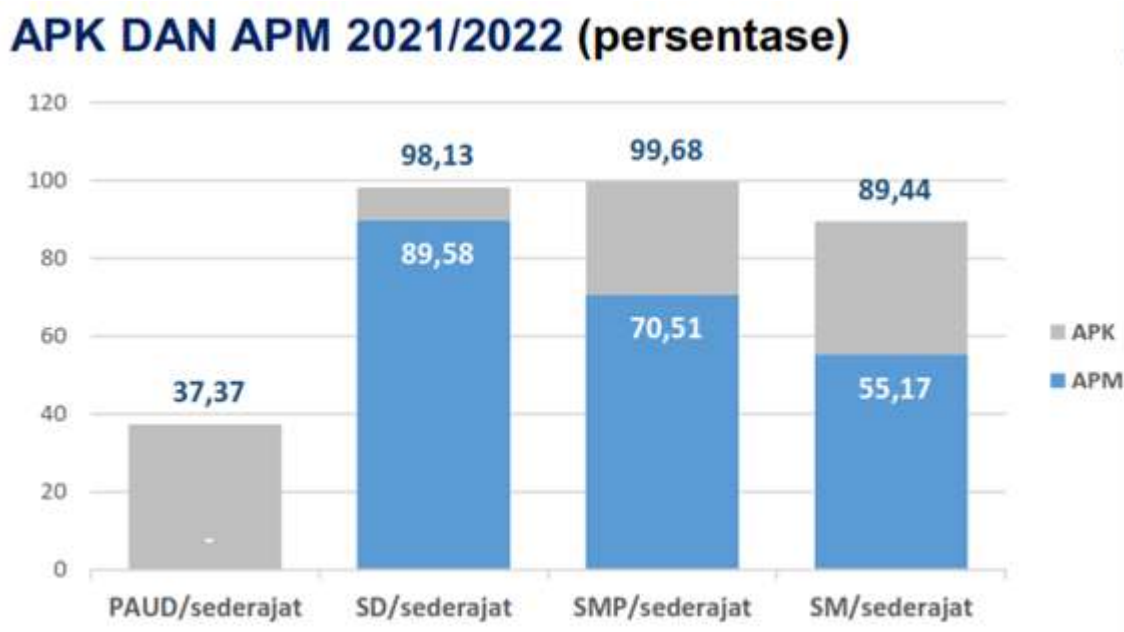
Hingga saat ini, Kabupaten Tanggamus masih memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) yang tergolong rendah. Rendahnya kualitas SDM ini merupakan permasalahan mendasar yang memiliki potensi untuk menghambat kemajuan pembangunan di era globalisasi. Kualitas SDM dapat diukur melalui nilai IPM, yang mencerminkan sejauh mana penduduk Kabupaten Tanggamus dapat mengakses layanan pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Sektor pendidikan di Kabupaten Tanggamus masih menghadapi permasalahan yang signifikan. Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam ranah pendidikan di Kabupaten Tanggamus adalah tingkat pendidikan yang masih rendah. Meskipun harapan masa pendidikan telah melebihi 12 tahun dan rata-rata lama sekolah terus mengalami peningkatan tiap tahun, namun angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tanggamus masih berada pada angka 7,35 tahun, yang menunjukkan bahwa program wajib belajar 12 tahun belum sepenuhnya tercapai.

a. Partisipasi Sekolah

Partisipasi kelompok usia sekolah dalam tingkat pendidikan tertentu dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS), suatu indikator yang menjadi tolok ukur penting dalam mengukur kemajuan pembangunan di sektor pendidikan, terutama terkait upaya perluasan akses pendidikan. Semakin tinggi APS, semakin besar peluang bagi penduduk untuk mengakses pendidikan. Pada tahun 2022, APK Kabupaten Tanggamus memperlihatkan angka yang cukup signifikan : 98,13 persen untuk jenjang SD/ sederajat dan 99,68 persen untuk jenjang SMP/ sederajat dan 89,44 persen untuk Sekolah Menengah/ sederajat.. Akan tetapi Angka Partisipasi Murni menunjukkan kondisi yang lebih rendah terutama pada jenjang SMP dan SMA. APM SMA di kabupaten Tanggamus hanya 55,17 hal ini sejalan dengan masih rendahnya rata-rata lama sekolah di kabupaten tanggamus yang hanya mencapai 7,36 tahun atau setara dengan jenjang SMP kelas tujuh.

Grafik 3.1. APK dan APM Kabupaten Tanggamus 2021-2022

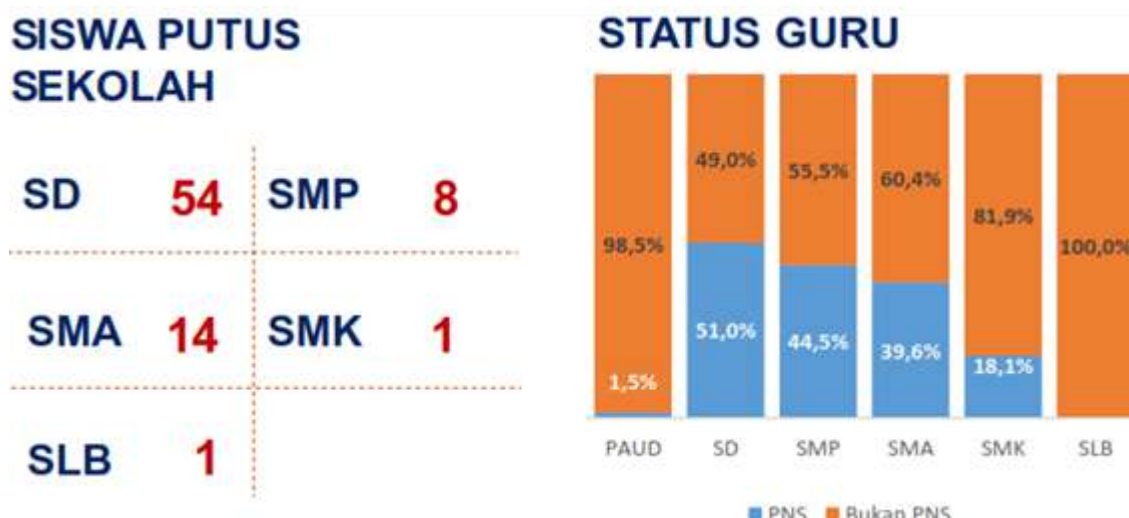


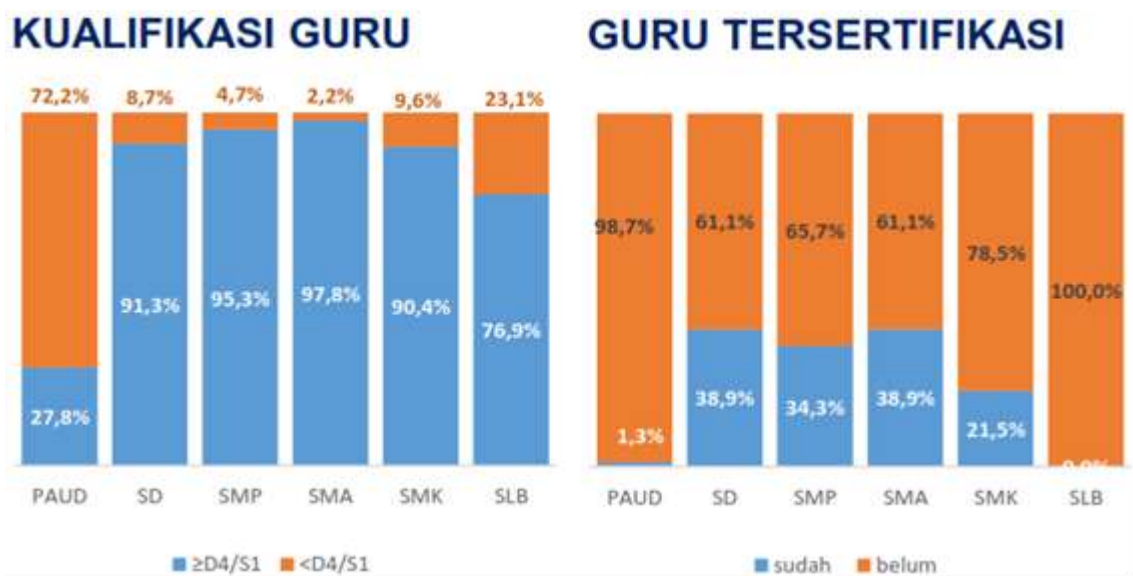
Sumber: npd.kemdikbud.go.id

b. Angka Putus Sekolah

Indikator lainnya adalah Angka Putus Sekolah (APTS) yakni persentase siswa yang pada tahun ajaran sekarang tidak melanjutkan sekolah lagi sebelum lulus jenjang pendidikan tertentu, terhadap siswa yang pada tahun ajaran lalu masih bersekolah di jenjang pendidikan yang sama. APTS pada jenjang SD/ sederajat 0,45 persen, SMP/ sederajat 1,43 persen.

Grafik 3.2. Jumlah Kasus Putus Sekolah dan Kondisi Guru di Kabupaten Tanggamus Tahun 2022





Sumber: npd.kemdikbud.go.id

Masalah selanjutnya adalah kualitas pendidikan di Kabupaten Tanggamus. Kualitas pendidikan dipengaruhi oleh beberapa hal seperti rasio guru terhadap murid dan kualitas tenaga pendidik. Semakin banyak jumlah murid maka beban mengajar masing-masing guru meningkat sehingga mampu menurunkan kualitas kegiatan belajar mengajar di kelas. Meskipun begitu, jumlah murid yang terlampaui sedikit atau tidak memenuhi standar juga menjadi tidak efisien.

Kualitas ruang kelas juga menjadi salah satu masalah di bidang pendidikan Kabupaten Tanggamus. Masih terdapat 19,38% ruang kelas dalam kondisi rusak untuk jenjang pendidikan dasar yang sangat mendesak untuk diperbaiki. Kondisi ruang kelas yang rusak akan mempengaruhi kualitas pendidikan secara signifikan karena akan menciptakan lingkungan pembelajaran yang tidak kondusif dan menyebabkan gangguan serius terhadap proses belajar mengajar.

Selain permasalahan yang telah disebutkan di atas, terdapat masalah-masalah lain seperti Belum meratanya distribusi tenaga pendidik dan kependidikan, cakupan pelayanan pendidikan yang dibutuhkan semakin luas, harus mempertimbangkan sebaran jumlah penduduk usia sekolah, belum optimalnya kualitas dan kapasitas SDM guru (sertifikasi, kompetensi, keahlian, jenjang pendidikan dan kualitas dan kuantitas terhadap akses dan mutu layanan pendidikan masih perlu ditingkatkan.

3.1.1.2. Kesehatan

Indikator yang paling representatif dalam menggambarkan kemajuan di sektor kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merujuk pada proyeksi rata-rata tambahan usia yang diantisipasi seseorang dalam kurun waktu tertentu.

Indikator ini memberikan perspektif yang lebih rinci dan menyeluruh terkait perkembangan kesehatan suatu masyarakat dengan mengukur secara detail ekspektasi umur hidup mereka. Tren pencapaian AHH di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 mencapai 68,95 tahun meningkat dibanding tahun 2021 yang mencapai 68,67 tahun, meskipun demikian capaian AHH ini masih dibawah capaian AHH Provinsi Lampung sebesar 70,99 tahun dan Nasional yang mencapai 71,85 tahun.

Selain Angka Harapan Hidup, permasalahan kesehatan di Kabupaten Tanggamus terkait dengan derajat kesehatan masyarakat di antaranya yaitu kematian bayi. Pada Tahun 2022 terjadi 36 kasus kematian bayi termasuk neonatal, yaitu 17 bayi laki-laki dan 19 bayi perempuan. Meningkat dibandingkan Tahun 2021 yaitu 10 kasus. Dari 10.347 sasaran bayi lahir hidup di dapat angka kematian bayi 3,5 per 1.000 KH. Beberapa penyebab kematian bayi adalah BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) yaitu berat bayi kurang dari 2,5 kilogram dan asfiksia (gangguan dalam pengangkutan oksigen (O₂) ke jaringan tubuh) pada bayi usia 0 – 28 hari (neonatal), sedangkan kematian bayi usia 29 hari – 11 bulan (post neonatal) didominasi oleh penyebab lain, kelainan saluran cerna dan diare.

Mortalitas di Kabupaten Tanggamus tidak hanya terkait dengan angka kematian bayi, tetapi juga masih tingginya jumlah kematian ibu. Pada Tahun 2022 terjadi 11 kasus kematian ibu maternal yang masing-masing disebabkan oleh perdarahan, hipertensi dan lain-lain. Melihat penyebab kematian ibu diatas, perlu peningkatan upaya promotif pencegahan perdarahan dan hipertensi pada ibu hamil, peningkatan kepatuhan minum tablet tambah darah (Fe), peningkatan kunjungan ibu bersalin dan ibu nifas, serta monitoring pada ibu pasca persalinan yang mempunyai penyakit penyulit yang memungkinkan resiko penyebab kematian ibu nifas.

Kondisi status gizi balita yang termasuk dalam kategori sangat pendek dan pendek, yang dikenal sebagai stunting, mencerminkan gangguan dalam pertumbuhan fisik dan perkembangan otak pada anak. Fenomena ini umumnya terjadi selama 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Prevalensi stunting di Kabupaten Tanggamus telah mengalami penurunan yang cukup menggembirakan, sebagaimana tercermin dalam data SSGI, di mana prevalensi stunting turun sebesar 4,6% dari tingkat pada tahun 2021 yang mencapai 25% menjadi 20,4% pada tahun 2022. Meskipun terdapat penurunan tersebut, perlu diakui bahwa permasalahan stunting dan gizi balita tetap merupakan isu pembangunan yang krusial, mengingat perlunya menjaga kesinambungan dalam penanganannya. Hal ini menjadi sangat penting mengingat bahwa bayi dan balita

adalah generasi yang akan membentuk dan mengisi peran penting dalam pembangunan di masa depan.

Pengendalian penyakit terdiri atas Pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Penyakit menular meliputi penyakit menular langsung, penyakit yang dapat dikendalikan dengan imunisasi dan penyakit yang ditularkan melalui hewan. Penyakit menular utama yang terjadi di Kabupaten Tanggamus adalah penyakit Menular (HIV/AIDS, TBC, DBD, Malaria). Jumlah kasus HIV di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 berjumlah 53 kasus, sedangkan untuk jumlah kasus baru AIDS sebanyak 11 orang. Selanjutnya, salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah sangat serius di masyarakat sampai saat ini adalah tuberkulosis (TBC) atau yang lebih dikenal dengan TB Paru. Jumlah seluruh penderita TB Paru sepanjang Tahun 2022 di Kabupaten Tanggamus pada sebanyak 795 orang yang terdiri dari laki - laki sebanyak 514 kasus dan perempuan sebanyak 281 kasus. Kasus Tuberkulosis anak 0-14 tahun sebanyak 67 kasus. Case Detection Rate (CDR) merupakan persentase jumlah pasien TB (BTA+) yang diobati dan dilaporkan dibandingkan jumlah semua pasien TB (BTA+) yang diperkirakan ada dalam wilayah Kabupaten Tanggamus. Dengan perkiraan insiden tuberkulosis sebanyak 1.942 kasus, maka CDR di Kabupaten Tanggamus pada Tahun 2022 sebesar 40,9%.

Penyakit DBD di Kabupaten Tanggamus masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, hal ini didukung oleh masih adanya daerah Endemis DBD, dan faktor mobilisasi masyarakat yang sangat tinggi sehingga faktor penularan DBD akan semakin tinggi. Pada Tahun 2022 terjadi 212 kasus DBD, dimana 1 kasus diantaranya menyebabkan kematian. Kasus tertinggi DBD ada di Kecamatan Kota Agung 37 kasus, Kecamatan Gisting 31 kasus dan Kecamatan Sudimoro 20 kasus. Ketiga kecamatan tersebut termasuk dalam kecamatan dengan kepadatan penduduk cukup tinggi.

Pergeseran pola penyakit ke arah penyakit degeneratif (penyakit tidak menular) merupakan salah satu hal yang perlu diwaspadai. Penyakit-penyakit ini timbul sebagai konsekuensi dari gaya hidup yang kurang sehat, konsumsi makanan cepat saji, kekurangan aktivitas fisik dan istirahat, serta tekanan psikologis.

Sumber daya dalam pelayanan kesehatan di Kabupaten Tanggamus juga masih menghadapi masalah, seperti rasio dokter per 100.000 penduduk di semua kabupaten/kota masih di bawah standar yang ditetapkan WHO. Selain itu, rasio dokter per 100.000 penduduk di beberapa kabupaten/kota belum mencapai target yang tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 54 Tahun 2013 Tentang Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan

2011-2025. Rasio dokter per 100.000 penduduk di Kabupaten Tanggamus masih jauh dari target yang ditetapkan.

3.1.1.3. Sosial

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah masih tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanggamus. Pada tahun 2022 tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanggamus sebesar 10,98% meskipun angka ini lebih rendah daripada tingkat kemiskinan Provinsi Lampung sebesar 11,90% namun lebih tinggi dari tingkat kemiskinan Nasional sebesar 9,68%. Angka kemiskinan di Kabupaten Tanggamus menunjukkan penurunan sebesar 0,83 poin dibandingkan dengan Maret 2022, yang mencatat persentase penduduk miskin sebesar 11,81%. Meski ada penurunan, angka ini masih cukup tinggi dan menunjukkan bahwa masih banyak penduduk di Kabupaten Tanggamus yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Permasalahan lain yang juga perlu diselesaikan adalah masih tingginya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang belum menerima bantuan dari pemerintah. Kendala dalam pembinaan dan pengawasan PPKS juga menjadi permasalahan serius. Keberhasilan program-program ini sangat bergantung pada pemantauan dan bimbingan yang efektif, namun belum optimalnya proses ini dapat menyebabkan penyalahgunaan atau distribusi yang tidak merata. Oleh karena itu, perlu diperkuatnya mekanisme pengawasan guna memastikan efisiensi dan keadilan dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial.

Masalah administratif juga turut menjadi penghambat di bidang sosial Kabupaten Tanggamus. Pendataan terkait layanan PPKS belum optimal, mengakibatkan ketidakmaksimalan dalam identifikasi dan penjangkauan kelompok-kelompok yang membutuhkan bantuan. Pembinaan administrasi yang lebih baik dapat menjadi langkah awal dalam memastikan bahwa bantuan sosial mencapai sasaran yang tepat dan efektif.

Koordinasi lintas lembaga atau sektor juga menjadi titik lemah dalam pembangunan sosial di Kabupaten Tanggamus. Belum optimalnya sinergi antara berbagai pihak terkait menghambat efisiensi dan efektivitas upaya pembangunan sosial. Diperlukan langkah-langkah konkret untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi di antara berbagai lembaga dan sektor terkait guna mencapai hasil yang lebih baik.

Perlindungan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan, seperti lansia, disabilitas dan anak terlantar juga masih jauh dari optimal. Pada tahun 2022, jumlah anak terlantar sebanyak 420 orang, lanjut usia terlantar

sebanyak 1.650 orang dan penyandang disabilitas sebanyak 1.380 orang. Diperlukan perhatian khusus untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan program-program yang dapat memberikan perlindungan serta memberdayakan kelompok-kelompok ini agar dapat hidup mandiri dan bermartabat.

Terakhir, rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pelayanan sosial juga masih terbatas dan rendah kualitasnya. Hal ini menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan sosial. Pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi para petugas sosial perlu diperkuat untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memberikan layanan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3.1.1.4. Tenaga Kerja

Berbagai permasalahan dalam pembangunan bidang tenaga kerja mencakup berbagai aspek seperti tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, dominasi pekerjaan di sektor informal, kurangnya pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan, kualitas dan kompetensi tenaga kerja yang belum memadai, motivasi dan jiwa kewirausahaan yang rendah, keterbatasan lembaga formal vokasi dan pelatihan tenaga kerja, kurangnya variasi dan jenis pelatihan, serta sistem informasi ketenagakerjaan yang belum memadai.

Pertama-tama, tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2022 sebesar 68,91%, yang lebih rendah dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi sebesar 70,06%, mencerminkan adanya ketidakefektifan dalam pemanfaatan potensi tenaga kerja di Kabupaten Tanggamus. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan partisipasi angkatan kerja melalui program-program yang memotivasi dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam berbagai sektor ekonomi.

Kemudian, meningkatnya tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 menjadi 3,70% menjadi perhatian serius. Peningkatan angka ini dapat mencerminkan ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja dengan kebutuhan pasar. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan koordinasi antara lembaga pendidikan, pelatihan kerja, dan industri untuk memastikan bahwa keterampilan yang diajarkan sesuai dengan permintaan pasar.

Mayoritas pekerja di Kabupaten Tanggamus bekerja di sektor informal, menunjukkan kurangnya kesempatan untuk pekerjaan formal dan kurangnya perlindungan terhadap pekerja. Diperlukan inisiatif yang lebih besar untuk mengembangkan sektor formal.

Selanjutnya, rendahnya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan menjadi hambatan dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Pelatihan yang berorientasi pada kebutuhan pasar dan kewirausahaan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas dan relevansi keterampilan tenaga kerja.

Kualitas dan kompetensi angkatan kerja yang belum memadai juga perlu mendapat perhatian serius. Perbaikan pada sistem pendidikan dan pelatihan serta pengembangan keterampilan yang sesuai dengan perkembangan industri di Kabupaten Tanggamus akan mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja.

Rendahnya motivasi dan jiwa kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru menunjukkan perlunya dukungan bagi inovasi dan usaha baru. Pembangunan budaya kewirausahaan dan fasilitasi akses ke sumber daya untuk pengusaha potensial dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Terbatasnya lembaga formal vokasi dan pelatihan tenaga kerja, kurangnya variasi dan jenis pelatihan, serta sistem informasi ketenagakerjaan yang belum memadai menjadi kendala dalam pengembangan tenaga kerja. Perlu dibangun infrastruktur lembaga pendidikan dan pelatihan yang lebih luas dan berkualitas, disertai dengan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan yang efektif.

3.1.1.5. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kesetaraan Gender

Indikator yang dapat menggambarkan pemberdayaan perempuan adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG menganalisis ketimpangan gender dengan menggunakan rasio IPM menurut jenis kelamin sehingga hasil IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2018, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tanggamus mencapai angka 90,14 persen, mengalami sedikit penurunan menjadi 90,13 persen pada tahun 2020. Namun, terjadi peningkatan pada tahun 2021 menjadi 90,98 persen dan kembali naik menjadi 91,10 persen pada tahun 2022.

Partisipasi perempuan di berbagai bidang masih menunjukkan tingkat yang rendah, menciptakan ketidaksetaraan akses terhadap peluang dan sumber daya. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga masih menjadi isu yang perlu penanganan serius, memerlukan langkah-langkah perlindungan dan pencegahan yang lebih efektif, serta penegakan hukum yang tegas.

Optimalisasi pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak, yang seharusnya diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, masih menjadi titik fokus yang perlu diperkuat. Diperlukan upaya konkret untuk memberikan pelatihan, pendidikan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi agar perempuan dapat berpartisipasi secara aktif dan setara dalam pembangunan berkelanjutan.

Kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender masih menunjukkan kelemahan, termasuk ketersediaan data dan statistik gender yang kurang memadai. Hal ini menjadi hambatan dalam menyusun kebijakan yang berbasis pada data akurat dan relevan. Oleh karena itu, perlu dilakukan investasi lebih lanjut dalam memperkuat lembaga-lembaga yang berfokus pada pengarusutamaan gender dan meningkatkan kapasitas mereka.

Kurang optimalnya penguatan karakter berbasis keluarga juga menjadi kendala dalam menciptakan lingkungan yang mendukung nilai-nilai positif dan hubungan yang sehat di lingkungan keluarga. Program penguatan karakter berbasis keluarga dapat menjadi langkah strategis untuk membangun fondasi kehidupan yang harmonis dan berdaya.

3.1.1.6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pembangunan di Kabupaten Tanggamus telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang perlu diselesaikan. Salah satu permasalahan yang paling menonjol adalah masih terdapat 3 desa/pekon tertinggal. Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi jumlah pekon tertinggal di Kabupaten Tanggamus adalah 3 pekon, yaitu pekon Karang Brak, Tirom dan Sinar Jawa. Pekon yang masih tertinggal menunjukkan ketidakmerataan dalam pembangunan di Kabupaten Tanggamus. Tertinggalnya desa-desa ini dapat mengindikasikan adanya kesenjangan dalam akses terhadap layanan dasar, infrastruktur dan peluang pembangunan ekonomi. Diperlukan strategi yang terfokus untuk mengangkat tingkat kesejahteraan di desa-desa tersebut agar kesenjangan dapat diminimalkan.

Selanjutnya, lemahnya kompetensi aparatur di BPM Kabupaten Tanggamus menjadi kendala utama dalam penyelenggaraan tugas teknis pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Profesionalisme yang kurang dan kekurangan kompetensi dapat menghambat efisiensi dan efektivitas dari program pemberdayaan yang dijalankan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan

kapasitas dan pelatihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualifikasi dan keahlian aparatur tersebut.

Selain itu, dukungan kebijakan, baik dari segi politik maupun kepastian hukum, perlu diperkuat agar pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan maksimal. Kebijakan yang mendukung secara politik dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan program pemberdayaan, sedangkan kepastian hukum akan memberikan landasan yang kuat dan jelas bagi semua pihak terkait.

Masih lemahnya kapasitas Pemerintah desa/pekon dalam menerapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat menjadi permasalahan serius lainnya. Pemerintah pekon yang kurang mampu mengelola administrasi dan program pembangunan lokal dapat menghambat capaian pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang berfokus pada penguatan kapasitas pemerintah desa agar mereka dapat berperan secara aktif dalam pembangunan masyarakat.

Ketidakterdayaan masyarakat merupakan masalah serius lain yang dihadapi. Faktor ekonomis dan akses terbatas terhadap layanan menjadi penghalang bagi masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif. Program pemberdayaan masyarakat harus dirancang dengan memperhitungkan keberagaman kebutuhan dan potensi masyarakat, serta memberikan akses yang lebih luas dan merata terhadap peluang pembangunan ekonomi.

3.1.1.7. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembangunan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tanggamus dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian serius untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelayanan kepada masyarakat. Tantangan utama yang dihadapi mencakup rasio penduduk ber-KTP yang belum optimal, keberadaan masyarakat yang tidak memiliki akta nikah tercatat, serta keterbatasan sarana, prasarana dan SDM dalam pengelolaan data administrasi kependudukan.

Rasio penduduk ber-KTP di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 hanya mencapai 74,09%, mencerminkan adanya kesenjangan dalam pencatatan identitas penduduk. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya memiliki KTP, kendala akses ke layanan administrasi kependudukan, atau prosedur yang kompleks. Peningkatan kesadaran masyarakat, disertai dengan upaya meningkatkan

aksesibilitas layanan administrasi kependudukan, menjadi kunci untuk meningkatkan rasio penduduk ber-KTP.

Selanjutnya, permasalahan terkait pencatatan perkawinan juga menjadi fokus perhatian. Beberapa pasangan yang sudah menikah mungkin belum memiliki akta nikah resmi atau tidak terdaftar di buku register nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) yang bersangkutan. Ketidakpenuhan prosedur ini dapat memicu ketidakpastian hukum dan administratif, serta memengaruhi akses pasangan tersebut terhadap berbagai hak dan layanan yang berkaitan dengan status perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan dan memastikan prosedur administratif yang mudah diakses.

Selain itu, terbatasnya sarana dan prasarana, termasuk SDM yang terampil dalam pengelolaan data administrasi kependudukan, menjadi kendala dalam pelayanan. Kecepatan dan keakuratan pengolahan data sangat bergantung pada ketersediaan teknologi dan keahlian SDM. Upaya peningkatan infrastruktur dan pelatihan SDM dalam teknologi informasi dan manajemen data dapat menjadi langkah kunci untuk memperbaiki kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

3.1.1.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Tanggamus menghadapi serangkaian permasalahan yang memerlukan perhatian mendalam untuk meningkatkan efektivitas program-program yang ada. Beberapa tantangan utama mencakup rendahnya persentase akseptor KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengendalian penduduk dan KB, kekurangan jumlah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan ketidakmerataan kapasitas SDM aparatur dalam memberikan pelayanan di bidang ini.

Pertama-tama, persentase akseptor KB MKJP pada tahun 2022 mencapai 38,39%, menunjukkan rendahnya minat dan partisipasi masyarakat dalam mengadopsi metode kontrasepsi jangka panjang. Mungkin ada sejumlah faktor yang memengaruhi tingginya angka ini, termasuk kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat dan keamanan metode kontrasepsi jangka panjang. Perlu dilakukan kampanye penyuluhan yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pilihan kontrasepsi yang tersedia.

Kemudian, masalah pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengendalian penduduk dan KB turut menjadi perhatian. Pemahaman yang

kurang dapat mengakibatkan penolakan atau ketidaksetujuan terhadap program-program KB yang ditawarkan. Oleh karena itu, diperlukan strategi edukasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang manfaat dan pentingnya pengendalian penduduk serta KB dalam mencapai kesejahteraan keluarga.

Kurangnya jumlah Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) menjadi kendala serius dalam pelaksanaan program. Idealnya, setiap pekon seharusnya memiliki satu PLKB untuk memberikan pendampingan dan informasi kepada masyarakat. Keterbatasan jumlah PLKB dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan KB dan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai metode kontrasepsi. Peningkatan jumlah PLKB dan pelatihan yang berkelanjutan perlu diupayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

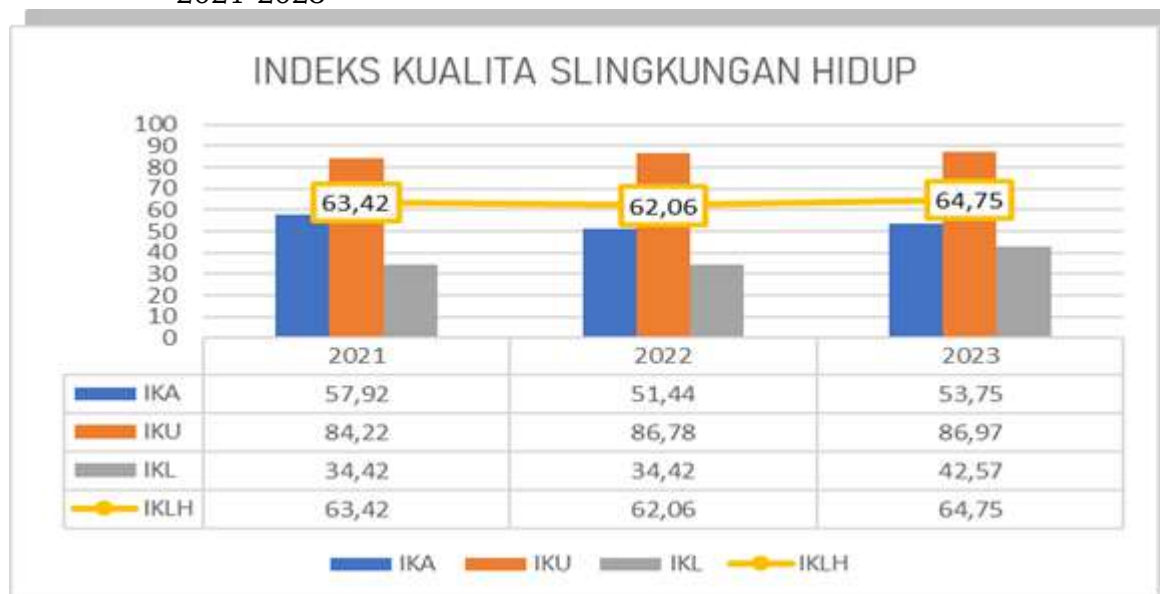
Selain itu, belum meratanya kapasitas dan kemampuan SDM aparatur dalam memberikan pelayanan di bidang Pengendalian Penduduk dan KB menjadi hambatan. Diperlukan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi aparatur untuk memastikan bahwa mereka mampu memberikan layanan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penguatan kapasitas SDM menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran dan efektivitas program-program KB di tingkat lokal.

3.1.1.9. Lingkungan Hidup

Pembangunan berwawasan lingkungan meliputi aspek pengendalian pencemaran lingkungan (air, udara, tanah), perlindungan kawasan lindung dan konservasi. Selama ini untuk mengukur kualitas lingkungan umumnya dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan sehingga sulit untuk menilai apakah kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik atau sebaliknya.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) telah dikembangkan sejak tahun 2009 yang merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Grafik 3.3. Kondisi Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tanggamus Tahun 2021-2023



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 sebesar 64,75, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 62,06. Beberapa permasalahan utama adalah Indeks Kualitas Air di Kabupaten Tanggamus sempat menurun di tahun 2022 mencapai 51,44, meskipun meningkat di tahun 2023 (53,75) namun belum bisa mencapai kondisi semula di tahun 2021 (57,92). Kualitas Air di Tanggamus juga dalam kategori sedang, Disamping itu, berkurangnya luas tutupan lahan akibat perluasan pemukiman penduduk dan kebakaran hutan menyebabkan turunnya IKLH Kabupaten Tanggamus selama tiga tahun terakhir kondisi Indeks Kualitas Lahan masih dalam kategori kurang. Rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan hidup menjadi salah satu hambatan utama dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap dampak lingkungan perlu menjadi fokus, dengan memperkuat regulasi dan penegakan hukum.

Permasalahan lain dibidang lingkungan hidup adalah tingginya timbulan sampah yang belum termanfaatkan. Pada tahun 2022 berdasarkan hasil survei timbulan sampah di Kabupaten Tanggamus mencapai 488,78 Ton per hari. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap lingkungan bersih dan sehat, termasuk dalam penanganan dan pengolahan sampah, menjadi permasalahan penting. Hal itu terlihat dari masih rendahnya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Tabel 3.1. Estimasi Timbunan Sampah Kabupaten Tanggamus Tahun 2022

No.	Sumber sampah	Berat [kg/unit/hari]	Unit	Jumlah Unit	Berat [ton/hari]
1	Rumah Tangga	0,56	Jiwa	645.807	361,65
2	Retail Modern	0,34	Pegawai	342	0,12
3	Faskes	0,14	Bed	2.024	0,28
4	Sekolah	0,01	murid dan guru	106.285	1,06
5	Tempat Ibadah	0,06	Orang	1.837	0,11
6	Ponpes	0,04	santri dan pengasuh	18.111	0,72
7	Pertokoan	0,41	Pegawai	5.118	2,10
8	Pasar	5,57	Pedagang	5.847	32,57
9	Industri	1,17	Pegawai	75.553	88,40
10	Tempat Wisata	0,01	m2	52.400	0,52
11	Rumah Makan	0,26	Kursi	2.967	0,77
12	Penginapan	0,18	Bed	128	0,02
13	Fasilitas Umum	0,001	m2	9.800	0,01
14	Perkantoran	0,04	Pegawai	10.891	0,44
Jumlah Timbunan Sampah					488,78

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Grafik 3.4. Tingkat Pengetahuan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengolahan Sampah Tahun 2022



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2023

Program edukasi yang intensif dapat membantu meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat terkait pelestarian lingkungan serta upaya yang lebih besar harus dilakukan untuk memperluas jaringan bank sampah dan Tempat Pengelolaan Sampah Secara Terpadu (TPS3R). Minimnya bank sampah dan TPS3R menandakan perlunya perluasan infrastruktur pengelolaan sampah yang

berkelanjutan. Penerapan sirkular ekonomi dalam pengelolaan sampah menjadi kunci untuk menciptakan manfaat ekonomi rumah tangga. Diperlukan strategi yang inovatif untuk memanfaatkan limbah sebagai sumber daya yang dapat diolah kembali dan memberikan kontribusi ekonomi.

3.1.1.10. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Tanggamus menemui sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian serius demi menciptakan infrastruktur yang berkelanjutan dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi mencakup rendahnya kondisi jalan yang baik, tingginya tingkat kerusakan jalan dan jembatan, infrastruktur irigasi yang masih rentan terhadap kerusakan, keterbatasan sistem drainase dan utilitas terpadu, serta pelayanan infrastruktur sanitasi permukiman yang belum optimal.

Kondisi jalan yang masih rendah dalam kondisi baik menjadi salah satu hambatan utama dalam pembangunan di Kabupaten Tanggamus. Tingkat kemantapan jalan kabupaten pada tahun 2022 baru mencapai 37,45%, mencerminkan tingginya tingkat kerusakan dan kekurangan perawatan rutin. Rendahnya kualitas jalan dapat menghambat konektivitas antar wilayah, menghambat distribusi barang, dan meningkatkan risiko kecelakaan. Perbaikan dan pemeliharaan jalan perlu ditingkatkan untuk memastikan mobilitas yang lancar dan aman bagi masyarakat.

Selanjutnya, tingkat kerusakan infrastruktur irigasi yang masih tinggi menjadi tantangan serius dalam mendukung sektor pertanian. Meskipun capaian irigasi dalam kondisi mantap telah meningkat, tetapi masih berada pada angka 64,49%, menunjukkan bahwa masih banyak area yang membutuhkan perbaikan dan rehabilitasi. Upaya penguatan sistem irigasi akan memberikan dampak positif terhadap produktivitas pertanian dan keberlanjutan lingkungan.

Belum optimalnya sistem drainase dan utilitas secara terpadu dan berkelanjutan juga menjadi perhatian. Dalam pengembangan wilayah, perlu dirancang sistem drainase yang efisien untuk mencegah banjir dan melindungi lingkungan. Sistem utilitas yang terpadu dan berkelanjutan dapat memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi secara menyeluruh, termasuk air bersih dan energi.

Pelayanan infrastruktur sanitasi permukiman, termasuk pengelolaan limbah, sampah, dan drainase, juga menjadi fokus permasalahan. Belum optimalnya pelayanan ini dapat mengancam kesehatan masyarakat dan keberlanjutan

lingkungan. Diperlukan investasi dan strategi yang lebih baik dalam pengelolaan limbah dan sampah, serta perbaikan sistem drainase perkotaan dan pedesaan.

3.1.1.11. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Beberapa tantangan utama yang dihadapi mencakup tingginya jumlah Rumah Tidak Layak Huni, pengelolaan kawasan permukiman yang belum optimal, keberadaan kawasan/permukiman kumuh, terbatasnya pelayanan air bersih, kurangnya sarana prasarana pada kawasan permukiman, belum terintegrasinya pengembangan kawasan perumahan dengan pembangunan prasarana dan sarana kawasan, serta pemenuhan kebutuhan air bersih yang masih sangat terbatas.

Tingginya jumlah rumah tidak layak huni pada tahun 2022 sebanyak 6.798 unit mencerminkan adanya kesenjangan dalam pemenuhan hak dasar hunian layak bagi masyarakat. Rumah yang tidak layak huni dapat berdampak negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Upaya rehabilitasi dan perbaikan rumah perlu didorong untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk dan mencapai target perumahan yang layak.

Belum optimalnya pengelolaan kawasan permukiman menjadi masalah serius. Perencanaan dan pengelolaan kawasan permukiman yang kurang baik dapat menyebabkan tumbuhnya kawasan/permukiman kumuh yang memerlukan penanganan mendesak. Pengelolaan yang baik harus memperhatikan aspek-aspek keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan lingkungan serta pemerataan infrastruktur.

Kawasan/permukiman kumuh yang memerlukan penanganan mendesak menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam akses masyarakat terhadap fasilitas dasar. Penyediaan infrastruktur yang memadai dan perencanaan kawasan yang terintegrasi menjadi langkah penting untuk menangani permasalahan ini. Selain itu, upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan dan keteraturan kawasan permukiman juga harus ditingkatkan.

3.1.1.12. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Tanggamus menghadapi serangkaian permasalahan yang signifikan di Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang memerlukan penanganan komprehensif. Diantara permasalahan yang dihadapi antara lain rendahnya ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, ketidaktetapan kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana mitigasi dan penanganan tanggap darurat bencana yang belum memadai serta kurangnya dukungan database kebencanaan.

Ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah yang masih rendah dapat mengakibatkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan daerah perlu ditingkatkan. Program edukasi dan sosialisasi yang efektif dapat membantu meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap aturan yang berlaku, sehingga tercipta ketertiban yang lebih baik.

Selanjutnya, kondisi Kabupaten Tanggamus yang rawan terhadap bencana alam menjadi perhatian serius. Fenomena alam seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi dapat menyebabkan kerugian besar terhadap masyarakat dan infrastruktur. Perlu adanya upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan sarana dan prasarana mitigasi dan penanganan tanggap darurat bencana, termasuk sistem peringatan dini, rute evakuasi, dan pusat pengungsian, untuk mengurangi risiko dan kerugian yang dapat timbul akibat bencana alam.

Belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan bencana dan kurangnya sarana prasarana yang memadai juga menjadi kendala. Pelatihan dan simulasi yang berkelanjutan perlu diintensifkan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan petugas penanganan bencana, serta pembangunan infrastruktur yang mampu menanggulangi dampak bencana secara efektif.

Kurangnya dukungan database kebencanaan menjadi tantangan lain yang perlu diatasi. Database yang lengkap dan terintegrasi dapat menjadi dasar informasi yang kritis dalam perencanaan, mitigasi, dan penanganan bencana. Perlu dikembangkan sistem informasi yang akurat dan terkini yang memungkinkan pemantauan dan respons yang cepat terhadap situasi darurat.

3.1.1.13. Pertanian

Sektor pertanian memiliki peranan penting dalam pembangunan Kabupaten Tanggamus, menjadi tulang punggung ekonomi dan penopang kesejahteraan masyarakat. Dengan potensi alam yang melimpah, sektor pertanian di Kabupaten Tanggamus tidak hanya menyediakan pangan bagi penduduk, tetapi juga menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak keluarga. Meskipun demikian, sejumlah permasalahan juga menjadi penghambat perkembangan sektor pertanian di Kabupaten Tanggamus.

Permasalahan pertama adalah Nilai Tukar Petani (NTP) yang kurang bersaing. NTP Kabupaten Tanggamus di tahun 2022 adalah 101,20 meningkat secara signifikan dari tahun 2021 sebesar 88,03. Meskipun terjadi peningkatan, NTP

Kabupaten masih berada dibawah NTP Provinsi Lampung sebesar 102,19 dan NTP Nasional sebesar 109,00. Dengan demikian diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan daya saing produk pertanian lokal agar petani dapat mendapatkan nilai ekonomi yang lebih baik.

Selanjutnya, produktivitas pertanian masih perlu peningkatan. Contohnya saja produktivitas padi pada tahun 2018 sebesar 57,50 Ku/Ha dan pada tahun 2022 menurun menjadi 57,00 Ku/Ha. Penurunan produktivitas padi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- Perubahan iklim, seperti peningkatan suhu udara dan curah hujan yang tidak menentu, dapat menyebabkan tanaman padi mengalami stres dan produktivitasnya menurun.
- Penggunaan varietas padi yang tidak adaptif dengan kondisi lingkungan setempat dapat menyebabkan tanaman padi rentan terhadap serangan hama dan penyakit, sehingga produktivitasnya menurun.
- Pengelolaan budidaya padi yang kurang optimal, seperti penggunaan pupuk yang tidak tepat dan pengendalian hama dan penyakit yang kurang efektif, dapat menyebabkan produktivitas padi menurun.

Permasalahan lain di sektor pertanian adalah belum optimalnya akses dan penggunaan teknologi dalam pengolahan lahan dan pengolahan hasil pertanian dalam peningkatan efisiensi dan produktivitas. Sosialisasi, pelatihan, dan penyediaan infrastruktur digital perlu diperkuat untuk memastikan bahwa petani dapat mengadopsi teknologi modern dengan baik.

Masih banyak petani dan peternak yang belum memanfaatkan fasilitas asuransi pertanian. Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura telah memberikan dukungan kepada petani dalam bentuk Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). AUTP merupakan program asuransi yang diberikan kepada petani untuk melindungi usahatani mereka. Program ini merupakan pengalihan risiko yang dapat memberikan ganti rugi akibat kerugian usahatani sehingga keberlangsungan usahatani dapat terjamin. Selain AUTP, Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menggalakkan Program Kartu Petani Berjaya (PKPB) yang merupakan program Gubernur Lampung yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani menuju kesejahteraan melalui upaya penyelesaian permasalahan secara terstruktur, sistematis dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Kabupaten Tanggamus menjadi salah satu dari empat kabupaten yang diprioritaskan dalam program ini. Program ini dapat membantu para petani dalam mengatasi kebutuhan sarana produksi, kepastian ketersediaan sarana produksi pertanian, pembinaan usaha tani,

penanganan paska panen, penyerapan pasar, bantuan permodalan hingga beasiswa bagi anak petani yang berprestasi.

Kabupaten Tanggamus menghadapi permasalahan strategis dalam pengembangan sektor pertaniannya, khususnya terkait dengan keterbatasan hilirisasi produk hasil pertanian. Meskipun daerah ini memiliki potensi besar dalam produksi pertanian, kenyataannya, sebagian besar produk pertanian masih dijual dalam bentuk bahan baku tanpa melalui proses pengolahan atau branding yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa rantai nilai tambah dari produk pertanian belum optimal, sehingga petani dan pelaku usaha lokal belum mampu memaksimalkan keuntungan dari hasil pertanian mereka.

Keterbatasan hilirisasi ini mengakibatkan rendahnya daya saing produk pertanian Kabupaten Tanggamus di pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional. Produk yang dijual sebagai bahan baku cenderung memiliki nilai jual yang lebih rendah dibandingkan produk olahan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Selain itu, kurangnya inovasi dalam pengolahan dan branding produk juga membatasi kemampuan daerah dalam menciptakan identitas unik yang bisa menarik perhatian pasar.

Kondisi ini menuntut adanya strategi yang lebih terarah dalam mengembangkan industri pengolahan di daerah, meningkatkan kapasitas dan keterampilan petani serta pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi pengolahan, dan mendorong lahirnya usaha-usaha berbasis produk olahan pertanian dengan branding yang kuat. Dengan demikian, Kabupaten Tanggamus dapat mengoptimalkan potensi sektor pertaniannya, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memperkuat posisi daerah dalam peta persaingan ekonomi yang lebih luas.

Pada sub sektor peternakan terdapat kendala seperti terbatasnya tenaga paramedik veteriner dan dokter hewan di Puskesmas menjadi hambatan dalam pengelolaan kesehatan hewan. Diperlukan peningkatan jumlah dan kualitas tenaga medik veteriner serta infrastruktur kesehatan hewan untuk mencegah dan mengatasi penyakit yang dapat merugikan sektor peternakan. Keterbatasan keberadaan sarana produksi peternakan (saprotrak) karena tergantung pabrik luar daerah juga menjadi permasalahan yang perlu diatasi. Penguatan kapasitas dan keberlanjutan pabrik lokal perlu diperhatikan untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok luar daerah.

3.1.1.14. Pangan

Pembangunan di sektor pangan di Kabupaten Tanggamus dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian dan upaya bersama untuk

mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan. Beberapa permasalahan tersebut antara lain : penurunan ketersediaan pangan utama, rendahnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH), Nilai Tukar Petani (NTP) kurang bersaing dan masih adanya beberapa daerah yang rawan pangan yang memerlukan penanganan serius.

Ketersediaan pangan utama menjadi poin penting dalam permasalahan pembangunan di sektor pangan di Kabupaten Tanggamus. Fenomena penurunan ketersediaan pangan utama menciptakan ancaman serius terhadap ketahanan pangan lokal. Berbagai faktor seperti perubahan iklim, ketidakpastian cuaca dan kendala dalam praktik pertanian modern dapat berdampak pada penurunan produksi pangan utama seperti padi, jagung dan kedelai. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi untuk memitigasi dampak perubahan iklim dan memperkuat ketahanan pertanian lokal, termasuk pengenalan teknologi pertanian yang lebih canggih dan adaptasi varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi lingkungan yang berubah.

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Tanggamus di tahun 2022 sebesar 87,61, lebih rendah dibandingkan dengan skor PPH tingkat Provinsi Lampung sebesar 90,6 dan nasional sebesar 92,9. menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pola konsumsi pangan. PPH itu sendiri merupakan metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan di wilayah tertentu baik secara nasional maupun provinsi dan kabupaten kota. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan keberagaman pangan dan mendukung pola makan yang seimbang untuk mencapai gizi yang optimal.

Masalah selanjutnya adalah adanya beberapa daerah yang masih rawan pangan yang menandakan perlunya penanganan serius untuk mengatasi ketidakpastian pangan dan memastikan kecukupan pangan di tingkat lokal. Pendekatan yang holistik, termasuk program-program bantuan dan pembangunan infrastruktur pertanian, diperlukan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Kabupaten Tanggamus.

3.1.1.15. Perikanan

Sumber daya perikanan yang melimpah tidak hanya menjadi aset penting bagi ketahanan pangan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya sektor perikanan di Kabupaten Tanggamus terlihat dari peranannya dalam menyediakan sumber protein hewani bagi masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan di sektor

ini. Nelayan lokal yang aktif beroperasi di perairan Kabupaten Tanggamus turut serta dalam mencukupi kebutuhan pangan dan memasok ikan ke pasar lokal. Namun, sejumlah permasalahan juga muncul yang memerlukan upaya bersama untuk mengoptimalkan kontribusi sektor perikanan. Pertama, sarana prasarana perikanan tangkap masih belum memadai. Kondisi ini dapat menghambat efisiensi operasional nelayan dan berpotensi menurunkan hasil tangkapan. Diperlukan investasi dalam pembaruan dan peningkatan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap secara berkelanjutan.

Selanjutnya, sumber daya manusia kelautan dan perikanan, baik dari pihak aparaturnya maupun nelayan, masih memiliki kapasitas yang kurang. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pendidikan tentang praktik-praktik kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta peningkatan keterampilan dalam pengelolaan sumber daya laut, menjadi langkah penting untuk mencapai pengelolaan yang lebih baik. Rendahnya penguasaan teknologi tepat guna bagi nelayan menjadi hambatan dalam peningkatan produktivitas dan keberlanjutan sektor perikanan. Diperlukan pendekatan inovatif, seperti pelatihan dalam penggunaan teknologi modern untuk penangkapan ikan dan pengelolaan sumber daya laut, guna mendukung perikanan yang berkelanjutan. Kurangnya permodalan dalam pengembangan usaha di bidang kelautan dan perikanan juga menjadi kendala serius. Pemberian akses lebih baik terhadap sumber daya keuangan, termasuk kredit usaha dapat membantu nelayan dan pelaku usaha di sektor ini untuk meningkatkan kapasitas produksi dan diversifikasi usaha.

3.1.1.16. Perdagangan

Perdagangan di Kabupaten Tanggamus memiliki potensi yang besar untuk menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, namun masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian serius. Beberapa kendala utama termasuk terbatasnya pangsa pasar produk daerah ke luar daerah dan nasional, rendahnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, keterbatasan pengetahuan pengusaha mengenai potensi pasar produk daerah, rendahnya daya saing dan manajemen pengelolaan usaha, serta kesadaran pelaku usaha terkait legalitas usaha bidang perdagangan yang masih rendah. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Tanggamus yang masih rendah memerlukan perhatian khusus dalam upaya meningkatkan peran perdagangan sebagai penggerak ekonomi. Pengembangan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor perdagangan, pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha, serta fasilitasi akses pasar dapat menjadi langkah-langkah strategis. Selanjutnya, terbatasnya pangsa pasar produk daerah ke luar daerah

dan nasional menjadi hambatan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi Kabupaten Tanggamus. Diperlukan strategi pemasaran yang lebih agresif, pengembangan jaringan distribusi yang efisien, dan peningkatan kualitas produk untuk meningkatkan daya tarik produk daerah di tingkat nasional.

Keterbatasan pengetahuan pengusaha mengenai potensi pasar produk daerah menjadi kendala lain yang perlu diatasi. Program pelatihan, pendampingan, dan penyediaan informasi pasar dapat membantu pengusaha lokal memahami tren pasar, kebutuhan konsumen, dan peluang bisnis yang dapat diakses. Selain itu, rendahnya daya saing dan manajemen pengelolaan usaha juga perlu menjadi fokus perbaikan. Pelatihan manajemen, penerapan teknologi informasi dalam pengelolaan bisnis, dan upaya untuk meningkatkan kualitas produk dapat membantu pengusaha lokal menjadi lebih kompetitif di pasar yang semakin global.

Kesadaran pelaku usaha terkait legalitas usaha bidang perdagangan yang masih rendah juga memerlukan perhatian. Peningkatan pemahaman tentang peraturan dan regulasi terkait perdagangan, serta upaya untuk memudahkan proses perizinan dan legalitas usaha, dapat membantu menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif.

Terbatasnya sarana dan prasarana pasar yang belum memenuhi kriteria sebagai pasar tradisional yang bersih dan sehat serta pertumbuhan ritel modern di beberapa kota kecamatan juga menjadi kendala utama. Perlu adanya investasi dalam perbaikan infrastruktur pasar tradisional dan strategi adaptasi bagi pedagang tradisional untuk bersaing dengan ritel modern. Kesadaran pedagang pasar dalam menata dagangan dan menjaga kebersihan pasar juga menjadi isu krusial. Program pelatihan dan kampanye kesadaran dapat membantu menciptakan lingkungan pasar yang bersih, nyaman, dan menarik bagi konsumen. Apabila permasalahan ini dapat diatasi, Kabupaten Tanggamus akan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih inklusif, sehat, dan berdaya saing.

3.1.1.17. Perindustrian

Perindustrian di Kabupaten Tanggamus memiliki potensi besar sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal, namun masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang memerlukan upaya bersama untuk diperbaiki. Beberapa kendala utama melibatkan terbatasnya pengetahuan pengusaha mengenai potensi pasar produk daerah, rendahnya daya saing dan manajemen pengelolaan usaha, serta kesadaran pelaku usaha terkait legalitas usaha yang

masih rendah, yang semuanya menyebabkan pangsa pasar produk daerah Kabupaten Tanggamus masih terbatas. Pertama-tama, terbatasnya pengetahuan pengusaha mengenai potensi pasar produk daerah menjadi hambatan utama untuk mengoptimalkan pemasaran dan distribusi produk lokal. Diperlukan program pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan pemahaman pengusaha terhadap pasar, tren konsumen, dan strategi pemasaran yang efektif. Selanjutnya, rendahnya daya saing dan manajemen pengelolaan usaha merupakan kendala serius. Pelatihan dalam meningkatkan kualitas produk, penerapan inovasi, serta pengembangan strategi manajemen dapat membantu pengusaha lokal untuk bersaing di tingkat yang lebih luas.

Faktor kesadaran pelaku usaha kaitannya dengan legalitas usaha bidang perindustrian juga perlu diperhatikan. Rendahnya kesadaran terkait peraturan dan regulasi, serta proses perizinan yang kompleks, dapat menjadi hambatan dalam pengembangan usaha. Sosialisasi, pendampingan, dan penyederhanaan prosedur perizinan dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan industri lokal.

Pangsa pasar produk daerah Kabupaten Tanggamus yang masih terbatas juga menjadi isu krusial. Perlu adanya strategi pemasaran yang lebih efektif, peningkatan kualitas produk, dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk memperluas jangkauan pasar.

3.1.1.18. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Peranan koperasi, usaha kecil, dan menengah (KUKM) memiliki dampak penting terhadap pembangunan di Kabupaten Tanggamus, menciptakan basis ekonomi yang kuat dan inklusif. KUKM tidak hanya menjadi sumber lapangan pekerjaan bagi masyarakat, tetapi juga memainkan peran kunci dalam mendiversifikasi ekonomi daerah dan mengurangi disparitas ekonomi. Meskipun demikian, beberapa permasalahan juga menghadang perkembangan sektor ini.

Pembangunan di sektor koperasi, usaha kecil, dan menengah (KUMKM) di Kabupaten Tanggamus menghadapi sejumlah permasalahan yang memerlukan tindakan strategis. Pertama, jumlah koperasi aktif pada tahun 2022 menunjukkan penurunan yang signifikan, hanya mencapai 71 koperasi. Hal ini menciptakan tantangan dalam meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian lokal.

Selanjutnya, daya saing koperasi dan UMKM masih rendah. Faktor-faktor seperti kurangnya inovasi, keterbatasan akses terhadap teknologi, dan kurangnya

integrasi dalam rantai pasok menciptakan kesulitan dalam bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

Manajemen pengelolaan koperasi dan UMKM belum tertata dengan baik. Perluasan pengetahuan dan keterampilan dalam aspek manajemen menjadi esensial untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing bisnis di tingkat lokal. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha kecil dan menengah menjadi hambatan serius dalam pengelolaan usaha. Diperlukan upaya pendidikan dan pelatihan yang intensif untuk meningkatkan kapasitas para pelaku usaha dalam mengelola keuangan, pemasaran, dan aspek lainnya yang berkaitan dengan operasional bisnis.

Keterbatasan modal menjadi kendala utama bagi pelaku usaha koperasi dan UMKM. Terbatasnya akses pembiayaan modal membuat sulit bagi mereka untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Diperlukan strategi penguatan akses ke sumber pembiayaan, baik melalui kerjasama dengan lembaga keuangan maupun melalui program-program pemerintah yang mendukung.

Lemahnya akses UMKM dalam memasuki pasar menjadi kendala tambahan. Perluasan jejaring dan penguatan pemasaran melalui platform digital dapat membantu UMKM meningkatkan visibilitas dan daya jual produk mereka.

Kurangnya kerja sama antar-pelaku usaha koperasi dan UMKM dalam melakukan kerja sama usaha dengan pihak ketiga menjadi hambatan dalam membangun sinergi dan menciptakan nilai tambah bersama. Perlu ditingkatkan pemahaman akan manfaat kerja sama, termasuk kerjasama dalam pengembangan produk, distribusi, dan pemasaran.

Dengan demikian, permasalahan pembangunan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Tanggamus melibatkan berbagai aspek. Solusi yang komprehensif dan kolaboratif diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan mewujudkan pembangunan koperasi dan UMKM yang berkelanjutan dan inklusif.

3.1.1.19. Penanaman Modal

Penanaman modal merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah, karena dapat membantu meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun demikian, terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam pengembangan sektor ini.

Pertama, jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) masih tergolong sedikit. Pada tahun 2022, hanya terdapat 13 investor berskala nasional dan jumlah ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal

ini menciptakan tantangan dalam meningkatkan daya tarik Kabupaten Tanggamus sebagai destinasi investasi yang potensial.

Selanjutnya, belum lengkapnya profil dan peta investasi daerah menjadi hambatan dalam menarik minat investor. Informasi yang tidak memadai mengenai potensi dan peluang investasi di daerah dapat mengurangi ketertarikan investor. Diperlukan upaya untuk menyusun profil investasi yang komprehensif dan peta investasi daerah yang jelas untuk memberikan gambaran yang akurat kepada calon investor.

Belum optimalnya kerjasama dan promosi investasi daerah menjadi faktor penting yang mempengaruhi penanaman modal. Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah, lembaga investasi, dan sektor swasta untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Promosi investasi yang intensif dan terarah juga menjadi kunci untuk menjangkau lebih banyak investor potensial.

Kurangnya sarana dan prasarana perhubungan, ketersediaan listrik, dan belum adanya pelabuhan menjadi hambatan nyata dalam mendukung investasi di Kabupaten Tanggamus. Infrastruktur yang tidak memadai dapat menghambat kelancaran distribusi barang dan layanan, sehingga mengurangi daya tarik investasi. Diperlukan investasi dalam pengembangan infrastruktur perhubungan, penyediaan listrik, dan pembangunan pelabuhan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan investasi.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini, perlu adanya strategi yang terkoordinasi antara pemerintah daerah, lembaga investasi, dan sektor swasta. Upaya untuk meningkatkan jumlah investor dan daya tarik investasi perlu didukung dengan langkah-langkah konkret seperti penyusunan profil investasi yang komprehensif, peningkatan promosi investasi, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

3.1.1.20. Pariwisata

Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki potensi pariwisata yang cukup besar. Potensi pariwisata di Kabupaten Tanggamus meliputi wisata alam, wisata budaya, dan wisata kuliner. Pariwisata memiliki peran penting terhadap pembangunan di Kabupaten Tanggamus. Pariwisata berperan dalam meningkatkan perekonomian daerah, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Tanggamus menghadapi sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian serius untuk meningkatkan

potensi wisata dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Pertama, persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata masih sangat kecil, hanya sebesar 0,008%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah masih minim, sehingga diperlukan strategi untuk meningkatkan daya tarik dan dampak ekonomi dari pariwisata.

Kemudian yang tidak kalah penting adalah masih rendahnya investasi di sektor pariwisata. Diperlukan upaya untuk menarik investasi, baik dari sektor swasta maupun pemerintah guna meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata Tanggamus. Investasi ini perlu difokuskan pada penyediaan fasilitas dan pengembangan atraksi wisata yang dapat meningkatkan pengalaman wisatawan.

Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana, termasuk akses menuju destinasi wisata, juga menjadi hambatan. Infrastruktur yang baik menjadi kunci utama dalam menarik wisatawan dan memberikan pengalaman yang nyaman. Perlu dilakukan peningkatan pada jalan, transportasi, dan fasilitas umum lainnya untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata.

Pemasaran dan promosi wisata masih lemah, terutama karena kurangnya sarana promosi yang memenuhi syarat dan mengikuti perkembangan teknologi. Diperlukan upaya untuk meningkatkan strategi pemasaran, termasuk pemanfaatan media sosial dan teknologi digital guna mencapai audiens yang lebih luas.

Kurangnya kesadaran masyarakat lokal untuk ikut serta menjaga dan melestarikan objek wisata setempat menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Program edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian objek wisata perlu ditingkatkan agar wisatawan dapat menikmati lingkungan yang bersih dan lestari.

Disamping itu, terbatasnya fasilitas objek wisata seperti areal parkir, tempat ibadah, MCK, dan kios cinderamata/cinderaras serta keterbatasan jaringan listrik, perlu mendapatkan perhatian dalam pengembangan infrastruktur wisata. Peningkatan fasilitas ini dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan wisatawan selama berkunjung.

3.1.1.21. Kepemudaan dan Olahraga

Generasi muda memiliki peran strategis dalam membentuk masa depan daerah. Generasi muda yang terlibat aktif dalam berbagai kegiatan positif, seperti organisasi kepemudaan, pengembangan keterampilan, dan pemberdayaan,

menjadi modal berharga bagi pembangunan yang berkelanjutan. Kreativitas, semangat berinovasi, dan energi positif yang dimiliki oleh pemuda dapat menjadi kekuatan pendorong dalam menciptakan perubahan positif dalam berbagai sektor.

Olahraga juga menjadi elemen penting dalam pembangunan termasuk di Kabupaten Tanggamus. Melalui program olahraga, masyarakat dapat dinamis dan sehat, menciptakan lingkungan yang produktif dan berdaya saing. Selain manfaat kesehatan fisik, kegiatan olahraga juga dapat memupuk nilai-nilai seperti kerjasama, kejujuran dan semangat kompetisi yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun memiliki dampak positif, terdapat sejumlah permasalahan sektor kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Tanggamus yang memerlukan perhatian dan solusi. Pertama, partisipasi pemuda dalam organisasi dan kepemimpinan belum optimal. Hal ini menciptakan ketidakaktifan pemuda dalam kegiatan sosial dan pemberdayaan yang pada gilirannya dapat menghambat pengembangan potensi kepemudaan di daerah tersebut.

Selanjutnya, kenakalan remaja dan ancaman narkoba di kalangan pemuda menjadi masalah serius yang harus diatasi. Faktor-faktor ini dapat menghambat pembentukan karakter positif dan kontribusi positif pemuda terhadap masyarakat. Upaya pencegahan, pendidikan, dan pemberdayaan pemuda perlu ditingkatkan untuk mengatasi permasalahan ini.

Lalu di bidang olahraga, sarana dan prasarana olahraga sangat terbatas serta belum adanya gelanggang pemuda/remaja menjadi kendala dalam pengembangan bakat olahraga dan kesehatan pemuda. Keterbatasan fasilitas ini dapat menghambat potensi atletik dan kesehatan pemuda di Kabupaten Tanggamus. Investasi dalam pembangunan sarana olahraga, termasuk gelanggang pemuda, menjadi esensial untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan olahraga di kalangan pemuda.

Terbatasnya jumlah dan kualitas pembina dan tenaga keolahragaan menjadi hambatan lain dalam pengembangan bakat olahraga di Kabupaten Tanggamus. Diperlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para pelatih dan tenaga keolahragaan untuk memberikan dukungan yang lebih baik kepada pemuda dalam mengembangkan potensi mereka di bidang olahraga.

Diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga kepemudaan, lembaga olahraga dan masyarakat dalam menanggapi permasalahan ini. Program pemberdayaan pemuda, kegiatan anti-narkoba serta pembangunan sarana dan

prasarana olahraga perlu didukung dan diperkuat. Selain itu, peningkatan jumlah dan kualitas pelatih olahraga dapat meningkatkan potensi dan prestasi atlet muda di Kabupaten Tanggamus.

3.1.1.22. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan. Kebudayaan memiliki peran dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mempersatukan bangsa dan meningkatkan daya saing bangsa. Kebudayaan tidak hanya memperkaya kehidupan masyarakat, tetapi juga menjadi aset berharga dalam membangun daya tarik wisata, memperkuat identitas masyarakat dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Kabupaten Tanggamus memiliki kekayaan budaya yang beragam, seperti tari, musik dan seni rupa. Namun, Kabupaten Tanggamus juga menghadapi permasalahan dalam pengembangan sektor kebudayaan.

Pertama, masih rendahnya apresiasi terhadap budaya lokal Tanggamus. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai budaya dapat mengancam keberlanjutan dan pelestarian warisan budaya daerah.

Selanjutnya, promosi budaya lokal Tanggamus baik di dalam maupun di luar negeri masih kurang optimal. Upaya untuk meningkatkan eksposur budaya dapat menjadi kunci dalam memperkenalkan keunikan dan kekayaan warisan budaya kepada masyarakat lokal dan wisatawan. Diperlukan strategi promosi yang lebih efektif dan terarah untuk meningkatkan apresiasi terhadap kebudayaan lokal.

Permasalahan lainnya adalah belum terpenuhinya formasi Pamong Budaya. Keterbatasan personil dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan dapat membatasi kapasitas untuk menyelenggarakan kegiatan budaya dan melestarikan tradisi lokal. Pemenuhan formasi Pamong Budaya perlu diperhatikan agar program kebudayaan dapat dijalankan dengan lebih efektif.

3.1.1.23. Pertanian

Sebagian masyarakat di Kabupagten Tanggamus belum memahami sepenuhnya pentingnya proses sertifikasi atas tanah yang dimiliki. Hal ini menciptakan ketidakpastian terkait kepemilikan lahan dan dapat menjadi hambatan dalam pengembangan dan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan. Edukasi masyarakat mengenai manfaat dan proses sertifikasi tanah menjadi langkah yang krusial untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi pertanian.

Pada tahun 2022, persentase luas lahan yang bersertifikat di Kabupaten Tanggamus baru mencapai 68,5%. Hal ini menunjukkan perlunya percepatan

dalam proses sertifikasi guna mencapai target yang lebih tinggi. Sertifikasi lahan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah, tetapi juga mendukung pengembangan sektor pertanahan secara keseluruhan.

Masalah selanjutnya adalah ketidakadanya database pertanahan yang menjadi kendala dalam perencanaan dan pengelolaan lahan. Adanya database yang akurat dan terkini sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan terkait pertanahan, termasuk penentuan kebijakan pembangunan dan alokasi lahan yang efisien.

Optimalisasi kinerja pelayanan pertanahan juga menjadi permasalahan yang harus diperhatikan. Pelayanan yang cepat, akurat dan efisien di bidang pertanahan menjadi kunci dalam meningkatkan kepastian hukum dan mendorong investasi di sektor ini. Disamping itu, koordinasi yang belum optimal dengan pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya dapat memperlambat progres pembangunan pertanahan. Diperlukan upaya untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan guna menciptakan sinergi dalam peningkatan kinerja sektor pertanahan.

3.1.1.24. Perhubungan

Peranan bidang perhubungan memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan daerah, menjadi fondasi utama dalam membangun konektivitas dan mobilitas masyarakat. Infrastruktur perhubungan yang baik tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan aksesibilitas yang lebih baik, memperpendek jarak antarwilayah, dan meningkatkan integrasi sosial. Namun, seiring dengan manfaatnya, terdapat beberapa permasalahan yang juga perlu diatasi.

Beberapa permasalahan pembangunan bidang perhubungan di Kabupaten Tanggamus meliputi kondisi sarana dan prasarana lalu lintas yang belum optimal, pengawasan standar pelayanan transportasi yang kurang efektif, kualitas SDM yang belum memadai dalam perencanaan dan pengelolaan layanan transportasi, rendahnya kualitas pelayanan transportasi, belum terbentuknya kelembagaan pelayanan transportasi yang baik, pembangunan yang belum optimal dan merata di seluruh wilayah, terutama dalam hal fisik dan sistem manajemen transportasi, serta adanya simpul-simpul transportasi yang sulit dikembangkan karena kondisi geografis yang tidak mendukung dan penurunan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Salah satu tantangan utama adalah belum optimalnya kondisi sebagian sarana dan prasarana lalu lintas. Infrastruktur transportasi yang tidak memadai dapat

menghambat kelancaran pergerakan dan memberikan dampak negatif pada efisiensi dan keamanan transportasi. Peningkatan dan pemeliharaan sarana serta prasarana yang ada menjadi krusial untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas di seluruh kabupaten.

Pengawasan standar pelayanan transportasi juga belum mencapai tingkat optimal. Pengawasan yang kurang efektif dapat berdampak pada kualitas layanan transportasi, baik dari segi keselamatan maupun kenyamanan pengguna transportasi. Perlu ditingkatkan pengawasan dan penegakan standar pelayanan transportasi untuk memastikan kepatuhan dan kualitas layanan yang lebih baik.

Rendahnya kualitas SDM dalam perencanaan dan pengelolaan layanan transportasi menjadi hambatan serius. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang ini dapat mempengaruhi efektivitas perencanaan dan pengelolaan transportasi. Diperlukan investasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM yang berkompeten di bidang transportasi.

Belum terbentuknya kelembagaan pelayanan transportasi yang baik juga menciptakan tantangan dalam penyelenggaraan layanan transportasi yang efisien dan efektif. Pentingnya pembentukan kelembagaan yang kuat dan terkoordinasi menjadi aspek krusial untuk menciptakan sistem transportasi yang berintegrasi dan berkelanjutan.

Rendahnya kualitas pelayanan transportasi dapat menciptakan ketidakpuasan masyarakat dan berdampak negatif pada mobilitas dan konektivitas. Perlu ditingkatkan sistem layanan transportasi, termasuk penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan.

Pembangunan yang belum optimal dan merata di seluruh wilayah menciptakan kesenjangan antar daerah. Upaya perencanaan dan pengembangan transportasi perlu lebih diperhatikan untuk memastikan bahwa setiap wilayah dapat mengakses layanan transportasi dengan baik.

Terakhir, adanya simpul-simpul transportasi yang sulit dikembangkan karena kondisi geografis yang tidak mendukung dan penurunan kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi permasalahan tambahan. Perlu adanya strategi khusus untuk mengatasi kendala ini, termasuk pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan kondisi geografis dan program pemulihan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1.1.25. Komunikasi dan Informatika

Pembangunan di bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Tanggamus dihadapkan pada beberapa permasalahan yang signifikan. Kondisi geografis yang

berbukit-bukit menjadi faktor utama yang menciptakan tantangan dalam penyediaan layanan komunikasi dan informatika. Beberapa wilayah yang sulit dijangkau oleh media elektronik menciptakan kesenjangan akses informasi antarwilayah. Upaya untuk mengatasi blank spot dan meningkatkan konektivitas menjadi sangat penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi.

Cakupan Layanan Telekomunikasi pada tahun 2022 baru mencapai 70%, menciptakan ketidaksetaraan dalam akses telekomunikasi di berbagai wilayah Kabupaten Tanggamus. Peningkatan infrastruktur telekomunikasi, seperti jaringan seluler dan internet perlu diprioritaskan untuk menyamakan aksesibilitas di seluruh wilayah Kabupaten Tanggamus.

Kendala lainnya adalah belum optimalnya integrasi sistem informasi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus menciptakan hambatan dalam efisiensi administrasi dan penyelenggaraan layanan publik. Pentingnya integrasi sistem informasi menjadi krusial untuk memastikan kelancaran pertukaran data dan informasi di antara lembaga pemerintah. Disamping itu, penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi juga masih perlu diperbaiki. Pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan layanan publik dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat.

Permasalahan selanjutnya adalah cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan baru mencapai 28% pada tahun 2022. Diperlukan peningkatan investasi dan dukungan untuk mengembangkan kapasitas dan peran kelompok-kelompok informasi masyarakat sebagai agen perubahan di tingkat lokal.

3.1.1.26. Statistik

Statistik merupakan satu cara yang dapat menentukan bagaimana pembangunan daerah berjalan selama periode tertentu. Statistik bersifat konkrit dan kaku karena karakteristik daerah secara jelas dapat digambarkan melalui data-data angka. Pada era modern ini, statistika mulai mendapat tuntutan untuk bersifat terbuka dan transparan sehingga masyarakat publik dapat menilai kinerja pemerintah secara langsung. Dalam hal ini, Kabupaten Tanggamus dihadapkan pada serangkaian permasalahan dalam bidang statistik yang menghambat proses perencanaan pembangunan.

Masalah yang cukup mencolok adalah rendahnya ketersediaan dan layanan data/informasi statistik sektoral di Kabupaten Tanggamus. Hal ini dapat

menghambat efisiensi perencanaan pembangunan karena kebijakan dan keputusan yang diambil harus didasarkan pada data yang akurat dan terkini. Kurangnya sumber daya dan sistem manajemen data yang efektif dapat menjadi hambatan signifikan dalam menghadirkan informasi yang relevan dan dapat dipercaya.

Selain itu, kurang optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan dan instansi terkait menjadi tantangan serius. Proses pengumpulan data untuk perencanaan pembangunan memerlukan kerjasama yang sinergis antara berbagai pihak terkait, mulai dari pemerintah daerah, badan statistik, hingga lembaga terkait. Belum terbangunnya koordinasi yang efektif dapat mengakibatkan tumpang tindihnya upaya, duplikasi data, dan ketidakpastian dalam kualitas informasi yang dihasilkan.

Ketidakoptimalan dukungan dari seluruh Perangkat Daerah terkait dengan proses pembangunan database yang valid dan akurat juga menjadi hambatan. Perlu adanya komitmen dan partisipasi aktif dari semua instansi terkait dalam mengumpulkan, memvalidasi, dan memelihara data untuk memastikan integritas dan keakuratan informasi yang disajikan. Tanpa dukungan penuh dari seluruh Perangkat Daerah, proses pembangunan database yang akurat akan sulit tercapai.

Masalah lainnya adalah ketersediaan data yang kurang akurat bagi kepentingan perencanaan pembangunan merupakan permasalahan serius yang mempengaruhi keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Tanggamus. Keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tidak akurat dapat mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak efisien dan program pembangunan yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah mengatasi permasalahan ini seperti peningkatan investasi dalam teknologi informasi, penguatan koordinasi antar instansi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terkait statistik.

3.1.1.27. Persandian

Terdapat sejumlah permasalahan dalam bidang persandian yang menjadi hambatan bagi pengamanan informasi di Kabupaten Tanggamus. permasalahan mendasar terletak pada kurang optimalnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Kabupaten Tanggamus. Pengamanan informasi menjadi krusial dalam menghadapi ancaman siber dan potensi kebocoran data. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan penyelenggaraan sistem persandian yang sesuai

dengan standar keamanan informasi untuk melindungi data sensitif dan menjaga keamanan informasi secara menyeluruh.

Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pengamanan informasi juga menjadi tantangan serius. Infrastruktur yang kurang memadai dapat membuka celah bagi potensi ancaman keamanan informasi. Diperlukan investasi dalam teknologi, perangkat lunak, dan pelatihan tenaga kerja untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana yang mendukung persandian dapat berfungsi secara optimal dan memberikan tingkat keamanan yang memadai.

Selanjutnya, belum terlaksananya tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JIK) merupakan permasalahan lain yang perlu mendapat perhatian serius. JIK mencakup aspek-aspek penting seperti kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan/atau nirsangkal informasi. Sebuah tata kelola yang baik dalam hal ini menjadi dasar untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons potensi ancaman terhadap keamanan informasi. Diperlukan kebijakan yang jelas, prosedur operasional standar, dan penerapan teknologi persandian yang memadai.

3.1.1.28. Perpustakaan

Perpustakaan sebagai tempat berbagai buku dikumpulkan berperan penting sebagai sarana membaca dan memperoleh pengetahuan bagi masyarakat di luar lembaga formal. Di Kabupaten Tanggamus baru terdapat 1 unit Perpustakaan daerah, yang mengakibatkan rendahnya minat baca dan jumlah pengunjung perpustakaan.

Permasalahan lainnya adalah keterbatasan koleksi di perpustakaan daerah menjadi hal yang perlu segera diatasi. Koleksi yang terbatas dapat membatasi akses pengetahuan masyarakat dan SKPD, sehingga perlu ditingkatkan dengan pengadaan bahan pustaka yang beragam dan relevan. Peningkatan ini akan mendukung keberagaman informasi dan pengetahuan yang dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat.

Selanjutnya, terbatasnya tenaga fungsional seperti pustakawan dan arsiparis dapat memengaruhi kualitas pelayanan. Diperlukan peningkatan jumlah dan kualifikasi tenaga fungsional untuk memastikan pengelolaan koleksi perpustakaan yang efektif, serta pembinaan dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dan SKPD. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mendukung peningkatan fungsi dan manfaat perpustakaan sebagai pusat informasi.

Disamping itu, Pelaksanaan perpustakaan keliling, yang merupakan inisiatif positif untuk meningkatkan aksesibilitas layanan perpustakaan, juga menghadapi kendala dalam mencapai seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten

Tanggamus. Perlu ditingkatkan infrastruktur dan dukungan logistik agar perpustakaan keliling dapat mencakup lebih banyak lokasi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat di seluruh Kabupaten Tanggamus.

3.1.1.29. Kearsipan

Pengelolaan arsip memiliki peran krusial dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi administrasi pemerintahan. Meskipun demikian, terdapat sejumlah permasalahan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan arsip di Kabupaten Tanggamus. Pada tahun 2022, hanya 40% Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pencarian informasi yang cepat, pemeliharaan data yang akurat, serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar yang berlaku. Perlu adanya langkah-langkah konkret untuk meningkatkan persentase ini melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan penerapan sistem manajemen arsip yang terstandarisasi.

Selain itu, kurangnya pemahaman dan kesadaran aparatur mengenai pentingnya pengelolaan arsip menjadi tantangan serius. Pemahaman yang kurang dapat mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap prosedur pengelolaan arsip, penanganan yang tidak benar terhadap dokumen, serta risiko hilangnya informasi penting. Edukasi dan sosialisasi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran aparatur akan nilai dan manfaat pengelolaan arsip dalam mendukung efisiensi dan akuntabilitas pelayanan publik.

3.1.1.30. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kabupaten Tanggamus memiliki potensi sumber daya energi dan sumber daya mineral yang dapat menjadi pilar utama dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Berbagai potensi tersebut mencakup energi terbarukan, sumber daya alam dan mineral yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Meskipun Kabupaten Tanggamus kaya akan potensi sumber daya energi dan sumber daya mineral, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi pembangunan sektor ini.

Salah satu tantangan yang dihadapi adalah fakta bahwa Infrastruktur kelistrikan di daerah terisolir atau terpencil juga masih menjadi kendala. Ketersediaan dan keterjangkauan listrik di daerah tersebut perlu diperbaiki untuk memastikan masyarakat di sana mendapatkan akses yang memadai. Saat ini persentase rumah tangga yang telah terhubung dengan listrik baru mencapai 96,78%, meninggalkan sebagian masyarakat yang masih belum terjangkau oleh layanan

listrik. Hal ini menciptakan ketidakmerataan akses energi di seantero Kabupaten Tanggamus.

Pemanfaatan potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) juga belum optimal. Sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidrolik masih perlu ditingkatkan agar dapat mendukung diversifikasi energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Sementara itu, potensi sumber daya mineral seperti batu bara, pasir silika, dan batuan fosfat masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Pentingnya pengelolaan yang efisien untuk mendukung sektor konstruksi, pertanian, dan infrastruktur perlu menjadi perhatian lebih lanjut.

Kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pelestarian kawasan energi dan sumber daya mineral juga masih perlu ditingkatkan. Pendidikan dan sosialisasi akan dampak dari ekstraksi sumber daya alam perlu menjadi prioritas untuk membangun pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat. Kehadiran kegiatan pertambangan rakyat yang belum berizin atau penambangan liar menjadi permasalahan serius yang harus diatasi. Perlu adanya penegakan hukum dan pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah dampak negatif dari aktivitas pertambangan ilegal.

Selanjutnya, pemanfaatan sumber daya alam yang belum berwawasan lingkungan menjadi perhatian penting. Diperlukan kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung pembangunan yang ramah lingkungan.

3.1.1.31. Transmigrasi

Program transmigrasi memiliki peran penting dalam mendukung redistribusi penduduk dan pengembangan wilayah di Kabupaten Tanggamus. Transmigrasi juga berperan dalam mengakselerasi pengembangan daerah dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan alam. Namun, program ini dihadapkan pada sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian dan solusi. Minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi dengan semangat memperbaiki kehidupan ekonomi masih relatif rendah menjadi permasalahan utama. Pemahaman masyarakat tentang manfaat dan peluang yang dapat diperoleh melalui program transmigrasi perlu ditingkatkan. Sosialisasi yang intensif, pendekatan partisipatif, dan penekanan pada keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan di lokasi transmigrasi dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berpartisipasi.

Selain itu, kendala terkait kuota transmigran di daerah tujuan transmigrasi menjadi tantangan serius. Terdapat keterbatasan dalam jumlah kuota yang tersedia, sehingga ketika calon transmigran mencapai kuota yang ditetapkan, peluang untuk terlibat dalam program tersebut menjadi terbatas. Perlu adanya koordinasi antara pemerintah daerah, pusat, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan adanya kuota yang memadai, sejalan dengan minat dan kebutuhan masyarakat. Terbatasnya sarana dan prasarana permukiman serta sarana pendukung di lokasi transmigrasi juga menjadi permasalahan serius. Infrastruktur yang tidak memadai dapat menghambat adaptasi dan keberlanjutan transmigran di tempat baru. Oleh karena itu, diperlukan investasi dalam pengembangan infrastruktur permukiman, transportasi, pendidikan, dan kesehatan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan transmigran.

Peningkatan sosialisasi dan informasi kepada masyarakat tentang manfaat program transmigrasi, perluasan kuota yang sesuai dengan kebutuhan serta peningkatan investasi dalam infrastruktur di lokasi transmigrasi adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program transmigrasi, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan mendukung pengembangan wilayah Kabupaten Tanggamus secara holistik.

3.1.1.32. Perencanaan

Perencanaan merupakan landasan utama dalam mengarahkan dan bertindak sebagai pilar fundamental pembangunan daerah yang mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai visi pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan menjadi arsitek pembangunan dengan merancang infrastruktur yang terarah dan berdaya guna. Bukan hanya sekadar perhitungan matematis, tetapi sebuah pandangan holistik yang mengelola sumber daya secara efisien dan efektif. Dengan mengintegrasikan berbagai aspek, perencanaan membantu membentuk arah pembangunan yang sejalan dengan kebutuhan dan potensi daerah. Dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tanggamus, terdapat beberapa permasalahan yang perlu diatasi guna memaksimalkan kontribusinya dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan efektif. Permasalahan pertama adalah ketidaksinergian antar perangkat daerah dalam mengoptimalkan dokumen perencanaan. Yang mana koordinasi dan kolaborasi antar perangkat daerah adalah kunci untuk menciptakan sinergi dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan. Diperlukan mekanisme yang lebih efektif dan terstruktur untuk memastikan bahwa setiap perangkat daerah memiliki

pemahaman yang sama mengenai tujuan, prioritas, dan strategi pembangunan daerah.

Permasalahan kedua adalah belum optimalnya data yang harus dikelola oleh masing-masing perangkat daerah. Data yang akurat dan terkini sangat penting untuk menyusun perencanaan pembangunan yang efektif. Diperlukan upaya meningkatkan manajemen data, termasuk pengumpulan, pengolahan dan analisis data guna memberikan informasi yang handal bagi proses perencanaan. Kerjasama yang erat antara instansi statistik dan perangkat daerah lainnya adalah kunci untuk memastikan ketersediaan data yang berkualitas.

3.1.1.33. Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif bukan hanya sekadar aspek teknis, melainkan tulang punggung yang menopang setiap keputusan dan langkah-langkah strategis. Pada hakikatnya, keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada bagaimana keuangan daerah dielola dan dioptimalkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Namun, di balik pentingnya peran ini, terdapat sejumlah kendala dan tantangan yang cukup berat, menuntut pemikiran strategis dan tindakan yang bijaksana. Ketergantungan daerah terhadap sumber pendapatan dari Dana Perimbangan masih menjadi tantangan utama. Meskipun dana ini memberikan stabilitas keuangan bagi daerah, namun keberlanjutan pembangunan daerah haruslah dibarengi dengan peningkatan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hingga kini, PAD belum mencapai optimalitasnya sebagai sumber pendanaan pembangunan, memberikan gambaran bahwa diversifikasi sumber pendapatan menjadi penting untuk keberlanjutan dan kemandirian keuangan daerah. Meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah tidak hanya akan meningkatkan kemandirian finansial, tetapi juga menciptakan ketahanan ekonomi daerah terhadap fluktuasi eksternal.

Permasalahan kedua terletak pada kapasitas aparatur yang terbatas dalam pengelolaan keuangan. Penguasaan terhadap prinsip-prinsip manajemen keuangan yang baik menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan keuangan daerah. Diperlukan investasi dalam peningkatan kapasitas dan pelatihan agar setiap tahapan pengelolaan keuangan dapat dijalankan secara profesional dan efisien.

Selanjutnya, ditetapkannya uang persediaan dalam jumlah terbatas menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan kegiatan. Terutama pada awal tahun anggaran, ketika sejumlah kegiatan direncanakan dan diharapkan dapat terlaksana sesuai time schedule yang telah ditetapkan. Dalam kondisi ini, terdapat risiko bahwa beberapa kegiatan harus tertunda atau tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana, menghambat kemajuan dan efektivitas penggunaan anggaran.

3.1.1.34.Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Dalam lanskap administrasi publik Kabupaten Tanggamus, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kualitas kepegawaian dan sistem pendidikan serta pelatihan yang diterapkan. Meskipun terdapat langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan standar profesionalisme dan pengembangan karir aparatur sipil negara (ASN), namun beberapa permasalahan masih menjadi hambatan yang berarti.

Tercatat bahwa nilai profesionalitas ASN di Kabupaten Tanggamus masih mencapai angka 54,23 dan nilai Merit System berada pada angka 173,5. Angka ini mencerminkan tantangan dalam meningkatkan kualitas dan etos kerja ASN di daerah ini. Perlu dilakukan evaluasi mendalam untuk mengidentifikasi area-area di mana perbaikan dapat diterapkan guna meningkatkan profesionalisme dan memastikan seleksi berdasarkan prestasi.

Selain itu, masalah utama terletak pada belum optimalnya pola pengembangan dan pembinaan karir, terutama dalam hal diklat dan peningkatan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Terbatasnya sumber daya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi kendala utama dalam menyelenggarakan program pelatihan yang memadai. Diperlukan solusi kreatif dan pemikiran strategis untuk memastikan bahwa ASN memiliki kesempatan dan akses ke pelatihan yang diperlukan. Sementara itu, manajemen informasi sistem kepegawaian di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga menjadi area yang belum optimal. Sistem informasi kepegawaian yang efektif sangat penting untuk memastikan data pegawai terkelola dengan baik, dan informasi dapat diakses dengan cepat dan akurat. Peningkatan pada infrastruktur teknologi informasi dan perbaikan manajemen data perlu menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional kepegawaian.

Permasalahan yang tidak kalah penting adalah kurangnya sumber daya aparatur yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Kesenjangan ini dapat menciptakan ketidakcocokan antara kebutuhan organisasi dengan kapasitas

aparatur yang ada. Perlu dilakukan analisis kebutuhan dan perencanaan sumber daya manusia yang matang untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas ASN dapat memenuhi tuntutan organisasi.

3.1.1.35. Penelitian dan Pengembangan

Peranan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) menjadi pilar utama yang membimbing langkah-langkah menuju pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Tanggamus. Litbang bukan hanya sekadar proses analisis dan penelitian, melainkan sebuah motor yang menggerakkan inovasi, meningkatkan kapasitas dan merumuskan kebijakan. Peran Litbang di Kabupaten Tanggamus terwujud dalam kontribusinya yang signifikan dalam perumusan kebijakan pembangunan. Melalui kegiatan penelitian yang dilakukan, litbang menjadi referensi yang mendasari kebijakan-kebijakan yang diterapkan di daerah. Tak hanya terbatas pada aspek kebijakan, litbang di Kabupaten Tanggamus juga menggalakkan semangat inovasi di berbagai sektor. SKPD dan pemangku kepentingan lainnya didorong untuk mengadopsi pendekatan baru dan teknologi guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas layanan publik. Inovasi bukan sekadar konsep, melainkan sebuah tindakan nyata yang menggerakkan roda pembangunan.

Meski begitu, terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian guna memaksimalkan kontribusi litbang dalam mendorong pembangunan daerah. Diantara permasalahan yang muncul adalah belum optimalnya peran litbang dalam perumusan kebijakan pembangunan. Koordinasi yang kurang efektif dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait menjadi kendala utama. Diperlukan sinergi yang lebih kuat antara litbang dan SKPD agar hasil penelitian dapat secara langsung memberikan masukan yang substansial dalam perumusan kebijakan. Kerjasama yang lebih erat akan membuka peluang untuk menyinkronkan visi pembangunan dengan temuan dan rekomendasi hasil litbang.

Masalah selanjutnya adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang litbang masih belum optimal. Optimalisasi SDM kelitbang, baik dari segi kuantitas, kapasitas maupun kualitas merupakan hal yang penting. Pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi personel litbang perlu ditingkatkan agar dapat menghadirkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dalam mendukung agenda pembangunan daerah.

3.2. Isu Strategis

3.2.1. Isu Strategis Global

3.2.1.1. Megatren Global

Tantangan global yang kita hadapi semakin kompleks, seiring dengan laju perubahan yang sangat cepat di beragam bidang, yang sering disebut sebagai "megatren global". Perubahan global ini tidak hanya melibatkan transformasi besar yang memengaruhi banyak aspek kehidupan, tetapi juga berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dan bersifat sangat mendalam, terutama karena terdorong oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi yang telah mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan berinovasi di dunia saat ini.

Terdapat 10 megatren global yang akan dihadapi dunia dalam 10 tahun dan 25 tahun kedepan. Megatren tersebut, yakni demografi global, geopolitik dan geoekonomi, disrupsi teknologi, urbanisasi dunia, perdagangan dunia, keuangan global, kelas menengah, sumber daya alam, perubahan iklim, dan pemanfaatan ruang angkasa.

Gambar 3.1. Megatren Global 2045



Sumber : Kementerian PPN/Bappenas, 2022 (diolah)

1. Demografi Global dan Bonus Demografi

Demografi global memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan ekonomi dan sosial, yang menciptakan tantangan dalam meningkatkan standar hidup masyarakat sementara sumber daya semakin terbatas. Pada tahun 2045, Indonesia akan memasuki periode bonus demografi, di mana potensi tenaga kerja produktif akan mencapai tingkat yang tinggi. Menurut publikasi BPS dalam buku

Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Lampung 2020-2035, proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Tanggamus pada tahun 2035 akan mencapai 745.530 jiwa. Komposisi penduduk angkatan kerja (usia 15-64 tahun) mencapai 66,84% dari jumlah penduduk dengan rasio ketergantungan sebesar 49,62% pada tahun 2035. Tingginya jumlah penduduk usia muda memberikan tantangan pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan (Bappenas, 2023). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, jaminan sosial (kesehatan dan pendidikan), peluang lapangan kerja bagi generasi muda.

2. Geopolitik dan Geoekonomi

Salah satu target pembangunan Indonesia 2045 adalah lepas dari negara *middle income trap* menjadi bagian negara maju yang berdaya saing global. Dinamika geopolitik berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi negara dan regional salah satunya dinamika daya tarik investasi dan perdagangan global-nasional-regional. Selain itu kerja sama antar negara dan institusi global tentunya akan mendorong akselerasi ekonomi negara berkembang dalam hal pendanaan komitmen global. Berbagai potensi tersebut menjadi tantangan bagi perencanaan pembangunan Kabupaten Tanggamus dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Tanggamus dipengaruhi secara signifikan oleh dinamika geopolitik dan geoekonomi yang memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Di tingkat geopolitik, hubungan internasional yang berkembang dapat mempengaruhi stabilitas dan akses ke pasar internasional.

Di sisi lain, faktor geoekonomi juga berperan penting. Kabupaten Tanggamus harus mampu mengelola kekayaan alam, sumber daya manusia, dan kemampuan untuk bersaing di pasar global. Pengembangan sektor-sektor yang sesuai dengan keunggulan komparatif dan investasi dalam infrastruktur serta inovasi teknologi akan menjadi kunci untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Selain itu *Asean Free Trade Area* (AFTA) juga berpengaruh pada dinamika ekonomi dan perdagangan Kabupaten Tanggamus. Dengan terbukanya pasar bebas di kawasan ASEAN, maka aliran perdagangan barang dan jasa, investasi, dan perpindahan tenaga kerja antar negara ASEAN tak ada lagi hambatannya. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan sektor ekspor lokal, seperti pertanian, perikanan, dan manufaktur. Dengan meningkatnya permintaan untuk produk-produk lokal, sektor-sektor ini akan berkembang, menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat Kabupaten Tanggamus.

3. Perkembangan Teknologi

Disrupsi teknologi merupakan suatu perubahan teknologi yang signifikan dan berpengaruh pada perilaku masyarakat, pasar, industri, dan aspek lainnya.

Disrupsi teknologi seringkali diidentifikasi melalui inovasi-inovasi yang meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya dan operasional. Agar dapat mengatasi dampak dari perkembangan teknologi, masyarakat perlu siap dalam mengadopsi teknologi ini secara efektif, sekaligus mengurangi risiko yang terkait dengan disrupsi teknologi.

Perkembangan teknologi seperti Internet of Things (IOT), Kecerdasan Buatan (AI), rekayasa genetik, nanotechnology, dan lain sebagainya akan mempengaruhi sektor manufaktur, perkembangan pendidikan-kesehatan, dan berbagai sektor lainnya. Selain itu, teknologi membuka peluang baru pembangunan ekonomi, mendorong inovasi, dan transformasi tata kelola kinerja pelayanan publik (Bappenas, 2023).

4. Krisis Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon

Kelangkaan sumber daya alam, terutama energi, air, dan pangan, menjadi tantangan yang mendasar dalam memenuhi kebutuhan manusia di masa depan. Kelangkaan ini tidak hanya merupakan akibat dari peningkatan permintaan global, tetapi juga dipengaruhi oleh tiga krisis global yang berdampak luas, dikenal sebagai "*The Triple Planetary Crisis*," yaitu perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan, kerusakan lingkungan dan kehilangan keanekaragaman hayati yang mengancam ekosistem.

Krisis global tersebut menjadi urgensi untuk mengarahkan praktik pembangunan yang berkelanjutan dan sirkular, seperti menerapkan ekonomi berwawasan lingkungan dan mengadopsi pembangunan rendah karbon. Dalam kesepakatan Paris Agreement tahun 2015, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebanyak 29% secara mandiri pada tahun 2030 dan hingga 41% dengan dukungan internasional. Kajian Bappenas tahun 2019 menunjukkan Indonesia memiliki potensi untuk mencapai penurunan emisi GRK sebesar 43% pada tahun 2030.

Pencapaian yang baik ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui langkah-langkah strategis. Langkah-langkah tersebut mencakup: (1) mendorong peralihan ke sumber energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan pada batu bara; (2) meningkatkan efisiensi penggunaan energi; (3) menerapkan moratorium yang ketat terhadap deforestasi, perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pemanfaatan lahan gambut; (4) mematuhi komitmen konservasi sumber daya air, perikanan, dan keanekaragaman hayati; serta (5) meningkatkan produktivitas penggunaan lahan.

Oleh karena itu, dalam konteks perencanaan pembangunan di Kabupaten Tanggamus, sangat penting untuk menjadikan ekonomi berwawasan lingkungan dan pembangunan rendah karbon.

Permasalahan pembangunan daerah adalah hasil dari analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian atau ketidakberhasilan pelaksanaan proyek pembangunan. Penentuan masalah ini dilakukan dengan membandingkan kinerja pembangunan yang sudah tercapai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Pengidentifikasian permasalahan pembangunan mencakup semua bidang pelayanan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam tabel di bawah ini, kami menunjukkan permasalahan pembangunan di Kabupaten Tanggamus berdasarkan aspek dan sektor pelayanan pemerintah daerah.

3.2.1.2. Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan pembangunan dalam Millennium Development Goals (MDGs) sebagai agenda pembangunan global tidak berhenti pada tahun 2015. Agenda untuk melanjutkan MDGs dikembangkan dalam konsep Sustainable Development Goals (SDGs). Perbedaan utama antara MDGs dan SDGs adalah penekanan yang lebih besar pada isu lingkungan global dalam SDGs, hasil evaluasi terhadap perubahan selama 15 tahun pelaksanaan MDGs.

Konsep SDGs diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi perubahan pasca 2015-MDGs, terutama terkait isu deplesi sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim yang semakin krusial, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, serta pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin. Tiga pilar yang menjadi indikator dalam pengembangan SDGs adalah: (1) indikator pembangunan manusia, seperti pendidikan dan kesehatan; (2) indikator pembangunan sosial-ekonomi, seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonomi; dan (3) indikator pembangunan lingkungan, seperti ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik.

Dalam penyusunan indikator SDGs, selain memikirkan standar global untuk pembangunan berkelanjutan, juga harus memastikan segala sesuatunya terukur dan sesuai prinsip Environmental Sustainability, Economic Sustainability, dan Social Sustainability. Secara global, terdapat 17 tujuan (Goals) yang harus dicapai hingga tahun 2030 yang meliputi:

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) mencakup 17 tujuan yang harus dicapai hingga 2030:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun.

2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan.
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjangkau, berkelanjutan, dan modern bagi semua orang.
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif, dan berkelanjutan serta kesempatan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta membina inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar negara.
11. Menjadikan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan mendesak untuk mengurangi dampak perubahan iklim.
14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan, serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memperbaiki, serta mendorong penggunaan ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses yang sama bagi semua orang, serta membangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Memperkuat cara-cara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Dalam implementasi SDGs, Indonesia mengembangkan 319 indikator dan 169 target untuk mencapai 17 tujuan tersebut. Upaya pencapaian 319 indikator ini dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah

Kabupaten/Kota sesuai dengan pembagian wewenang yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dari 319 indikator SDGs, Pemerintah Pusat bertanggung jawab atas 303 indikator, sementara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota masing-masing memiliki wewenang untuk mencapai 235, 220, dan 222 indikator.

Capaian indikator TPB Kabupaten Tanggamus dilakukan dengan mengacu pada metadata edisi I yang diterbitkan oleh BAPPENAS. Berdasarkan buku metadata edisi I, total indikator yang akan digunakan berjumlah 220 indikator. KLHS RPJPD pada wilayah Kabupaten Tanggamus menggunakan 220 indikator TPB, dan penilaian pencapaian indikator TPB di Kabupaten Tanggamus dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja indikator pada rentang waktu 2016-2022 dengan target nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Pencapaian indikator TPB terbagi dalam empat kategori yaitu:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS).
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB).
3. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data (NA).
4. Indikator TPB yang di luar wilayah kajian (LW).

Tabel 3.2 Capaian Indikator TPB Kab. Tanggamus Berdasarkan Metadata I

TPB	Tercapai (SS)	Belum Tercapai (SB)	Tidak ada Data (NA)	Diluar Wilayah (LW)	Jumlah Indikator
1	7	6	11	0	24
2	5	1	5	0	11
3	14	10	8	2	34
4	3	4	6	0	13
5	0	0	13	1	14
6	2	2	14	0	18
7	0	0	2	0	2
8	7	3	9	0	19
9	3	3	4	3	13
10	2	3	6	0	11
11	1	4	4	4	13
12	0	1	4	0	5
13	1	1	0	0	2
14	0	0	0	0	0
15	0	0	4	0	4
16	5	0	16	0	21
17	5	2	8	1	16
Jumlah	55	40	114	11	220
Persentase	25,00%	18,18%	51,82%	5,00%	100,00%

Sumber: KLHS RPJPD Kabupaten Tanggamus 2025-2045

Berdasarkan hasil perhitungan, Pemerintah Kabupaten Tanggamus memiliki 220 indikator TPB yang menjadi kewenangannya. Dari jumlah tersebut, indikator yang telah dilaksanakan dan mencapai target (SS) sebanyak 55 indikator atau 25,00%.

Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB) sebanyak 40 indikator atau 18,18%. Sedangkan indikator yang tidak ada atau belum ada data (NA) mencapai 114 indikator atau 51,82%. Sementara itu, indikator yang berada di luar wilayah kajian (LW) berjumlah 11 indikator atau 5,00%. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas indikator masih membutuhkan perhatian lebih lanjut, terutama yang belum ada data atau berada di luar wilayah kajian, untuk memastikan tercapainya target TPB di Kabupaten Tanggamus.

3.2.2. Isu Strategis RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

Isu-isu strategis regional yang tersaji di dalam dokumen rancangan RPJPD Provinsi Lampung 2025-2045 dijabarkan sebagai berikut :

- **Isu Strategis 1** : Jumlah Penduduk Lampung Tahun 2045 diproyeksikan mencapai 11,076 juta jiwa. (Bonus demografi)
- **Isu Strategis 2** : Letak Geografis Lampung menjadi peluang sekaligus tantangan.
- **Isu Strategis 3** : Ekonomi Biru dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Laut dan Pesisir.
- **Isu Strategis 4** : Potensi Sumber Daya Alam untuk Mendukung Kemandirian Energi.
- **Isu Strategis 5** : Lampung Wilayah Rawan Gempa, Tsunami, dan Gunung Berapi. Lampung Utara rawan banjir, kekeringan, dan gempa.
- **Isu Strategis 6** : Produktivitas Komoditas Unggulan Relatif Belum Berkembang.
- **Isu Strategis 7** : Peran Industri dalam Perekonomian Daerah masih Stagnan.
- **Isu Strategis 8** : Produktivitas Sektor Industri (Nilai TFP).
- **Isu Strategis 9** : Ekonomi Digital, Ekonomi Syariah, Pertanian, dan Perdagangan sebagai Pendorong Ekonomi Daerah (Nilai TFP).
- **Isu Strategis 10** : Ekonomi Sirkular.
- **Isu Strategis 11** : Peran IPTEK dan Inovasi.
- **Isu Strategis 12** : Stabilitas Trantibmas dalam Kemajemukan.
- **Isu Strategis 13** : Pelestarian Nilai Religi, Budaya, dan Nasionalisme sebagai Modal Sosial Pembangunan.
- **Isu Strategis 14** : Perubahan Iklim dan Perdagangan Karbon.
- **Isu Strategis 15** : Tata Kelola Pemerintahan - ASN Berintegritas.
- **Isu Strategis 16** : Tata Kelola Satu Data dan Satu Peta.

3.2.3. Isu Strategis KLHS RPJPD Kabupaten Tanggamus 2025-2045

Dari hasil uji silang antara isu pembangunan berkelanjutan (PB) dengan enam muatan lingkungan hidup (LH), teridentifikasi 13 isu muatan LH yang memiliki pengaruh signifikan. Isu-isu tersebut antara lain:

1. Masih tingginya laju kerusakan penutupan lahan;
2. Pencemaran lingkungan akibat limbah rumah tangga dan industri serta infrastruktur pengelolaan sampah yang belum optimal;
3. Produktivitas pertanian yang perlu ditingkatkan dengan memanfaatkan potensi LP2B dan sistem pertanian berkelanjutan;
4. Alih fungsi lahan hutan yang tinggi dan dampaknya terhadap potensi bencana alam;
5. Mitigasi perubahan iklim yang belum optimal dan dampaknya terhadap ekosistem darat dan pesisir;
6. Konservasi tanah dan air yang masih kurang menjadi prioritas kebijakan;
7. Pencemaran tingkat tinggi di wilayah pesisir akibat aktivitas pertambangan dan transportasi laut;
8. Praktik illegal fishing yang masih tinggi di wilayah perairan Tanggamus;
9. Dukungan yang belum optimal dari pemerintah daerah terhadap program perhutanan sosial;
10. Menurunnya keanekaragaman hayati akibat alih fungsi lahan dan rendahnya kesadaran masyarakat serta penegakan hukum kejahatan kehutanan;
11. Konflik yang sering terjadi antara satwa kunci (HBG) dengan manusia;
12. Tidak terintegrasi nya pengelolaan DAS Terpadu terkait dengan pembayaran jasa lingkungan dan kelembagaan antara kabupaten/kota di hulu dan hilir;
13. Rencana pembangunan jalan tol yang berdampak terhadap lingkungan dan ekonomi.

Isu capaian tujuan pembangunan berkelanjutan pada Konsultasi Publik/Uji Publik I Kabupaten Tanggamus mencakup tujuh isu yang dihasilkan dari analisis capaian TPB dalam kategori sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB). Isu-isu tersebut meliputi:

1. Tingkat kemiskinan yang masih tinggi di Kabupaten Tanggamus.
2. Persoalan kelaparan dan gizi buruk yang menyebabkan stunting.
3. Belum tercapainya target pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah.
4. Kurangnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang layak.

5. Kurangnya lapangan kerja yang berdampak pada tingginya tingkat pengangguran dan menurunnya pendapatan daerah.
6. Masalah permukiman yang masih menghadapi tantangan signifikan, termasuk desa-desa yang tertinggal.
7. Perlunya peningkatan dan perbaikan perekonomian untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

3.2.4. Isu Strategis RPJPD Kabupaten Tanggamus 2025-2045

Isu Strategis 1

Jumlah Penduduk Tanggamus 2045 diproyeksikan mencapai 768.256 jiwa

Proyeksi penduduk Kabupaten Tanggamus pada tahun 2045 diperkirakan akan mencapai sekitar 768.256 jiwa, yang akan meningkatkan kebutuhan akan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan. Diperhitungkan bahwa kebutuhan perumahan akan mencapai 153.651 unit, dengan asumsi setiap rumah dihuni oleh 5 orang, sehingga diperlukan sekitar 21 ribu unit rumah hunian baru. Peningkatan jumlah penduduk ini juga akan meningkatkan kebutuhan akan listrik, air bersih, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Penting untuk memastikan bahwa pembangunan perumahan baru tidak mengorbankan lahan pertanian, guna menjaga kondisi lingkungan dan ketahanan pangan. Alih fungsi lahan harus dikelola dengan cermat untuk mencegah degradasi lingkungan dan mempertahankan produktivitas pertanian yang vital bagi keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanggamus.

Data proyeksi menunjukkan Tanggamus berpotensi menikmati bonus demografi pada rentang waktu 2025-2035, dengan peningkatan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun). Fase bonus demografi ini diperkirakan berlangsung hingga 2040. Untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan persiapan lapangan kerja yang memadai bagi angkatan kerja yang terus bertambah serta peningkatan produktivitas melalui pelatihan keterampilan yang memadai.

Selain itu, jumlah penduduk lansia di Tanggamus diprediksi meningkat dari 4,13% pada 2025 menjadi 4,52% pada 2045. Peningkatan ini memerlukan antisipasi dengan program pelayanan khusus di bidang kesehatan untuk mengatasi tingginya risiko penyakit pada kelompok ini, serta bantuan sosial dan perlindungan untuk memastikan kesejahteraan mereka. Dengan strategi yang tepat, Kabupaten Tanggamus dapat memanfaatkan bonus demografi dan menghadapi tantangan demografis di masa depan dengan lebih baik.

Isu Strategis 2

Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Masih Perlu di Tingkatkan

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal penting dalam meraih visi Indonesia Emas 2045. Pada tahun 2022 Kabupaten Tanggamus memiliki kuantitas penduduk usia produktif yang mendominasi struktur penduduk Kabupaten Tanggamus. Kuantitas penduduk usia produktif harus didukung juga dengan kualitas sumber daya manusia yang baik dan dimulai dari sedini mungkin. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia didukung oleh berbagai macam aspek yang saling berkaitan, yaitu kesejahteraan sosial, kesehatan masyarakat dan pendidikan. Saat ini sumber daya manusia masih menjadi isu yang perlu pengoptimalan dari banyak aspek pendukungnya. Salah satu indikator untuk mengukur ketercapaian kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tanggamus adalah melalui angka indeks pembangunan manusia (IPM). IPM di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 masih berada di bawah capaian provinsi maupun nasional, bahkan menempati peringkat kelima terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung.

Kabupaten Tanggamus masih menghadapi isu-isu kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh kualitas dan partisipasi pendidikan yang belum optimal, derajat kesehatan yang masih rendah, serta perlindungan sosial yang masih belum optimal. Oleh karena itu, upaya pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Tanggamus tidak hanya terfokus pada peningkatan kualitas dan kuantitasnya, namun harus juga memperhatikan upaya untuk menyebarluaskan manfaatnya secara merata, mengatasi disparitas dalam akses pendidikan serta meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat. Dengan cara ini, sumber daya manusia akan mampu memberikan kontribusi maksimal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

a. Kualitas dan Partisipasi Pendidikan Belum Optimal

Pendidikan yang unggul, disertai dengan keterlibatan maksimal dalam proses pendidikan, memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui sistem pendidikan yang efisien dan efektif, masyarakat di Kabupaten Tanggamus diharapkan dapat mengakses peluang pekerjaan yang lebih baik. Evaluasi kualitas pendidikan ini mencakup sejumlah aspek, seperti fasilitas pendidikan, infrastruktur, kualifikasi tenaga pendukung, dan tingkat partisipasi dalam pendidikan.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Tanggamus di tahun 2022 adalah 7,35 tahun, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk hanya menempuh pendidikan hingga tingkat menengah (SMP) dan bahkan belum

mencapai standar wajib belajar selama 9 tahun. Oleh karena itu, perlu adanya dorongan untuk meningkatkan rata-rata lama masa sekolah hingga setidaknya 12 tahun atau bahkan lebih, agar lebih banyak masyarakat memiliki kesempatan untuk mengejar pendidikan tinggi.

Selain itu, aspek ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pendidikan juga belum mencapai tingkat optimal. Hal ini tercermin pada masih tingginya angka putus sekolah, kualifikasi yang belum memadai dari tenaga pendidik dan pendukung pendidikan, serta kualitas bangunan sekolah yang belum memadai. Kualitas tenaga pendidik dan kondisi fisik sekolah memiliki dampak signifikan terhadap pengalaman belajar siswa dan motivasinya untuk mengejar pendidikan lebih tinggi.

Oleh karena itu, Motivasi dari murid juga harus ditingkatkan agar melanjutkan pendidikan. Untuk mendorong motivasi anak, peranan orang tua untuk mendukung pendidikan anak juga menjadi penting.

Strategi untuk meningkatkan partisipasi sekolah di Kabupaten Tanggamus melalui Program SBS (Semua Bisa Sekolah) yang dirancang untuk menjawab tantangan angka putus sekolah yang masih tinggi di 302 pekon/kelurahan, terutama di kalangan usia produktif (18-35 tahun). Program ini bertujuan untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Tanggamus dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta memastikan bahwa semua warga, tanpa memandang usia, memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan formal.

Dengan menurunkan angka putus sekolah dan menuntaskan masalah pendidikan pada usia produktif yang terkendala oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan masalah biaya. Dengan fokus pada kelompok usia 18-35 tahun yang belum menamatkan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA, program ini bertujuan untuk memberikan mereka akses ke pendidikan setara yang layak. Melalui inovasi Program SBS, diharapkan terjadi peningkatan partisipasi sekolah, yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan IPM di Kabupaten Tanggamus.

b. Derajat Kesehatan Masyarakat Masih Rendah

Modal manusia lainnya untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia adalah kesehatan. Namun, kesehatan di Kabupaten Tanggamus masih menghadapi masalah diantaranya kematian bayi dan ibu, permasalahan gizi buruk dan stunting, penyakit menular dan tidak menular, serta akses dan pelayanan fasilitas kesehatan. Melalui perbaikan kesehatan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja, termasuk pada masyarakat miskin.

Penyebab kematian bayi didominasi oleh BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) yaitu berat bayi kurang dari 2,5 kilogram dan asfiksia (gangguan dalam pengangkutan oksigen (O₂) ke jaringan tubuh) pada bayi usia 0 – 28 hari (neonatal), sedangkan kematian bayi usia 29 hari – 11 bulan (post neonatal) didominasi oleh penyebab lain, kelainan saluran cerna dan diare. Sementara itu, pada tahun 2022 terjadi 11 kasus kematian ibu maternal yang masing-masing disebabkan oleh perdarahan, hipertensi dan lain-lain. Kasus stunting dan balita gizi buruk masih cukup tinggi di Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, faktor penyebab kasus stunting & balita gizi buruk adalah pola hidup dan pola asuh bayi dalam keluarga.

Pencegahan dan penanganan masalah-masalah yang telah disebutkan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan masih belum maksimal. Oleh karena itu, akses terhadap fasilitas dan pelayanan kesehatan perlu menjadi prioritas. Tidak hanya akses terhadap rumah sakit, tetapi juga akses terhadap pelayanan kesehatan di tingkat yang lebih rendah seperti puskesmas, puskesmas pembantu, ataupun klinik. Seiring bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan tenaga kesehatan (dokter umum dan spesialis, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kefarmasian, dan lainnya) juga semakin meningkat. Hal tersebut perlu menjadi perhatian lantaran kekurangan sumber daya tenaga kesehatan dapat meningkatkan beban kerja dan mempengaruhi kualitas pelayanan.

c. Perlindungan Sosial Belum Optimal

Perlindungan sosial merupakan aspek yang krusial dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya perlindungan sosial, perkembangan sumber daya manusia dapat terjadi tanpa adanya kekhawatiran terkait masalah-masalah sosial. Di Kabupaten Tanggamus, perlindungan sosial yang ada dapat dinilai masih belum optimal, terutama terlihat dari jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang masih signifikan. Di samping itu, upaya pemerintah untuk menangani masalah PPKS juga terbilang minim. Dengan cakupan pelayanan PPKS sebesar 79,72%, masih banyak PPKS yang belum mendapatkan layanan yang memadai. Inti dari permasalahan PPKS adalah tingginya kesenjangan, keterlantaran, dan kekerasan kepada anak disabilitas & kelompok rentan. Sementara itu, penanganan PPKS yang belum optimal disebabkan operator DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang kurang maksimal dalam pengelolaan data. Penanganan PPKS perlu dukungan dari berbagai pihak sehingga kerjasama antara OPD perlu ditingkatkan.

Selain itu jumlah penduduk miskin 10,98% dari total jumlah penduduk juga perlu diperhatikan. Masyarakat ini termasuk dalam kategori rentan dan perlu mendapatkan perlindungan melalui program bantuan sosial (bansos) yang

diselenggarakan oleh Kementerian Sosial. Pemerintah Kabupaten Tanggamus memiliki peran yang signifikan dalam memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan mencapai sasaran yang tepat dan merata, sehingga dampak positifnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.

Isu Strategis 3

Pengentasan Kemiskinan yang Belum Optimal dan Minimnya Lapangan Kerja

Pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja adalah dua isu yang saling terkait dan penting dalam pembangunan suatu negara. Kabupaten Tanggamus masih menghadapi tantangan serius dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan lapangan kerja. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanggamus, jumlah penduduk miskin di Tanggamu pada tahun 2022 mencapai 67,43 ribu jiwa turun sebesar 4,46 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi tahun 2021 yang sebesar 71,89 ribu orang. Meskipun ada penurunan, namun angka ini masih cukup tinggi dan menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tanggamus belum optimal.

Sementara itu, lapangan kerja di Kabupaten Tanggamus juga masih rendah. Data menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk yang bekerja berada di sektor pertanian, dengan jumlah pekerja di sektor manufaktur dan jasa lebih sedikit. Ini menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan untuk diversifikasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di sektor lain.

Secara keseluruhan, pengentasan kemiskinan dan peningkatan lapangan kerja di Kabupaten Tanggamus memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan semua stakeholder dan fokus pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Perlu adanya kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, seperti melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta mendorong investasi dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Sektor swasta juga memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Dengan investasi dan inovasi, sektor swasta dapat membuka peluang kerja baru dan membantu masyarakat untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan ekonomi lokal akan memastikan keberlanjutan dan kesuksesan dari upaya tersebut. Pendekatan ini juga dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, menciptakan rasa kepemilikan dan memperkuat daya dukung lokal. Dengan keterampilan dan pengetahuan yang

tepat, masyarakat dapat menciptakan peluang kerja sendiri dan membantu mengurangi kemiskinan di komunitas mereka.

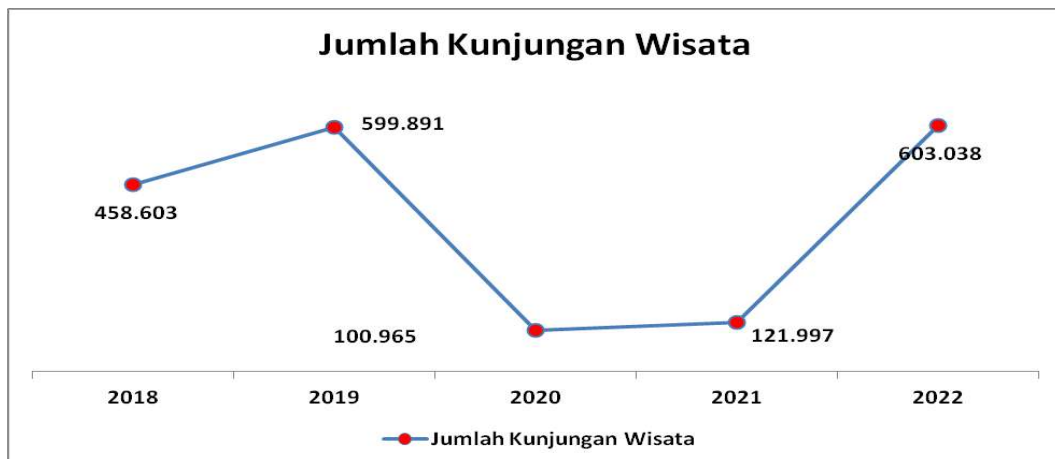
Isu Strategis 4

Potensi Sektor Pariwisata Tanggamus yang bisa dikembangkan untuk mendorong perekonomian

Dengan potensi pariwisata yang besar, Kabupaten Tanggamus berpeluang untuk memajukan perekonomian melalui pengembangan pariwisata yang dapat menarik minat wisatawan berkunjung ke Kabupaten Tanggamus. Namun melihat sampai saat ini pengembangan pariwisata dapat dinilai belum optimal. Kunjungan wisata pada tahun 2018 sebanyak 458.603 orang dan terus meningkat setiap tahunnya namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang drastis akibat pandemi Covid-19 dan kebijakan untuk pembatasan mobilisasi masyarakat yang berimbas pada penurunan secara signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan yang hanya mencapai 100.965 orang. Namun di tahun 2021, kunjungan wisata sudah mulai kembali meningkat menjadi 121.997 orang dan mulai bangkit pada tahun 2022 menjadi 603.038 orang.

Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Grafik 3.5. Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022

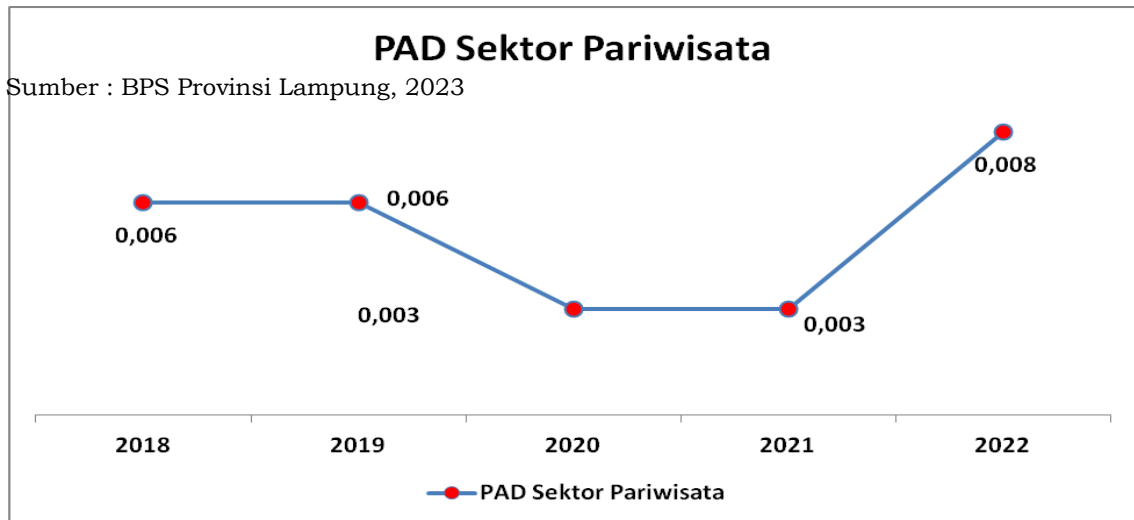


Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Disisi lain, sektor pariwisata memiliki peran dalam perekonomian Kabupaten Tanggamus. Kunjungan wisatawan, terutama dari luar Kabupaten Tanggamus, meningkatkan jumlah uang yang ada di Kabupaten Tanggamus. Namun sayangnya, kontribusi sektor ini terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanggamus tergolong masih sangat kecil, hanya mencapai

0,08%. Perkembangan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Grafik 3.6. Perkembangan Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kabupaten Tanggamus Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2023

Berdasarkan kondisi ini, terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Tanggamus :

1) Promosi dan pemasaran destinasi wisata

Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Tanggamus, diperlukan upaya yang serius dalam bidang promosi dan pemasaran destinasi wisata. Langkah awal yang penting adalah meningkatkan visibilitas destinasi tersebut melalui kampanye pemasaran yang terarah dan kreatif. Perlu dilakukan promosi melalui berbagai media, baik itu media sosial, situs web resmi, maupun media cetak untuk memberikan informasi yang menarik kepada wisatawan. Kerjasama dengan pihak swasta, seperti agen perjalanan dan perusahaan transportasi, juga dapat memperluas jangkauan promosi. Selain itu, keberadaan acara-acara khusus, festival budaya, atau kegiatan wisata tematik dapat menjadi daya tarik tersendiri untuk menarik perhatian calon wisatawan. Dengan membangun citra destinasi yang menarik serta menawarkan paket-paket wisata yang menarik akan meningkatkan kunjungan wisatawan, mengangkat potensi pariwisata lokal dan secara keseluruhan akan memberikan dampak positif pada ekonomi daerah Kabupaten Tanggamus.

2) Lingkungan fisik dan sumber daya alam

Karakteristik lingkungan fisik Kabupaten Tanggamus, khususnya aspek lingkungan fisik geologi yang unik dan spesifik dapat dimanfaatkan sebagai

daya tarik wisata dan sebagai sumber daya alam untuk mendukung aktivitas pariwisata. Lingkungan fisik dapat menjadi peluang namun juga tantangan bagi pengembangan pariwisata. Posisi Kabupaten Tanggamus yang memiliki garis pantai yang panjang semestinya dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata pantai yang potensial, namun demikian posisi yang memiliki garis pantai sepanjang 202 Km menjadikan Kabupaten Tanggamus berada pada risiko tinggi bencana tsunami. Dengan demikian, penetapan kawasan pariwisata perlu memperhatikan risiko bencana, perlindungan terhadap lingkungan budidaya dan kelestarian budaya.

3) Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata

Keterbatasan fasilitas dan infrastruktur pendukung pariwisata dapat menyebabkan rendahnya minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Tanggamus. Salah satu masalah utama adalah akses transportasi yang terbatas. Keterbatasan opsi transportasi umum dan jaringan jalan yang belum optimal dapat menciptakan kendala bagi wisatawan yang berencana mengunjungi Kabupaten Tanggamus. Kurangnya konektivitas yang baik antara tempat-tempat wisata dan pusat kota juga dapat mengurangi daya tarik destinasi. Selain itu, kurangnya pengembangan fasilitas akomodasi seperti hotel, penginapan, dan *guest house* merupakan hambatan lainnya. Keberadaan fasilitas akomodasi yang terbatas membuat wisatawan kurang memiliki pilihan dan mungkin merasa tidak nyaman selama kunjungan mereka. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan infrastruktur transportasi dan peningkatan jumlah serta kualitas fasilitas akomodasi dapat menjadi langkah penting dalam meningkatkan daya saing Kabupaten Tanggamus sebagai tujuan wisata yang menarik.

4) Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan mempengaruhi minat wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Tanggamus. Pelatihan dan pengembangan keterampilan yang terfokus pada sektor-sektor ini mungkin belum mendapatkan perhatian yang memadai, sehingga mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan profesionalisme di kalangan pelaku industri pariwisata. Keterbatasan dalam pemahaman tentang pelayanan pelanggan, promosi destinasi, dan manajemen acara wisata dapat memengaruhi pengalaman wisatawan secara keseluruhan. Selain itu, kurangnya inovasi dalam sektor ekonomi kreatif dapat mengurangi daya tarik destinasi tersebut, terutama di era digital saat

ini di mana kreativitas dan daya saing sangat penting. Dengan memperkuat fondasi kompetensi SDM, maka akan meningkatkan kualitas layanan, menciptakan inovasi, dan membangun citra destinasi yang lebih menarik bagi wisatawan, yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Tanggamus.

Isu Strategis 5

Produksi dan Kualitas Komoditas unggulan pertanian perlu ditingkatkan (Kopi, Coklat dan Hortikultura)

Ditinjau dari kontribusi setiap lapangan usaha terhadap PDRB Tanggamus, perekonomian Kabupaten Tanggamus masih sangat bergantung pada sektor primer. Lapangan usaha pertanian dan perikanan serta lapangan usaha pertambangan dan penggalian menyumbang lebih dari 40% penciptaan nilai tambah dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2018-2022).

Isu strategis sektor pertanian berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam dalam meningkatkan daya saing daerah. Pertanian dan perkebunan merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan distribusi PDRB ADHB menurut lapangan usaha, distribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mendominasi dengan persentase mencapai 38,33% dan menjadi sektor dengan kontribusi tertinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Hal ini memperlihatkan bahwa sektor ini perlu mendapatkan perhatian khusus dan intervensi pembangunan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tanggamus.

Rendahnya produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan masih menjadi isu strategis di sektor ini. Isu tersebut disebabkan oleh beberapa kondisi aktual yang terjadi pada sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi aktual tersebut antara lain alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan untuk peruntukan lainnya, rendahnya nilai tambah dan sumber daya manusia pertanian dan perkebunan, serta kelembagaan dan mekanisasi agribisnis belum terhubung secara baik.

Untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perkebunan di Kabupaten Tanggamus, beberapa langkah perlu diambil. Pertama, peningkatan mutu dan kualitas hasil pertanian dan perkebunan sangat penting. Kedua, permasalahan di kedua sektor tersebut harus segera dibenahi untuk mencapai keberlanjutan.

Sinergi antar lembaga dan peningkatan sarana serta prasarana penunjang perlu diwujudkan. Selain itu, pendampingan dan pelatihan bagi petani sangat

diperlukan untuk menciptakan sumber daya yang lebih kompetitif. Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian yang semakin pesat menyebabkan lahan tanam semakin berkurang, sehingga input sarana produksi harus ditingkatkan guna menjaga dan meningkatkan produksi.

Dengan fokus pada penggunaan teknologi modern, akses pembiayaan, dan penguatan infrastruktur, produktivitas sektor pertanian dan perkebunan dapat ditingkatkan. Hal ini akan memastikan ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Isu Strategis 6

Belum optimalnya *green economy* dan *blue economy* untuk pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan

Ekonomi hijau adalah konsep yang merujuk pada upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan. Di Kabupaten Tanggamus, penerapan ekonomi hijau telah menjadi bagian penting dari pembangunan berkelanjutan. Kabupaten Tanggamus memiliki potensi besar untuk menerapkan ekonomi hijau. Dengan sumber daya alam yang melimpah, seperti hutan, lahan pertanian, dan sumber air, Kabupaten Tanggamus memiliki peluang untuk mengembangkan berbagai sektor ekonomi hijau, seperti pengembangan ekonomi terbarukan, pemanfaatan limbah sebagai bahan bakar, pengelolaan sampah berkelanjutan, pertanian organik, dan lain-lain.

Pengembangan energi terbarukan di Kabupaten Tanggamus dapat menjadi langkah penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketahanan energi. Salah satu sumber energi terbarukan yang sudah dikembangkan di Kabupaten Tanggamus adalah energi panas bumi. Saat ini, PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) telah mengoperasikan PLTP Ulubelu yang memiliki potensi panas bumi yang sangat besar, dengan cadangan yang diperkirakan mencapai 2.100 MW. PLTP ini memiliki kapasitas sebesar 220 MW dan telah berkontribusi sebesar 110 MW melalui pengoperasian PLTP Unit 1 dan 2 di tahun 2012. Dengan selesainya pembangunan PLTP Unit 3 dan 4, energi listrik sebesar 220 MW diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik 25 persen dari total kebutuhan listrik di Lampung.

Selain energi panas bumi, energi hidro juga menjadi sumber energi terbarukan yang potensial dikembangkan di Kabupaten Tanggamus. Kabupaten Tanggamus memiliki banyak potensi air terjun yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Hingga saat ini, telah ada satu PLTA yang beroperasi di

Kabupaten Tanggamus, yaitu PLTA Kukusan II. PLTA tersebut memiliki kapasitas sebesar 5,4 MW.

Penerapan ekonomi hijau juga dilakukan dengan melakukan pengelolaan sampah secara berkelanjutan seperti yang telah dilakukan oleh komunitas Recycling Village. Recycling Village adalah komunitas yang berlokasi di Desa Air Naningan, Kabupaten Tanggamus. Komunitas ini didirikan pada tahun 2021 dan berdedikasi untuk mendaur ulang sampah plastik rumah tangga. Mereka mendaur ulang berbagai jenis sampah plastik, termasuk kantong plastik, bubble wrap, botol plastik, dan tutup botol. Recycling Village telah mengumpulkan sekitar 1.000 kilogram sampah plastik sejak didirikan. Sampah ini kemudian ditransformasikan menjadi berbagai produk fesyen siap pakai, seperti tas pouch, clutch, dompet, tote bag, sling bag, tas belanja, pemegang kartu nama, dan kotak tisu. Penampilan berwarna-warni dari produk ini bukan karena pewarna, tetapi warna asli dari sampah plastik yang didaur ulang. Dengan mendaur ulang sampah plastik menjadi produk fesyen, Recycling Village menerapkan ekonomi sirkular yang mampu menciptakan produk dan layanan yang lebih baik bagi konsumen, sekaligus berkontribusi pada industri fesyen. Selain itu, mereka meregenerasi lingkungan dengan tidak menambah limbah, tetapi justru memanfaatkan limbah untuk diproses lebih lanjut.

Ekonomi hijau di Kabupaten Tanggamus juga dilakukan dengan penerapan sistem pertanian organik. Pertanian organik di Kabupaten Tanggamus telah berkembang cukup pesat dan menunjukkan hasil yang positif, salah satunya adalah pengembangan padi organik yang dilakukan atas kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB). Dengan dilakukannya pengembangan padi organik, memberikan manfaatnya yang sangat besar bagi para petani, yaitu dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

Meskipun penerapan ekonomi hijau di Kabupaten Tanggamus telah dilakukan, namun hasilnya belum tercapai secara optimal. Terdapat beberapa kendala yang menghambat keberhasilan implementasi tersebut. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait manfaat ekonomi hijau. Meskipun ada kebijakan dan program-program yang mendukung, masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami konsep ini. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan edukasi dan sosialisasi agar masyarakat lebih terlibat dan mendukung penuh perubahan menuju ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, kurangnya infrastruktur yang mendukung praktik ekonomi hijau juga menjadi faktor penghambat. Misalnya, kurangnya fasilitas daur ulang dan

pengelolaan limbah yang efisien dapat membatasi potensi pertumbuhan ekonomi hijau. Perlu dilakukan investasi dan pengembangan infrastruktur yang lebih ramah lingkungan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung praktik ekonomi hijau.

Keterlibatan sektor swasta juga masih menjadi tantangan. Meskipun beberapa perusahaan telah memulai langkah-langkah menuju keberlanjutan, masih banyak yang belum sepenuhnya mengadopsi model bisnis yang ramah lingkungan. Diperlukan insentif yang lebih besar dan kebijakan yang mendukung agar perusahaan lebih termotivasi untuk beralih ke praktik ekonomi hijau.

Koordinasi antar instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait juga perlu ditingkatkan. Kurangnya koordinasi dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dan mengurangi efektivitas upaya bersama dalam mewujudkan ekonomi hijau di Kabupaten Tanggamus.

Selain ekonomi hijau, Kabupaten Tanggamus memiliki potensi besar untuk menerapkan ekonomi biru. Kabupaten Tanggamus memiliki potensi kelautan dan sumberdaya pesisir yang tinggi dan diperkaya dengan keanekaragaman hayati yang cukup besar, dimana kondisi umumnya masih belum optimal. Padahal, wilayah pesisir Kabupaten Tanggamus mencakup 9 (sembilan) kecamatan yang juga memiliki potensi besar untuk berkembang dalam kerangka pembangunan pesisir dan laut terpadu dan berkelanjutan. Kabupaten Tanggamus yang memiliki garis pantai sepanjang 202 km, juga mempunyai potensi Sumber Daya Alam yang luar biasa, antara lain: perikanan, ekosistem pesisir dan pariwisata serta potensi kelautan lainnya. Potensi perikanan di wilayah Kabupaten Tanggamus berasal dari 3 (tiga) jenis perikanan, yaitu (1) Perikanan tangkap, yang terdiri dari penangkapan laut dan perairan umum, (2) Perikanan budidaya, yang terdiri dari budidaya air tawar, payau dan laut dan (3) Pengolahan Hasil Perikanan.

Di Kabupaten Tanggamus terdapat 46 desa (15,38 persen dari total jumlah desa) yang berada pada posisi geografis di tepi laut. Jumlah rumah tangga perikanan tangkap tahun 2022 yaitu perikanan laut sebanyak 5.703 rumah tangga. Kecamatan dengan jumlah rumah tangga perikanan laut terbanyak adalah Kecamatan Kota Agung dengan 1.389 rumah tangga. Produksi perikanan laut pada tahun 2022 di Kabupaten Tanggamus mencapai 41.263,43 ton mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebanyak 27.573,54 ton.

Patut disayangkan, dengan potensi yang cukup besar, implementasi ekonomi biru di Kabupaten Tanggamus masih belum optimal dan dihadapkan pada sejumlah kendala. Salah satu kendala utama adalah kurangnya infrastruktur dan fasilitas

pendukung untuk pengembangan sektor ekonomi biru. Meskipun sumber daya lautnya kaya, namun minimnya pelabuhan, dermaga, dan fasilitas pendukung lainnya menjadi penghambat bagi pertumbuhan sektor ini. Keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur yang kurang memadai dapat menghambat potensi penuh ekonomi biru di Kabupaten Tanggamus.

Selain itu, keberlanjutan pengelolaan sumber daya laut juga menjadi tantangan. Praktik penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan dan kurangnya pengawasan terhadap keberlanjutan ekosistem laut dapat mengancam keberlanjutan ekonomi biru. Diperlukan kebijakan yang ketat dan implementasi yang konsisten dalam mengelola sumber daya laut untuk memastikan bahwa keberlanjutan ekosistem tetap menjadi prioritas.

Aspek lain yang memperumit penerapan ekonomi biru di Kabupaten Tanggamus adalah kurangnya investasi dalam riset dan pengembangan teknologi kelautan. Inovasi dalam teknologi penangkapan ikan, budidaya laut, dan pengelolaan limbah laut dapat menjadi kunci kesuksesan ekonomi biru, namun minimnya investasi dalam bidang ini dapat memperlambat progres menuju implementasi yang optimal.

Keterlibatan masyarakat lokal juga menjadi faktor penting. Pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi biru, seperti budidaya rumput laut atau pengembangan pariwisata bahari, memerlukan pendekatan yang terkoordinasi dan program pelatihan yang efektif.

Potensi yang tinggi dari sumber daya pesisir dan laut di Kabupaten Tanggamus seharusnya menjadi keunggulan komparatif yang dapat dikembangkan secara optimal. Keunggulan ini dapat menjadi dasar untuk menghasilkan keunggulan kompetitif yang berpotensi meningkatkan kemajuan wilayah pesisir, mengangkat taraf ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanggamus. Sesuai dengan prinsip ekonomi biru Indonesia yang tertera dalam RPJPN 2025-2045, pengembangan potensi laut harus disertai dengan upaya pelestarian sumber daya laut. Keseimbangan antara eksploitasi dan pelestarian sumber daya kelautan dapat memberikan dampak positif terhadap ketersediaan sumber pangan yang berkelanjutan.

Isu Strategis 7

Penguatan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

Penting bagi pemerintah untuk memperkuat strateginya dalam menghadapi berbagai tantangan yang timbul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi,

khususnya bagi pemerintah daerah. Sebagai bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi, ditekankan pentingnya mengenali dan mengurangi hambatan-hambatan yang dapat muncul selama pelaksanaan proses reformasi tersebut.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan memiliki kapasitas yang handal. Hal ini bertujuan agar pemerintah dapat memberikan layanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, profesional, dan bebas dari praktik KKN. Reformasi Birokrasi juga mendorong setiap unsur pemerintah daerah untuk memberikan dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam menghadapi tuntutan masyarakat yang semakin meningkat, Reformasi Birokrasi menjadi suatu keharusan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan mutu pelayanan publik.

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tanggamus memberikan gambaran tentang seberapa baik pemerintah setempat memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan nilai IRB sebesar 57,03 dan predikat CC, masih ada ruang untuk meningkatkan pelayanan publik. Ini berarti pemerintah perlu lebih fokus dalam membuat layanan-layanan seperti izin, kesehatan, dan pendidikan lebih mudah diakses dan berkualitas bagi semua orang. Hal ini mencakup memastikan proses layanan berjalan lancar, menyediakan informasi yang jelas kepada masyarakat, dan melibatkan mereka dalam proses perbaikan. Dengan langkah-langkah konkret seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan kualifikasi petugas, dan penggunaan teknologi, diharapkan kinerja pelayanan publik dan predikat IRB dapat meningkat.

Tabel 3.3. Indikator dan Capaian Indikator Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Tanggamus

Indikator	Kondisi Awal (Tahun 2023)	Satuan
Indeks Reformasi Birokrasi	57,03 (CC)	Indeks
Nilai SAKIP Pemerintah	65,16 (B)	Nilai
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	64,60	Indeks
Indeks Kepuasan Masyarakat	83,44 (B)	Indeks

Sumber: Bapperida Kabupaten Tanggamus, 2023

Birokrasi sering kali dihubungkan dengan persepsi tentang pegawai negeri yang cenderung bekerja lambat dan terkait dengan praktek-praktek korupsi. Untuk itu diperlukan pengelolaan pemerintahan dan peningkatan kapasitas Aparatur Sipil

Negara (ASN) yang merupakan aspek krusial dalam mewujudkan visi pembangunan Reformasi Birokrasi menuju karakter birokrasi yang berkelas dunia. Meskipun telah ada upaya yang signifikan, perlu diakui bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan. Kualitas pengelolaan pemerintahan harus terus ditingkatkan untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap langkah kebijakan.

Peningkatan kapasitas ASN juga menjadi hal utama yang harus diprioritaskan guna menghadapi dinamika tuntutan tugas yang semakin kompleks. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan memberdayakan ASN melalui berbagai pelatihan serta pengembangan kompetensi, pemerintah dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusianya untuk mencapai standar birokrasi yang mampu bersaing secara global. Pemerintah Kabupaten Tanggamus akan terus berkomitmen dan melanjutkan langkah-langkah strategis dalam merumuskan kebijakan yang mendukung transformasi birokrasi, sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Isu Strategis 8

Sebagain wilayah Tanggamus Tinggi Risiko Bencana

Kondisi fisik Wilayah Kabupaten Tanggamus yang sangat variatif, dimana mempunyai kemiringan yang bervariasi mulai dari 0 hingga > 40 %, banyaknya daerah aliran sungai, terdapatnya beberapa gunung serta terletak di dekat patahan semangka, menyebabkan wilayah Kabupaten Tanggamus cenderung mempunyai potensi daerah rawan bencana yang cukup besar.

Bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Tanggamus terdiri dari bencana alam dan non alam. Ancaman bencana alam seperti bencana longsor dan pergerakan tanah, banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran dan gelombang tinggi air laut. Sedangkan ancaman bencana non alam terdiri dari epidemic dan wabah penyakit, serta kegagalan teknologi. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Tanggamus juga harus mengedepankan mitigasi kebencanaan pada setiap aspek kehidupan bermasyarakat

Isu global terkait dengan perubahan iklim juga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Tanggamus. Perubahan iklim yang terjadi akibat berbagai aktivitas manusia diyakini tidak hanya berdampak pada kondisi lingkungan, namun secara lebih luas dapat berdampak pada kondisi perekonomian suatu daerah. Kabupaten Tanggamus menjadi salah satu daerah penyumbang emisi gas rumah kaca dari berbagai sektor seperti sektor energi,

sector transportasi, sektor industri, sektor persampahan, sektor kehutanan, dan sektor pertanian. Kesadaran akan hal tersebut menuntut adanya implementasi kebijakan pembangunan daerah terkait mitigasi perubahan iklim. Berdasarkan kondisi ini perlu adanya upaya yang lebih keras dari para pemangku kepentingan dalam aksi bersama penurunan emisi gas rumah kaca di Kabupaten Tanggamus.

Isu Strategis 9

Ekonomi Digital dan Ekonomi Syariah sebagai Pendorong Ekonomi Daerah

Perkembangan pesat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak signifikan pada berbagai sektor yang telah mengubah secara mendasar cara manusia bekerja, berbisnis, dan berinteraksi. Fenomena ini bukan hanya sebatas revolusi teknologi, melainkan juga sebuah pergeseran paradigma dalam dinamika ekonomi global.

Perkembangan ekonomi digital memunculkan gebrakan signifikan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Bisnis-bisnis tradisional beralih ke model-model yang lebih fleksibel dan inovatif, memanfaatkan internet, big data, kecerdasan buatan, dan teknologi lainnya untuk meningkatkan efisiensi operasional dan meraih pasar yang lebih luas.

Contohnya saja perdagangan elektronik atau e-commerce, menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan ini. Konsumen kini dapat mengakses dan membeli produk dari seluruh dunia tanpa harus meninggalkan rumah mereka. Hal ini tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga membuka peluang bisnis baru yang sebelumnya tak terbayangkan.

Peningkatan jumlah rumah tangga yang menggunakan e-commerce di Kabupaten Tanggamus juga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini terlihat dari meningkatnya nilai transaksi e-commerce di Kabupaten Tanggamus. Peningkatan nilai transaksi e-commerce didorong oleh meningkatnya jumlah produk dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha e-commerce di Kabupaten Tanggamus. Selain itu, meningkatnya jumlah konsumen yang menggunakan e-commerce juga turut berkontribusi terhadap peningkatan nilai transaksi. produk dan jasa yang paling banyak diperdagangkan melalui e-commerce di Kabupaten Tanggamus adalah :

- Makanan dan minuman
- Pakaian dan aksesoris
- Elektronik
- Peralatan rumah tangga
- Kosmetik

Pertumbuhan usaha e-commerce di Kabupaten Tanggamus diprediksi akan terus meningkat seiring dengan berbagai faktor pendukung, seperti peningkatan penetrasi internet dan kesadaran masyarakat akan kemudahan berbelanja online. Selain itu, ketersediaan produk dan jasa e-commerce yang beragam juga akan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan sektor ini. Dukungan dari pemerintah daerah dalam pengembangan e-commerce juga akan memberikan dorongan tambahan. Di tengah perkembangan ini, peluang ekonomi syariah dalam era digital pun semakin menarik. Ekonomi syariah menawarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sosial, serta menekankan pada transaksi yang halal dan berkelanjutan. Dalam konteks e-commerce, peluang ekonomi syariah bisa dimanfaatkan melalui pengembangan platform dan produk yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti jual-beli dengan prinsip keadilan dan penawaran produk yang halal. Pemerintah daerah juga dapat memainkan peran penting dalam memberikan dukungan dan fasilitasi bagi pengembangan ekonomi syariah di era digital, melalui regulasi yang mendukung dan program-program yang mendorong pertumbuhan sektor ini. Dengan demikian, ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk berkembang secara signifikan di tengah pesatnya perkembangan e-commerce di Kabupaten Tanggamus.

Isu Strategis 10

Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global adalah proses dimana ekonomi suatu wilayah menjadi bagian dari sistem ekonomi global. Ini melibatkan interaksi dan pertukaran antara pelaku ekonomi lokal dan global, termasuk investor dan perusahaan. Integrasi ekonomi domestik dan global dapat memberikan dampak positif bagi Kabupaten Tanggamus, terutama dalam hal peningkatan investasi. Integrasi ekonomi dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk dan jasa dari Kabupaten Tanggamus. Hal ini dapat meningkatkan peluang bagi investor untuk mengembangkan usahanya di Kabupaten Tanggamus. Selain itu, integrasi ekonomi juga dapat mendorong transfer teknologi antar negara. Hal ini dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan mendorong investasi.

Pada tahun 2022, jumlah investor PMDN dan PMA di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2022 masing-masing sebanyak 20 dan 5 investor dengan nilai investasi sebesar Rp.15,060,486,707.00 untuk PMDN dan Rp.45,279,620,435.00 untuk PMA. Dengan adanya integrasi ekonomi maka akan mendorong peningkatan jumlah investor PMDN dan PMA di Kabupaten Tanggamus. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

- Peningkatan akses pasar. Integrasi ekonomi dapat membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk dan jasa dari Kabupaten Tanggamus. Hal ini dapat meningkatkan peluang bagi investor untuk mengembangkan usahanya di Kabupaten Tanggamus.
- Peningkatan transfer teknologi. Integrasi ekonomi dapat mendorong transfer teknologi antar negara. Hal ini dapat meningkatkan daya saing perusahaan dan mendorong investasi.

Integrasi ekonomi juga dapat mendorong peningkatan nilai investasi PMDN dan PMA yang disebabkan oleh peningkatan jumlah investor dan Peningkatan skala investasi yang disebabkan oleh meningkatnya permintaan akan barang dan jasa dari dalam maupun luar negeri.

Integrasi ekonomi juga dapat meningkatkan kontribusi PDRB komponen pengeluaran net ekspor di Kabupaten Tanggamus. Hal ini disebabkan oleh peningkatan ekspor dan penurunan impor. Peningkatan ekspor dapat disebabkan oleh meningkatnya permintaan akan barang dan jasa dari luar negeri. Sementara itu, penurunan impor dapat disebabkan oleh meningkatnya produksi lokal.

Isu Strategis 11

Kehidupan masyarakat Tanggamus yang Majemuk, Religius, Aman, berbudaya dan demokratis perlu dioptimalkan sebagai modal sosial pembangunan

Ketahanan sosial dan budaya di suatu wilayah memainkan peran krusial dalam menciptakan masyarakat yang kuat dan berdaya. Kabupaten Tanggamus kaya akan kearifan lokal, menonjolkan komitmen mendalam pada ketahanan sosial dan budaya sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Masyarakat Tanggamus dikenal dengan keramahannya, kegotongroyongannya, dan kecintaannya terhadap budaya. Hal ini tercermin dari berbagai aspek kehidupan masyarakat Tanggamus, mulai dari keluarga, pemuda, hingga masyarakat umum. Namun, di balik potensi besar tersebut, terdapat beberapa isu yang perlu menjadi perhatian dalam upaya mewujudkan ketahanan sosial dan budaya di Kabupaten Tanggamus.

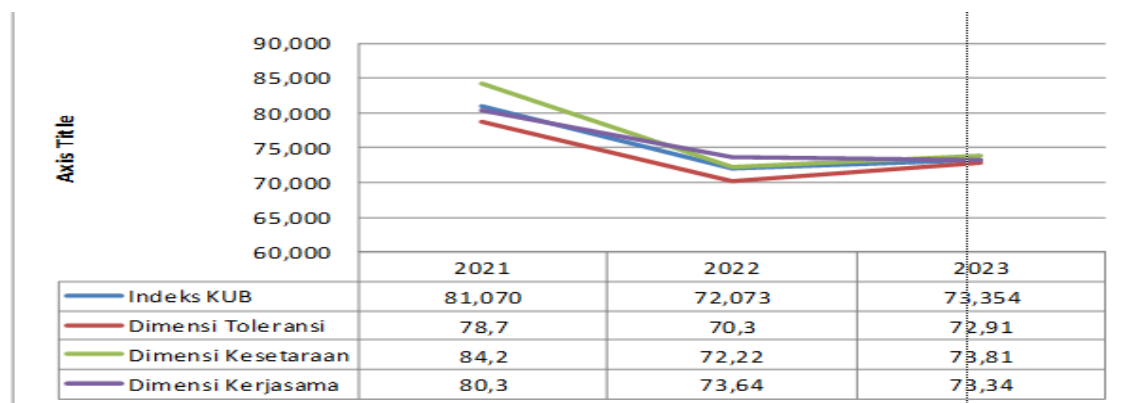
Pemahaman nilai-nilai keagamaan yang dijalankan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dapat tercermin melalui budaya dan dinamika kehidupan bersosialisasi. Hal ini perlu dipelihara dan ditingkatkan secara berkelanjutan, sebab nilai-nilai tersebut menjadi pondasi sosial yang esensial dan berharga untuk proses pembangunan. Untuk mencapai kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan berkomunitas, diperlukan beberapa faktor kunci seperti toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Toleransi sebagai indikator

mencakup dimensi penerimaan, penghargaan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Kesetaraan mencerminkan semangat untuk saling melindungi dan memberikan peluang yang setara tanpa menonjolkan superioritas. Sementara itu, konsep kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif dalam kolaborasi dengan pihak lain, sambil menyediakan empati dan simpati terhadap kelompok lain dalam berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan.

Di Indonesia, masyarakat religius, rukun dan berbudaya merupakan cita-cita yang telah lama diperjuangkan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa isu yang perlu menjadi perhatian. Salah satu isu yang perlu menjadi perhatian adalah masih adanya sikap intoleransi dan diskriminasi. Intoleransi dan diskriminasi dapat mengancam kerukunan antarumat beragama dan antarkelompok masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan konflik dan kekerasan.

Isu lain yang perlu menjadi perhatian adalah maraknya praktik-praktik budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan norma-norma sosial. Praktik-praktik budaya tersebut dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, seperti maraknya penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, dan kekerasan terhadap perempuan. Rerata Indeks KUB Provinsi Lampung Tahun 2023 sebesar 73.35, Kategori Indeks KUB tinggi. Namun meskipun demikian, apabila dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya Indeks KUB di Provinsi Lampung menurun.

Grafik 3.7. Indeks Kerukunan Umat Beragam (KUB) Provinsi Lampung Tahun 2021-2023



Sumber : balitbangdiklat.kemeng.go.id/halaman/dashboard-indeks-kub

Di tengah-tengah keberagaman masyarakatnya, keluarga berkualitas menjadi fondasi utama dalam membangun harmoni. Keluarga yang kuat dan saling mendukung menciptakan lingkungan yang positif bagi pertumbuhan anak-anak dan memberikan kontribusi positif pada masyarakat. Dengan memperkuat nilai-nilai keluarga, Kabupaten Tanggamus berupaya menjaga warisan budaya dan memastikan bahwa setiap generasi mewarisi nilai-nilai luhur yang telah ada.

Pemerintah daerah telah berupaya untuk meningkatkan kualitas keluarga melalui berbagai program, antara lain program Keluarga Berencana (KB) untuk menekan angka kelahiran dan kematian bayi, serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak, program Pendidikan Keluarga (PK) untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam mendidik anak dan program Pelatihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan keterampilan kerja anggota keluarga agar dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Kesetaraan gender menjadi pilar lain dalam membangun ketahanan sosial di Kabupaten Tanggamus. Langkah-langkah konkret diambil untuk memberikan kesempatan yang setara bagi semua warga, tanpa memandang jenis kelamin. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan, masyarakat Tanggamus berusaha untuk membangun komunitas yang inklusif dan adil, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi.

Pemuda Tangguh dan Produktif menjadi fokus berikutnya dalam membangun ketahanan sosial di Kabupaten Tanggamus. Melalui pembinaan dan pemberdayaan pemuda, baik secara pendidikan maupun pelatihan keterampilan, masyarakat berharap dapat menciptakan generasi yang tangguh dan produktif. Pemuda yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik diharapkan dapat menjadi motor penggerak pembangunan, menghadapi tantangan zaman, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakatnya.

Masyarakat religius menjadi salah satu pilar keempat dalam upaya memperkuat ketahanan sosial dan budaya di Kabupaten Tanggamus. Keterlibatan aktif dalam praktik keagamaan membantu membangun moral dan nilai-nilai spiritual yang kuat di tengah-tengah masyarakat. Hal ini menciptakan fondasi yang kokoh untuk kerjasama dan toleransi antarwarga, tanpa memandang perbedaan keyakinan.

Terakhir, rukun dan berbudaya menjadi cita-cita yang terus dikejar oleh masyarakat Tanggamus. Melalui upaya bersama untuk mempromosikan rasa saling menghormati dan memahami satu sama lain, Kabupaten Tanggamus berupaya menciptakan lingkungan yang penuh toleransi dan kebersamaan. Dengan demikian, masyarakat dapat hidup dalam kedamaian dan keharmonisan, menjadikan Kabupaten Tanggamus sebagai contoh nyata tentang bagaimana keberagaman bisa menjadi kekuatan untuk memperkuat ketahanan sosial dan budaya.

Isu Strategis 12

Ekonomi Sirkular

Peningkatan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya telah menjadi kebutuhan yang mendesak di Kabupaten Tanggamus, mengingat keterbatasan sumber daya yang semakin nyata, sementara kebutuhan manusia terus berkembang. Dalam konteks ini, konsep ekonomi sirkular menjadi sangat relevan, tidak hanya sebagai model industri yang mengusung prinsip zero waste, tetapi juga sebagai pendekatan yang memperhatikan aspek sosial dan keberlanjutan sumber daya dan energi.

Implementasi konsep ekonomi sirkular memiliki potensi besar dalam mengurangi ketergantungan pada impor di sektor industri, yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing Tanggamus di pasar nasional dan global. Strategi kunci melibatkan penerapan pendekatan 5R (*Reduce, Reuse, Recycle, Recovery, and Repair*) dalam proses industri serta mendorong pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang manfaat ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Adapun produsen unggulan di Tanggamus, seperti dalam sektor pertanian kopi, telah mengadopsi konsep ekonomi sirkular dengan berhasil, menciptakan sistem pertanian terintegrasi dengan peternakan yang menghasilkan produk utama dan derivatifnya sambil mengoptimalkan limbah organik untuk keperluan lain, seperti pakan ternak atau bahan energi terbarukan. Dalam skala lebih mikro, pendekatan ekonomi sirkular pada tingkat rumah tangga juga menjanjikan, dengan potensi untuk mengurangi limbah, menciptakan peluang bisnis, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Tanggamus. Dukungan pemerintah dalam menggalakkan praktek-praktek ekonomi sirkular, seperti melalui pembentukan bank sampah dan pengembangan inisiatif komunitas, menjadi kunci dalam mempercepat perubahan menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan di tingkat lokal.

Isu Strategis 13

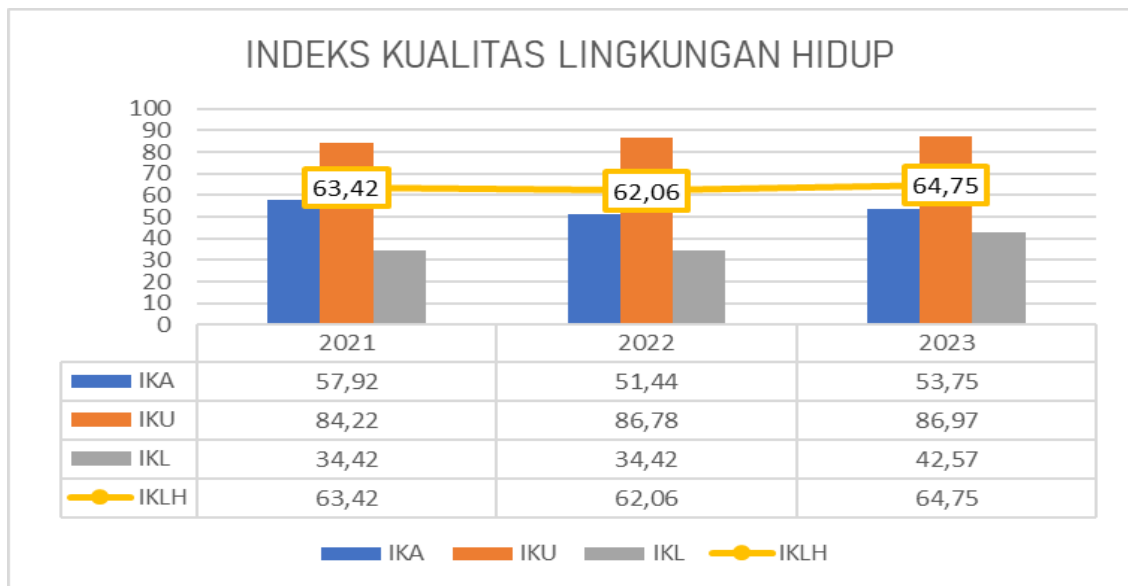
Lingkungan Hidup yang Belum Optimal dan Ancaman Perubahan Iklim

Kondisi Lingkungan hidup dapat dilihat dari beberapa aspek, beberapa diantaranya adalah aspek daya dukung, kualitas, dan ancaman bencana. Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Tanggamus dilihat dari aspek aspek daya dukungnya dinilai belum dikelola dengan optimal, dari aspek kualitasnya juga dinilai belum optimal, dan dari aspek kebencanaannya memiliki risiko bencana yang masih belum optimal.

1) Kualitas Lingkungan Hidup yang Masih Belum Optimal

Permasalahan lingkungan yang terjadi di Kabupaten Tanggamus berasal berbagai kegiatan seperti aktivitas rumah tangga, industri, transportasi, pertambangan, hingga pengelolaan sampah yang kurang baik yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hidup. Dalam Permen Nomor 27 tahun 2021, kualitas lingkungan dapat dinilai menggunakan IKLH. IKLH dinilai berdasarkan 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan. IKLH Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 mencapai angka 64,75, berarti kondisi lingkungan hidup masuk dalam kategori sedang. Angka IKLH dinilai berdasarkan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 86,97 (baik), Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 53,75 (sedang), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 42,57 (kurang)

Grafik 3.8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tanggamus Tahun 2021-2023



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus, 2024

Secara keseluruhan Kabupaten Tanggamus memiliki kuantitas sumber daya air yang cukup tinggi, namun dari segi kualitas menunjukkan adanya indikasi pencemaran di beberapa wilayah. Pencemaran air di Kabupaten Tanggamus baik air tanah dan air permukaan dimungkinkan berasal dari limbah yang berupa limbah industri, limbah domestik/permukiman, dan limbah lainnya yang meliputi limbah pertanian, peternakan, persampahan, dan lain-lain. Pencemaran air yang terjadi di Kabupaten Tanggamus dapat berdampak pada penurunan kualitas air, dimana hal tersebut dapat berakibat padapenurunan ketersediaan atau kuantitas air bersih di setiap tahunnya.

2) Ancaman Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan isu global yang mendesak dan mempengaruhi semua aspek kehidupan di bumi. Efek perubahan iklim dirasakan di seluruh lapisan kehidupan, dan penyebabnya berasal dari berbagai sektor. Perubahan iklim sendiri adalah fenomena dinamis yang telah berlangsung selama jutaan tahun, bahkan sebelum manusia ada. Namun, aktivitas manusia belakangan ini telah memperburuk dan mempercepat perubahan iklim, menjadikannya semakin ekstrem. Manusia dianggap sebagai penyebab utama perubahan iklim ini karena aktivitasnya meningkatkan konsentrasi emisi gas rumah kaca (GRK) di atmosfer. Emisi GRK ini menyebabkan pemanasan global yang kemudian memicu perubahan iklim, ditandai dengan meningkatnya suhu permukaan bumi. Kondisi ini mengakibatkan ketidakseimbangan alam dan ekosistem, membawa dampak negatif yang signifikan bagi kehidupan di planet ini.

Perubahan iklim memicu cuaca ekstrem dan kekeringan, dua masalah yang menjadi perhatian serius di Kabupaten Tanggamus. Menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Kabupaten Tanggamus memiliki risiko sedang terhadap kekeringan dan cuaca ekstrem, dengan skor masing-masing 11,1 dan 6,29. Dampak dari perubahan iklim ini sangat terasa dalam sektor pertanian, yang sering terganggu musim tanamnya dan berujung pada kerusakan serta kegagalan panen. Salah satu contoh dampak nyata adalah banjir yang terjadi di Kecamatan Semaka pada Juni 2023, yang merusak 1.172 hektar lahan sawah milik 167 petani, dengan 339 hektar rusak dan 71 hektar gagal panen. Kekeringan juga berdampak signifikan, khususnya pada tanaman padi dan jagung, dengan 663 hektar lahan padi terdampak, terdiri dari 281 hektar rusak ringan, 231 hektar rusak sedang, 67 hektar rusak berat, dan 54 hektar gagal panen.

Berdasarkan inventarisasi GRK tahun 2022, Kabupaten Tanggamus menghasilkan 756,17 Gg CO₂e, dengan sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar (76%). Seiring dengan pertumbuhan penduduk, kebutuhan energi, dan kegiatan industri, emisi GRK diperkirakan akan terus meningkat. Untuk mengantisipasi hal ini, upaya yang dilakukan meliputi peningkatan penggunaan energi terbarukan, mitigasi sektor industri melalui produksi bersih, penerapan sistem pertanian rendah emisi, perbaikan pengelolaan limbah, dan peningkatan teknologi pengelolaan limbah dengan prinsip 5R (*Reduce, Reuse, Recycle, Recovery, and Repair*).

Isu Strategis 14

Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Stabilitas keamanan dan tertib masyarakat menjadi landasan yang menentukan bagi kemajuan suatu wilayah. Ketika masyarakat merasa aman, mereka dapat lebih fokus pada pengembangan diri, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Sebaliknya, ketidakamanan dapat menciptakan ketegangan, kekhawatiran, dan menghambat potensi masyarakat untuk berkembang. Salah satu indikator yang dapat mencerminkan tingkat keamanan tersebut adalah angka kriminalitas. Semakin rendah angka kriminalitas, semakin tinggi tingkat keamanan dan tertib masyarakat. Hal ini tidak hanya memberikan kepercayaan kepada masyarakat, tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Secara umum, kondisi stabilitas keamanan dan tertib masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Tanggamus dapat dikatakan kondusif. Hal ini terlihat dari menurunnya angka kriminalitas dan terciptanya situasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Berdasarkan data dari Polres Tanggamus, jumlah kasus kriminalitas di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 menurun sebesar 10% dibandingkan tahun 2022. Penurunan ini terjadi pada semua jenis kejahatan, mulai dari pencurian, kekerasan, hingga narkoba.

Isu Strategis 15

Pemerataan Pembangunan Kewilayahan termasuk di Pulau Berpenduduk

Infrastruktur merupakan aset publik yang vital sebagai penyedia layanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mendorong pemerataan infrastruktur yang berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan layanan dasar seluruh masyarakat. Namun, pemerataan pembangunan di Kabupaten Tanggamus masih menghadapi berbagai kendala dan belum mencapai tingkat optimal. Beberapa wilayah masih mengalami kesulitan aksesibilitas, infrastruktur yang kurang memadai, dan keterbatasan sumber daya, yang mengakibatkan kesenjangan antarwilayah dan berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat setempat.

Terlebih terdapat 1 Pulau berpenghuni di wilayah Tanggamus yaitu Pulau Tabuan. Pulau Tabuan, satu-satunya pulau berpenghuni di Kabupaten Tanggamus, terletak di Teluk Semaka dan masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Cukuh Balak. Pulau ini memiliki luas 4.135 hektare dan terbagi menjadi empat pekon: Karang Buah (830 ha), Sawang Balak (1.350 ha), Kuta Kakhang (960 ha), dan Suka Banjar (995 ha). Akses transportasi umum ke Pulau Tabuan terbatas pada perahu kayu yang memerlukan waktu tempuh 3 jam dari

Dermaga Kota Agung atau 1 jam dari Dermaga Putih di Kecamatan Cukuh Balak, yang sebelumnya harus dicapai dengan perjalanan darat selama 2 jam menggunakan sepeda motor.

Pulau Tabuan memiliki fasilitas pendidikan yang terbatas, terdiri dari 2 unit PAUD, 3 unit SD Negeri, 1 SMP Negeri satu atap, dan 1 MA swasta. Fasilitas kesehatan hanya tersedia dalam bentuk 1 unit puskesmas pembantu (pustu) yang berlokasi di Desa Sawang Balak. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur layanan dasar di Pulau Tabuan menjadi prioritas untuk 20 tahun ke depan bagi 663 keluarga di sana, sesuai dengan visi Lampung 2045 untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah berupaya untuk melakukan pemerataan pembangunan kewilayahan. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya optimal. Berikut beberapa kondisi pembangunan kewilayahan di Kabupaten Tanggamus :

1) Layanan infrastruktur dasar

Layanan infrastruktur dasar, seperti jalan, air bersih, dan sanitasi, masih belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Tanggamus. Kondisi kemantapan jalan di Kabupaten Tanggamus masih rendah, yaitu sekitar 37,45%. Hal ini menyebabkan aksesibilitas masyarakat di beberapa wilayah menjadi terbatas. Selain itu, Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk rumah tangga masih sangat terbatas walaupun selalu diupayakan secara berkelanjutan.. Hal ini menyebabkan masyarakat di beberapa wilayah masih menggunakan air tidak layak minum.

2) Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni juga masih terdapat di beberapa wilayah di Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus tahun 2022, jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Tanggamus mencapai 6.798 unit.

3) Kesesuaian Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW

Kesesuaian perencanaan dan pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanggamus juga masih belum optimal. Masih terdapat beberapa wilayah yang pemanfaatan ruangnya tidak sesuai dengan RTRW. Diantara penyimpangan pemanfaatan ruang ditunjukkan oleh tingginya alih fungsi lahan produktif karena pengaruh kegiatan ekonomi, perkembangan penduduk maupun kondisi sosial budaya.

Isu Strategis 16

Perencanaan Pembangunan dan Pembiayaan Daerah yang belum optimal

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses yang sangat penting dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan suatu daerah. Proses ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, hingga sektor swasta. Namun, seringkali perencanaan ini terhambat oleh keterbatasan anggaran. Pada beberapa tahun terakhir, Kabupaten Tanggamus dihadapkan pada ketidakseimbangan antara ambisi pembangunan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap pembangunan daerah, antara lain:

- 1) Pembangunan daerah tidak berjalan efektif dan efisien. Hal ini karena perencanaan pembangunan daerah yang tidak memadai dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan pembangunan daerah. Selain itu, penganggaran yang tidak memadai dapat menyebabkan tidak tersedianya sumber daya keuangan yang cukup untuk membiayai pembangunan daerah.
- 2) Pemerintah daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini karena perencanaan pembangunan daerah yang tidak memadai dapat menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Selain itu, penganggaran yang tidak memadai dapat menyebabkan pemerintah daerah tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
- 3) Peningkatan kesenjangan sosial dan ekonomi. Hal ini karena perencanaan pembangunan daerah yang tidak memadai dapat menyebabkan pembangunan daerah tidak merata. Selain itu, penganggaran yang tidak memadai dapat menyebabkan pemerintah daerah tidak dapat memberikan perhatian yang cukup kepada daerah-daerah yang tertinggal.
- 4) Pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Tanggamus.
- 5) Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang tidak memadai. Hal ini dapat menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tanggamus.
- 6) Peningkatan kemiskinan dan pengangguran. Hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial di Kabupaten Tanggamus.

Pemerintah Kabupaten Tanggamus berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya agar perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran yang memadai diharapkan pembangunan di Kabupaten Tanggamus dapat berjalan dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan

masyarakat. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus adalah :

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang).
- 2) Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan kepada semua perangkat daerah perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien.
- 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran daerah. Hal ini dilakukan dengan membuka akses informasi anggaran kepada masyarakat dan melakukan audit terhadap pelaksanaan anggaran Pemerintah Daerah.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa proses perencanaan pembangunan di tingkat daerah adalah komponen esensial dari perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merumuskan rencana pembangunan daerahnya sendiri, yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional secara keseluruhan, dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam proses tersebut.

4.1. Visi Daerah Tahun 2025-2045

4.1.1. Visi Pembangunan Nasional 2025-2045

Visi abadi Indonesia diterjemahkan ke dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 sebagai **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**. Penentuan visi ini berlandaskan pada: (i) kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia, meliputi kependudukan, modal sosial dan budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim; (ii) perkembangan megatren global; dan (iii) pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara kepulauan besar yang terletak di antara dua samudera besar, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia akan menjadi negara tangguh pada tahun 2045, yang memiliki kekuatan geopolitik, militer, dan geoekonomi serta peradaban maritim yang besar di kancan dunia.

Kekuatan geopolitik : Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya dan mengelola wilayah maritime secara efektif, serta menjalin hubungan kerja sama dengan Negara-negara lain di kawasan dan dunia internasional.

Kekuatan militer : Indonesia memiliki kekuatan dalam bidang militer di seluruh matra, sehingga mampu melindungi wilayah Indonesia dari ancaman asing, mengamankan jalur pelayaran dan perbatasan, mengontrol perairan strategis, dan melaksanakan operasi militer dengan kekuatan besa.

Kekuatan geoekonomi : Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya ekonomi di wilayah maritimnya, serta memperkuat perekonomian domestic dan posisinya

dalam perdagangan internasional, yang meliputi kemampuan untuk mengembangkan industri dan jasa terutama maritime, meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam, serta memperkuat hubungan perdagangan dengan Negara-negara lain di kawasan dan dunia internasional.

Kekuatan peradaban maritime : Indonesia dan masyarakatnya mampu mempertahankan dan mengembangkan warisan budaya baharinya, yang meliputi nilai-nilai, tradisi, seni, dan budaya bahari yang merupakan asset penting dalam memperkuat identitas budaya dan daya saing bangsa di kawasan dan dunia internasional.

Bersatu menegaskan seluruh wilayah Indonesia akan tunduk pada satu sistem hukum nasional yang menjamin hak dan kewajiban yang setara bagi seluruh warga negara. Pemerintahan terpusat memegang kedaulatan tertinggi, namun tetap mengakomodasi desentralisasi dan otonomi daerah untuk menjaga kohesi nasional. Meski beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat, semua dipersatukan oleh identitas nasional dan Pancasila sebagai dasar negara, mencerminkan semangat Bhineka Tunggal Ika.

Berdaulat maksudnya adalah Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur sendiri seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di wilayahnya.

Indonesia sebagai Negara maju dicerminkan dengan perekonomian Indonesia yang mencapai posisi nomor lima terbesar dunia, berbasis pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya Indonesia. Indonesia menjadi Negara berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil, sehingga memiliki daya saing yang tinggi dikancah domestik dan global, ketahanan ekonomi yang kuat terhadap gejolak dan perubahan global serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peran Indonesia semakin penting dalam berbagai forum internasional.

Sedangkan berkelanjutan artinya Indonesia sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.

Gambar 4.1. Visi Indonesia Emas 2045



Sumber: RPJPN 2025-2045

Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran visi, yaitu: mencapai pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, meningkatnya kepemimpinan dan pengaruh Indonesia di dunia internasional, meningkatnya daya saing sumber daya manusia, serta menurunnya intensitas Emisi GRK menuju net zero emission.

Gambar 4.2 Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045



Sumber: RPJPN 2025-2045

Sasaran pertama, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan setara seperti Negara maju sekitar US\$23.000 – 30.300 dan masuk ke dalam ekonomi lima terbesar di dunia yang utamanya didorong oleh peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15,0 persen berbasis inovasi serta secara inklusif dan berkelanjutan. Lapangan pekerjaan layak (*decent job*) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.

Sasaran kedua, sejalan dengan peningkatan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan pendapatan kelas menengah meningkat, sehingga kemiskinan menurun pada kisaran 0,5-0,8 persen, yang diikuti penurunan secara signifikan jumlah penduduk rentan miskin. Ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin menurun dengan Rasio Gini berkisar 0,290-0,320. Sementara itu, ketimpangan antarwilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia menjadi 28,5 persen.

Sasaran ketiga, sejalan dengan kemajuan yang diraih oleh Indonesia, peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang dicerminkan penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global yang diukur dengan *Global Power Index* (GPI) diperingkat 15 besar dunia.

Sasaran keempat adalah meningkatkannya daya saing sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang utamanya diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index*) menjadi 0,73 pada tahun 2045.

Sasaran kelima dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya Intensitas Emisi GRK menjadi 93,5% pada tahun 2045 dibandingkan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca di tahun 2010, dan menuju *net zero emission* pada tahun 2060.

4.1.2. Visi Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

Pembangunan Provinsi Lampung 2045 juga dikonstruksikan untuk mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045 yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan” dan cita-cita luhur perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 menjadi negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Gambar 4.3. Kerangka Berfikir Visi dan Misi Lampung 2045



Sumber : Rancangan RPJPD Provinsi Lampung 2025-2045

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, dan RPJP Nasional 2025-2045 harus menjadi pedoman bagi RPJP Daerah. Dengan memperhatikan faktor internal (geografis, demografi, lingkungan, capaian pembangunan) serta faktor eksternal (tantangan dan isu strategis global, kebijakan nasional, kewenangan daerah), maka rumusan Visi pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut :

VISI LAMPUNG 2025-2045

"SEJAHTERA, MAJU, MERATA, DAN BERKELANJUTAN "

SEJAHTERA: Pada 2045, masyarakat Lampung diharapkan sejahtera, dengan kebutuhan jasmani dan rohani terpenuhi. Ekonomi makmur dengan ketersediaan pangan, sandang, dan perumahan yang terjangkau. Populasi terkontrol dan kualitas hidup meningkat dengan kesehatan dan layanan sosial yang baik. Masyarakat memiliki hak yang terjamin dan akses yang setara ke pekerjaan, pendidikan, dan layanan sosial. Keamanan, ketertiban, serta

keharmonisan sosial terjaga, dengan minimnya kriminalitas dan penyalahgunaan NAPZA. Demokrasi dan pemerintahan dijalankan dengan adil dan transparan.

MAJU (Mandiri dan Berdaya Saing): Pada 2045, pendapatan penduduk Lampung diharapkan masuk kategori “High Income” dengan pertumbuhan ekonomi 6-7 persen, didukung oleh industri yang berperan besar dan SDM berkualitas. Kemiskinan dan pengangguran menurun, masyarakat memiliki jaminan sosial yang cukup, dan kesenjangan antar kelompok berkurang. Pertanian modern dan industri hulu-hilir terintegrasi, serta Lampung menjadi tujuan investasi yang ramah. Teknologi dikuasai, masyarakat produktif dan bermental wirausaha. Pemerintahan efektif, transparan, dan pelayanan publik merata. Infrastruktur berkualitas, konektivitas antarwilayah baik, serta lingkungan aman dan nyaman terjaga.

MERATA: Pembangunan merata memastikan semua masyarakat terlibat dan mendapat manfaat tanpa memandang latar belakang. Ekonomi tumbuh inklusif, membuka peluang usaha dan kerja, serta mengurangi kemiskinan. Distribusi aset tanah diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Ketimpangan ekonomi, pendapatan, dan infrastruktur antarwilayah, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), dikurangi. Layanan publik menyentuh kelompok rentan (anak, lansia, disabilitas), dan kesetaraan gender diperhatikan.

BERKELANJUTAN: Pembangunan Lampung di 2045 harus memastikan ketersediaan sumber daya yang berkelanjutan untuk generasi sekarang dan mendatang, serta menjaga harmoni antara pemerintah pusat dan daerah. Pemanfaatan sumber daya alam harus bijaksana, menjaga kelestarian lingkungan agar diwariskan tanpa membebani generasi berikutnya. Pembangunan sosial dan ekonomi seimbang dengan lingkungan melalui kebijakan ekonomi hijau dan biru, serta pengelolaan bencana dan mitigasi iklim yang andal. Keberlanjutan ini didukung oleh sumber pendanaan inovatif yang melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi. Pembangunan bertahap memerlukan kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen untuk memastikan kesinambungan antarperiode, antartingkat pemerintahan, dan antargenerasi..

Untuk lebih mempertegas bagaimana ukuran keberhasilan dari Visi Lampung 2045, maka visi tersebut juga tercermin pada 5 (lima) Sasaran Visi, yaitu :

- 1) Pendapatan per Kapita penduduk Provinsi Lampung masuk pada level High Income, pada kisaran Rp. 328-384 juta, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi pada kisaran 7 persen, kontribusi sektor Industri dalam PDRB

sebesar 26-28 persen; dan pembangunan ekonomi biru dengan nilai indeks mencapai 65.

- 2) Pengentasan Kemiskinan akan terus ditekan pada kisaran 2,5 – 2,0 persen; dan tingkat Ketimpangan yang rendah pada angka Indeks Gini di level 0,256-0,266 dan kontribusi PDRB Provinsi Lampung terhadap nasional mencapai 2,50 persen; serta persentase Desa Mandiri 31-35 persen.
- 3) Daya Saing Daerah di level nasional mencapai 4,0.
- 4) Kualitas Sumber Daya Manusia yang meningkat, tercermin dari nilai Indeks Modal Manusia (IMM) pada rentang 0,68–0,70 dan IPM berkisar 79,00-80,00.
- 5) Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 93,17 persen dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 78,16.

Secara lebih detail, Sasaran Visi Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1 Sasaran Visi RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

Visi Tahun 2025-2045 : Lampung “Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan”								
No	Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2023	Baseline Tahun 2025	Target			
					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2045
1	Pendapatan Perkapita Dalam Kategori Tinggi	Pendapatan per Kapita (Juta Rupiah)	48,2	52,14 - 54,46	76,82 - 95,94	158,77 - 176,23	267,5 - 296,9	328,03- 384,39
		Pertumbuhan ekonomi	4,55	4,90-5,30	5,31-6,0	5,90- 6,41	6,22-7,0	5,52- 6,97
		Kontribusi sektor Industri dalam PDRB (persen)	18,01	18,50 - 19,40	20,54- 21,1	22,36- 23,4	24,18 - 25,70	26-28
		Indeks ekonomi biru (Indeks)	N/A	23,43	40	50	60	65,16
2	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Rendah	Persentase Penduduk Miskin (persen)	11,11	9,50- 10,00	7,50- 8,50	4,00- 5,00	1,50- 2,00	0,50- 1,00
		Indeks Gini (Indeks)	0,324	0,318- 0,321	0,290- 0,310	0,275- 0,280	0,270- 0,274	0,256 - 0,266
		Persentase Desa Mandiri (persen)	7,46	1,51	4,0 - 5,0	6,0 - 8,0	10,0 - 12,0	13,0 - 15,13
3	Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,02	3,02	3,1- 3,25	3,26- 3,30	3,30- 3,75	3,76 - 4,00
		Kontribusi PDRB Provinsi Lampung terhadap nasional (persen)	2,15	2,17	2,25	2,33	2,42	2,50

Visi Tahun 2025-2045 : Lampung “Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan”								
No	Sasaran Visi	Indikator	Capaian 2023	Baseline Tahun 2025	Target			
					Tahun 2025-2029	Tahun 2030-2034	Tahun 2035-2039	Tahun 2040-2045
4	Kualitas Sumber Daya Manusia yang Meningkat	IPM (Indeks)	72,48	73,00	73,01-75,00	75,01-77,00	77,01-78,90	79,00 – 80,00
		IMM (Indeks)	0,52	0,54	0,57-0,59	0,60-0,62	0,64-0,66	0,68 - 0,70
5	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (persen)	14,92	62,79	69,79	72,79	82,79	93,17
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,91	70,99	76,37	76,82	77,73	78,16

Sumber: RPJPD Provinsi Lampung 2025-2045

4.1.3. Visi Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2045

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertuang visi abadi Indonesia yaitu **Negara yang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur**. Visi tersebut didukung oleh empat misi abadi yang merupakan tujuan Bangsa Indonesia, yaitu Kesatu, melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Selanjutnya visi abadi Indonesia tersebut diterjemahkan kedalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yaitu **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan**, visi tersebut dikenal juga dengan Visi Indonesia Emas 2045. Penentuan visi tersebut berlandaskan pada tiga hal strategis yaitu Kesatu, kekuatan modal dasar yang dimiliki Indonesia meliputi kependudukan, modal sosial dan budaya, kekayaan alam, dan kekuatan maritim. Kedua, perkembangan megatren global dan Ketiga, pencapaian pembangunan periode sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas serta memperhatikan potensi daerah yang dimiliki, pencapaian pembangunan daerah sebelumnya dan tantangan yang akan dihadapi maka disusunlah Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanggamus sebagai berikut:

VISI KABUPATEN TANGGAMUS 2025-2045 **“TANGGAMUS SEJAHTERA, MAJU DAN BERKELANJUTAN”**

Terdapat tiga kata kunci dalam visi RPJPD tersebut diatas yaitu Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan. Visi ini merupakan cita-cita dan komitmen seluruh komponen di Kabupaten Tanggamus yang akan diwujudkan dalam periode tahun 2025-2045.

Kabupaten Tanggamus **sejahtera** adalah Kabupaten Tanggamus yang memiliki masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani maupun rohani, dan hidup dalam kedamaian dan ketentraman. Komponen utama dalam kata kunci ini yaitu makmur, mandiri dan aman. **Makmur** bermakna mampu mencukupi kebutuhan dasar yang bisa dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat. **Mandiri** memiliki arti bahwa Kabupaten Tanggamus harus mampu mengurangi ketergantungan dengan menjalankan pembangunan daerah secara adil dan merata yang ditopang oleh sumber daya alam yang dimiliki serta pendapatan daerah sebagai pendanaan pembangunan daerah. Sedangkan **aman** bermakna bahwa Kabupaten Tanggamus mampu memberikan perlindungan dan keamanan bagi masyarakatnya di segala aspek kehidupan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, politik maupun keamanan sehingga terwujud lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk berkembang dan berkontribusi pada pembangunan secara aktif dan produktif.

Kabupaten Tanggamus yang **maju** adalah Kabupaten Tanggamus yang memiliki daya saing yang tinggi dikancah regional yang berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya sehingga menjadi daerah yang modern, tangguh, inovatif dan adil. **Modern** memiliki arti bahwa Kabupaten Tanggamus memiliki infrastruktur yang baik dan maju, serta tata kelola sistem pemerintahan yang transparan, efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang ditunjang dengan teknologi yang mutakhir. **Tangguh** bermakna Kabupaten Tanggamus memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan dan krisis dengan kemampuan yang kuat dan andal, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, politik maupun keamanan. **Inovatif** berarti bahwa Kabupaten Tanggamus memiliki sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi sehingga mampu memainkan peran yang penting dalam memecahkan berbagai masalah sosial dan lingkungan yang semakin kompleks dimasa depan. Sedangkan **adil** bermakna bahwa seluruh Masyarakat Kabupaten Tanggamus dapat menikmati keadilan yang merata dalam segala aspek kehidupan seperti dalam hal distribusi sumber daya, akses terhadap layanan publik, perlakuan yang sama di hadapan hukum,

kesempatan bekerja, akses kesehatan dan pendidikan tanpa diskriminasi serta didukung oleh sistem jaminan sosial yang kuat.

Berkelanjutan bermakna bahwa Kabupaten Tanggamus berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup. Komponen penting dalam berkelanjutan yaitu **lestari** yang berarti bahwa di Kabupaten Tanggamus harus mampu menjaga keseimbangan pembangunan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga terjaga kualitas hidup manusia yang prima.

Tabel 4.2. Penyelarasan Visi RPJP Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2045 dan RPJP Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 serta RPJP Nasional Tahun 2025-2045

No	Visi RPJPN Tahun 2025-2045	Visi RPJPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2045	Visi RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2045
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	Sejahtera, Maju, Merata, dan Berkelanjutan	Tanggamus Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan

Sumber: Analisis, data diolah, 2024

Tabel 4.3. Penyusunan Penjelasan Visi RPJPD Tahun 2025-2045

VISI	POKOK-POKOK VISI	KOMPONEN UTAMA VISI	PENJELASAN VISI
Kabupaten Tanggamus Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan	Sejahtera		Memiliki masyarakat yang telah terpenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani maupun rohani, dan hidup dalam kedamaian dan ketentraman
		Makmur	Mampu mencukupi kebutuhan dasar yang bisa dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat
		Mandiri	Mampu mengurangi ketergantungan dengan menjalankan pembangunan daerah secara adil dan merata yang ditopang oleh sumber daya alam yang dimiliki serta pendapatan daerah sebagai pendanaan pembangunan daerah
		Aman	Mampu memberikan perlindungan dan keamanan bagi masyarakatnya di segala aspek kehidupan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, politik maupun keamanan sehingga terwujud lingkungan yang kondusif bagi masyarakat untuk berkembang dan berkontribusi pada pembangunan secara aktif dan produktif

VISI	POKOK-POKOK VISI	KOMPONEN UTAMA VISI	PENJELASAN VISI
	Maju		Memiliki daya saing yang tinggi dikancah regional yang berbasis pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya sehingga menjadi daerah yang modern, tangguh, inovatif dan adil
		Modern	Memiliki infrastruktur yang baik dan maju, serta tata kelola sistem pemerintahan yang transparan, efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang ditunjang dengan teknologi yang mutakhir.
		Tangguh	Memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan dan krisis dengan kemampuan yang kuat dan andal, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, politik maupun keamanan
		Inovatif	Memiliki sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi sehingga mampu memainkan peran yang penting dalam memecahkan berbagai masalah sosial dan lingkungan yang semakin kompleks dimasa depan
		Adil	Menikmati keadilan yang merata dalam segala aspek kehidupan seperti dalam hal distribusi sumber daya, akses terhadap layanan publik, perlakuan yang sama di hadapan hukum, kesempatan bekerja, akses kesehatan dan pendidikan tanpa diskriminasi serta didukung oleh sistem jaminan sosial yang kuat.
	Berkelanjutan		Berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup
		Lestari	Mampu menjaga keseimbangan pembangunan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan sehingga terjaga kualitas hidup manusia yang prima.

Sumber: Analisis, data diolah, 2024

4.2. Sasaran Visi Daerah 2025-2045

Visi Tanggamus “**Tanggamus Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan**” dicerminkan oleh lompatan besar meliputi 5 sasaran visi yaitu: (1) Peningkatan Pendapatan per Kapita; (2) Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan; (3) Daya

Saing Daerah; (4) Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia; (5) Penurunan Emisi GRK menuju *net zero emission* sebagaimana tertera pada table di bawah ini.

Sasaran Pertama. Produktivitas ekonomi meningkat dibuktikan dengan meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanggamus yang mencapai 5,4-6,8 persen per tahun; pertumbuhan tersebut akan mendorong Peningkatan Pendapatan per Kapita mencapai 192,6-239,9 juta rupiah.

Sasaran Kedua. Sejalan dengan peningkatan perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat maka kemiskinan terus menurun pada kisaran 2,8-1,8 persen. Peningkatan pendapatan terdistribusi merata sehingga Ketimpangan pendapatan antar penduduk rendah pada angka indeks Gini di level 0,202-0,197.

Sasaran ketiga. Daya Saing Daerah yang tercermin dari meningkatnya Indeks Daya Saing Daerah mencapai 3,5-4,0;

Sasaran keempat. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui pendidikan dan peningkatan kualitas kesehatan; Kualitas sumber daya manusia yang mampu berdaya saing global yang tercermin dari nilai Indeks Pembangunan Manusia pada rentang 86,5-87,3, dan

Sasaran kelima bahwa pembangunan berkelanjutan tetap dilaksanakan dalam kerangka menjaga kelestarian alam yang utamanya ditunjukkan dengan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 93,17 persen.

Tabel 4.4 Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2045

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2023	Baseline Th. 2025	Target Priode			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
1	Pendapatan Perkapita Dalam Kategori Tinggi	Pendapatan per Kapita (Juta Rupiah)	29,6	34,41-34,42	46,6-47,9	76,2-82,4	119,3-137,1	192,6-250
		Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	4,70	4,88-5,20	5,2-5,9	6,1-7,2	6,1-7,4	5,4-6,8
		Kontribusi sektor Industri dalam PDRB (persen)	6,30	6,6	7,1	9,6	13,6	19,9

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2023	Baseline Th. 2025	Target Priode			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Indeks ekonomi biru (Indeks)	N/A	23,43	40	50	60	65,16*
2	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan Rendah	Persentase Penduduk Miskin (persen)	10,28 (2024)	9,28	8,3-8,4	6,2-6,6	3,9-4,6	0,50-1,00
		Indeks Gini (Indeks)	0.256	0,231	0,189-0,231	0,1470-180	0,114-0,140	0,084-0,109
		Persentase Desa Mandiri (persen)	3,6 (2024)	4,0-8,0	9,0-15,0	16,0-22,0	23,0-29,0	30,0-33,0
3	Daya Saing Daerah	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	2,90	3,02	3,1-3,25	3,26-3,30	3,30-3,75	3,76 - 4,00
		Kontribusi PDRB Provinsi Lampung terhadap nasional (persen)	2,15	2,17	2,25	2,33	2,42	2,50
4	Kualitas Sumber Daya Manusia yang Meningkat	Kualitas Sumber Daya Manusia						
		IPM (Indeks)	69,93	71,47	73-73,1	73-75,3	76,10-78,00	79-80
		- IMM (Indeks)	0,52	0,54	0,57-0,59	0,60-0,62	0,64-0,66	0,68 - 0,70
5	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) kumuatif(ton CO2. Ekuivalen)	NA	331,795.42	331,795.42-414,194.56	434,747.00-511,809.12	531.542,43-612.349,81	634,029.18-761,810.92
		Persentase Penurunan Gas Rumah Kaca		9,52	9,52	16,57	23,62	30,69
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,75	69,14	70,15	71,41	72,68	74,19

Sumber : Hasil Analisis Tim Penyusun

4.3. Misi Daerah Tahun 2025-2045

4.2.1. Misi dan Arah Pembangunan Nasional 2025-2045

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dilaksanakan 8 (delapan) Misi (agenda) Pembangunan. Delapan agenda ini pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu (i) Transformasi Indonesia, dengan 3 (tiga) Agenda yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola; (ii) Landasan Transformasi terdiri dari 2 (dua) Agenda yaitu Agenda Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi serta Agenda Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; dan (iii) Kerangka Implementasi dengan 3 (tiga) Agenda yaitu Agenda Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas; Agenda Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; serta Agenda Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan. Kedelapan agenda tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) Arah Kebijakan menuju Indonesia Emas 2045.

Delapan misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi yang adaptif dan taat asas, serta birokrasi yang bersih, efektif, ramah, dan cepat.
4. Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya dalam pengelolaan risiko bencana dan iklim, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan, dan guncangan.

6. Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan ketangguhan diplomasi, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
7. Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
8. Kestinambungan pembangunan yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Gambar 4.4. Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045



Sumber: RPJPN 2025-2045

4.2.2. Misi Pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2025-2045

Pembangunan Lampung ke depan perlu mengubah pendekatan dengan menggunakan paradigma baru. Langkah reformasi saja tidak cukup. Sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045, Lampung juga harus melakukan transformasi secara menyeluruh berlandaskan kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk mendorong kemajuan. Untuk mewujudkan Visi Lampung 2025-2045 “Sejahtera, Maju, Merata dan Berkelanjutan” akan dituangkan dalam **3 (tiga) pilar transformasi daerah** dan ditempuh melalui **8 (delapan) Misi Pembangunan**, yaitu : 1)Transformasi Sosial; 2)Transformasi Ekonomi; 3)Transformasi Tata Kelola; 4) Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas

Ekonomi Makro Daerah; 5)Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; 6)Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; 7)Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; serta 8)Kestinambungan Pembangunan.

TRANSFORMASI DAERAH :

1) Misi ke-1 : Transformasi Sosial : Mewujudkan SDM yang Unggul, Adaptif, dan Produktif

Misi ini untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, adaptif dan produktif. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Untuk itu, setiap penduduk di Provinsi Lampung harus hidup lebih sehat, mendapatkan pendidikan inklusif dan adaptif serta perluasan nilai manfaat perlindungan sosial.

2) Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi : Menuju Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Misi ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi Lampung dengan meningkatkan produktivitas, daya saing, serta digitalisasi pasar, dan membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru yang merata, inklusif dan berkelanjutan. Disamping itu, potensi dan keunggulan yang dimiliki terus dikembangkan dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru di sektor riil (dalam bentuk PMA dan PMDN) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja.

3) Misi ke-3 : Transformasi Tata Kelola : Mewujudkan Pelayanan Publik Berkualitas dan Merata

Misi ini bertujuan mewujudkan kelembagaan pemerintah yang menerapkan tata kelola pemerintahan efektif dan akuntabel serta pemantapan kapasitas dan kualitas SDM aparatur untuk mewujudkan pelayanan publik berkualitas dan merata.

LANDASAN TRANSFORMASI DAERAH :

4) Misi ke-4 : Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Misi ini bertujuan untuk menyiapkan landasan transformasi pembangunan daerah melalui peningkatan keamanan, ketertiban umum dan penegakan supremasi sebagai kondisi perlu yang akan mendukung stabilitas makro ekonomi daerah serta mendorong kehidupan demokrasi bertanggungjawab dalam masyarakat. Dengan landasan yang kuat tersebut, maka diharapkan dapat terwujud Provinsi Lampung yang aman, demokratis dan stabil.

5) Misi ke-5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Misi ini bertujuan untuk menyiapkan landasan transformasi pembangunan daerah melalui perwujudan ketangguhan dan keseimbangan antara kebutuhan aktifitas manusia dengan terpeliharanya kualitas lingkungan secara terus menerus.

KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI DAERAH :

6) Misi ke-6 : Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Misi ini bertujuan menciptakan kesetaraan dan kesejahteraan yang lebih merata di seluruh wilayah, mengurangi ketimpangan Ekonom dengan meningkatkan Akses terhadap layanan dasar wilayah dengan memperkuat infrastruktur di wilayah-wilayah yang tertinggal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan memfasilitasi aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat sehingga menciptakan peluang kerja dan sumber penghidupan yang lebih merata di seluruh wilayah dan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan di berbagai wilayah berjalan seimbang dengan pelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam.

7) Misi ke-7 : Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkunga

Misi ini bertujuan pada pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan ketahanan ekologi dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana. Dengan populasi global yang terus meningkat dan dampak perubahan iklim yang semakin terasa, pembangunan infrastruktur yang tahan bencana dan berkelanjutan menjadi semakin penting. Misi ini menekankan pada pengelolaan sumber daya alam, konservasi energi, pengelolaan limbah, perlindungan lingkungan, dan perlindungan biodiversitas serta pengelolaan sumber daya air. Misi ini melibatkan implementasi kebijakan yang berkelanjutan serta mengupayakan pengurangan dampak negatif terhadap

lingkungan. Menjamin bahwa proyek infrastruktur dan lingkungan tidak hanya berkelanjutan dari perspektif lingkungan, tetapi juga secara ekonomi berkelanjutan dalam jangka panjang baik melalui teknologi yang inovatif dan ramah lingkungan untuk meningkatkan infrastruktur dan memastikan pengelolaan yang efisien dan berkelanjutan dari sumber daya alam.

8) Misi ke-8 : Kestinambungan Pembangunan

Misi ini bertujuan untuk menjamin konsistensi, keselarasan dan kesinambungan perencanaan pembangunan secara antarwaktu, antar periode dan antarjenjang pemerintahan; dan terbentuknya ekosistem pendanaan pembangunan daerah yang mencirikan kemandirian.

4.2.3. Misi Kabupaten Tanggamus 2025-2045

Menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks, Kabupaten Tanggamus memandang perlu untuk melakukan transformasi mendasar dalam pengelolaan daerah. Langkah-langkah reformasi yang dilakukan sebelumnya dinilai belum cukup untuk mengantarkan Tanggamus pada pencapaian visi kemajuan yang diharapkan. Oleh karena itu, pendekatan baru dengan paradigma yang lebih visioner dan komprehensif menjadi keniscayaan. Pendekatan ini harus selaras dengan Visi Indonesia Emas 2045 yang telah dicanangkan pemerintah pusat, sekaligus menjawab aspirasi masyarakat Tanggamus akan kehidupan yang sejahtera, maju, dan berkelanjutan di masa depan.

Untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut, pemerintah Kabupaten Tanggamus telah merumuskan Visi Tanggamus 2045 yaitu "Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan". Visi ini akan dituangkan melalui **3 (tiga) pilar transformasi daerah** dan ditempuh melalui **8 (delapan) Misi Pembangunan**.

TRANSFORMASI DAERAH :

1) Misi ke-1 : Transformasi Sosial

Misi ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap penduduk Kabupaten Tanggamus dapat menikmati fasilitas kesehatan yang lebih baik, memperoleh akses pendidikan yang inklusif dan adaptif, serta mendapatkan manfaat dari sistem perlindungan sosial yang lebih komprehensif. Implementasi strategi

ini diharapkan akan menghasilkan sumber daya manusia berkualitas unggul.

Manusia sebagai subjek dan objek utama pembangunan, memerlukan pengembangan yang holistik. Kualitas sumber daya manusia tidak hanya diukur dari penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan dan taraf hidup. Sinergi antara pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang prima, dan standar hidup yang layak akan menciptakan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan produktif, yang pada gilirannya akan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah.

Dalam menghadapi era disrupsi teknologi yang pesat, perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan, dan dinamika geopolitik global, diperlukan transformasi sosial yang fundamental. Perubahan-perubahan ini akan berdampak luas pada struktur, institusi, nilai, dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, transformasi sosial menjadi kunci penting dalam mempersiapkan masyarakat menghadapi tantangan masa depan yang lebih kompleks dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi.

Keberhasilan transformasi sosial ini bertumpu pada tiga pilar utama, yakni : pemenuhan pelayanan dasar, pengembangan modal manusia, dan penguatan modal sosial budaya. Implementasinya diwujudkan melalui tiga upaya pembangunan yang saling terkait dan harus dijalankan secara simultan :

- a. Penyediaan akses kesehatan yang universal dan berkualitas.
- b. Pengembangan sistem pendidikan yang berkualitas tinggi dan merata.
- c. Implementasi sistem perlindungan sosial yang adaptif dan responsif.

Ketiga upaya pembangunan ini menjadi sangat krusial mengingat dinamika pembangunan yang semakin cepat dan kompleks, yang menimbulkan perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik dan adaptif ini, diharapkan Kabupaten Tanggamus dapat membangun fondasi yang kokoh untuk menghadapi tantangan masa depan, meningkatkan daya saing daerah, dan pada akhirnya mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan.

2) Misi ke-2 : Transformasi Ekonomi

Misi ini diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi di Kabupaten Tanggamus melalui peningkatan produktivitas, daya saing, dan digitalisasi pasar, serta pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang

merata, inklusif, dan berkelanjutan. Fokus utama diarahkan pada pengembangan potensi dan keunggulan daerah, dengan orientasi pada integrasi ekonomi nasional dan global. Strategi ini mencakup penguatan ekonomi berbasis agro yang kemudian ditransformasikan menuju ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa dengan dukungan teknologi mutakhir. Sebagai katalis pertumbuhan, peningkatan investasi di sektor riil, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), menjadi prioritas untuk memperluas lapangan kerja.

Dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks, pembangunan ekonomi Kabupaten Tanggamus dalam dua dekade mendatang memerlukan transformasi ekonomi yang fundamental. Proses ini akan menggeser struktur ekonomi daerah secara gradual, dari yang semula bertumpu pada komoditas bernilai tambah rendah, menuju ekonomi berbasis industri dengan nilai tambah tinggi, didukung oleh inovasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing. Transformasi ini menjadi kunci dalam upaya Kabupaten Tanggamus untuk keluar dari kategori daerah berpendapatan menengah-bawah (*lower-middle income*) menuju daerah berpendapatan tinggi (*high income*).

Reorientasi ekonomi akan diarahkan pada perdagangan bernilai tambah tinggi, mengadaptasi model ekonomi yang lebih efisien dan produktif untuk memperkuat sektor-sektor potensial. Mengingat kompleksitas proses ini, diperlukan kolaborasi sinergis antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga pendukung lainnya untuk menjamin pertumbuhan yang tinggi dan inklusif. Dari sisi pemerintahan, komitmen kuat dan implementasi kebijakan yang tepat sasaran menjadi prasyarat untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

3) Misi ke-3 : Transformasi Tata Kelola

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kelembagaan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), efektif, dan akuntabel. Fokus utamanya adalah pada peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur, dengan tujuan akhir menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan merata.

Tata kelola pemerintahan yang baik didefinisikan sebagai pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, dan akuntabel, berlandaskan pada pertukaran informasi yang terbuka dan transparan, serta kepatuhan terhadap kerangka hukum yang berlaku. Konsep ini mencakup interaksi yang luas dengan

berbagai elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha, komunitas adat, dan beragam kelompok sosial lainnya.

Dalam konteks pemerintahan, implementasi tata kelola yang baik merupakan suatu keharusan dalam pengelolaan sektor publik. Transformasi tata kelola dipandang sebagai langkah strategis untuk memungkinkan pemerintah beroperasi dalam kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel. Kunci keberhasilan transformasi ini terletak pada ketersediaan SDM aparatur yang tidak hanya berkualitas tinggi, tetapi juga berintegritas dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan sektor publik.

Tata kelola pemerintahan yang baik merepresentasikan konsensus yang dicapai antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Proses ini mengacu pada mekanisme pengambilan keputusan dan implementasinya yang dapat dipertanggungjawabkan secara kolektif. Transformasi tata kelola diarahkan pada tiga aspek utama: regulasi dan kelembagaan, pengembangan SDM aparatur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Transformasi tata kelola ini diharapkan akan menghasilkan sistem pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, pemerintah dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik, fasilitator pembangunan, dan katalisator pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Implementasi transformasi tata kelola ini memerlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Sehingga diharapkan dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga mampu merespons dinamika perubahan dan tantangan pembangunan di era global dengan lebih baik.

LANDASAN TRANSFORMASI DAERAH :

4) Misi ke-4 : Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Menjunjung Supermasi Hukum;

Misi ini bertujuan untuk memperkokoh fondasi transformasi pembangunan daerah melalui tiga pilar utama: peningkatan keamanan, pemantapan ketertiban umum, dan penguatan kehidupan demokratis. Implementasi ketiga pilar ini diproyeksikan akan menjadi katalis dalam mendukung stabilitas ekonomi makro daerah. Dengan landasan yang kuat ini,

diharapkan dapat terwujud visi Kabupaten Tanggamus sebagai wilayah yang aman, demokratis, dan stabil.

Dalam konteks yang lebih luas, transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola merupakan inti dari agenda transformasi pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk memastikan keberhasilan implementasi ketiga dimensi transformasi tersebut, diperlukan fondasi yang kokoh berupa stabilitas multidimensi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Lebih lanjut, stabilitas ini juga akan memperkuat daya tahan daerah dalam menghadapi berbagai gejolak dan tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hal ini menjadi sangat krusial mengingat dinamika global yang semakin kompleks dan tidak pasti.

Dalam implementasinya, misi ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, aparat keamanan, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Koordinasi yang erat antar berbagai elemen ini akan menjadi kunci dalam membangun landasan yang kokoh bagi transformasi pembangunan Kabupaten Tanggamus.

5) Misi ke-5 : Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Misi ini bertujuan untuk membangun landasan yang kokoh bagi transformasi pembangunan daerah melalui penciptaan ketangguhan dan keseimbangan antara dimensi sosial-budaya dan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan lintas generasi. Esensi dari ketangguhan budaya bangsa tercermin dalam nilai-nilai religius, kearifan lokal, dan norma budaya yang mengakar, serta terwujudnya masyarakat yang beradab dan bermartabat. Karakteristik ini diharapkan dapat menjadi benteng dalam menghadapi infiltrasi budaya negatif dari luar.

Strategi implementasi dimulai dari unit terkecil masyarakat melalui pembangunan kualitas keluarga, yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar dan penyediaan perlindungan sosial. Pendekatan ini dilandasi oleh literasi keagamaan yang inklusif dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Pembentukan karakter masyarakat yang tangguh diproyeksikan akan mendukung optimalisasi pengendalian kerusakan lingkungan hidup serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan pangan, energi, dan air.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi menjadi fondasi krusial dalam mewujudkan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola yang holistik. Masyarakat yang tangguh dicirikan oleh kemampuannya dalam menjaga keseimbangan dalam menghadapi berbagai perubahan dan guncangan. Fokus utama diarahkan pada pemeliharaan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkelanjutan, memungkinkan setiap individu untuk hidup berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan, sambil meminimalisir dampak eksploitasi sumber daya alam.

Implementasi strategi ini diharapkan akan menghasilkan masyarakat yang tangguh secara sosial-budaya, memiliki kesadaran ekologis yang tinggi, serta mampu berkontribusi secara optimal dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, transformasi pembangunan daerah dapat berjalan secara holistik, inklusif, dan berkelanjutan, menciptakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan penguatan identitas budaya.

KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI DAERAH :

6) Misi ke-6 : Pemerataan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas dan Berkeadilan untuk Mengurangi Disparitas Wilayah;

Misi ini diarahkan untuk memitigasi disparitas pembangunan yang terjadi di wilayah Kabupaten Tanggamus. Upaya ini dilaksanakan melalui serangkaian langkah komprehensif yang mencakup beberapa aspek krusial. Pertama, peningkatan konektivitas antar wilayah menjadi fokus utama guna memfasilitasi pergerakan orang, barang, dan jasa secara lebih efisien. Kedua, pemerataan akses terhadap infrastruktur vital diupayakan untuk memastikan bahwa setiap daerah memiliki fondasi yang kuat untuk berkembang. Ketiga, penyediaan layanan dasar masyarakat dan fasilitas publik yang merata menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk di seluruh wilayah.

Selain itu, misi ini juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah pekon (desa) maju, yang akan berfungsi sebagai motor penggerak pembangunan di tingkat akar rumput. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru juga menjadi bagian integral dari strategi ini, bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan merangsang aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan kewilayahan ini berlandaskan pada tiga prinsip fundamental. Pertama, prinsip keadilan, yang menjamin bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Kedua, prinsip partisipasi masyarakat, yang memastikan keterlibatan aktif warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Ketiga, prinsip keberlanjutan lingkungan, yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang

7) Misi ke-7 : Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan yang Berbasis Mitigasi Bencana;

Misi ini memiliki tujuan yaitu pengembangan infrastruktur berkualitas yang ramah lingkungan dan penguatan kapasitas mitigasi bencana. Fokus utamanya adalah menciptakan ekosistem yang berkelanjutan dan tahan terhadap berbagai tantangan lingkungan serta iklim yang semakin tidak menentu.

Dalam aspek pengembangan infrastruktur, misi ini menekankan pada pembangunan sarana dan prasarana yang tidak hanya fungsional dan berkualitas tinggi, tetapi juga memiliki dampak minimal terhadap lingkungan. Hal ini mencakup penggunaan material ramah lingkungan, desain hemat energi, dan integrasi teknologi hijau dalam berbagai proyek pembangunan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan binaan yang harmonis dengan alam sekitarnya, sekaligus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penggunanya.

Sementara itu, dalam konteks mitigasi bencana, misi ini berfokus pada peningkatan ketangguhan masyarakat dan infrastruktur terhadap berbagai jenis bencana alam serta dampak perubahan iklim. Ini melibatkan serangkaian upaya komprehensif, mulai dari pemetaan risiko bencana, pengembangan sistem peringatan dini, hingga penguatan struktur bangunan dan infrastruktur vital.

Lebih spesifik lagi, misi ini menargetkan beberapa area kunci untuk mencapai tujuan tersebut :

- a. Pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan: Ini mencakup implementasi sistem pengolahan sampah terpadu, mulai dari pemilahan di sumber, pengumpulan yang efisien, hingga pengolahan dan daur ulang yang inovatif. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban lingkungan akibat timbunan sampah dan menciptakan ekonomi sirkular.

- b. Penurunan emisi gas rumah kaca: Upaya ini melibatkan berbagai strategi, termasuk peningkatan efisiensi energi di berbagai sektor, transisi menuju energi terbarukan, pengembangan transportasi ramah lingkungan, serta pelestarian dan perluasan ruang hijau sebagai penyerap karbon alami.
- c. Peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana: Fokus ini meliputi edukasi masyarakat tentang risiko bencana dan langkah-langkah mitigasi, pengembangan infrastruktur tahan bencana, serta penguatan sistem manajemen bencana di tingkat lokal dan nasional.

Dengan pendekatan ini, misi tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas, di mana masyarakat dapat hidup dan berkembang selaras dengan alam. Selain itu, misi ini juga bertujuan untuk membangun ketangguhan kolektif dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan potensi bencana alam, sehingga dapat menjamin keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang."

8) Misi ke-8 : Kestinambungan Pembangunan untuk Mengawal Pencapaian Tujuan Pembangunan;

Misi ini memiliki dua tujuan utama yang saling berkaitan dan bersifat fundamental bagi keberhasilan pembangunan jangka panjang. Pertama, misi ini bertujuan untuk memastikan adanya konsistensi, keselarasan, dan kestinambungan dalam proses perencanaan pembangunan. Kedua, misi ini berupaya membentuk suatu ekosistem pendanaan pembangunan daerah yang mencerminkan prinsip kemandirian.

Dalam konteks konsistensi, keselarasan, dan kestinambungan perencanaan pembangunan, misi ini menekankan pentingnya harmonisasi dalam tiga dimensi utama :

- a. **Antar waktu** : Hal ini mengacu pada kontinuitas perencanaan dari waktu ke waktu, memastikan bahwa rencana jangka pendek, menengah, dan panjang saling terkait dan mendukung satu sama lain. Tujuannya adalah untuk menciptakan trajektori pembangunan yang koheren dan berkelanjutan, di mana setiap tahap pembangunan menjadi landasan yang kokoh bagi tahap berikutnya.
- b. **Antar periode** : Dimensi ini berfokus pada kestinambungan perencanaan antara berbagai periode pemerintahan. Meskipun pergantian kepemimpinan adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi, misi ini bertujuan untuk memastikan bahwa program-program pembangunan

yang bermanfaat dan strategis dapat terus berlanjut, terlepas dari perubahan politik. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas pembangunan jangka panjang.

- c. **Antar jenjang pemerintahan** : Aspek ini menekankan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan di setiap tingkat saling mendukung dan memperkuat, bukan malah tumpang tindih atau bertentangan.

Sementara itu, pembentukan ekosistem pendanaan pembangunan daerah yang mandiri merupakan aspek krusial lainnya dari misi ini. Kemandirian dalam konteks ini tidak hanya merujuk pada kemampuan daerah untuk membiayai pembangunannya sendiri, tetapi juga mencakup beberapa elemen penting :

- a. Diversifikasi sumber pendanaan: Mendorong daerah untuk mengembangkan berbagai sumber pendapatan, tidak hanya bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
- b. Optimalisasi potensi daerah: Memanfaatkan secara maksimal sumber daya dan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh masing-masing daerah.
- c. Inovasi dalam skema pembiayaan: Mengembangkan mekanisme pembiayaan kreatif seperti kemitraan pemerintah-swasta, obligasi daerah, atau crowdfunding untuk proyek-proyek pembangunan.
- d. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan : Memperkuat kemampuan daerah dalam merencanakan, mengalokasikan, dan mengelola anggaran secara efektif dan transparan.

UPAYA SUPER PRIORITAS (*GAME CHANGER*) PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025-2045

Dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045, terdapat upaya transformatif super prioritas (*Game Changer*) Pembangunan Daerah Tahun 2025-2045 yang diselaraskan dengan RPJPN, antara lain:

No	TRANSFORMASI DAERAH	UPAYA SUPER PRIORITAS (<i>GAME CHANGER</i>) DAERAH	
A.	Transformasi Ekonomi	1.	Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor.
		2.	Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital.
B.	Transformasi Sosial	3.	Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (food, energy, water).
		4.	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah).
		5.	Investasi pelayanan primer, penuntasan stunting, serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama tuberculosis dan kusta).
		6.	Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.
C.	Transformasi Tata Kelola	7.	Digitalisasi Pelayanan Publik berbasis satu data.
		8.	Penerapan system merit pada birokrasi pemerintahan.
D.	Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Berkelanjutan	9.	Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau.
		10.	Integrasi infrastruktur konektivitas dengan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi dalam wilayah.
		11.	Implementasi aktivitas ekonomi pada Kawasan industri.
		12.	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Lebih jauh daripada itu, arah kebijakan daerah ditujukan untuk mengimplementasikan arah pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi sebagaimana yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga pembangunan daerah harus mendukung pencapaian target kinerja pembangunan nasional. Sebagaimana diamantkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen perencanaan perlu disusun untuk dapat menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara pusat dan daerah.

Guna mewujudkan Visi Kabupaten Tanggamus 2045, diperlukan penetapan arah kebijakan dan sasaran pokok yang ingin dicapai melalui implementasi perencanaan bertahap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun atau yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pentahapan ini memungkinkan pembangunan daerah dilakukan secara terstruktur dan sistematis dalam jangka menengah guna merealisasikan visi jangka panjang Kabupaten Tanggamus.

Pentahapan pembangunan lima tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2045 disesuaikan dengan tahapan pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045.

Arah kebijakan dalam mencapai visi dan misi pada RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

- 1) Tahapan Kesatu (2025-2029) berupa Penguatan Fondasi Transformasi Pembangunan;
- 2) Tahapan Kedua (2030-2034) berupa Akselerasi Transformasi Pembangunan;
- 3) Tahapan Ketiga (2035-2039) berupa Ekspansi Pembangunan;
- 4) Tahapan Keempat (2040-2045) berupa Perwujudan Visi Pembangunan.

Gambar 5.1. Empat Tahapan Pembangunan Lima Tahunan dalam RPJPD



Sumber : Bapperida Kabupaten Tanggamus, 2024 (diolah)

Selanjutnya, penerapan 4 (empat) tahap pembangunan lima tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah akan diuraikan lebih rinci pada masing-masing Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Adapun skenario pembangunannya dirancang sebagai berikut :

5.1.1. Misi ke-1 : Tranformasi Sosial

Arah Kebijakan :

1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
 - Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.
 - Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
 - Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.
 - Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.
 - Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.
 - Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
 - Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas.
 - Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.
 - Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
 - Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.

- Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, *digital literacy*, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).
- Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
- Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan.
- Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.
- Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).
- Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
- Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.
- Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
- Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
- Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
- Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.
- Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
- Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas.
- Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
- Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan.
- Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada daerah perdesaan.
- Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan

pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya.

- Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.
- Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (*unique & high-value economy*), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- Pengembangan/peningkatan *government-induced activities* dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi melalui bertambahnya *demand*.
- Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan.
- Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.
- Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.
- Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling*.
- Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau *urban renewal* pada area yang telah mengalami *urban decay* dalam suatu kawasan perkotaan.
- Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.

Tabel 5.1. Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-1

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-1			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
MISI KE-1 : TRANSFORMASI SOSIAL	Pemenuhan Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan Sosial yang Berkualitas dan Berkeadilan	Akselerasi Pembangunan Manusia melalui Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan Pendidikan yang Modern, Pendidikan akhlak dan karakter	Optimalisasi Transformasi Sosial melalui Penguatan Derajat Kesehatan, Dimensi Pendidikan, Literasi Digital Penguatan Daya Saing SDM	Perwujudan Sumber Daya Manusia yang adaptif, produktif dan Unggul
IE1. Kesehatan untuk Semua	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan. • Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal. • Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. • Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya. • Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. • Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. • Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting. • Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
IE 2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah. • Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i>, dan kondisi lokal daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah). • Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik. • Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-1			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>(termasuk kondisi kebencanaan daerah).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). • Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan. • Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama. 	<p>khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. • Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. • Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan. • Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. • Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK. 	berkualitas.	
IE 3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan. • Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada daerah perdesaan. • Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. • Pengembangan/ 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i>. • Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-1			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	<p>pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi. 	<p>peningkatan <i>government-induced activities</i> dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi melalui bertambahnya <i>demand</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan. • Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan. • Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga. • Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah. 	<p>layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau <i>urban renewal</i> pada area yang telah mengalami <i>urban decay</i> dalam suatu kawasan perkotaan.</p>	<p>efisien.</p>

Sumber: Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Tanggamus 2025-2045

5.1.2. Misi ke-2 : Tranformasi Ekonomi

Arah Kebijakakan :

- Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian.
- Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).
- Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.
- Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
- Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.
- Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.
- Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
- Pengembangan *closed loop* model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian.
- Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.
- Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.
- Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/ platform.

- Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.
- Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.
- Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.
- Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.
- Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.
- Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.
- Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan.
- Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.
- Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).
- Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum.
- Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (*green & grey infrastructure*).
- Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu menuju *zero solid waste* dan mendukung *circular economy*.
- Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran *fixed connection* dan/atau pembangunan infrastruktur *mobile connection* pada area-area *weak coverage*.

- Pembangunan dan perluasan *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi yang saling terintegrasi.
- Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal.
- Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas.
- *City beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan *dignity*, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata *urban tourism*.
- Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/ asosiasi usaha.
- Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
- Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.
- Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Lampung untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: Bandarlampung-Gedongtataan-Pringsewu-Kotaagung-Liwa-Krui; Terbanggi Besar-Kotabumi-Blambangan Umpu; dan Metro-Sukadana.
- Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhan.
- Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global.
- Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.
- Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.
- Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.
- Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.
- Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.
- Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerjasama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.
- Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.

- Peningkatan produktivitas BUMD.
- Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iii) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iv) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (v) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (vi) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vii) pengembangan sistem penyimpanan/cadangan energi; (viii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (ix) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (x) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.
- Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).
- Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian.
- Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).
- Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.

- Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
- Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.
- Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.
- Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.

Tabel 5.2. Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-2

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
MISI KE-2 : TRANSFORMASI EKONOMI	Penurunan Kemiskinan, Peningkatan Kemandirian Pangan, Pengendalian Inflasi dan Penguatan Infrastruktur Ekonomi yang berbasis Pembangunan Desa	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dengan Penguatan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru, serta Pengembangan Produk Unggulan dan Potensi Wisata	Ekspansi Ekonomi dengan Inovasi dan Digitalisasi, Peningkatan Investasi dan Pengembangan Kawasan Industri Maritim	Terwujudnya Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat yang Merata
IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan produk unggulan pertanian, kelautan, dan Jasa Pariwisata. • Peningkatkan produktivitas sektor unggulan melalui pemanfaatan inovasi dan teknologi serta diversifikasi produk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan produktivitas produk unggulan dengan peningkatan kualitas serta nilai tambah produk pertanian, kelautan, dan jasa pariwisata yang berstandar. • Optimalisasi produktivitas sektor unggulan dengan percepatan pemanfaatan inovasi dan teknologi serta diversifikasi produk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan produktivitas unggulan secaramasif dengan peningkatan kualitas serta nilai tambah produk pertanian, kelautan, dan jasa pariwisata yang berstandar • Pemantapan produktivitas sektor unggulanyang sangat inovatif dan diversifikatif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan produk unggulan daerah yang berdaya saing nasional dan global • Perwujudan produktivitas sektor unggulanyang sangat inovatif dan diversifikatif.
IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru	Penerapan kebijakan tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Peningkatan partisipasi pelaku kebijakan tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Pemantapan implementasi tata kelola faktor produksi yang ramah lingkungan dan ekonomis secara merata di daerah	Perwujudan pelaksanaan prinsip ekonomi hijau dengan nilai ekonomis tinggi
IE 6. Transformasi Digital	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan akses layanan digital yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. • Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi terapan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perluasan akses layanan digital yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat . • Perluasan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi terapan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan akses layanan digital yang berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat . • Pemantapan akses informasi bagi pelaku ekonomi guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi terapan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan kualitas akses layanan digital dan mendukung peningkatan masyarakat . • Perwujudan teknologi tertapan dengan akses informasi yang meningkatkan produktivitas.

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-2			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
IE 7. Ekonomi Domestik dan Global	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengembangan ekosistem bisnis pelaku industri lokal. ● Pengembangan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi pasar ekspor/global. ● Pembangunan ekonomi daerah yang berdaya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penguatan ekosistem bisnis pelaku industri lokal. ● Peningkatan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan potensi pasar ekspor/global. ● Peningkatan daya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemantapan ekosistem bisnis pelaku industri lokal. ● Pemantapan komoditas unggulan yang bernilai tinggi dengan akses pasar ekspor/global. ● Pemantapan daya saing melalui penguatan dan perluasan akses perdagangan dan kerjasama antar daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ● Perwujudan Produk unggulan daerah sebagai pemasok utama kebutuhan produk akhir pasar domestik dan global
IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> ● Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. ● Pembangunan kebijakan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan dengan prinsip <i>comparative advantage</i>. ● Pemenuhan kebutuhan pangan secara sehat tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. ● Penguatan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan. ● Pemantapan kemandirian pangan yang sehat tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penguatan kapasitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. ● Penguatan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan. ● Pemantapan kemandirian pangan yang sehat tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Perwujudan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, dan kesempatan kerja yang luas dengan prinsip keberlanjutan lingkungan. ● Perwujudan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan. ● Perwujudan kemandirian pangan yang sehat tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal.

Sumber: Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Tanggamus 2025-2045

5.1.3. Misi ke-3 : Transformasi Tata Kelola

Mewujudkan kelembagaan pemerintah yang menerapkan tata kelola pemerintahan efektif dan akuntabel serta pemantapan kapasitas dan kualitas SDM aparatur untuk mewujudkan pelayanan publik berkualitas dan merata.

Arah Kebijakan :

- Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.
- Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
- Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.
- Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Lampung yang profesional dan bebas korupsi.
- Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.
- Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
- Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
- Penguatan integritas partai politik.

Tabel 5.3. Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-3

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-3			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
MISI KE-3 : TATA KELOLA	Penguatan Fondasi Kelembagaan Pemerintah, Penerapan Manajemen Risiko Kepemerintahan, Penguatan Manajemen ASN berbasis Merit System	Akselerasi Transformasi Tata Kelola melalui Pengembangan Manajemen ASN, Pengetahuan dan Inovasi, serta Digitalisasi dalam Perencanaan Pembangunan dan Pelayanan Publik	Perwujudan kelembagaan pemerintah yang inovatif, informatif, adaptif dan akuntabel dan ASN yang profesional	Perwujudan pelayanan publik yang transparan dan berkualitas
IE 9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	<ul style="list-style-type: none"> • Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah. • Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. 	<ul style="list-style-type: none"> • Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. • Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. • Penguatan integritas partai politik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah • Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi • Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan

Sumber: Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Tanggamus 2025-2045

5.1.4. Misi ke-4 : Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Yang Menjunjung Supermasi Hukum

Arah Kebijakan :

- Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.
- Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
- Penguatan pengendalian inflasi daerah.

Tabel 5.4. Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-4

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-4			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
MISI KE-4 : STABILITAS KEAMANAN, KETERTIBAN MASYARAKAT YANG MENJUNJUNG SUPERMASI HUKUM	Penguatan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah	Percepatan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah	Pemantapan supremasi hukum dan stabilitas ekonomi makro daerah	Perwujudan Kabupaten Tanggamus yang aman, demokratis dan stabil
IE 10. Hukum Berkeadilan, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Trantibumlinmas Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas
IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. • Pembangunan kebijakan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan dengan prinsip <i>comparative advantage</i>. • Pemenuhan Kebutuhan pangan secara sehat tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. • Penguatan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan. • Pemantapan kemandirian pangan yang sehat tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kapasitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. • Penguatan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan. • Pemantapan kemandirian pangan yang sehat tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan investasi dan perluasan kesempatan kerja dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. • Perwujudan pembangunan ekonomi antar wilayah yang merata, inklusif dan berkelanjutan. • Perwujudan kemandirian pangan yang sehat tangguh dan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan kearifan lokal.
IE 12. Daya Saing Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal. • Pembangunan kapasitas tenaga kerja dengan pelatihan dan pendidikan sesuai dengan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal. • Penguatan kapasitas kelembagaan pada pasar tenaga kerja sektor unggulan dan penerapan standarisasi kualitas pekerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerataan aksesibilitas dan konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal. • Pemantapan kualitas dan kapasitas tenaga kerja sektor unggulan dengan penerapan dukungan capaian 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan aksesibilitas dan konektivitas barang dan jasa antar daerah dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal. • Perwujudan kapasitas tenaga kerja sesuai standar pasar tenaga kerja.

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-4			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
	kebutuhan pasar kerja lokal. <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan diversifikasi produk sektor unggulan melalui insentif kepada penerapan investasi pada penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi. 	sektor unggulan. <ul style="list-style-type: none"> • Penguatan diversifikasi produk sektor unggulan melalui insentif kepada penerapan investasi pada penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi. 	standarisasi kualitas pekerja sektor unggulan. <ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan diversifikasi produk sektor unggulan melalui insentif kepada penerapan investasi pada penelitian dan pengembangan pelaku ekonomi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Perwujudan ketersediaan dan distribusi produk unggulan daerah yang bernilai tinggi dan ekonomis dalam pasar barang dan jasa.

Sumber: Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Tanggamus 2025-2045

5.1.5. Misi ke-5 : Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi

Arah Kebijakan :

- Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila.
- Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
- Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.
- Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.
- Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
- Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
- Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
- Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
- Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
- Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
- Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.

Tabel 5.5. Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-5

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
MISI KE-5 : KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI	Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	Percepatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan	Pemantapan ketahanan sosial budaya dan ekologi yang setara dan inklusif	Perwujudan Kabupaten Tanggamus yang tangguh dan adaptif
IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	<ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila ● Peningkatan kerukunan antaretnis, agama, dangolongan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila ● Penguatan kerukunan antaretnis, agama, dangolongan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemantapan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila ● Pemantapan kerukunan antaretnis, agama, dangolongan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Perwujudan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila ● Perwujudan kerukunan antar etnis, agama, dangolongan
IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	<ul style="list-style-type: none"> ● Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusis sosial dalam pembangunan. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan ● Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusis sosial dalam pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal ● Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang ● Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Perwujudan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal ● Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.

MISI DAN SASARAN POKOK	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-5			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> ● Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati Daerah. ● Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang disusun periode 2025-2030 (untuk 5 tahun sekali) dan diintegrasikan dalam RPJMD 	<ul style="list-style-type: none"> ● Menetapkan Kawasan Bernilai Penting Bagi Konservasi Keanekaragaman Hayati. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Menetapkan Kawasan Bernilai Penting Bagi Konservasi Keanekaragaman Hayati. ● Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang disusun periode 2035-2040 (untuk 5 tahun sekali) dan diintegrasikan dalam RPJMD. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Menetapkan Kawasan Bernilai Penting Bagi Konservasi Keanekaragaman Hayati. ● Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang disusun periode 2040-2045 (untuk 5 tahun sekali) dan diintegrasikan dalam RPJMD.
IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	<ul style="list-style-type: none"> ● Peningkatan konsumsi listrik per Kapita ● Peningkatan intensitas energi/primer. ● Penurunan ketidakcukupan konsumsi pangan. ● Peningkatan kapasitas air baku. ● Peningkatan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Percepatan Penuntasan dalam pemenuhan konsumsi listrik per Kapita. ● Percepatan pemenuhan intensitas energi/Primer. ● Percepatan meminimalisasi ketidakcukupan konsumsi pangan. ● Percepatan pemenuhan kapasitas air baku. ● Penataan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pemantapan Konsumsi Listrik per Kapita secara masif. ● Pemantapan intensitas energi/primer secara masif. ● Pemantapan dalam meminimalisasi ketidakcukupan konsumsi pangan. ● Pemantapan kapasitas air baku. ● Penguatan pembangunan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Perwujudan Pemenuhan Konsumsi Listrik yang handal. ● Perwujudan intensitas energi/primer yang handal. ● Perwujudan kehandalan dalam konsumsi Pangan. ● Perwujudan kapasitas air baku yang handal. ● Pengelolaan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan yang handal. ● Pengelolaan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan.
IE 17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Penguatan kapasitas dan kelembagaan terkait pengurangan risiko akibat perubahan iklim dan bencana alam	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana dalam Penanganan Bencana)	Pemantapan kapasitas dan kelembagaan terkait pengurangan risiko akibat perubahan iklim dan bencana alam	Terwujudnya kapasitas dan kelembagaan terkait pengurangan risiko akibat perubahan iklim dan bencana alam

Sumber: Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Tanggamus 2025-2045

5.1.6. Misi ke-6 : Pemerataan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas dan Berkeadilan untuk Mengurangi Disparitas Wilayah

Sarana dan prasarana (infrastruktur) memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di suatu daerah. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat antara lain peningkatan produktifitas tenaga kerja, peningkatan nilai konsumsi dan akses kepada lapangan kerja serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilitas ekonomi makro. Perkembangan infrastruktur dengan pembangunan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat dan saling ketergantungan satu sama lain, dengan kata lain ketersediaan infrastruktur juga sudah menjadi suatu tuntutan untuk menjalankan roda perekonomian.

Infrastruktur sendiri dalam sebuah sistem menopang sistem sosial dan system ekonomi sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan. Ketersediaan infrastruktur memberikan dampak terhadap sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh karenanya, infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar-dasar dalam mengambil kebijakan.

Pembangunan infrastruktur dalam sebuah sistem menjadi penopang kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu ruang. Infrastruktur merupakan wadah dalam sebuah pembangunan. Ketersediaan infrastruktur meningkatkan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga dapat meningkatkan sumberdaya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang menuju pada perkembangan ekonomi suatu kawasan atau wilayah.

Infrastruktur dapat dikategorikan kedalam tiga jenis, yaitu:

1. Infrastruktur ekonomi, merupakan aset fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi baik dalam produksi maupun konsumsi final, meliputi publik utilities (tenaga, telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas), public work (jalan, bendungan, kanal, saluran irigasi dan drainase) serta sektor transportasi (jalan, rel kereta api, angkutan pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya).
2. Infrastruktur sosial, merupakan aset yang mendukung kesehatan dan keahlian masyarakat, meliputi pendidikan (sekolah dan perpustakaan), kesehatan (rumah sakit dan pusat Kesehatan), perumahan dan rekreasi (taman, museum dan lain-lain).

3. Infrastruktur administrasi/institusi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi serta kebudayaan.

Fasilitas infrastruktur bukan hanya berfungsi melayani berbagai kepentingan umum tetapi juga memegang peranan penting pada kegiatan-kegiatan swasta di bidang ekonomi. Kebutuhan prasarana merupakan pilihan (*preference*), dimana tidak ada standar umum untuk menentukan berapa besarnya fasilitas yang tepat di suatu daerah atau populasi. Edwin (dalam Permatasari: 2014) menguraikan prasarana umum terdiri dari kategori-kategori dalam fasilitas pelayanan dan fasilitas produksi.

Tabel 5.6. Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-6

MISI	ARAH KEBIJAKAN dan TAHAPAN PADA MISI KE-6			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
MISI KE-6 : PEMERATAAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN UNTUK MENGURANGI DISPARITAS WILAYAH	Pembangunan Wilayah Pesisir dan Kawasan Strategis melalui Penyediaan Infrastruktur Dasar Masyarakat	Peningkatan Konektivitas Wilayah melalui Pemerataan Infrastruktur Transportasi Wilayah Pesisir dan Daerah Terpencil, serta Fasilitas Publik yang Inklusif	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Penyediaan Fasilitas Publik yang Modern	Perwujudan Pemerataan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Sumber: Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Tanggamus 2025-2045

A. Jaringan Jalan

Penyelenggaraan infrastruktur jaringan jalan merupakan hal yang sangat vital dalam pembangunan karena berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar dan mendukung aktivitas masyarakat. Pembangunan infrastruktur jaringan jalan diarahkan untuk menjembatani kesenjangan antar wilayah dan mendorong pemerataan pembangunan. Penyediaan jaringan jalan merupakan hal yang penting dalam mempercepat laju pembangunan. Selain itu, infrastruktur jalan dapat menopang sector transportasi yang dapat memperlancar arus distribusi barang dan jasa, mobilisasi manusia, aksesibilitas antar wilayah, serta berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan. Maka dari itu data jaringan jalan terbangun sangat diperlukan dalam penyusunan strategi pengembangan suatu daerah di masa yang akan datang.

Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam system jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota Kabupaten dengan Ibu kota Kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat

kegiatan lokal, serta jalan sekunder dalam wilayah kabupaten. Panjang jalan Kabupaten di Kabupaten Tanggamus pada tahun 2023 sepanjang 939,13 km. Panjang jalan menurut kondisinya di Kabupaten Tanggamus, kondisi baik sepanjang 226,67 km, dikatakan jalan baik jika jalan dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan 60 km per jam. Kondisi jalan sedang sepanjang 192,23 km, dikatakan jalan kondisi sedang jika jalan dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan 40 - 60 km per jam. Kondisi rusak ringan sepanjang 100,32 km, dikatakan jalan rusak ringan jika jalan dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan 20 - 40 km per jam dan kondisi jalan rusak berat sepanjang 419,91 km, dikatakan jalan kondisi rusak berat jika jalan dapat dilalui oleh kendaraan dengan kecepatan 0- 20 km per jam.

B. Persampahan

Sampah adalah limbah yang berbentuk padat juga setengah padat, dari bahan organik atau anorganik, baik benda logam maupun benda bukan logam, yang dapat terbakar dan yang tidak dapat terbakar. Bentuk fisik benda benda tersebut dapat berubah menurut cara pengangkutannya atau cara pengolahannya. Permasalahan mengenai sampah merupakan hal yang sangat membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak. Karena untuk saat ini sampah masih menjadi persoalan di setiap daerah di Indonesia dalam hal penanganannya. Padahal jika dilihat dari dampak yang pasti terjadi dalam masyarakat jika penanggulangan sampah tidak ditangani dengan baik akan berimbas pada menurunnya kualitas hidup, menurunnya kondisi lingkungan, potensi terjadi bencana akan lebih besar. Pengelolaan persampahan mempunyai tujuan yang sangat mendasar yang meliputi peningkatan kesehatan lingkungan dan masyarakat, melindungi sumber daya alam (air), melindungi fasilitas sosial ekonomi dan menunjang sektor strategis. Oleh karena itu ketersediaannya infrastruktur pengelolaan dan pengolahan sampah sangat penting.

Dalam menyelesaikan persoalan lingkungan akibat sampah, saat ini di butuhkan alternatif yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah. Cara pengelolaan sampah yang di butuhkan adalah pengelolaan yang mampu memanfaatkan seluruh sampah untuk didaur ulang sehingga memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat dan tidak berbahaya bagi lingkungan atau alam. Saat ini Kabupaten Tanggamus memiliki 1 lokasi TPA dan IPLT yang telah beroperasi yaitu TPA dan IPLT Kalimiring di Kecamatan Kota Agung Barat dengan dengan luas 3,72 Ha dan luas *landfill* 7.700 m². Sampah masuk di TPA Kalimiring per tahunnya sebesar 10.220 Ton.

Di Kabupaten Tanggamus juga sudah terdapat infrastruktur pengolahan sampah TPS3R dengan prinsip pengelolaan sampah *Reduce, Reuse* dan *Recycle* di 5 titik yaitu 4 titik di Kecamatan Gisting dan 1 titik di Kecamatan Air Nainingan, namun keberhasilan dari pengelolaan sampah dengan prinsip 3R ini harus diupayakan lagi peran masyarakat untuk memilah sampah sesuai dengan jenis sampah.

C. Air Bersih

Air menjadi salah satu hal terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya diperlukan sebagai air minum saja, air bersih juga sangat dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan. Secara umum, keberadaan air bersih sangat diharapkan masyarakat untuk menunjang Leeitas kehidupan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, masyarakat dapat menggunakan air yang bersumber dari sumur maupun dari penyedia air bersih.

Sebuah daerah yang memiliki penduduk yang banyak akan cenderung lebih memerlukan air bersih untuk kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu yang Panjang. Dikarenakan kebutuhan air di kalangan masyarakat berbeda-beda keperluannya, missal seperti rumah tangga, industry, perkantoran, sekolah, universitas dan lainnya.

Tabel 5.7. Jumlah Pelanggan PDAM Way Agung

No.	Kecamatan	Pelanggan	Air Disalurkan (M ³)
1	Wonosobo	-	-
2	Semaka	-	-
3	Bandar Negeri Semuong	-	-
4	Kota Agung	2.572	599.841
5	Pematang Sawa	-	-
6	Kota Agung Timur	313	136.722
7	Kota Agung Barat	274	90.840
8	Pulau Panggung	159	24.674
9	Ulu Belu	-	-
10	Air Nainingan	518	57.388
11	Talang Padang	818	155.163
12	Sumberejo	-	-
13	Gisting	-	-
14	Gunung Alip	-	-
15	Pugung	-	-
16	Bulok	-	-
17	Cukuh Balak	-	-
18	Kelumbayan	-	-
19	Limau	-	-
20	Kelumbayan Barat	-	-
	TOTAL	4.654	1.064.628

Sumber: PDAM Way Agung-Tanggamus 2023

PDAM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyediaan air bersih. Salah satu tujuan dibentuknya PDAM adalah mencukupi kebutuhan masyarakat akan air bersih, meliputi penyediaan, pengembangan pelayanan sarana dan prasarana serta distribusi air bersih, sedangkan tujuan lainnya adalah ikut serta mengembangkan perekonomian guna menunjang pembangunan daerah dengan memperluas lapangan pekerjaan, serta mencari Laba sebagai sumber utama pembiayaan bagi daerah. Di sisi lain, PDAM Sebagai salah Satu BUMD diharapkan mampu memberikan kontribusi yang memadai dalam memberikan kontribusi pendapatan asli daerah.

PDAM Way agung merupakan perusahaan daerah yang menyediakan pasokan air bersi untuk masyarakat di Kabupaten Tanggamus. Jumlah pelanggan air di Kabupaten Tanggamus tahun 2023 ada sebanyak 4654 pelanggan, kecamatan kota agung memiliki jumlah terbanyak yaitu 2.572 pelanggan. Jumlah air yang disalurkan oleh PDAM di Kabupaten Tanggamus adalah sebanyak 1.064.628 m³.

D. Pendidikan

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi salah satu fasilitas pembentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Manusia dalam peranannya merupakan subjek dan objek pembangunan yang berarti manusia selain sebagai pelaku pembangunan juga merupakan sasaran pembangunan.

Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan perbaikan kualitas modal manusia. Dalam hal ini modal manusia dapat mengacu pada pendidikan. Pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar di suatu wilayah. Pendidikan merupakan fondasi utama yang menjadi hal terpenting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Adanya keinginan yang kuat dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang baik maka masa depan suatu bangsa akan cemerlang dan berkemajuan. Upaya ini dilakukan agar dalam prosesnya peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensinya untuk memiliki kekuatan dan kesadaran spiritual keagamaan, berbangsa dan bernegara. Proses pendidikan dapat dikatakan bermutu apabila mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan. Untuk itu pendidikan yang bermutu saat ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Maju tidaknya suatu bangsa sangat tergantung pada pendidikan bangsa tersebut. Proses pendidikan dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan Pendidikan, agar tujuan pendidikan tersebut dapat dicapai maka perlu diperhatikan segala sesuatu yang mendukung keberhasilan tuiuan pendidikan. Oleh karena itu, keberadaan sarana prasarana pendidikan mutlak

dibutuhkan dalam proses pembelajaran, sehingga termasuk dalam komponen-komponen yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pendidikan. Tanpa sarana prasarana, proses pendidikan akan mengalami kesulitan yang sangat serius, bahkan bisa menggagalkan pendidikan.

Infrastruktur pendidikan yang terbangun di kabupaten Tanggamus terdiri dari 466 sekolah dasar 132 sekolah menengah pertama sederajat dan 76 SMA sederajat dan 3 Perguruan Tinggi.

E. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada gilirannya mendukung percepatan pencapaian sasaran pembangunan suatu daerah. Pada dasarnya kesehatan merupakan salah satu aspek yang menentukan tinggi rendahnya standar hidup seseorang. Oleh karena itu, status kesehatan yang relatif baik dibutuhkan oleh manusia untuk menopang semua aktivitas hidupnya. Maka untuk mencapai kondisi kesehatan yang baik tersebut dibutuhkan sarana kesehatan yang baik pula.

Kesehatan adalah hal yang paling dominan di dalam menyumbang kualitas sumber daya manusia (SDM). Manakala kualitas kesehatan bagus, kualitas SDM akan sekalian bagus. Kualitas sumber daya manusia adalah hal utama dalam pembangunan suatu negara. Sebagai indikator kesejahteraan rakyat, tujuan jangka panjang pembangunan kesehatan Indonesia adalah peningkatan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap warga negara Indonesia agar terwujud derajat kesehatan masyarakat di masa depan yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan masyarakat yang semaksimal mungkin.

Tabel 5.8. Jumlah Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tanggamus Tahun 2023

No	Fasilitas Kesehatan	Pemkab	Swasta	Jumlah
1	Rumah Sakit umum	1	1	2
2	Puskesmas rawat inap	17	0	17
3	Puskesmas non rawat inap	7	0	7
4	Puskesmas pembantu	53	0	53
5	Balai pengobatan/klinik	0	17	17

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus 2023

F. Jaringan Listrik

Dengan pertumbuhan ekonomi dan penambahan penduduk yang pesat, Indonesia membutuhkan energi yang sangat besar untuk pemenuhan energi penduduknya. Salah satu energi yang vital dan menunjang kegiatan ekonomi serta aktivitas manusia adalah energi listrik. Kebutuhan listrik terus meningkat di kalangan rumah tangga dan industri. Kualitas pelayanan ketenagalistrikan harus ditunjang dengan infrastruktur tenaga listrik yang memadai juga. Sehingga informasi mengenai infrastruktur yang sudah ada menjadi penting guna merencanakan peningkatan kualitas pelayanan dibidang ketenagalistrikan.

Perkembangan teknologi dalam bidang telekomunikasi yang begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir tidak hanya terbatas dalam telepon seluler tetapi saat ini akses internet sudah menjadi kebutuhan utama yang dibutuhkan oleh semua kalangan masyarakat untuk menunjang berbagai kegiatan sehari-hari mulai dari pendidikan, pemerintahan hingga perdagangan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan akses telekomunikasi dan internet tersebut dibutuhkan suatu infrastruktur yang memadai sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati layanan telekomunikasi dan internet dengan baik. Untuk itu data infrastruktur yang telah dibangun dalam bidang telekomunikasi harus dimiliki pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah dapat memastikan warganya sudah terjangkau oleh jaringan telekomunikasi.

Energi merupakan kebutuhan yang sangat penting karena tanpa adanya energi listrik maka industri dan kegiatan lainnya tidak dapat berjalan. Kebutuhan akan energi listrik di Kabupaten Tanggamus setiap tahunnya terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya jumlah penduduk dan semakin banyak industri yang tumbuh di Kabupaten Tanggamus. Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di Kabupaten Tanggamus pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus terus berupaya untuk memaksimalkan sumber daya alam yang dimiliki mulai dari panas bumi hingga sungai untuk dijadikan sebagai sumber energi listrik.

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Area Ulubelu, Tanggamus, Lampung, menyumbang 20 persen kebutuhan listrik Lampung. Yakni sebesar 1050 megawatt (MW). PLTP ini berkapasitas 220 MW terdiri dari 4 unit pembangkit 55 MW. Ini artinya, masyarakat Lampung sudah menikmati listrik dengan sumber energi terbarukan.

Diketahui, energi panas bumi di Ulubelu pertama kali ditemukan rentang tahun 1993 dan 1994 oleh PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). Melihat adanya potensi energi listrik berkapasitas 220 MW. PT PLN (Persero) bekerjasama dengan

PGE mendirikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Arca Ulubelu. Pada tahun 2011 PLTP Area Ulubelu dibawah kaki gunung Tanggamus rampung dibangun. Setahun kemudian, PLTP dioperasikan untuk menyokong kebutuhan listrik yang ada di Lampung. Hingga saat ini, PT PLN Persero dan PGE sendiri memiliki 54 sumur, yang terbagi menjadi sumur produksi sebanyak 23 sumur, sumur injeksi sebanyak 14, dan sumur monitoring sebanyak 17.

Luas daerah PLTP Area Ulubelu mencapai 92.064 hektar. PT PLN Persero dan PGE mengelola 4 unit penghasil listrik dengan kapasitas 55 MW masing-masing unit. Dimana, untuk unit-unit itu awalnya dioperasikan secara berbeda. Sumur injeksi Imtuk unit-unit itu awalnya dioperasikan nya berbeda-beda. Unit 1 dan 2 mulai dioperasikan pada tahun 2012, sedangkan Unit 3 dan 4 mulai beroperasi pada tahun 2016 dan 2017.

Uap panas dari sumur bor disuplai lewat sistem transmisi uap. Kemudian uap masuk dalam media pengumpul uap yang dilengkapi pengamanan terakhir unit (*rupture disc*). Jika terjadi tekanan berlebih, uap akan dibuang melalui *vent structure*. Uap kemudian dialirkan ke separator yang berfungsi memisahkan uap dari benda asing dan partikel berat. Setelah itu uap masuk ke *demister* yang berfungsi untuk memisahkan *moisture* yang terkandung dalam uap dan saat masuk turbin uap sudah dalam keadaan bersih. Saat masuk turbin terjadi konversi energi kalor yang terkandung dalam uap menjadi energi kinetik yang diterima sudut turbin. Turbin berputar sehingga terjadi konversi dari Energi Kinetik menjadi Energi Mekanik. Generator berputar menghasilkan energi listrik.

Sedangkan, uap bekas dari turbin dikondensasikan di dalam *condensor* dengan sistem *jet spray*. Uap bekas yang telah melewati media pendingin kemudian dibuang ke atmosfer melalui *cooling tower*.

Perusahaan tersebut mendirikan PT Tanggamus Electric Power pada 2011 bersama dengan Posco Engineering & Construction, PT BS Energy dan PT. Nusantara Natural Hydro. Pembangunan pembangkit listrik dimulai pada Februari 2015. Komipo memulai operasi komersial pembangkit listrik pada Juli 2018.

PLTA Way Semangka memiliki daya 2 x 28 megawatt di kawasan hutan lindung Register 39 Kota Agung, tepatnya di utara Blok 10 Dusun Kali Kumbang, Pekon Sidomulyo, Kecamatan Semangka, Tanggamus.

Listrik disalurkan ke sistem Sumatra melalui jaringan transmisi 150 kilovolt (kV) sepanjang 33,4 kilometer dari pembangkit ke gardu induk (GI) 150 kV Kota Agung yang dibangun PLN.

5.1.7. Misi ke-7 : Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan yang Berbasis Mitigasi Bencana.

Beberapa arah pembangunan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup yang akan dilakukan antara lain :

1. **Pengembangan Ekowisata** : Memanfaatkan potensi alam dan lingkungan Kabupaten Tanggamus untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata yang berkelanjutan. Ini mencakup pengelolaan taman nasional, hutan lindung, dan area konservasi lainnya dengan pendekatan berbasis masyarakat untuk memastikan perlindungan lingkungan serta kesejahteraan ekonomi lokal.
2. **Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan** : Menggunakan teknologi dan inovasi yang ramah lingkungan dalam kegiatan pertanian, perikanan, dan industri lainnya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Contohnya adalah penggunaan metode pertanian organik, teknik pengolahan limbah yang efisien, dan implementasi energi terbarukan.
3. **Pengelolaan Hutan dan Lahan** : Menerapkan kebijakan yang mendukung pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan, termasuk penghijauan, pengendalian deforestasi, rehabilitasi lahan terdegradasi, dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.
4. **Konservasi Sumber Daya Alam** : Melindungi keanekaragaman hayati serta sumber daya alam lainnya melalui pembentukan dan penegakan regulasi yang ketat terhadap eksploitasi yang berlebihan. Ini dapat mencakup pembentukan kawasan konservasi baru, penegakan hukum terhadap perburuan liar, dan promosi pola konsumsi yang berkelanjutan.
5. **Pendidikan Lingkungan dan Kesadaran Masyarakat** : Menggalakkan program pendidikan lingkungan yang menyoar masyarakat, termasuk pelatihan tentang praktik-praktik ramah lingkungan, pengurangan sampah, dan pentingnya menjaga kelestarian alam bagi kesejahteraan generasi masa depan.
6. **Kemitraan dan Kolaborasi** : Membangun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta menggalang dukungan bersama untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.
7. **Pengembangan Infrastruktur Hijau** : Mendorong pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan, seperti transportasi massal yang berbasis energi terbarukan, jaringan jalan yang memperhatikan

perlindungan ekosistem, dan penyediaan akses air bersih untuk seluruh masyarakat dengan memperhatikan konservasi sumber daya air.

Tabel 5.9. Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-7

MISI	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-7			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
MISI KE-7 : PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA YANG BERKUALITAS DAN RAMAH LINGKUNGAN YANG BERBASIS MITIGASI BENCANA	Peningkatan Pembangunan Ekologi Berkualitas, Ketangguhan Wilayah pada Perubahan Iklim dan Kesiapsiagaan Bencana	Penguatan Kualitas Lingkungan dan Monitoring Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan	Peningkatan Kontribusi Daerah pada Pembangunan Lingkungan yang Berkelanjutan dan Berbasis Mitigasi Bencana	Perwujudan Pembangunan Ekologi Berkualitas dan Ramah Lingkungan yang Berbasis Mitigasi Bencana

Sumber: Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Tanggamus 2025-2045

A. Arah Pembangunan Kabupaten Tanggamus Dalam Mewujudkan Kualitas dan Kuantitas Prasarana dan Sarana yang Menunjang Pengembangan Wilayah, Penyediaan Pelayanan Dasar dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Beberapa arah pembangunan terhadap penyediaan pelayanan dasar yang akan dilakukan antara lain :

1. **Pengembangan Infrastruktur Transportasi** : Infrastruktur transportasi yang baik adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meningkatkan jaringan jalan dan jembatan akan meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Tanggamus, memudahkan mobilitas masyarakat, pengiriman barang, serta akses ke pasar dan tempat kerja. Selain itu, pengembangan transportasi umum seperti angkutan bus dan kereta api juga akan membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara.
2. **Peningkatan Aksesibilitas Air Bersih** : Akses yang memadai terhadap air bersih adalah hak dasar yang penting bagi kesejahteraan manusia. Dengan memperluas jaringan penyediaan air bersih dan meningkatkan kualitas air minum, Kabupaten Tanggamus akan meningkatkan kesehatan masyarakat, mengurangi angka penyakit terkait air, serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan air bersih untuk pertanian dan industri.
3. **Peningkatan Sarana Kesehatan** : Fasilitas kesehatan yang memadai adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup dan harapan hidup masyarakat. Dengan membangun dan meningkatkan rumah sakit, puskesmas, dan klinik, Kabupaten Tanggamus dapat meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan,

mempercepat deteksi penyakit, serta meningkatkan kapasitas dalam menangani berbagai masalah kesehatan masyarakat.

4. **Peningkatan Kualitas Pendidikan** : Pendidikan berkualitas adalah investasi jangka panjang yang vital bagi kemajuan suatu daerah. Dengan membangun dan memperbaiki fasilitas pendidikan seperti sekolah, gedung, dan perpustakaan, Kabupaten Tanggamus akan meningkatkan akses dan mutu pendidikan, meningkatkan tingkat literasi masyarakat, dan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan masa depan.
5. **Pengembangan Infrastruktur Listrik** : Akses yang stabil dan terjangkau terhadap listrik adalah prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan meningkatkan jaringan distribusi listrik, Kabupaten Tanggamus dapat memastikan bahwa seluruh masyarakat dan industri memiliki akses listrik yang memadai untuk mendukung kegiatan sehari-hari, produksi, dan inovasi.
6. **Pengembangan Sarana Olahraga dan Rekreasi** : Fasilitas olahraga dan rekreasi tidak hanya penting untuk kesehatan fisik dan mental masyarakat, tetapi juga untuk mempererat ikatan sosial dan membangun komunitas yang kuat. Dengan membangun lapangan, taman, dan pusat kegiatan sosial, Kabupaten Tanggamus akan mendorong gaya hidup aktif, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan menciptakan ruang publik yang ramah.
7. **Peningkatan Akses Telekomunikasi** : Akses yang cepat dan handal terhadap telekomunikasi dan internet merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan dan inovasi. Dengan memperluas jaringan telekomunikasi dan internet, Kabupaten Tanggamus akan meningkatkan akses informasi dan komunikasi, mendukung perkembangan bisnis dan industri berbasis digital, serta memperkuat konektivitas global.
8. **Pengembangan Kawasan Industri** : Pengembangan kawasan industri dan pusat logistik adalah strategi untuk menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendiversifikasi basis ekonomi daerah. Dengan menawarkan infrastruktur yang memadai dan lingkungan bisnis yang kondusif, Kabupaten Tanggamus akan dapat menarik investor, merangsang pertumbuhan sektor manufaktur dan jasa, serta meningkatkan pendapatan daerah.
9. **Pengembangan Infrastruktur Pertanian** : Pertanian tetap menjadi sektor penting dalam ekonomi Kabupaten Tanggamus. Dengan meningkatkan sarana dan prasarana pertanian seperti irigasi, saluran air, dan pusat penelitian pertanian, Kabupaten Tanggamus akan dapat meningkatkan produktivitas, keberlanjutan, dan ketahanan pangan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan petani.

10. **Pengembangan Pariwisata** : Pariwisata adalah sumber potensi ekonomi yang besar bagi Kabupaten Tanggamus. Dengan membangun dan meningkatkan infrastruktur pariwisata seperti hotel, restoran, dan tempat wisata, Kabupaten Tanggamus akan meningkatkan daya tarik wisata, menciptakan lapangan kerja di sektor pariwisata, serta mendiversifikasi pendapatan daerah.
11. **Pengembangan Sarana Keamanan dan Ketertiban** : Keamanan dan ketertiban adalah prasyarat bagi pembangunan yang berkelanjutan. Dengan meningkatkan fasilitas keamanan seperti kantor polisi, pemadam kebakaran, dan pos keamanan, Kabupaten Tanggamus akan meningkatkan rasa aman masyarakat, mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat kedaulatan dan stabilitas daerah.
12. **Pengembangan Sarana Perdagangan** : Perdagangan merupakan tulang punggung ekonomi Kabupaten Tanggamus. Dengan membangun pasar modern, pusat perbelanjaan, dan fasilitas perdagangan lainnya, Kabupaten Tanggamus akan meningkatkan efisiensi distribusi barang, meningkatkan aksesibilitas barang dan jasa bagi masyarakat, serta mendukung pertumbuhan sektor perdagangan dan distribusi.
13. **Pengembangan Infrastruktur Perikanan** : Perikanan dan kelautan adalah sektor penting dalam ekonomi dan kehidupan masyarakat pesisir Kabupaten Tanggamus. Dengan meningkatkan sarana dan prasarana perikanan seperti pelabuhan, dermaga, dan tempat penampungan, Kabupaten Tanggamus akan meningkatkan produksi perikanan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.
14. **Pengembangan Infrastruktur Lingkungan** : Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan seperti tempat pembuangan sampah, pengolahan limbah, dan taman kota adalah langkah penting dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam setiap kegiatan pembangunan, Kabupaten Tanggamus akan meningkatkan kualitas udara dan air, mengurangi pencemaran lingkungan, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat.

B. Arah Pembangunan Kabupaten Tanggamus Berdasarkan Klaster Wilayah

Setiap wilayah dalam suatu kabupaten memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda. Ada wilayah yang kaya akan sumber daya alam, ada yang potensial untuk pengembangan pariwisata, ada pula yang cocok untuk pengembangan industri atau pertanian. Keberagaman ini menjadi tantangan sekaligus peluang dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat

sasaran dan efektif. Dengan mengklusterkan wilayah-wilayah berdasarkan potensi dan ketersediaan infrastruktur, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi dengan lebih baik kekuatan dan kelemahan masing-masing wilayah. Ini memungkinkan mereka untuk merumuskan strategi pembangunan yang lebih terarah dan sesuai dengan kondisi lokal.

Klasterisasi juga membantu pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Investasi infrastruktur dan program pembangunan dapat diprioritaskan pada wilayah yang paling membutuhkan dan memiliki potensi tertinggi untuk memberikan dampak positif yang signifikan.

Dengan demikian, mengklusterkan wilayah-wilayah berdasarkan potensi dan ketersediaan infrastruktur merupakan langkah penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan. Ini membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, meningkatkan daya saing wilayah, dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan inklusif.

Dalam konteks pengembangan wilayah melalui klasterisasi, teori *trickle down effect* dapat diterapkan dengan memfokuskan upaya pembangunan pada wilayah-wilayah yang memiliki potensi ekonomi yang besar dan didukung oleh infrastruktur yang memadai. Dengan mengembangkan klaster-klaster ekonomi di wilayah-wilayah tersebut, diharapkan akan terjadi efek “rembesan” ke bawah yang dapat memberikan manfaat kepada wilayah-wilayah sekitarnya.

Sebagai contoh, jika suatu kabupaten memiliki wilayah dengan potensi pariwisata yang besar, pemerintah daerah dapat mengembangkan klaster pariwisata di wilayah tersebut dengan membangun infrastruktur pendukung seperti akses transportasi, akomodasi, dan fasilitas wisata. Dengan adanya klaster pariwisata yang berkembang pesat, diharapkan akan terjadi efek rembesan ke bawah berupa terciptanya lapangan kerja baru, peluang usaha baru, dan peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah sekitarnya. Selain itu, pengembangan klaster ekonomi juga dapat mendorong terbentuknya rantai nilai yang terintegrasi. Wilayah-wilayah di sekitar klaster utama dapat berperan sebagai pemasok bahan baku, tenaga kerja, atau bahkan menjadi pasar bagi produk-produk yang dihasilkan oleh klaster utama. Ini menciptakan sinergi ekonomi yang saling menguntungkan dan memperluas efek rembesan ke bawah.

Penerapan Klaster pada wilayah Kecamatan di Kabupaten Tanggamus

Penentuan klaster-klaster di Kabupaten Tanggamus didasarkan pada beberapa faktor, yaitu potensi sumber daya alam di wilayah tersebut, rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan, serta ketersediaan infrastruktur pendukung.

Konsep klasterisasi ini bertujuan untuk mengarahkan pembangunan ekonomi di kecamatan-kecamatan yang berada dalam satu klaster yang sama. Harapannya, kecamatan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat memberikan efek rembesan positif terhadap kecamatan lain dalam klaster yang sama, yang pertumbuhannya lebih rendah. Dengan demikian, perkembangan ekonomi dapat lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Tanggamus.

Tata Jenjang Pusat-Pusat Pelayanan

Pusat-pusat pelayanan di Daerah Kabupaten Tanggamus adalah :

1. Pusat Pelayanan Kota Agung berfungsi sebagai pusat pelayanan ORDE I dengan Skala Pelayanan Wilayah Kabupaten;
2. Pusat Pelayanan Wonosobo dan Sumberejo berfungsi sebagai pusat pelayanan ORDE II dengan jangkauan pelayanan skala wilayah pengembangan;
3. Pusat Pelayanan Way Nipah (Pematang Sawa), Sukaraja (Semaka), Ngarip (Ulu Belu), Tekad (Pulau Panggung), Talang Padang (Talang Padang), Rantau Tijang (Pugung), Putihdoh (Cukuh Balak), dan Napal (Kelumbayan) sebagai pusat pelayanan ORDE III dengan jangkauan pelayanan skala lokal.

Wilayah Pengembangan dan Fungsi Utama Wilayah Pengembangan

Wilayah Pengembangan di Kabupaten Tanggamus adalah :

1. Wilayah Pengembangan I meliputi Kecamatan Kota Agung, Talang Padang dan Pugung, dengan luas 587,3 km² dan pusat pengembangan di Kota Agung;
2. Wilayah Pengembangan II terdiri atas Kecamatan Wonosobo, Semaka, dan Pematang Sawa, dengan luas 663,94 km² dan pusat pengembangan di Wonosobo;
3. Wilayah Pengembangan III meliputi Kecamatan Pulau Panggung, Ulu Belu, dan Sumberejo, dengan luas 1.003,41 km² dan pusat pengembangan di Sumberejo;
4. Wilayah Pengembangan V meliputi Kecamatan Cukuh Balak dan Kelumbayan, dengan luas 254,85 km² dan pusat pengembangan di Pardasuka.

Fungsi utama masing-masing Wilayah Pengembangan dalam konstelasi wilayah Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut :

1. Wilayah Pengembangan I merupakan pusat pelayanan primer yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat permukiman perkotaan, pusat pendidikan dan budaya, pusat pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, pusat pengembangan perikanan tangkap, pusat pengembangan pertanian lahan basah, pengembangan wisata alam dan budaya, dan pusat pengembangan pertambangan;

2. Wilayah Pengembangan II merupakan pusat pelayanan sekunder yang berfungsi sebagai kawasan lindung dan konservasi, pusat pengembangan perikanan pantai dan perikanan tambak, serta pusat pengembangan pertambangan;
3. Wilayah Pengembangan III merupakan pusat pelayanan sekunder yang berfungsi sebagai pusat kawasan lindung dan konservasi pusat pengembangan tanaman perkebunan, pusat pengembangan pertanian lahan basah dan lahan kering/ pusat pengembangan perikanan air tawar sistem keramba jaring apung, pusat pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan, pusat pengembangan pariwisata dan olah raga air serta pusat pengembangan sumberdaya energi;
4. Wilayah Pengembangan IV merupakan pusat pelayanan sekunder yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, pusat pengembangan jasa perdagangan, permukiman perkotaan, pusat pengembangan pertanian lahan basah dan kering, pusat pengembangan perikanan darat, pusat pengembangan peternakan, serta pusat pengembangan industri kecil dan menengah;
5. Wilayah Pengembangan V merupakan pusat pelayanan sekunder yang berfungsi sebagai kawasan lindung dan konservasi, pengembangan pertanian lahan basah dan pengembangan perikanan pantai dan tangkap.

Fungsi Pendukung masing-masing Wilayah Pengembangan dalam konstelasi wilayah Kabupaten Tanggarrms adalah sebagai berikut :

1. Wilayah Pengembangan I memiliki fungsi pendukung sebagai kawasan pengembangan pertanian lahan kering, peternakan, perkebunan, perikanan tambak, pertambangan dan kawasan hutan lindung;
2. Wilayah Pengembangan II memiliki fungsi pendukung sebagai kawasan pertanian lahan basah, perkebunan, perikanan tangkap, pariwisata alam, pengembangan industri hasil perikanan;
3. Wilayah Pengembangan III memiliki fungsi pendukung sebagai kawasan pengembangan pertanian lahan kering, perikanan air tawar, ternak kecil serta kawasan wisata alam dan buatan;
4. Wilayah Pengembangan IV memiliki fungsi pendukung sebagai kawasan pengembangan perikanan air tawar, perkebunan, serta pengembangan pertambangan;
5. Wilayah Pengembangan V memiliki fungsi pendukung sebagai kawasan pengembangan pertanian lahan kering, perkebunan, dan kawasan pariwisata alam.

C. Rencana Pola Ruang

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Rencana pola ruang terbagi atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.

1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya yaitu hutan lindung, Suaka Alam. (Taman Nasional) yang mencakup :
 - Register 25 Pematang Tanggung yang meliputi Kecamatan Kelumbayan;
 - Register 26 Serkung Peji yang meliputi Kecamatan Kelumbayan;
 - Register 27 Pematang Sulah yang meliputi Kecamatan Cukuh Balak;
 - Register 28 Pematang Neba yang meliputi Kecamatan Pugung, Talang Padang, Kota Agung dan Cukuh Balak;
 - Register 30 Gunung Tanggamus yang meliputi Kecamatan Kota Agung dan Wonosobo;
 - Register 31 Pematang Arahon yang berada di Kecamatan Semaka;
 - Register 32 Bukit Rindian yang berada di Kecamatan Pulau Panggung;
 - Register 39 Kota Agung Utara yang berada di Kecamatan Pulau Panggung;
 - Register 49 Sumatera Selatan I yang berada di Kecamatan Pulau Panggung;
 - CAL BBS yang berada di Kecamatan Pematang Sawa;
 - Daerah tangkapan air (Catchment Area) waduk Batutegei seluas 424 Km².
- b. Kawasan Konservasi Perairan Teluk Kiluan dan Perairan Sekitarnya, yang berada di wilayah kecamatan Kelumbayan, Kelumbayan Barat, dan Cukuh Balak. Sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 49/KEPMEN-KP/2019 Tentang Kawasan Konservasi Perairan Teluk Kiluan dan Perairan Sekitarnya di Provinsi Lampung. Kawasan ini memiliki luas keseluruhan sebesar 72.211,68 hektare. Kawasan ini terbagi menjadi tiga zona, yaitu: Zona Inti

merupakan area yang memiliki perlindungan paling ketat dan memiliki luas sebesar 8.824,22 hektare. Sementara itu, Zona Pemanfaatan digunakan untuk kegiatan wisata dengan luas sebesar 4.771,76 hektare. Zona Perikanan Berkelanjutan adalah area yang diperuntukkan bagi kegiatan perikanan yang berkelanjutan dan memiliki luas terluas, yaitu 58.615,70 hektare.

c. Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi untuk melindungi komponen lingkungan tertentu dari kegiatan budidaya, meliputi :

- Kawasan Sempadan Sungai yang meliputi kawasan selebar 100 meter di kiri - kanan sungai sebesar 50 meter di kiri - kanan anak sungai yang berada di luar kawasan pemukiman serta sebesar 10 - 15 meter di kiri - kanan sungai dan anak sungai di dalam kawasan pemukiman di seluruh Kabupaten Tanggamus.
- Kawasan Sempadan Pantai meliputi seluruh garis pantai dari ujung Timur sampai Barat, dengan lebar 100 meter dihitung dari titik pasang tertinggi Lokasi : Kecamatan Kelumbayan, Cukuh balak, Kota Agung, Wonosobo, Semaka, dan Pematang Sawa;
- Kawasan sekitar mata air yang meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter di sekitar mata air, dengan lokasi :
 - Kec. Pulau Panggung, meliputi Gunung Megang, Way Datarajan, Tanjung Rejo, Way Hayu, dan Way Talang Iman;
 - Kec. Sumberejo meliputi Way Dadapan, Way Simpang Rimba, Sumber Agung, dan Way Argopeni;
 - Kec. Wonosobo meliputi Way Sanggt dan Way Panas;
 - Kec. Kota Agung meliputi Way Biah I II, III, Way Pardasuka, Way Isom, Way Teba, Way Batu Keramat, dan Way Lalaan;
 - Kec. Pugung meliputi Way Pring;
 - Kec. Talang Padang meliputi Way Suka Banjar, Way Landsbaw, Way Green (Grim), dan Way Bekhak.
- Kawasan sempadan danau/waduk yaag meliputi dataran sepanjang danau/waduk antara 50 - 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, dengan lokasi di kawasan Waduk Batu Tegi Kecamatan Pulau Panggung;
- Kawasan strategis Waduk Batutegi yang merupakan sumber daya buatan

2. Pengembangan Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya di Tanggamus terdiri dari :

a. Hutan Kemasyarakatan

Kawasan hutan kemasyarakatan adalah kawasan lindung yang telah menjadi kawasan hutan kritis yang dijadikan hutan kemasyarakatan untuk kepentingan rakyat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kawasan hutan kemasyarakatan ini tidak diperkenankan untuk diperluas dan tetap difungsikan sebagai kawasan lindung.

b. Kawasan Pertanian

Kawasan Pertanian terdiri dari :

- Kawasan pertanian pangan lahan basah yang didasarkan atas tingkat kesesuaian lahan basah adalah sebagai berikut :
 - Sangat Sesuai yang berada di Kecamatan Pugung dengan luas ±6.101,23 Ha.
 - Cukup Sesuai yang berada di Kecamatan :
 - Pematang Sawa dengan luas ± 1.418,64 Ha;
 - Pulau Panggung dengan luas ± 1.977,89 Ha;
 - Sumberejo dengan luas ± 595,85 Ha;
 - Pugung dengan luas ± 2.114,65 Ha;
 - Talang Padang dengan luas ± 6.542,89 Ha;
 - Cukuh Balak dengan luas ± 747,89 Ha;
 - Kota Agung dengan luas ± 2.247,42 Ha.
- Kawasan pertanian pangan lahan kering yang tersebar di Kecamatan:
 - Talang Padang dengan luas ± 6.542,89 Ha;
 - Pugung dengan luas ± 8.220,89 Ha;
 - Kota Agung dengan luas ± 4.439,53 Ha;
 - Pulau Panggung dengan luas ± 1.977,89 Ha.
- Kawasan tanaman perkebunan terletak di kecamatan Pulau Panggung, Talang Padang, Kota Agung, Wonosobo, dan Cukuh Balak (tanaman kopi), sedangkan Kecamatan Wonosobo, Semaka, dan Pematang Sawa dikembangkan untuk tanaman karet, dengan ± 89.707,54 ha;
- Kawasan tanaman hortikultura tersebar di kecamatan :
 - Tanaman Sayuran berada di Kecamatan Gisting dan Pulau Panggung.
 - Tanaman Buah - Buahan tersebar di seluruh kecamatan se Kabupaten Tanggamus.

- Tanaman Hias berada di Kecamatan Talang Padang.
- Kawasan peternakan besar terletak di Kecamatan Gisting dan Sumberejo; Kawasan peternakan kecil terletak di Kecamatan Pulau Panggung, Talang Padang, dan Kota Agung; dan Kawasan peternakan unggas terletak di Kecamatan Talang Padang.
- Kawasan perikanan tangkap laut terletak di Kecamatan Kota Agung, Pematang Sawa, Kelumbayan, dan Cukuh Balak; Kawasan perikanan tambak (pantai) terletak di Kecamatan Wonosobo, Kota Agung, dan Cukuh Balak; dan Kawasan perikanan air tawar terletak di Kecamatan Wonosobo, Pulau Panggung, Kota Agung, dan Talang Padang.

3. Kawasan Pertambangan;

Kawasan pertambangan merupakan pertambangan golongan B dan C :

- Pengembangan kawasan pertambangan golongan B terletak di Kecamatan Kebombayan, Cukuh Balak, Wonosobo, Ulu Belu dan Pugung;
- Pengembangan kawasan pertambangan golongan C terletak di Kecamatan Pematang Sawa, Wonosobo, Pulau Panggung, Pugung, Kota Agung, Talang Padang, dan Cukuh Balak.

4. Kawasan Perindustrian;

Kawasan perindustrian terdiri dari :

- Kawasan pengembangan industri berbasis sumberdaya laut terletak di Kecamatan Kota Agung;
- Kawasan pengembangan industri berorientasi agribisnis terletak di Kecamatan Wonosobo, Pulau Panggung, dan Talang Padang;
- Pengembangan zona/sentra industri kecil tersebar di wilayah Kabupaten Tanggamus menurut kedekatannya dengan sumber bahan baku.

5. Kawasan Pariwisata;

Kawasan Pariwisata terdiri dari :

- Kawasan Wisata Alam :
 - Air Terjan Way Lalaan di Kecamatan Kota Agung;
 - Pantai Pihabung di Kecamatan Kota Agung;
 - Gisting dan Gunung Tanggamus di Kecamatan Kota Agung;
 - Pantai Pasir Putih di Kecamatan Cukuh Balak;
 - Pantai Paku di Kecamatan Kelumbayan;
 - Air Terjun Kaca Marga di Kecamatan Cukuh Balak;
 - Pantai Terbaya di Kecamatan Kota Agung;

- Pantai Tanjung Beringin di Kecamatan Kota Agung;
- Pantai Way Gelang di Kecamatan Kota Agung;
- TNBBS di Kecamatan Semaka;
- Arung Jeram Semangka di Kecamatan Semaka;
- Air Terjun Talang Ogan di Kecamatan Sumberejo;
- Air Terjun Curup di Kecamatan Wonosobo;
- Pantai Sawmil di Kecamatan Wonosobo;
- Pantai Tulung di Kec. Kota Agung;
- Batu Keramat di Kec, Kota Agung;
- Tampang di Kec. Pematang Sawa;
- Pantai Putih Doh di Kec. Cukuh Balak;
- Pantai Pulau Tabuan di Kec. Cukuh Balak;
- Pantai Balak di Cukuh Balak;
- Pantai Balakung di Kota Agung.
- Pemandian Way Isom di Kecamatan Kota Agung;
- Pemandian Air Panas di Kecamatan Kota Agung;
- Bukit Batu Keramat di Kecamatan Kota Agung;
- Pemandian Wono Tirto di Kecamatan Surnberejo.
- Wisata Budaya :
 - Pelabuhan Tradisional Kota Agung di Kecamatan Kota Agung;
 - Prasasti Batu Bedil di Kecamatan Pulau Panggung;
 - Pekon Tradisional Rantau Tijang di Kec. Pugung;
 - Makam Ratu Sangkhira Tiyuh Memon di Kec. Pugung;
 - Makam Gunung Putri (makam Raja-raja Islam) di Kec. Wonosobo;
 - Batu Bertulis di Kec. Ulu Belu;
 - Batu Gajah di Kec. Pulau Panggung;
 - Batu Kapal di Kec. Ulu Belu;
 - Cagar Budaya Lawang Marga Putih di Kec. Cukuh Balak;
 - Makam Syafe'i di Sukanegri Kec. Talang Padang;
- Wisata Buatan :
 - Waduk Batu Tegi di Kecamatan Pulau Panggung.

6. Kawasan Pemukiman;

Kawasan Pemukiman terdiri dari :

- Kawasan pemukiman perkotaan terletak hampir di seluruh pusat pelayanan, yaitu Kecamatan Kota Agung dan Talang Padang;
- Kawasan pemukiman pedesaan tersebar di wilayah Kecamatan dengan kepadatan penduduk relatif rendah.

7. Pengembangan Kawasan Prioritas

Pengembangan Kawasan Prioritas pada dasarnya mengacu pada kepentingan sektor/sub sektor atau permasalahan yang mendesak penanganannya. Kawasan Prioritas di Kabupaten Tanggamus yang perlu mendapat perhatian untuk dikembangkan terdiri dari :

- a. Kawasan pengembangan strategis karena kemampuannya dalam meningkatkan perekonomian wilayah dan sebagai penunjang sektor-sektor strategis/ unggulan terletak di Kecamatan Kota Agung (Pengembangan industri hasil perikanan);
- b. Kawasan yang terisolasi karena faktor geografis, jaringan jalan dan berperan sebagai kawasan konservasi hutan dan perlindungan sumberdaya air yang terletak di Kecamatan Pematang Sawa;
- c. Kawasan rawan bencana atau kritis yang perlu dipelihara fungsi lindungnya untuk menghindari kerusakan lingkungan dan berperan dalam menunjang kegiatan sektor lainnya terletak di Pematang Sawa, Semaka, Wonosobo, Kota Agung, Cukuh Balak, dan Kelumbayan.

5.1.8. Misi ke-8 : Kestinambungan Pembangunan untuk Mengawal Pencapaian Tujuan Pembangunan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan kunci untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Namun, untuk mewujudkannya, diperlukan perencanaan yang konsisten, selaras, dan berkesinambungan di berbagai tingkatan pemerintahan serta periode waktu tertentu. Inilah yang menjadi fokus utama dalam menjamin kesinambungan pembangunan.

Pertama, Konsistensi perencanaan pembangunan antarwaktu dan antar periode sangat penting. Rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan harus saling terkait dan sejalan. Setiap rencana jangka pendek harus merupakan turunan dari rencana jangka menengah, yang pada gilirannya merupakan turunan dari rencana jangka panjang. Ini memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam pembangunan selalu mengarah pada tujuan akhir yang ingin dicapai.

Kedua, Keselarasan perencanaan pembangunan antar jenjang pemerintahan juga sangat penting. Rencana pembangunan daerah harus sejalan dengan rencana pembangunan nasional dan regional. Sinergi antar tingkat pemerintahan ini memastikan sumber daya dan upaya pembangunan tidak terpecah belah dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan bersama. Dengan

konsistensi dan keselarasan yang baik, kesinambungan pembangunan dapat terjamin. Setiap program dan proyek pembangunan yang dilaksanakan akan saling mendukung dan melengkapi, sehingga tidak ada upaya yang terbuang sia-sia atau bahkan saling bertentangan.

Ketiga, Ekosistem pendanaan yang kuat dan mandiri. Ketergantungan yang berlebihan pada bantuan pemerintah pusat atau provinsi dapat membahayakan keberlanjutan pembangunan jika terjadi perubahan kebijakan atau alokasi anggaran. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus proaktif dalam mencari sumber-sumber pendanaan alternatif, seperti peningkatan Pendapatan Asli Daerah, kemitraan dengan swasta melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau *Public Private Partnership* (PPP), serta pemanfaatan aset daerah secara produktif. Dengan demikian, daerah dapat membiayai pembangunan secara mandiri dan tidak tergantung pada sumber eksternal yang sewaktu-waktu dapat berubah.

Keempat, Inovasi dalam mencari solusi pendanaan yang kreatif dan berkelanjutan. Misalnya, dengan mengembangkan proyek-proyek yang dapat menghasilkan pendapatan jangka panjang atau memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam pendanaan pembangunan melalui skema tertentu.

Dengan menjamin konsistensi, keselarasan, dan kesinambungan perencanaan pembangunan, serta terbentuknya ekosistem pendanaan yang mandiri, pembangunan daerah dapat terus berlanjut tanpa terganggu. Ini memastikan upaya pembangunan tidak sia-sia dan terus memberikan manfaat bagi masyarakat dari waktu ke waktu, sehingga visi pembangunan jangka panjang dapat diwujudkan secara optimal.

Tabel 5.10. Arah Kebijakan dan Tahapan Misi ke-8

MISI	ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN PADA MISI KE-8			
	TAHAP I (2025-2029)	TAHAP II (2030-2034)	TAHAP III (2035-2039)	TAHAP IV (2040-2045)
MISI KE-8 : KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN UNTUK MENGAWAL PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN	<ul style="list-style-type: none"> Kesesuaian dan kesinambungan antara rencana pembangunan jangka panjang antara pemerintah pusat dan daerah. Penyempurnaan peraturan-peraturan terkait pengelolaan sumber-sumber pendanaan untuk keperluan pembangunan. Peningkatan efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang tidak produktif melalui program revitalisasi atau restrukturisasi aset. Pengembangan sistem informasi dan data terpadu untuk mendukung monitoring dan evaluasi pembangunan daerah secara efektif dan transparan. 	<ul style="list-style-type: none"> koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu. Pengembangan skema pendanaan inovatif untuk mendukung pembiayaan proyek-proyek pembangunan berkelanjutan Peningkatan kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang mendukung kesinambungan pembangunan, seperti insentif pajak untuk investasi ramah lingkungan atau pemberian subsidi untuk program-program strategis. Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah menjadi instrument untuk mitigasi perencanaan pembangunan Keselarasan pembangunan pusat-daerah secara konsisten 	<ul style="list-style-type: none"> Terwujudnya kemandirian fiskal daerah Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berfungsi sebagai instrumen penyempurnaan perencanaan pembangunan pada periode selanjutnya. Keselarasan pembangunan pusat-daerah secara konsisten

Sumber: Tim Penyusun RPJPD Kabupaten Tanggamus 2025-2045

5.2. Sasaran Pokok

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator utama pembangunan daerah Kabupaten Tanggamus yang bersifat progresif.

Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2025-2045 memperhatikan arah pembangunan, arah kebijakan transformasi dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) pembangunan jangka panjang Nasional 2025-2045 serta pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung 2025-2045 untuk dilakukan penyelarasan dalam rangka berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang Nasional termasuk penyelarasan terhadap arahan arah pembangunan, arah kebijakan transformasi dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) Kabupaten/Kota di Lampung, dalam rangka berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung.

Berikut hasil penyelarasan arah pembangunan, arah kebijakan transformasi dan Indikator Utama Pembangunan (IUP) yang disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten Tanggamus.

MISI KE-1 : TRANSFORMASI SOSIAL

Sasaran Pokok/Indikator		Baseline	Target 2025-2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
IE.1.	Kesehatan untuk semua					
1.	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,87	74,59- 76,03	76,39- 77,83	78,33- 80,33	80,83- 83,33
2.	Kesehatan Ibu dan Anak:					
a.	Angka Kematian Ibu(per 100.000 kelahiran hidup)	18	15	10	5	1
b.	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita(%)	17,1	8,5-10,5	7,7-8,8	5-6	3-4
3.a	Cakupan penemuankasus tuberkulosis (<i>case detection rate</i>)(%)	40,9	70-85	86-88	89-90	90,00 – 95,00
b.	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success rate (%0)	96,91	97,18	97,45	97,72	98,00
4.	Cakupan kepesertaan jaminankesehatan nasional (%)	80,1	90-92	93-95	95-97	98,00 – 100
IE.2.	Pendidikan Berkualitas yang Merata					

Sasaran Pokok/Indikator		Baseline	Target 2025-2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
5	Hasil pembelajaran					
a.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmentingkat nasional untuk :					
	(i) Literasi Membaca	9,09 – 11,09	20,09- 35,09	40,09- 55,09	56,09- 68,09	69,66 – 71,66
	(ii) Numerasi	27	20,50- 35,50	40,50- 55,50	56,50- 61,50	61,50 – 63,50
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmentingkat nasional untuk :					
	(iii) Literasi Membaca	24,76 – 26,7	35,76- 45,76	45,05- 56,05	55,65-65	68,61 – 70,61
	(iv) Numerasi	12,52 – 14,52	20-30	40-50	70-80	90-100
b.	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun(tahun)	7,36	7,86-8,86	9,11-10,11	10,38- 11,44	11,70- 13,03
c.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,31	12,53- 12,97	13,08- 13,52	13,63- 14,07	14,18- 14,73
6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	7,43	7,63	7,83	8,00	8,36
7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di BidangKeahlian Menengah Tinggi (%)	57,23	60,00	65,00	70,00	75,00
IE.3.	Perlindungan sosial yang adaptif					
8	Tingkat Kemiskinan (%)	10,28	8,3-8,4	6,2-6,6	3,9-4,6	0,5-1,0
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	12,81	20-30	40-50	60-70	70-80
10	Persentase Penyandang DisabilitasBekerja (%)	22,00	30,00- 35,00	36,00- 46,00	47,00- 52,00	53,00- 55,00

MISI KE-2 : TRANSFORMASI EKONOMI

Sasaran Pokok/Indikator		Baseline	Target 2025-2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
IE.4.	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi					
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	6,33	7,1	9,6	13,6	19,9
12	Pengembangan Pariwisata					
a.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	2,02	2,1	2,2	2,3	2,4
b.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara(Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	3,25	4,00	4,75	5,50	6,1

Sasaran Pokok/Indikator		Baseline	Target 2025-2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif(%)	1,82	1,91-2,30	2,20-2,60	2,49-2,80	2,77-3,10
14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD					
a.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	11,81	13,39	14,96	16,54	18,11
b.	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	2,36	3,27	4,18	5,09	6
c.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,62	3,22	3,83	4,43	5,03
d.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,35	2,76	4,18	5,59	7,00
e.	Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	1,91	2,72	3,54	4,35	5,16
15a.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,35	2,5-2,7	2,1-2,2	1,7-1,8	1,3-1,4
b.	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	30	36	42	48	55
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	58,8	61,58	64,35	67,13	69,9
17	Tingkat penguasaan IPTEK					
a.	Peringkat Index Inovasi Daerah (skor)	60,94	65-70	70-75	75-80	80-85
IE.5.	Penerapan Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru					
18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau					
a.	Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	9,52	9,52	16,57	23,62	30,69
b.	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	36,00	37,00	40,40	42,80	44,20
IE.6	Transformasi Digital					
19	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi	5,8	6,18	6,55	6,93	7,3
IE.7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global					
20	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	5,15	4,82	4,5	4,16	3,83
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	24,85	25,5	26,5	27,6	28,85
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	23,8	25,35	26,9	28,45	30
IE.8	IE.8 Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi					
23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan					
a.	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	68,95	75,16	82,922	90,685	100

Sasaran Pokok/Indikator		Baseline	Target 2025-2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
b.	Persentase Desa Mandiri (%)	0,67	15,15- 24,50	25,46- 27,46	28,15- 29,46	30,00- 33,00

MISI KE-3 : TATA KELOLA

Sasaran Pokok/Indikator		Baseline	Target 2025-2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
IE 9.	Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan adaptif					
24	Indeks Reformasi Hukum	70,00	71-80	81-90	91-95	100
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,6	3,99	4,37	4,5	5,00
26	Indeks Pelayanan Publik	4,31	4,71	4,81	4,91	5,00
27	Indeks Reformasi Birokrasi	59,14	63,1 - 73,2	67,07 - 77,09	71,04 - 81,06	75,09- 86,01
28	Anti Korupsi					
a.	Indeks integritas nasional (hasil survey penilaian integritas oleh KPK)	71,86	75,56	80,56	85,56	86,56

MISI KE-4 : STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT YANG MENJUNJUNG SUPERMASI HUKUM

Sasaran Pokok/Indikator		Baseline	Target 2025-2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
IE 10.	Hukum Berkeadilan, Demokrasi Substansial dan Stabilitas					
29	Tingkat Kriminalitas (Rasio)	94	90	85	80	70
30	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	71,7	75,7	80,7	85,7	89,08
31	Indeks Demokrasi Indonesia	78,32	82-85	85-86	86-87	87 - 90
IE 11.	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah					
32	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB(%)	0,12	0,125	0,13	0,14	0,15
33	Tingkat Inflasi (%)	2,9 – 3,7	2,4 – 3,5	1,95 – 3,35	1,48 – 3,18	1 – 3
34	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan					
a.	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	16,2	25,33	34,45	43,58	52,7
b.	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
c.	Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	1,7	4,315	6,975	9,60	12,16
d.	Total Kredit/PDRB (%)	15,0	24,0	33,0	42,0	51,0
35	Inklusi Keuangan (%)	85,5	88,43	91,35	94,28	97,2

Sasaran Pokok/Indikator		Baseline	Target 2025-2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
IE 12.	Daya Saing Daerah					
36	Efektivitas Kerjasama Daerah (%)	NA	80	90	100	100
37	Persentase Penurunan Konflik Sosial (%)	20	60	80	90	100

MISI KE-5 : KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI

Sasaran Pokok/Indikator		Baseline	Target 2025-2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
IE 13.	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju					
38	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	59,10– 59,12	59,50- 62,00	63,00- 64,00	66,00- 68,00	68,96 – 69,11
39	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	74,07 – 74,13	76,07- 77,95	78,07- 79,95	80,07- 81,00	81,24 – 81,94
IE 14.	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif					
40	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,21	73,21- 73,99	74,21- 74,99	75,21- 76,00	76,33- 67,38
a.	Indeks Perlindungan Anak	64,64	74,64- 76,76	77,64- 79,76	80,64- 82,76	83 - 85
b.	Indeks Pembangunan Pemuda	49,53	60,53- 65,00	65,53- 70,00	70,53- 75,00	75 - 78
41	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,42	0,35-0,40	0,28-0,34	0,22-0,27	0,186 – 0,195
IE 15.	Lingkungan Hidup Berkualitas					
42	Kualitas Lingkungan Hidup					
a.	Indeks kualitas lingkungan hidup	64,75	69,14	70,15	71,41	72,68
b.	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)	5	14	25,5	36,5	50
c.	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	19,12	32,20	48,70	65,20	90,00
d.	Proporsi Rumah Tangga(RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*	14,46	31,568	52,953	74,338	100
IE 16.	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan					
43	Ketahanan energi, air, dan pangan					
a.	Ketahanan Energi					
	(i) Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	750	750	1.223	1.696	2.170
	(ii) Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)	161	161	153	145	137
b.	Ketahanan Pangan					

Sasaran Pokok/Indikator		Baseline	Target 2025-2029	Target 2030-2034	Target 2035-2039	Target 2040-2045
	(i) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)	6,2	5,2	3,9	2,6	1,1
c.	Ketahanan Air					
	(i) Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	0,44	0,44	4,4	8,36	12,32
	(ii) Akses Rumah Tangga Perkotaanterhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	5,4	31,568	25,953	35,338	45
IE 17.	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim					
44	Indeks Risiko Bencana (IRB)	130	118,1-129	95,7-113,6	73,3-91,22	46,42-68,82
45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)					
a.	Kumulatif	9,52	9,52	16,57	23,62	30,69

BAB VI PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanggamus Tahun 2025–2045 yang berisi Visi, Misi, dan Arah pembangunan nasional merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan elemen masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 tahun ke depan.

Visi Tanggamus “**Tanggamus Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan**” dicerminkan oleh lompatan besar meliputi 5 Indikator Tujuan Visi : (1) Produktivitas ekonomi meningkat; (2) Kemiskinan dan Ketimpangan Rendah; (3) SDM yang mampu berdaya saing global ; (4) Pelayanan Publik Merata dan Berkualitas; (5) Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca Menurun menuju Emisi Nol Netto (*Net Zero Emission*).

RPJPD ini juga mengacu pada penyusunan RPJPN, RPJPD Provinsi Lampung dan RTRW Kabupaten. Yang nantinya menjadi pedoman bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati dalam menyusun Visi, Misi, dan Program prioritas. RPJPD memiliki posisi tertinggi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, dan menjadi pedoman bagi dokumen Perencanaan turunannya dengan kaidah pelaksanaan, sebagai berikut :

1. Visi dan misi RPJPD menggambarkan jangkauan kebijakan yang lebih luas dalam jangka panjang dan secara konsisten dijabarkan dalam arah kebijakan pembangunan jangka menengah. (Pasal 165 Ayat 3 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).
2. Sasaran pokok dalam RPJPD digunakan untuk menjabarkan kinerja pembangunan Daerah 5 (lima) tahunan dalam kerangka pencapaian sasaran 20 (dua puluh) tahunan dalam RPJPD. (Pasal 167 Ayat 6 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).
3. Sasaran pokok RPJPD ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan per periode 5 (lima) tahunan. (Pasal 168 Ayat 2 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).
4. Sasaran yang akan ditetapkan dalam RPJMD, selain menerjemahkan tujuan dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih paling sedikit juga berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. (Pasal 168 Ayat 3 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

5. Sasaran dalam RPJMD yang ditetapkan harus dilengkapi dengan indikator dan target kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. (Pasal 169 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).
6. Arah Kebijakan RPJPD merupakan prioritas pembangunan Daerah 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan kedalam kebijakan 5 (lima) tahunan yang harus dipedomani dalam perumusan visi dan misi calon Kepala Daerah dan penyusunan RPJMD periode berkenaan. (Pasal 171 Ayat 3 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).
7. Sumber pendanaan rencana pembangunan Daerah bersumber dari APBD; termasuk didalamnya dengan mendorong partisipasi masyarakat serta kontribusi sektor swasta dan pihak lain dalam pembangunan serta sumber pendanaan lain yang sah. (Pasal 176 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).
8. Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota dan antarkabupaten/kota. (Pasal 181 Ayat 2 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).
9. Visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah kabupaten/kota, selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang Daerah provinsi dan nasional. (Pasal 208 Ayat 3 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).
10. Kepala BAPPEDA kabupaten/kota melaksanakan ^{[[1]]}pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah lingkup kabupaten/kota (Pasal 267 Ayat 1 Permendagri Nomor Tahun 2017).
11. Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
 - hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

- terjadi perubahan yang mendasar, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. (Pasal 342 □Permendagri Nomor 86 Tahun 2017).

Pj. BUPATI TANGGAMUS,



MULYADI IRSAN